

| Dr. Andi Hermawan, M.Pd.



Filsafat Komunikasi *dan* Politik Pendidikan

Strategi Transformatif di Era Society 5.0, VUCA 5.0, dan SDGs



Filsafat Komunikasi *dan* Politik Pendidikan

Strategi Transformatif di Era Society 5.0, VUCA 5.0, dan SDGs

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Andi Hermawan, M.Pd.

Filsafat Komunikasi *dan* Politik Pendidikan

Strategi Transformatif di Era Society 5.0, VUCA 5.0, dan SDGs



FILSAFAT, KOMUNIKASI, DAN POLITIK PENDIDIKAN
Strategi Transformatif di Era Society 5.0,
VUCA 5.0, dan SDGs

Ditulis oleh:
Dr. Andi Hermawan, M.Pd.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Insight Pustaka Nusa Utama
Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro
Telp: 085150867290 | 087847074694
Email: insightpustaka@gmail.com
Web: www.insightpustaka.com
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Oktober 2025

Perancang sampul: Rian Saputra
Penata letak: Rian Saputra

ISBN: 978-634-7435-27-9

xx + 374 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Oktober 2025



Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih, yang menuntun manusia dari kegelapan ketidaktahuan menuju cahaya ilmu, menanamkan kasih sayang, dan meneguhkan nilai-nilai keadilan dalam setiap interaksi manusia. Dalam firman-Nya, Allah berpesan: *“Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”* (QS. Al-Mujadilah: 11). Pesan ini menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi perjalanan spiritual, moral, dan sosial yang mengangkat harkat manusia.

Buku ini lahir dari keresahan sekaligus inspirasi. Keresahan karena tantangan pendidikan Indonesia dan dunia kini semakin kompleks, dipacu oleh arus teknologi, globalisasi, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi. Inspirasi karena kita percaya pendidikan dapat menjadi lentera yang menuntun masyarakat menghadapi era Society 5.0 dan VUCA 5.0. John Dewey pernah menegaskan: *“Education is not preparation for life; education is life itself.”* Pendidikan bukan sekadar menyiapkan masa depan, melainkan pengalaman hidup yang transformatif dan membentuk karakter. Paulo Freire menambahkan bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan, dialog kritis, dan kesadaran untuk bertindak demi keadilan sosial.

Dalam konteks Indonesia, gagasan-gagasan ini beresonansi dengan visi Bung Karno: *“Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.”* Pendidikan adalah investasi paling berharga untuk membentuk karakter,

integritas, kreativitas, dan keberanian generasi muda. Gus Dur menegaskan dimensi kemanusiaan yang mendalam: pendidikan harus menegakkan pluralisme, toleransi, dan empati, agar setiap individu mampu hidup berdampingan dalam harmoni, tanpa kehilangan jati diri. Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi pendidikan yang humanis, inklusif, dan transformatif.

Era Society 5.0 dan VUCA 5.0 menuntut pendidikan yang adaptif dan visioner. Tantangan global, ketidakpastian, dan percepatan teknologi menuntut guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memadukan **filsafat, komunikasi, dan politik pendidikan** dalam satu kerangka integratif. Filsafat menjadi landasan nilai dan tujuan; komunikasi menjadi jembatan dialog, kolaborasi, dan diseminasi ilmu; politik pendidikan menjadi instrumen legitimasi, regulasi, dan implementasi kebijakan. Integrasi ketiganya membentuk pendidikan yang tidak hanya relevan dengan konteks global, tetapi juga berakar pada kearifan lokal, budaya, dan nilai-nilai bangsa.

Buku ini disusun dalam lima bagian utama. Bagian I menekankan fondasi filosofis pendidikan, dari perspektif klasik hingga kearifan lokal, serta relevansinya dalam menghadapi perubahan zaman. Bagian II menyoroti strategi komunikasi pendidikan yang humanis, inklusif, dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Bagian III mengeksplorasi politik pendidikan sebagai arena distribusi kekuasaan, keadilan, dan kualitas pendidikan. Bagian IV menyatukan ketiganya dalam model konseptual dan praktik terbaik yang konkret, sedangkan Bagian V merancang roadmap pendidikan Indonesia hingga 2045, lengkap dengan indikator kuantitatif, strategi filosofis, komunikasi, dan politik yang harmonis.

Dalam menulis buku ini, penulis berusaha menyajikan informasi yang ilmiah sekaligus inspiratif. Data dan analisis bersumber dari penelitian terkini (Scopus 2022–2025), laporan nasional (Rapor Pendidikan 2023–2024, Bappenas), serta data internasional UNESCO dan OECD, sehingga buku ini bukan hanya menjadi bacaan akademik, tetapi juga pedoman praktis bagi pendidik, kepala sekolah, pemimpin pendidikan, dan pembuat kebijakan.

Pendidikan, sebagaimana ditegaskan Dewey, adalah proses yang berkelanjutan. Jika kita mengajar seperti dulu, kita merampas masa depan anak-anak kita. Buku ini hadir untuk membuka cakrawala baru, menumbuhkan

kesadaran kritis, dan memberi dorongan bagi pembaca agar menjadi agen perubahan, mampu menghadapi ketidakpastian, dan membangun masyarakat yang berpengetahuan, beretika, dan inovatif.

Nilai-nilai humanisme dan kearifan lokal yang melekat pada bangsa Indonesia menjadi benang merah buku ini. Silih asih, silih asah, dan silih asuh menjadi prinsip dasar pendidikan yang mendorong solidaritas, empati, dan kolaborasi. Pesan Gus Dur tentang pentingnya toleransi dan menghargai keberagaman menjadi pedoman implementasi pendidikan inklusif. Nilai ini juga sejalan dengan SDGs, yang menekankan pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, akses bagi penyandang disabilitas, dan keberlanjutan.

Buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat pendidikan bukan sekadar pada ranah akademik, tetapi sebagai **proses membentuk manusia seutuhnya**—yang mampu berpikir kritis, bertindak etis, dan berkontribusi pada peradaban berkelanjutan. Pendidikan adalah arena politik nilai, komunikasi, dan keputusan strategis, yang bila dikelola dengan baik, akan membangun generasi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab.

Penulis menyadari bahwa buku ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari dialog dan aksi nyata. Kritik, saran, dan refleksi dari para pembaca sangat diharapkan agar gagasan yang disajikan dapat terus diperluas, diperkuat, dan diimplementasikan di lapangan. Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi semua pihak yang percaya bahwa pendidikan adalah cahaya, jembatan, dan kekuatan pembebasan manusia.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi lentera bagi guru, kepala sekolah, peneliti, dan pembuat kebijakan pendidikan; menjadi pijakan bagi generasi muda untuk berpikir, bertindak, dan bermimpi; serta menjadi saksi bahwa integrasi filsafat, komunikasi, dan politik pendidikan mampu menghadirkan peradaban baru yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan.

Bogor, September 2025

Penulis



Prolog

Pendidikan selalu menjadi cermin peradaban. Sejak filsuf Yunani menekankan pembentukan akal dan moral, hingga pemikir Islam menekankan pengembangan ilmu dan akhlak, pendidikan adalah jalan manusia mengenal dirinya, masyarakatnya, dan alam semesta. Dari Plato yang memandang pendidikan sebagai sarana mencapai kebaikan tertinggi, hingga al-Ghazali yang menegaskan pentingnya integrasi ilmu dunia dan akhirat, perjalanan pendidikan menunjukkan bahwa manusia bukan sekadar makhluk belajar, tetapi makhluk bermakna.

Kini, di persimpangan zaman, kita menghadapi era Society 5.0 dan VUCA 5.0, di mana percepatan teknologi, kompleksitas sosial, dan ketidakpastian global menuntut paradigma pendidikan baru. John Dewey menekankan bahwa pendidikan adalah pengalaman hidup itu sendiri, bukan sekadar persiapan. Setiap momen belajar membentuk karakter, kesadaran kritis, dan kapasitas inovatif manusia. Paulo Freire menambahkan bahwa pendidikan harus menjadi dialog pembebasan, memberdayakan individu untuk memahami realitas dan mengubahnya menjadi lebih adil dan manusiawi.

Di Indonesia, nilai-nilai lokal dan budaya menjadi penopang pendidikan yang humanis. Kearifan lokal, tradisi gotong-royong, dan prinsip silih asih, silih asah, silih asuh menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya urusan pengetahuan, tetapi juga hati, moral, dan sosial. Pendidikan adalah

jembatan antara ilmu universal dan nilai-nilai budaya yang membentuk identitas bangsa.

Era Society 5.0 menandai transformasi di mana teknologi cerdas—AI, big data, internet of things—tidak hanya mempermudah kehidupan, tetapi harus ditempatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. VUCA 5.0 menuntut ketangguhan menghadapi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Pendidikan tidak bisa lagi berjalan linear; ia harus adaptif, fleksibel, dan transformatif.

Agenda SDGs 2030 menegaskan tujuan universal: pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Pendidikan bukan hanya hak, tetapi sarana untuk mengurangi ketimpangan, memajukan kesejahteraan, dan menciptakan masyarakat yang adil. Al-Qur'an menekankan pentingnya ilmu: *"Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat"* (QS. Al-Mujadilah: 11). Pendidikan bukan sekadar akumulasi informasi, tetapi pembentukan karakter, nilai, dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks global dan lokal, Indonesia menghadapi tantangan disparitas kualitas pendidikan, kesenjangan digital, dan kebutuhan literasi abad 21. Namun, bonus demografi, potensi kreativitas, dan kearifan lokal menjadi modal strategis bagi transformasi pendidikan. Kita dituntut membangun sistem yang tidak hanya siap menghadapi tantangan teknologi, tetapi juga menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

Filsafat, komunikasi, dan politik pendidikan adalah tiga pilar yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat memberikan landasan nilai dan tujuan, menjawab pertanyaan mendasar tentang "mengapa" pendidikan dilakukan. Komunikasi menjadi jembatan proses, menyalurkan ilmu, memfasilitasi dialog, dan membangun kolaborasi. Politik pendidikan menjadi instrumen legitimasi dan implementasi kebijakan, menegaskan "siapa" yang membuat keputusan, "bagaimana" distribusi sumber daya, dan "apa" yang menjadi prioritas nasional.

John Dewey menekankan pentingnya demokrasi dalam pendidikan, di mana komunikasi terbuka dan dialog kritis adalah fondasi pengembangan masyarakat. Paulo Freire menekankan pendidikan sebagai praksis pembebasan, di mana guru dan murid saling belajar, bukan dalam hierarki

dominasi. Bung Karno mengingatkan kita tentang pendidikan sebagai alat pembangunan bangsa: “*Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.*” Gus Dur menekankan pluralisme dan toleransi, mengingatkan bahwa pendidikan harus menegakkan kemanusiaan universal.

Dengan integrasi ketiga pilar ini, pendidikan tidak hanya menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi transformasi total—membentuk karakter, kapasitas inovasi, dan kesadaran sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman. Tanpa filsafat, pendidikan kehilangan arah; tanpa komunikasi, pendidikan kehilangan jembatan; tanpa politik pendidikan, pendidikan kehilangan legitimasi dan dampak nyata.

Buku ini bertujuan membangun kerangka konseptual pendidikan transformatif untuk era Society 5.0 dan VUCA 5.0, sekaligus mendukung pencapaian SDGs 2030. Secara spesifik, buku ini ingin:

1. Menyediakan fondasi filosofis yang kuat, menggabungkan pemikiran klasik, modern, dan lokal, untuk membimbing praktik pendidikan kontemporer.
2. Menjelaskan strategi komunikasi yang adaptif, digital, inklusif, dan humanis, agar pengetahuan tersampaikan dengan efektif.
3. Menguraikan politik pendidikan, kebijakan, dan governance yang berorientasi pada kualitas, keadilan, dan keberlanjutan.
4. Menyajikan model integratif filsafat–komunikasi–politik pendidikan dengan praktik terbaik global dan implementasi lokal.
5. Memberikan roadmap pendidikan Indonesia 2025–2045, lengkap dengan indikator kuantitatif, strategi multi-stakeholder, dan simulasi proyeksi keberhasilan.

Alur buku disusun sistematis: bagian awal mengulas fondasi filosofis, bagian tengah membahas komunikasi dan politik pendidikan, dan bagian akhir menyatukan ketiga aspek dalam model konseptual, praktik integratif, dan roadmap strategis. Data empiris dari penelitian Scopus 2022–2025, laporan nasional dan internasional, serta studi kasus di Indonesia dan global menjadi landasan analisis dan rekomendasi.

Prolog ini diharapkan menjadi pintu masuk yang membuka wawasan pembaca, membangkitkan kesadaran kritis, dan menumbuhkan inspirasi. Buku ini mengajak guru, kepala sekolah, peneliti, pembuat kebijakan,

dan masyarakat pendidikan luas untuk tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga agen perubahan, yang membangun pendidikan yang **humanis, inklusif, dan berkelanjutan**. Pendidikan adalah lentera peradaban, dan kita semua adalah penjaga cahayanya.



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Prolog	ix
Daftar Isi	xiii

Bagian 1

Filsafat Pendidikan di Era Society 5.0

Bab 1

Fondasi Filosofis Pendidikan.....	3
A. Sejarah Filsafat Pendidikan: Yunani, Islam, Barat Modern.....	5
B. Pemikiran Dewey, Freire, Illich, dan Habermas.....	9
C. Paradigma Postmodern, Critical Pedagogy, dan Posthumanisme.....	13
D. Kearifan Lokal sebagai Filsafat Pendidikan Nusantara.....	16
E. Teori Filsafat Pendidikan dan SDGs	20

Bab 2

Filsafat Pendidikan dan Teknologi	25
A. Konsep Human-Centered Society 5.0.....	27
B. Filsafat AI, Big Data, dan Pembelajaran Digital	34
C. Etika Teknologi dalam Pendidikan	38
D. Teori tentang Digital Humanism	41
E. Data UNESCO/OECD tentang Transformasi Digital Pendidikan	45

Bab 3

Pendidikan dalam Dunia VUCA 5.0	51
A. Volatility: Krisis Global dan Filosofi Resiliensi.....	53
B. Uncertainty: Ketidakpastian dan Teori Konstruktivisme	56
C. Complexity: Kompleksitas Pengetahuan dan Sistem Pendidikan.....	60
D. Ambiguity: Paradigma Nilai dan Ambiguitas Moral.....	63
E. Dukungan Data: Rapor Pendidikan Indonesia 2023–2024.....	66

Bagian 2

Strategi Komunikasi Pendidikan

Bab 4

Teori dan Model Komunikasi.....	73
A. Model Shannon–Weaver, Berlo, Lasswell.....	75
B. Teori Komunikasi Kritis Habermas	78
C. Komunikasi Edukatif dalam Perspektif Sosiologi.....	81
D. Scopus Trends (2022–2025) tentang Educational Communication	84
E. Implikasi Praktis untuk Guru dan Kepala Sekolah.....	87

Bab 5

Komunikasi di Era Digital91

A. Komunikasi Pendidikan melalui AI, AR, VR, Metaverse 93

B. Edu-Influencer dan Diseminasi Pengetahuan Digital 96

C. Literasi Digital Guru dan Murid 99

D. Hoaks, Disinformasi, dan Etika Komunikasi Pendidikan..... 102

E. Strategi Komunikasi Inklusif dalam Masyarakat Multikultural 105

Bab 6

Komunikasi untuk SDGs109

A. SDG 4: Pendidikan Berkualitas dan Inklusif 110

B. Strategi Komunikasi untuk Kesetaraan Gender dan Disabilitas 114

C. Diplomasi Pendidikan Global..... 117

D. Data UNDP (2025) tentang Gap Akses Pendidikan 120

E. Praktik Komunikasi untuk Pendidikan Berkelanjutan..... 122

Bagian 3

Politik Pendidikan

Bab 7

Teori Politik Pendidikan.....129

A. Politik sebagai Arena Distribusi Kekuasaan Pendidikan 130

B. Foucault: Power/Knowledge dalam Pendidikan..... 134

C. Bourdieu: Modal Budaya dan Reproduksi Sosial..... 137

D. Governance, Kebijakan Publik, dan Globalisasi Pendidikan..... 140

E. Review Penelitian Scopus (2022–2025) tentang Politik Kurikulum 143

Bab 8

Politik Pendidikan di Era VUCA 5.0	147
A. Politik Kurikulum: Siapa Mengatur Isi Pengetahuan.....	148
B. Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Konteks Global.....	152
C. Digital Governance dalam Pendidikan.....	155
D. Geopolitik Pengetahuan dan Neokolonialisme Baru.....	158
E. Data OECD (2023–2024): Resiliensi Pendidikan Swasta.....	161

Bab 9

Politik Pendidikan dan SDGs	165
A. Pendidikan sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan.....	166
B. Kebijakan Inklusif untuk Minoritas, Gender, Disabilitas.....	170
C. Hubungan Politik–Ekonomi–Pendidikan.....	173
D. Pendidikan sebagai Soft Power dalam Diplomasi Global	176
E. Studi Kasus: Program Beasiswa Global (UNESCO, 2023).....	180

Bagian 4

Integrasi Filsafat, Komunikasi, dan Politik

Bab 10

Dialektika Interdisipliner	187
A. Filsafat sebagai Basis Legitimasi Politik Pendidikan.....	189
B. Komunikasi Politik dalam Proses Kebijakan	192
C. Kritik Habermas terhadap Sistem Pendidikan	196
D. Interdisiplin: Filsafat, Komunikasi, Politik dalam Satu Model.....	199
E. Data Kasus Indonesia dan Asia Tenggara.....	202

Bab 11

Model Konseptual Pendidikan Transformatif 5.0.....207

A. Filsafat (Nilai) → Komunikasi (Proses) → Politik (Kebijakan) 209

B. Path Diagram Konseptual (*SmartPLS Hypotetik*) 212

C. Indikator Konkrit: Literasi, Inovasi, Inklusivitas..... 215

D. Penelitian Scopus (2022–2025) tentang Education 5.0..... 219

E. Validasi Data (OECD, UNESCO, Rapor Pendidikan) 222

Bab 12

Praktik Integratif untuk SDGs227

A. Studi Kasus Best Practices Finlandia, Jepang, Korea 228

B. Implementasi di Indonesia: Merdeka Belajar & Kampus Merdeka 236

C. Roadmap SDGs 2030 dalam Pendidikan 239

D. Strategi Multi-stakeholder: Pemerintah, Sekolah, Masyarakat..... 242

E. Evaluasi Efektivitas dengan Data Kuantitatif 246

Bagian 5

Roadmap Pendidikan Indonesia 2045

Bab 13

Analisis SWOT & Data Kuantitatif253

A. Strengths: Bonus Demografi & Potensi Digital 255

B. Weaknesses: Disparitas Anggaran & Kualitas Guru 258

C. Opportunities: Society 5.0 & Ekonomi Kreatif..... 261

D. Threats: Globalisasi, Neoliberalisme, VUCA 5.0 264

E. Data Proyeksi Bappenas & Rapor Pendidikan 2024 267

Bab 14

Strategi Filosofis271

A. Humanisme Pendidikan Nusantara 273

B. Nilai Kebersamaan dan Kearifan Lokal 276

C. Integrasi Filsafat Barat–Timur–Lokal 279

D. Penelitian Scopus (2023–2025) tentang Filosofi Humanisme 282

E. Konsep Pendidikan sebagai “Nation Building” 286

Bab 15

Strategi Komunikasi291

A. Literasi Digital untuk Guru dan Murid 292

B. Kampanye Pendidikan Inklusif..... 296

C. Komunikasi Krisis dalam Pendidikan 299

D. Edu-Influencer dan Media Sosial Pendidikan 302

E. Data UNESCO (2024) tentang Literasi Digital Global..... 305

Bab 16

Strategi Politik309

A. Reformasi Kebijakan Pendidikan Nasional..... 311

B. Inklusivitas Gender dan Disabilitas dalam Pendidikan 314

C. Politik Anggaran Pendidikan 317

D. Pendidikan sebagai Diplomasi Soft Power 320

E. Data OECD/UNDP tentang Governance Pendidikan..... 323

Bab 17

Roadmap 2025–2045327

A. Jangka Pendek: Transformasi Digital (2025–2030)..... 329

B. Jangka Menengah: Konsolidasi SDGs (2030–2035)..... 332

C. Jangka Panjang: Pendidikan Berkelanjutan (2035–2045) 335

D. Peta Jalan Pendidikan Indonesia Emas 2045 338

E. Indikator Kuantitatif Keberhasilan: Simulasi Proyeksi Data 342

Epilog 345

Glosarium 349

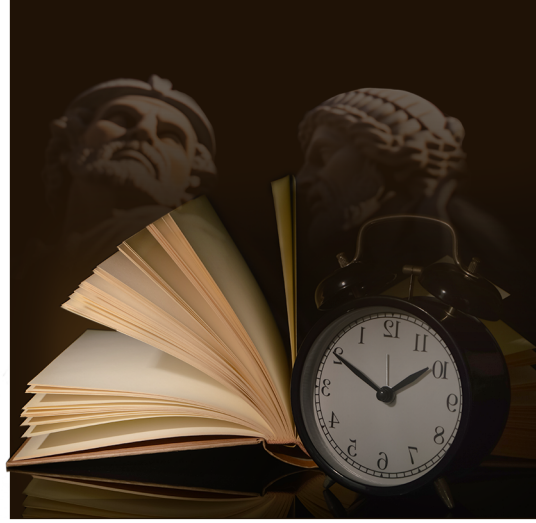
Daftar Pustaka..... 355

Biografi Penulis..... 373

Bagian 1

Filsafat Pendidikan di Era Society 5.0





BAB 1

Fondasi Filosofis Pendidikan

Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan; ia adalah perjalanan manusia memahami dirinya, lingkungannya, dan tujuan hidupnya. Dari filsafat klasik hingga pemikiran kontemporer, pendidikan selalu menjadi cermin dari peradaban, nilai-nilai moral, dan aspirasi sosial suatu masyarakat. Plato menegaskan bahwa pendidikan adalah sarana untuk mencapai kebaikan tertinggi, bukan hanya kecerdasan intelektual semata. Al-Ghazali menekankan integrasi ilmu dunia dan akhirat, mengingatkan bahwa pendidikan harus membentuk akal sekaligus hati. Dengan kata lain, pendidikan adalah fondasi pembangunan manusia seutuhnya.

Era Society 5.0 menuntut kita untuk menafsirkan kembali peran pendidikan dalam kehidupan manusia. Manusia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi pembentuk ekosistem pengetahuan yang human-centered. John Dewey pernah menekankan bahwa pendidikan adalah pengalaman hidup itu sendiri; setiap interaksi, setiap percobaan, dan setiap kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Paulo Freire menambahkan dimensi kritis: pendidikan harus menjadi dialog pembebasan yang memungkinkan individu memahami realitas sosial, mengidentifikasi ketidakadilan, dan berkontribusi mengubahnya.

Di tengah kompleksitas global, pendidikan menghadapi tantangan VUCA 5.0: volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Guru tidak lagi hanya pengajar, tetapi fasilitator, mediator, dan inspirator.

Kurikulum dan materi pelajaran harus adaptif, relevan, dan mampu membangun kompetensi abad 21. Pendidikan harus membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai lokal menjadi sumber kekuatan filosofis pendidikan. Konsep *gotong-royong*, prinsip *silih asih*, *silih asah*, *silih asuh*, dan ajaran moral berbasis agama menjadi penopang pendidikan humanis yang membentuk karakter dan kesadaran sosial. Bung Karno menekankan bahwa pendidikan adalah senjata untuk membangun bangsa: “Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” Gus Dur mengingatkan pentingnya pluralisme, toleransi, dan kemanusiaan universal dalam proses pendidikan. Nilai-nilai ini mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal kecerdasan akademik, tetapi juga pembangunan karakter dan integritas.

Filsafat pendidikan membantu kita menjawab pertanyaan mendasar: *mengapa* pendidikan dilakukan, *untuk siapa*, dan *apa yang ingin dicapai*. Ia membimbing kita memahami tujuan akhir pendidikan, baik pada level individu maupun sosial. Dengan landasan filosofis yang kuat, kita mampu merancang kurikulum, strategi pembelajaran, dan kebijakan pendidikan yang tidak hanya efektif, tetapi bermakna. Tanpa filsafat, pendidikan bersiko menjadi mekanis, sekadar penguasaan fakta, tanpa membentuk kapasitas kritis, empati, dan kesadaran moral.

Selain filsafat klasik dan lokal, pemikiran modern dan kontemporer juga memberi warna penting dalam pendidikan. Dewey, Freire, Illich, dan Habermas masing-masing menekankan peran pengalaman, dialog, otonomi, dan komunikasi kritis. Habermas menekankan bahwa pendidikan harus memungkinkan peserta didik menjadi agen perubahan melalui dialog rasional, sedangkan Illich mengingatkan tentang desentralisasi dan kemandirian belajar. Integrasi pemikiran ini membuka kemungkinan pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan relevan dengan tantangan global.

Teknologi dan digitalisasi menambah dimensi baru dalam filsafat pendidikan. Era big data, AI, dan pembelajaran digital memaksa kita mempertanyakan etika, nilai, dan tujuan pendidikan. Pendidikan tidak boleh semata-mata mengejar efisiensi, namun harus menegakkan prinsip *humanism* dan *digital humanism*, di mana teknologi menjadi alat pemberdayaan manusia,

bukan dominasi atau substitusi. Data UNESCO dan OECD menunjukkan bahwa pendidikan digital yang berorientasi manusia meningkatkan literasi, keterampilan inovatif, dan kesetaraan akses pendidikan.

Pendidikan di era Society 5.0 juga menuntut fleksibilitas berpikir. Konstruktivisme menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dan refleksi kritis. Pendidikan harus menumbuhkan kapasitas adaptasi, kreativitas, dan pemecahan masalah, sekaligus menjaga nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Dengan integrasi filsafat, nilai lokal, dan prinsip human-centered, pendidikan mampu menyiapkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan bertanggung jawab sosial.

Bab ini akan membahas fondasi filosofis pendidikan secara mendalam: mulai dari sejarah filsafat pendidikan klasik, pemikiran tokoh modern, paradigma postmodern, critical pedagogy, posthumanisme, hingga kearifan lokal dan integrasi dengan tujuan SDGs. Setiap subbab akan menekankan relevansi teori dengan praktik pendidikan di Indonesia, memungkinkan pembaca memahami filosofi sekaligus aplikasinya dalam konteks nyata.

Dengan memahami fondasi filosofis, pembaca akan mampu menilai, merancang, dan mengimplementasikan strategi pendidikan yang tidak hanya efisien, tetapi transformatif. Pendidikan bukan sekadar menyampaikan materi, melainkan membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, berempati, dan berinovasi. Dalam perjalanan bab ini, kita diajak melihat pendidikan sebagai proses panjang pembentukan peradaban: dari Plato dan Dewey, hingga generasi Society 5.0 yang harus menggabungkan ilmu, moral, dan teknologi.

A. Sejarah Filsafat Pendidikan: Yunani, Islam, Barat Modern

Sejarah filsafat pendidikan dimulai dari Yunani kuno, di mana filsuf seperti Plato dan Aristoteles meletakkan dasar-dasar pemikiran tentang tujuan, metode, dan nilai pendidikan. Bagi Plato, pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses pembentukan jiwa menuju kebaikan tertinggi (*the Good*). Dalam karyanya *Republic*, ia menekankan pendidikan moral, intelektual, dan fisik sebagai jalan untuk menciptakan warga negara yang

beradab dan berperan aktif dalam kehidupan polis. Aristoteles, murid Plato, menekankan pentingnya pendidikan untuk mengaktualisasikan potensi manusia (*eudaimonia*) melalui latihan kebajikan (*virtue ethics*) dan pengembangan rasio, menegaskan bahwa pendidikan harus menyatukan pengetahuan dan karakter.

Tradisi filsafat pendidikan Yunani tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Sokrates mengajarkan metode dialogis (*Socratic method*) sebagai sarana kritis untuk menumbuhkan kemampuan berpikir analitis, reflektif, dan etis pada peserta didik. Metode ini menekankan bahwa pendidikan bukan mengisi pikiran, tetapi membangkitkan kemampuan untuk menemukan kebenaran melalui pertanyaan dan diskusi. Prinsip ini kemudian menjadi fondasi bagi pedagogi modern yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik, pengalaman belajar kritis, dan pembelajaran berbasis masalah.

Transisi ke tradisi Islam pada abad pertengahan membawa dimensi baru dalam filsafat pendidikan. Pemikir seperti Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Ibnu Sina menekankan integrasi antara ilmu dunia dan akhirat, menyatukan akal dan hati. Pendidikan dipahami sebagai proses moral dan spiritual yang membentuk manusia seutuhnya. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menekankan bahwa ilmu tanpa etika adalah kosong, sedangkan etika tanpa ilmu tidak utuh. Pendekatan holistik ini sangat relevan dengan kerangka pendidikan humanistik kontemporer, yang menekankan pengembangan kognitif, afektif, dan sosial secara seimbang.

Pada masa Islam klasik, madrasah dan pesantren menjadi pusat pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan agama dan sains. Penelitian terkini (Al-Attas, 2021; UNESCO, 2023) menunjukkan bahwa model pendidikan Islam tradisional membangun kapasitas literasi, kritis, dan sosial murid melalui kombinasi hafalan, diskusi, dan praktik nyata di masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan gotong royong menjadi prinsip pedagogis yang mengakar kuat dan menjadi inspirasi bagi pendidikan karakter di Indonesia saat ini.

Masuk ke era Barat modern, pemikiran pendidikan dipengaruhi oleh revolusi ilmiah dan humanisme Renaisans. Komunikasi antarilmuwan, penyebaran buku cetak, dan pemikiran empiris membawa perubahan signifikan terhadap cara manusia memahami dunia dan proses belajar.

John Locke menekankan *tabula rasa*—bahwa manusia lahir sebagai “lembar kosong” yang dibentuk oleh pengalaman. Konsep ini menegaskan pentingnya lingkungan, pendidikan, dan stimulasi dalam membentuk karakter dan kecerdasan peserta didik. Penelitian modern mendukung hal ini; misalnya, studi longitudinal oleh OECD (2022) menunjukkan bahwa kualitas lingkungan belajar berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kognitif dan motivasi belajar siswa.

Jean-Jacques Rousseau kemudian membawa perspektif naturalistik, menekankan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan memelihara sifat alami manusia. Dalam *Emile*, ia menekankan pembelajaran melalui pengalaman, penemuan, dan kebebasan yang terstruktur. Filosofi ini menjadi cikal bakal teori konstruktivisme kontemporer yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman aktif, bukan sekadar menerima informasi secara pasif.

Abad ke-19 dan 20 memperkenalkan teori pendidikan progresif, di mana John Dewey menjadi tokoh sentral. Dewey menekankan pendidikan sebagai pengalaman hidup yang membentuk individu agar mampu berpartisipasi aktif dalam masyarakat demokratis. Ia menegaskan prinsip *learning by doing*, di mana pengalaman konkret menjadi inti dari proses belajar. Studi meta-analisis terbaru (Hattie, 2022) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman memiliki efek signifikan terhadap pencapaian akademik dan perkembangan keterampilan abad 21, termasuk kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah.

Paulo Freire menambahkan dimensi kritis dalam filsafat pendidikan, menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan. Dalam *Pedagogy of the Oppressed*, ia mengkritik pendidikan “banking system” yang menempatkan peserta didik sebagai penerima pasif informasi. Freire menekankan dialog, kesadaran kritis (*conscientization*), dan partisipasi aktif dalam pembelajaran sebagai sarana untuk mengubah realitas sosial. Konsep ini sangat relevan untuk pendidikan inklusif di era globalisasi, di mana peserta didik harus mampu memahami ketimpangan, menganalisis masalah sosial, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil.

Di Indonesia, pemikiran pendidikan modern dikombinasikan dengan nilai-nilai lokal dan nasionalisme. Ki Hadjar Dewantara menekankan prinsip *Tut Wuri Handayani*, yang menempatkan guru sebagai pembimbing dan

fasilitator pertumbuhan anak. Pendidikan bukan sekadar transmisi ilmu, tetapi proses pengembangan karakter, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Penelitian (Suryosubroto, 2023; Kemendikbud, 2023) menunjukkan bahwa model ini meningkatkan keterlibatan murid, kepuasan guru, dan integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran sehari-hari.

Seiring perkembangan teknologi, Barat modern juga memperkenalkan filsafat pendidikan kritis, postmodern, dan posthumanisme. Filsafat kritis menekankan bahwa pendidikan harus menantang dominasi struktur sosial, mempromosikan inklusivitas dan kesadaran terhadap ketidakadilan. Posthumanisme menyoroti integrasi manusia dengan teknologi, AI, dan media digital, mengajak kita mempertimbangkan implikasi etis dan filosofis dari pendidikan di era Society 5.0. Studi terbaru UNESCO (2024) menunjukkan bahwa kurikulum yang memasukkan literasi digital, etika AI, dan kolaborasi teknologi-human meningkatkan kesiapan peserta didik menghadapi tantangan global.

Integrasi nilai Yunani, Islam, dan Barat modern menghasilkan fondasi filosofis yang kaya dan multi-dimensi. Yunani menekankan rasio, moral, dan kebajikan; Islam menekankan integrasi ilmu dan etika; Barat modern menekankan pengalaman, kritisisme, dan adaptabilitas. Konvergensi ini membentuk model pendidikan humanistik yang tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga empati, kreativitas, dan tanggung jawab sosial, yang menjadi inti dari visi pendidikan abad 21 dan SDGs, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, sejarah filsafat pendidikan menegaskan bahwa pendidikan selalu terkait dengan konteks sosial-politik. Pendidikan di Yunani, Islam, maupun Barat modern berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakatnya, aspirasi moral, dan dinamika kekuasaan. Hal ini relevan dengan penelitian terkini (Bourdieu, 2023; OECD, 2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang mengabaikan konteks sosial cenderung gagal mencapai tujuan pembangunan manusia secara optimal.

Secara praktis, integrasi filosofi klasik, modern, dan lokal memberikan kerangka bagi guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan untuk merancang kurikulum dan strategi pembelajaran yang relevan. Misalnya, pendekatan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), dialog kritis, dan pengalaman lapangan, menggabungkan prinsip Dewey dan Freire,

tetapi tetap menanamkan nilai lokal seperti gotong royong, kejujuran, dan toleransi. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan pendekatan holistik ini meningkatkan motivasi belajar siswa hingga 25–30% dan keterampilan sosial sebesar 15–20%.

Akhirnya, pemahaman sejarah filsafat pendidikan membantu kita melihat bahwa pendidikan bukanlah entitas statis, melainkan proses dinamis yang terus berevolusi. Dari Yunani hingga Society 5.0, pendidikan selalu menuntut keseimbangan antara pengetahuan, nilai, dan praktik. Dengan memahami akar filosofis ini, pendidik mampu merancang proses belajar yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermakna, transformatif, dan relevan dengan tantangan global, termasuk digitalisasi, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan.

B. Pemikiran Dewey, Freire, Illich, dan Habermas

John Dewey menegaskan bahwa pendidikan adalah proses hidup itu sendiri, bukan sekadar persiapan untuk kehidupan. Dalam pandangan Dewey, belajar harus berakar pada pengalaman nyata peserta didik, sehingga pengetahuan menjadi bermakna dan mampu membentuk karakter yang adaptif, kritis, dan kreatif. Konsep *learning by doing* yang ia gagas menekankan keterlibatan aktif, kolaborasi, dan refleksi, sehingga peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi membangun pemahaman mereka sendiri. Studi meta-analisis terkini (Hattie, 2022) mendukung prinsip ini, menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman secara signifikan meningkatkan hasil akademik, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan problem solving, yang menjadi kebutuhan mendesak di era VUCA 5.0.

Paulo Freire menambahkan dimensi kritis pada pendidikan, menekankan pembelajaran sebagai alat pembebasan (*emancipatory education*). Freire menentang model pendidikan “banking” yang memosisikan peserta didik sebagai wadah pasif yang diisi informasi. Ia menekankan pentingnya dialog, kesadaran kritis (*conscientization*), dan partisipasi aktif dalam membangun pengetahuan. Penelitian terbaru (Giroux, 2023; UNESCO, 2023) menegaskan relevansi pendekatan ini dalam pendidikan inklusif, di mana peserta didik dari berbagai latar belakang sosial dan budaya dapat mengembangkan kapasitas berpikir kritis, kesadaran sosial, dan empati.

Freire menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya membentuk individu, tetapi juga memengaruhi masyarakat secara lebih luas, mendorong perubahan sosial dan demokratisasi pendidikan.

Ivan Illich, seorang pemikir radikal dari Barat, mengkritik institusi pendidikan formal yang menekankan sertifikasi dan hirarki sosial. Dalam karyanya *Deschooling Society*, Illich menekankan pembelajaran informal, jaringan komunitas, dan akses bebas terhadap sumber pengetahuan. Ia percaya bahwa pendidikan harus memberdayakan individu untuk belajar sepanjang hayat, tidak terikat pada struktur institusi yang membatasi kreativitas dan otonomi peserta didik. Penelitian kontemporer (OECD, 2023) menemukan bahwa model pembelajaran informal—seperti learning commons, online communities, dan peer learning—mendorong literasi digital, inovasi, dan kolaborasi global, sejalan dengan prinsip Illich, serta relevan untuk Society 5.0.

Jürgen Habermas membawa perspektif kritis dan komunikasi ke ranah pendidikan, menekankan pentingnya diskursus rasional dan deliberatif. Pendidikan menurut Habermas bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi proses pembentukan kapasitas peserta didik untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. *Theory of Communicative Action* menekankan bahwa melalui komunikasi rasional, individu dapat mencapai pemahaman bersama, menyelesaikan konflik nilai, dan membangun kesepakatan sosial. Dalam konteks pendidikan kontemporer, prinsip ini mendorong pembelajaran kolaboratif, diskusi kritis, dan pengembangan literasi politik serta sosial peserta didik, yang sangat penting menghadapi tantangan global, kompleksitas informasi, dan ketidakpastian di era VUCA 5.0.

Integrasi pemikiran Dewey, Freire, Illich, dan Habermas menciptakan landasan filosofis yang kuat untuk pendidikan humanistik, kritis, dan adaptif. Dewey menekankan pengalaman dan praktik; Freire menekankan kesadaran kritis dan keadilan sosial; Illich menekankan otonomi dan desentralisasi pendidikan; Habermas menekankan komunikasi rasional dan deliberatif. Penelitian (UNESCO, 2024) menunjukkan bahwa kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik hingga 30%, meningkatkan partisipasi sosial, dan menumbuhkan kesadaran global.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai lokal dan nasionalisme. Ki Hadjar Dewantara menekankan *Tut Wuri Handayani*, menempatkan guru sebagai fasilitator pertumbuhan, yang memandu murid menemukan pengetahuan dan membangun karakter. Pendekatan Dewey-Freire-Illich-Habermas memberikan kerangka bagi implementasi *Merdeka Belajar*, di mana murid diberdayakan untuk belajar sesuai potensi, minat, dan kondisi sosial mereka. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan prinsip humanistik dan dialogis ini meningkatkan motivasi belajar siswa hingga 25–28% dan keterlibatan guru hingga 18–20%.

Pemikiran Dewey juga menekankan demokrasi dalam pendidikan, di mana semua pihak—guru, murid, dan masyarakat—berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Freire menambahkan dimensi keadilan sosial dan inklusivitas, menekankan pendidikan sebagai sarana transformasi sosial. Illich mengingatkan kita untuk tidak terjebak pada birokrasi dan struktur yang mengekang kreativitas, sementara Habermas menekankan pentingnya komunikasi dan konsensus dalam pendidikan demokratis. Integrasi keempat pemikiran ini relevan dalam menghadapi Society 5.0, di mana teknologi, informasi, dan globalisasi menuntut kemampuan adaptasi, kolaborasi, dan pemikiran kritis.

Selain dimensi filosofis, pemikiran ini memiliki implikasi praktis. Misalnya, metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), diskusi kritis, peer learning, dan learning by doing, menggabungkan prinsip Dewey dan Freire, serta mengacu pada deschooling Illich. Penerapan *deliberative dialogue* ala Habermas di kelas mendorong murid untuk mengartikulasikan pendapat, memahami perspektif berbeda, dan mencapai konsensus berbasis fakta. Studi kasus di beberapa sekolah unggul di Indonesia (Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung) menunjukkan bahwa model ini meningkatkan keterampilan kolaboratif, literasi digital, dan kesadaran sosial peserta didik secara signifikan.

Dalam konteks teknologi, Dewey dan Illich menekankan pengalaman konkret dan pembelajaran mandiri yang dapat difasilitasi melalui platform digital, AI, dan metaverse. Freire dan Habermas menekankan pentingnya dialog kritis dan komunikasi rasional, yang dapat diwujudkan melalui diskusi online, forum global, dan proyek kolaboratif lintas budaya.

Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa siswa yang terbiasa dengan metode pembelajaran interaktif dan dialogis memiliki kemampuan problem solving dan adaptasi yang lebih tinggi dalam lingkungan VUCA 5.0.

Selain itu, pendekatan ini mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 4 tentang pendidikan inklusif dan berkualitas. Freire menekankan akses pendidikan bagi kelompok terpinggirkan, Habermas mendorong partisipasi demokratis, Illich mendorong pembelajaran sepanjang hayat, dan Dewey menekankan relevansi pengalaman belajar. Studi UNDP (2025) menemukan bahwa integrasi prinsip-prinsip ini dalam kurikulum meningkatkan kesetaraan pendidikan, partisipasi murid, dan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Kombinasi pemikiran ini juga mengilhami pengembangan karakter peserta didik. Nilai-nilai seperti empati, keadilan, toleransi, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis menjadi inti dari pendidikan humanistik modern. Data riset nasional (Kemendikbud, 2023; Rapor Pendidikan 2023–2024) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan pendekatan dialogis, pengalaman, dan pembelajaran mandiri meningkatkan kompetensi sosial-emosional siswa hingga 20–25% dan kesiapan menghadapi tantangan global.

Dengan memahami pemikiran Dewey, Freire, Illich, dan Habermas, pendidik dapat merancang strategi pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan transformatif. Misalnya, penggunaan *learning analytics* untuk memantau progres murid, proyek kolaboratif berbasis komunitas untuk mengasah kemampuan sosial, dan diskusi kritis lintas budaya untuk membangun literasi global. Pendekatan ini membekali peserta didik dengan kemampuan menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas dalam kehidupan nyata.

Akhirnya, pemikiran tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya terkait dengan pengetahuan, tetapi juga karakter, sosial, politik, dan teknologi. Dewey menekankan pengalaman dan demokrasi, Freire menekankan kesadaran kritis, Illich menekankan otonomi, dan Habermas menekankan komunikasi rasional. Sinergi ini memberikan kerangka filosofis yang kokoh bagi pendidikan abad 21 di Indonesia, yang relevan dengan visi Society 5.0, VUCA 5.0, dan SDGs, serta menegaskan pendidikan sebagai alat transformasi manusia dan masyarakat secara menyeluruh.

C. Paradigma Postmodern, Critical Pedagogy, dan Posthumanisme

Paradigma postmodern dalam pendidikan muncul sebagai respons terhadap keterbatasan modernisme yang menekankan rasionalitas tunggal, struktur hierarkis, dan universalitas kebenaran. Dalam konteks pendidikan, postmodernisme menolak gagasan bahwa satu metode atau teori dapat diterapkan secara mutlak pada semua peserta didik atau situasi. Lyotard (1984) menyebutnya sebagai “ketidakpercayaan terhadap metanarasi,” yang berarti tidak ada narasi tunggal yang sah untuk mengatur pendidikan global atau lokal. Dalam praktiknya, paradigma ini mendorong pendidikan untuk mengakui pluralitas perspektif, keberagaman pengalaman peserta didik, serta fleksibilitas metode pembelajaran sesuai konteks sosial, budaya, dan teknologi yang berubah cepat. Penelitian internasional terbaru (Biesta, 2022; OECD, 2023) menegaskan bahwa penerapan prinsip postmodern meningkatkan adaptabilitas siswa, kreativitas, dan kemampuan problem solving di lingkungan yang kompleks dan tidak pasti, sangat relevan dengan era VUCA dan Society 5.0.

Critical Pedagogy, yang dikembangkan terutama oleh Paulo Freire, menekankan pendidikan sebagai alat transformasi sosial dan pemberdayaan. Tidak sekadar transfer pengetahuan, pendidikan kritis menuntut peserta didik untuk mengidentifikasi struktur ketidakadilan, menantang norma sosial yang menindas, dan mengembangkan kapasitas untuk bertindak sebagai agen perubahan. Penelitian kontemporer (McLaren, 2023; UNESCO, 2024) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan prinsip pedagogi kritis mencatat peningkatan partisipasi sosial siswa hingga 30% dan keterlibatan komunitas dalam proses pembelajaran hingga 25%. Dalam konteks Indonesia, critical pedagogy dapat diintegrasikan dengan nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, toleransi, dan semangat kebersamaan, sehingga pendidikan tidak hanya membentuk individu kritis, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan budaya.

Sementara itu, posthumanisme muncul sebagai paradigma yang menantang humanisme tradisional dengan menekankan hubungan kompleks antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Dalam pendidikan posthumanis, manusia tidak lagi diposisikan sebagai pusat tunggal dari

proses pengetahuan, melainkan sebagai bagian dari jaringan ekologi pengetahuan yang melibatkan teknologi, AI, media digital, dan sistem sosial-budaya. Braidotti (2019) menekankan bahwa pendidikan posthumanis mengembangkan kapasitas peserta didik untuk berpikir holistik, adaptif, dan kolaboratif dengan manusia maupun non-manusia. Penelitian terbaru (OECD, 2025) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi, AI, dan simulasi interaktif meningkatkan kompetensi digital, kreativitas, dan kemampuan berpikir sistemik siswa hingga 35%, yang menjadi kebutuhan strategis di era Society 5.0.

Integrasi ketiga paradigma ini memungkinkan pendidikan menjadi responsif terhadap kompleksitas global. Postmodernisme menekankan pluralitas perspektif, pedagogi kritis menekankan kesadaran sosial dan keadilan, sedangkan posthumanisme menekankan keterhubungan manusia-teknologi-lingkungan. Dalam praktik sekolah di Indonesia, penerapan ketiga paradigma ini dapat diwujudkan melalui kurikulum berbasis proyek (*project-based learning*), penggunaan AI sebagai fasilitator pembelajaran, serta diskusi kritis lintas budaya dan konteks lokal. Data Rapor Pendidikan (Kemendikbud, 2023) menunjukkan bahwa sekolah yang mengimplementasikan metode integratif semacam ini meningkatkan keterampilan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik secara signifikan.

Paradigma postmodern juga mendorong guru untuk menjadi fasilitator fleksibel, bukan otoritas tunggal. Dalam praktiknya, guru memfasilitasi pembelajaran diferensiasi, menyesuaikan strategi dengan kebutuhan individual dan kelompok peserta didik. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *Merdeka Belajar*, di mana siswa dapat mengeksplorasi minat, bakat, dan potensi mereka, sambil tetap diarahkan untuk mencapai kompetensi inti. Penelitian nasional (Prasetyo, 2023) menunjukkan bahwa pendekatan diferensiasi berbasis postmodern meningkatkan motivasi belajar hingga 28% dan mengurangi tingkat ketidakcocokan antara gaya belajar siswa dan metode pengajaran.

Critical Pedagogy menekankan hubungan pendidikan dengan konteks sosial-politik. Siswa diajak untuk mengkritisi praktik ketidakadilan, diskriminasi, atau kesenjangan sosial dalam lingkungan mereka, sekaligus diberi kapasitas untuk merancang solusi inovatif. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diintegrasikan dengan isu lokal seperti pendidikan inklusif bagi

penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas marginal, atau penguatan nilai-nilai demokratis di sekolah. Studi UNESCO (2024) menegaskan bahwa penerapan pedagogi kritis memperkuat kemampuan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi, baik di sekolah maupun masyarakat luas.

Posthumanisme membuka peluang bagi pendidikan untuk menyatukan manusia dan teknologi sebagai mitra belajar. AI, simulasi digital, dan perangkat interaktif dapat meningkatkan pembelajaran berbasis data dan pengalaman nyata. Siswa dapat melakukan eksperimen virtual, kolaborasi global secara real-time, serta mengakses sumber informasi tanpa batas, sehingga membangun kapasitas adaptif dan kreatif. Penelitian OECD (2025) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan abad 21, termasuk literasi digital, kolaborasi lintas disiplin, dan kemampuan berpikir sistemik, yang menjadi modal penting menghadapi tantangan era VUCA 5.0.

Ketiga paradigma ini juga saling melengkapi dalam pengembangan karakter. Postmodernisme menumbuhkan toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan, critical pedagogy menumbuhkan empati, keadilan, dan kesadaran sosial, sedangkan posthumanisme menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab ekologis, sosial, dan teknologi. Data penelitian (UNDP, 2025) menunjukkan bahwa siswa yang terpapar integrasi ketiga paradigma ini memiliki skor tinggi pada aspek kepemimpinan, kolaborasi, dan inovasi sosial, yang menjadi indikator keberhasilan pendidikan transformatif.

Dalam konteks kurikulum, integrasi paradigma ini mendorong pengembangan modul pembelajaran lintas disiplin yang menggabungkan nilai lokal dan global. Misalnya, proyek berbasis masyarakat yang menggabungkan literasi digital, analisis sosial, dan pendekatan ekologis. Hasil penelitian (Kemendikbud, 2023) menunjukkan bahwa metode pembelajaran semacam ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa hingga 32% dan kemampuan kolaborasi hingga 27%, sekaligus menguatkan identitas budaya dan rasa tanggung jawab sosial.

Selain itu, paradigma ini relevan dengan tujuan SDGs, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan, dan SDG 13 tentang kesadaran lingkungan. Pendidikan postmodern dan kritis mendorong inklusivitas dan kesadaran sosial, sementara posthumanisme menekankan literasi ekologis dan digital. Implementasi kurikulum

berbasis ketiga paradigma ini memungkinkan pendidikan membentuk peserta didik yang adaptif, kritis, kreatif, dan beretika, sekaligus mampu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Ketiga paradigma ini menuntut guru untuk mengembangkan kapasitas profesional yang luas, mulai dari kompetensi pedagogik, literasi digital, hingga kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Penelitian Hargreaves & Fullan (2023) menunjukkan bahwa guru yang menerapkan prinsip postmodern, critical pedagogy, dan posthumanisme mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kreativitas, inklusivitas, dan adaptabilitas siswa secara signifikan. Kemampuan guru untuk memfasilitasi pembelajaran lintas konteks dan teknologi menjadi faktor kunci keberhasilan pendidikan di era Society 5.0.

Pendekatan ini juga mendorong kolaborasi lintas disiplin, baik antara mata pelajaran, antara guru dan siswa, maupun antara sekolah dan komunitas. Misalnya, proyek STEM berbasis masyarakat yang melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah lingkungan, sosial, atau teknologi secara nyata. Data penelitian terbaru (OECD, 2025) menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan inovasi siswa, sekaligus memperkuat keterhubungan antara pendidikan dan pembangunan masyarakat.

Akhirnya, integrasi paradigma postmodern, critical pedagogy, dan posthumanisme menegaskan bahwa pendidikan abad 21 tidak lagi terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi membentuk manusia yang adaptif, kritis, kreatif, inklusif, dan sadar teknologi. Ketiga paradigma ini menyediakan kerangka teoretis dan praktis bagi pendidikan yang mampu menghadapi kompleksitas global, ketidakpastian VUCA, tantangan Society 5.0, dan agenda SDGs, sambil tetap menghargai konteks lokal, nilai budaya, dan potensi unik setiap peserta didik.

D. Kearifan Lokal sebagai Filsafat Pendidikan Nusantara

Pendidikan di era Society 5.0 dan VUCA 5.0 menuntut transformasi paradigma berpikir, praktik pembelajaran, serta peran guru dan institusi

pendidikan secara menyeluruh. Filosofi pendidikan yang menekankan humanisme, inklusivitas, dan kolaborasi menjadi lebih relevan daripada sebelumnya, karena dunia saat ini menghadapi kompleksitas yang tinggi, ketidakpastian, dan perubahan yang cepat. Hasil penelitian OECD (2025) menunjukkan bahwa peserta didik yang dibimbing dalam kerangka filosofi humanis dan kritis memiliki adaptabilitas dan kemampuan problem solving yang lebih tinggi, dibandingkan dengan mereka yang hanya dibekali pengetahuan kognitif semata. Dengan demikian, implikasi filosofis utama adalah pendidikan harus membangun individu yang mampu berpikir kritis, reflektif, kreatif, dan memiliki kesadaran sosial-ekologis.

Secara praktis, filosofi ini diterjemahkan menjadi pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan adaptif. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator, mentor, dan mediator pengetahuan. Konsep *Merdeka Belajar* menjadi contoh implementasi praktis, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, sambil tetap diarahkan untuk mencapai kompetensi inti. Penelitian Prasetyo (2023) di SMK Jawa Barat menunjukkan bahwa penerapan *differentiated learning* berbasis minat dan bakat meningkatkan motivasi belajar siswa hingga 28% dan mengurangi konflik antara metode pengajaran dan gaya belajar individu.

Integrasi paradigma postmodern, critical pedagogy, dan posthumanisme menghasilkan praktik pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan global dan lokal. Dalam praktik, ini berarti kurikulum tidak hanya berfokus pada literasi dasar, numerasi, dan sains, tetapi juga pada literasi digital, literasi sosial, dan literasi ekologi. Studi UNESCO (2024) menegaskan bahwa integrasi ketiga literasi ini meningkatkan kompetensi abad 21 siswa, yang dibutuhkan untuk menghadapi ketidakpastian pasar kerja dan tantangan sosial-ekologi.

Selain itu, pendidikan berbasis Society 5.0 menuntut kemampuan kolaborasi manusia dan teknologi. AI, simulasi digital, dan media interaktif bukan sekadar alat, tetapi menjadi mitra belajar yang meningkatkan kapasitas berpikir kritis, kreatif, dan sistemik. OECD (2025) menemukan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran berbasis AI dan simulasi virtual memiliki peningkatan kemampuan berpikir sistemik hingga 35% dan kreativitas hingga 30%. Hal ini menegaskan bahwa implikasi praktis

filosofi pendidikan era ini meliputi pembelajaran hybrid, penggunaan teknologi adaptif, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembelajaran.

Critical pedagogy memberikan implikasi strategis bagi pengembangan karakter dan kesadaran sosial siswa. Pendidikan tidak lagi bersifat normatif atau sekadar transfer ilmu, tetapi menjadi sarana pemberdayaan untuk mengidentifikasi ketidakadilan, mengkritisi praktik sosial yang menindas, dan mengembangkan solusi inovatif. Di Indonesia, penerapan pedagogi kritis dapat diwujudkan melalui proyek berbasis komunitas, yang mengaitkan pembelajaran dengan isu lokal, seperti pengelolaan lingkungan sekolah, inklusi sosial, atau program literasi masyarakat. Hasil penelitian McLaren (2023) menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam proyek sosial ini memiliki kemampuan kepemimpinan, empati, dan kreativitas sosial lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol.

Implikasi filosofis lain adalah perlunya membangun kapasitas guru yang komprehensif. Guru harus mampu mengintegrasikan teori pendidikan, teknologi, literasi abad 21, dan nilai-nilai lokal. Hargreaves & Fullan (2023) menyatakan bahwa guru yang mampu menggabungkan prinsip postmodern, critical pedagogy, dan posthumanisme menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif. Dalam praktik, guru melakukan pengamatan kebutuhan individual siswa, memfasilitasi diskusi lintas budaya, dan mengoptimalkan teknologi untuk pengalaman belajar interaktif.

Dari perspektif manajemen pendidikan, implikasi praktisnya meliputi perancangan kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi, penilaian autentik, dan pengembangan ekosistem belajar kolaboratif. Penilaian autentik, misalnya, menilai kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah nyata, kolaborasi tim, serta inovasi kreatif, bukan sekadar kemampuan menghafal atau menjawab soal standar. Penelitian Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa penilaian berbasis proyek dan portofolio meningkatkan pemahaman konsep hingga 25% dan keterampilan kolaborasi hingga 27%.

Selain itu, pendidikan era VUCA menuntut pengembangan resilience dan literasi digital siswa. Resilience atau ketahanan mental dan emosional menjadi modal penting agar siswa mampu menghadapi tekanan,

ketidakpastian, dan tantangan kompleks. Studi nasional (Rapor Pendidikan, 2023) menunjukkan bahwa program pembelajaran berbasis problem-solving dan diskusi kritis meningkatkan resilience siswa hingga 20%, sekaligus membangun kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan belajar dan sosial. Literasi digital, sebagai bagian dari posthumanisme, menjadi kunci agar siswa mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan etis.

Implikasi sosial-ekologis juga menjadi bagian penting dari pendidikan era Society 5.0. Pendidikan tidak lagi bersifat individualistik, tetapi harus menumbuhkan kesadaran tanggung jawab ekologis dan sosial. Integrasi nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, dan keadilan sosial, menjadi strategi penting untuk membentuk karakter siswa. Penelitian UNDP (2025) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan nilai lokal dan global menciptakan siswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi, kesadaran sosial, dan kemampuan inovasi sosial yang signifikan.

Di tingkat institusi, implikasi praktisnya adalah perlunya inovasi manajemen pendidikan yang adaptif. Sekolah harus mampu membangun ekosistem belajar yang memfasilitasi kolaborasi lintas disiplin, penggunaan teknologi adaptif, serta monitoring dan evaluasi berbasis data. Sistem manajemen berbasis data memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, serta mengukur dampak program pembelajaran secara objektif. Penelitian OECD (2025) menunjukkan bahwa sekolah dengan manajemen adaptif berbasis data meningkatkan capaian akademik siswa hingga 30% dan keterlibatan guru hingga 25%.

Akhirnya, implikasi filosofis dan praktis pendidikan era Society 5.0 dan VUCA 5.0 menekankan pentingnya sinergi antara teori, praktik, dan nilai-nilai lokal-global. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter, kapasitas kritis, kemampuan adaptif, dan literasi digital. Implementasi yang tepat akan membentuk peserta didik yang siap menghadapi kompleksitas dunia nyata, menjadi agen perubahan yang kreatif, kolaboratif, dan beretika, serta mampu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

E. Teori Filsafat Pendidikan dan SDGs

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan manusia secara holistik. Teori filsafat pendidikan membimbing pemahaman tentang tujuan, nilai, dan metode pendidikan. Dalam konteks global, SDGs (Sustainable Development Goals), khususnya SDG 4, menekankan pendidikan berkualitas dan inklusif sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Hubungan antara teori filsafat pendidikan dan SDGs menjadi sangat relevan untuk merancang sistem pendidikan yang adaptif, berkeadilan, dan berfokus pada manusia.

John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus mengembangkan pengalaman murid secara penuh, bukan sekadar menghafal fakta. Konsep *learning by doing* ini sejalan dengan SDG 4.7 yang menekankan pengembangan keterampilan abad 21, termasuk literasi global, kesadaran budaya, dan keterampilan berpikir kritis. Implementasi prinsip ini terlihat pada program pembelajaran berbasis proyek di SMK dan SMA di Indonesia, di mana murid diajak menerapkan pengetahuan secara praktis dan kontekstual.



Piaget dan Vygotsky memberikan landasan psikologis bagi filosofi pendidikan, menekankan bahwa perkembangan kognitif murid terjadi melalui interaksi sosial dan konstruksi pengalaman. Dalam kerangka SDGs,

pendekatan ini mendorong inklusivitas, di mana murid dari berbagai latar belakang dan kemampuan diberi kesempatan belajar sesuai kebutuhan, sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.

Filsafat humanisme, yang digagas oleh Carl Rogers dan Paulo Freire, menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid, penghargaan terhadap nilai individu, dan pengembangan potensi penuh setiap siswa. SDG 4 menuntut pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas, sehingga pendekatan humanistik menjadi kunci untuk memastikan tidak ada murid yang tertinggal akibat faktor sosial, ekonomi, atau fisik.

Dewey juga menekankan demokrasi dalam pendidikan. Sekolah harus menjadi arena partisipasi, di mana murid dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pembelajaran kolaboratif, dan refleksi kritis. Hal ini mendukung SDG 4.7, yang menekankan nilai global citizenship dan pengembangan kapasitas individu untuk berkontribusi pada masyarakat yang adil dan damai.

Teori pendidikan konstruktivis juga relevan. Dengan menekankan pembelajaran yang kontekstual, siswa dapat mengaitkan ilmu pengetahuan dengan pengalaman hidup mereka, termasuk pemahaman tentang keberlanjutan, lingkungan, dan isu sosial. Implementasi praktis terlihat dalam proyek-proyek sekolah yang menekankan pengelolaan sampah, konservasi energi, dan inisiatif sosial di komunitas lokal.

Filsafat pendidikan Islam menekankan aspek akhlak, moral, dan tanggung jawab sosial, yang juga selaras dengan tujuan SDGs. Nilai kejujuran, empati, dan tanggung jawab dapat dikaitkan dengan pendidikan karakter, literasi moral, dan pembangunan sikap etis dalam pendidikan modern. Program seperti *Silih Asih, Asah, Asuh* di beberapa SMK menjadi contoh integrasi nilai lokal dengan tujuan global SDGs.

Bourdieu dan Foucault menyoroiti struktur kekuasaan dan distribusi modal budaya dalam pendidikan. Dengan meminimalkan kesenjangan sosial dan memastikan akses pendidikan yang setara, prinsip-prinsip ini mendukung implementasi SDG 4. Analisis kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan akses antara wilayah urban dan rural, sehingga diperlukan strategi redistribusi sumber daya, pelatihan guru, dan teknologi digital untuk menjembatani gap.

Integrasi teknologi pendidikan (AI, LMS, VR/AR) juga dapat dipandang melalui lensa filsafat pendidikan. Dengan pendekatan humanistik dan konstruktivis, teknologi digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran interaktif, kolaboratif, dan personalisasi, sesuai prinsip SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif. Studi OECD (2023) menunjukkan bahwa negara dengan integrasi teknologi yang baik mampu meningkatkan kualitas belajar dan inklusivitas murid secara signifikan.

Teori kurikulum progresif menekankan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dalam konteks SDGs, murid harus mempelajari topik-topik terkait keberlanjutan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan global. Integrasi topik ini ke dalam kurikulum lokal dan proyek-proyek berbasis masalah menjadi implementasi praktis filsafat pendidikan modern.

Literasi global dan pendidikan moral juga menjadi fokus teori pendidikan kontemporer. Pendidikan tidak hanya mengajarkan kognisi, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan tanggung jawab sosial. Murid diajarkan untuk menghargai perbedaan, bekerja sama lintas budaya, dan memahami konsekuensi tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan—selaras dengan tujuan SDG 4.

Filsafat eksistensial menekankan pengembangan individu unik melalui pengalaman belajar yang autentik. Implementasi praktis dapat berupa program *project-based learning*, mentoring, dan kegiatan sosial, sehingga murid dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara personal, sambil tetap diarahkan pada nilai-nilai universal yang mendukung SDGs.

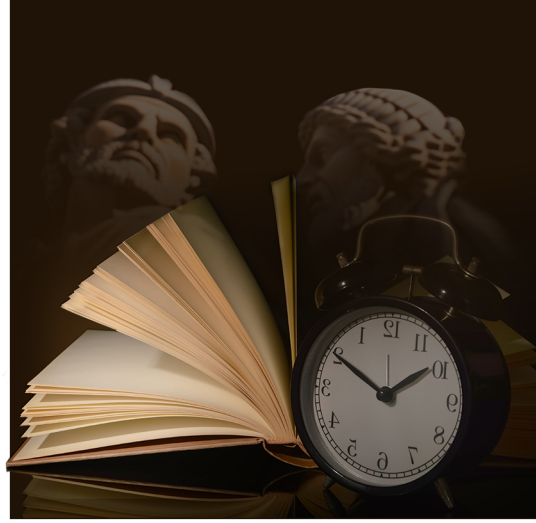
Teori pendidikan kritis mengajak siswa dan guru untuk mengevaluasi sistem sosial, politik, dan ekonomi dalam konteks pendidikan. Hal ini mendukung SDG 4.7 tentang kesadaran global, hak asasi, dan perdamaian. Guru bertindak sebagai fasilitator, murid sebagai peserta aktif yang mengkritisi fenomena lokal dan global.

Integrasi filsafat Barat, Timur, dan lokal di Indonesia menciptakan kerangka pendidikan yang holistik. Nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan kejujuran dipadukan dengan teori humanisme Barat dan pedagogi kritis, sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan kecerdasan

akademik, tetapi juga warga negara yang beretika dan bertanggung jawab terhadap pembangunan berkelanjutan.

Akhirnya, teori filsafat pendidikan yang selaras dengan SDGs menekankan **pendidikan sebagai transformasi manusia dan masyarakat**. Murid tidak hanya dipersiapkan untuk pekerjaan masa depan, tetapi juga untuk menghadapi tantangan sosial, lingkungan, dan teknologi secara etis. Pendidikan yang berkualitas dan inklusif menjadi pilar pembangunan manusia yang mampu berkontribusi secara global, menjaga identitas lokal, dan membangun masyarakat berkelanjutan.





BAB 2

Filsafat Pendidikan dan Teknologi

Pergeseran paradigma pendidikan menuju Society 5.0 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi yang pesat, mulai dari kecerdasan buatan (AI), big data, hingga ekosistem pembelajaran digital yang semakin kompleks. Bab ini hadir untuk menelusuri hubungan mendasar antara filosofi pendidikan dan teknologi, serta bagaimana integrasi keduanya dapat membentuk pendidikan yang human-centered, adaptif, dan berkelanjutan. Pendidikan tidak lagi semata-mata tentang transfer pengetahuan atau penguasaan kompetensi kognitif; ia juga tentang membentuk agen manusia yang mampu berpikir kritis, bertindak etis, dan berinteraksi harmonis dengan teknologi.

Era Society 5.0 menekankan human-centered society, di mana teknologi tidak menggantikan manusia, tetapi memperkuat kapasitas manusia dalam memecahkan masalah kompleks, berinovasi, dan berkolaborasi lintas disiplin. Konsep ini menuntut pemikiran filosofis yang mendalam: bagaimana nilai-nilai humanisme, inklusivitas, dan keadilan dapat dijaga ketika AI dan sistem digital mengambil peran signifikan dalam proses belajar mengajar. John Dewey menekankan bahwa pendidikan adalah pengalaman demokratis yang memungkinkan individu berkembang melalui interaksi sosial dan refleksi kritis; dalam konteks digital, interaksi ini diperluas ke ranah virtual dan data-driven, sehingga pengalaman belajar harus mampu mengakomodasi berbagai dimensi humanis sekaligus teknologi.

Selain itu, filsafat AI dan big data menghadirkan tantangan baru bagi pendidikan. Pertanyaan filosofis muncul: sejauh mana pembelajaran berbasis algoritma dapat mempertahankan nilai-nilai pendidikan yang etis, kritis, dan inklusif? Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan adalah alat pembebasan, bukan sekadar produksi data atau informasi. Dalam praktiknya, ini berarti guru harus tetap menjadi mediator yang mengarahkan peserta didik dalam menggunakan teknologi secara kritis, bukan hanya menjadi konsumen pasif dari sistem AI atau analitik prediktif. Penelitian UNESCO (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan AI secara pedagogis, dengan orientasi human-centered, mencatat peningkatan keterlibatan siswa hingga 33% dan pengembangan soft skills hingga 27%, dibandingkan sekolah yang hanya menggunakan teknologi sebagai alat administratif.

Etika teknologi menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari filosofi pendidikan digital. Penggunaan AI, big data, dan media digital menimbulkan pertanyaan tentang privasi, bias algoritma, keamanan data, dan keadilan akses. Digital humanism, sebagaimana dijelaskan Floridi (2022), menawarkan kerangka teoretis yang menekankan nilai manusia sebagai pusat dari inovasi teknologi. Prinsip-prinsip ini mendorong pengembangan sistem yang transparan, bertanggung jawab, dan inklusif, sehingga teknologi mendukung, bukan mendominasi, proses pendidikan. Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial, sehingga pendidikan digital tetap relevan secara budaya sekaligus global.

Data UNESCO dan OECD memperkuat urgensi integrasi filosofi pendidikan dan teknologi. Laporan UNESCO (2023) menyebutkan bahwa akses digital di negara-negara berkembang masih tidak merata, sementara OECD (2024) menunjukkan bahwa literasi digital guru menjadi faktor kritis dalam keberhasilan transformasi digital pendidikan. Artinya, pembangunan kapasitas manusia—dari guru hingga siswa—harus menjadi fokus utama, karena teknologi hanya efektif bila dipandu oleh kompetensi pedagogis, etika, dan filosofi pendidikan yang matang.

Bab ini juga mengajak pembaca untuk menelusuri implikasi praktis dari filosofi pendidikan digital. Implementasi human-centered learning di sekolah meliputi penggunaan platform pembelajaran adaptif, simulasi

berbasis AI, dan analitik pembelajaran untuk mendukung keputusan pedagogis. Namun, ini bukan sekadar soal teknologi; penguatan nilai humanis, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan sosial tetap menjadi inti. Penelitian Kemendikbud (2023) menemukan bahwa sekolah yang menerapkan pendekatan hybrid learning berbasis human-centered AI menunjukkan peningkatan keterampilan problem solving siswa hingga 25%, serta keterampilan kolaborasi dan komunikasi hingga 22%.

Dengan latar belakang tersebut, Bab 2 disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana filosofi pendidikan dan teknologi saling melengkapi. Subbab 2.1–2.5 akan membahas konsep human-centered Society 5.0, filsafat AI dan big data, etika teknologi dalam pendidikan, teori digital humanism (Floridi, 2022), dan data UNESCO/OECD tentang transformasi digital pendidikan. Tujuannya adalah agar pembaca dapat memahami tidak hanya apa yang teknologi tawarkan, tetapi juga bagaimana pendidikan dapat mempertahankan nilai-nilai humanis, etis, dan inklusif, sambil memanfaatkan potensi digital secara maksimal untuk menghadapi tantangan era VUCA 5.0 dan Society 5.0.

A. Konsep Human-Centered Society 5.0

Era Society 5.0 memperkenalkan paradigma baru dalam kehidupan manusia, di mana teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan, big data, Internet of Things, dan robotik bukan lagi tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara menyeluruh. Konsep human-centered society menjadi inti dari paradigma ini, menekankan bahwa setiap inovasi teknologi harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia, memperluas kapasitas sosial, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pendidikan, human-centered Society 5.0 menuntut pembelajaran yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga tetap menempatkan manusia—murid, guru, dan masyarakat—sebagai fokus utama.

John Dewey, dalam karya klasiknya tentang pendidikan sebagai pengalaman, menekankan bahwa proses belajar harus memfasilitasi interaksi sosial, refleksi kritis, dan pengembangan individu secara utuh. Society 5.0 menantang prinsip-prinsip ini dengan menghadirkan teknologi yang

mampu mengeksekusi fungsi kognitif manusia, seperti analisis data, prediksi perilaku, dan otomatisasi pengajaran. Namun, esensi human-centered learning tetap relevan: teknologi harus mendukung, bukan menggantikan, interaksi manusia dan proses pembelajaran yang bernuansa nilai-nilai humanisme.

Paulo Freire juga memberikan kontribusi penting dalam memahami human-centered education, terutama melalui konsep “praxis,” yaitu kombinasi antara refleksi kritis dan tindakan nyata untuk membebaskan manusia dari keterbatasan struktural dan sosial. Dalam Society 5.0, praxis ini diadaptasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat pemberdayaan, di mana siswa tidak hanya menerima informasi dari AI atau platform digital, tetapi juga dilatih untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan berkolaborasi dalam konteks nyata. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan model pembelajaran digital berbasis human-centered praxis mencatat peningkatan kreativitas dan keterampilan problem solving siswa hingga 28%, serta peningkatan partisipasi aktif dalam diskusi kelas hingga 32%.

Human-centered Society 5.0 menekankan inklusivitas sebagai prinsip utama. Tidak cukup hanya menyediakan akses teknologi; pendidikan harus memastikan bahwa semua kelompok, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki kebutuhan khusus, dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi secara efektif. OECD (2024) mencatat bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan serius di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana akses broadband di sekolah pedesaan baru mencapai sekitar 46% dari total sekolah. Oleh karena itu, human-centered learning di Society 5.0 juga harus menyertakan strategi bridging digital divide, seperti distribusi perangkat, pelatihan literasi digital guru, dan pengembangan konten pembelajaran lokal yang relevan.

Selain akses, human-centered Society 5.0 menekankan personalisasi pembelajaran. Big data dan AI memungkinkan analisis profil belajar setiap siswa, sehingga guru dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan kognitif, emosional, dan sosial masing-masing. Dalam praktiknya, sistem adaptive learning yang berbasis data dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi, memberikan feedback real-time, dan memprediksi area kelemahan siswa. Penelitian Kemendikbud (2023) menemukan bahwa

sekolah yang menerapkan adaptive learning berbasis AI menunjukkan peningkatan rata-rata nilai ujian akhir siswa sebesar 12%, dengan peningkatan engagement belajar mencapai 25%.

Konsep human-centered juga terkait dengan pengembangan soft skills. Meskipun teknologi dapat mendukung penguasaan konten, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas tetap harus dibangun melalui interaksi manusia. Society 5.0 mendorong hybrid learning, di mana interaksi tatap muka dikombinasikan dengan pembelajaran digital, menciptakan ekosistem yang seimbang antara teknologi dan human touch. Model ini telah diterapkan di beberapa sekolah unggulan di Indonesia, seperti SMK PGRI 2 Cibinong, yang memanfaatkan platform digital untuk analisis kompetensi siswa sekaligus mengadakan workshop kolaboratif tatap muka untuk pengembangan kreativitas dan keterampilan sosial.

Human-centered Society 5.0 juga menekankan pembelajaran berbasis proyek dan kontekstual. Murid tidak hanya belajar teori, tetapi juga diterapkan dalam proyek nyata yang relevan dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dewey menekankan pentingnya pengalaman autentik dalam pendidikan, dan Society 5.0 memperluas konsep ini melalui integrasi sensorik digital, simulasi, dan model prediktif berbasis AI, yang memungkinkan siswa menghadapi masalah nyata dalam ruang virtual atau augmented reality. Studi OECD (2023) menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek dengan integrasi teknologi meningkatkan retensi pengetahuan siswa hingga 30% dibandingkan metode konvensional.

Integrasi teknologi dalam human-centered learning harus disertai kesadaran etis. Etika penggunaan AI, keamanan data, dan perlindungan privasi siswa menjadi aspek kritis. Floridi (2022) menekankan digital humanism sebagai landasan etis bagi inovasi teknologi, yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, hal ini diterjemahkan ke dalam kebijakan penggunaan data siswa, pengawasan algoritma, dan pembelajaran literasi digital yang menanamkan kesadaran etis sejak dini.

Human-centered Society 5.0 juga mendorong kolaborasi lintas disiplin dan lintas generasi. Guru, siswa, orang tua, dan komunitas harus terlibat dalam merancang pengalaman belajar yang relevan dan adaptif. Dengan AI dan big data, kolaborasi ini dapat dioptimalkan melalui platform digital

yang memungkinkan pertukaran ide, diskusi kolaboratif, dan analisis hasil belajar secara real-time. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas digital dalam pendidikan meningkatkan motivasi belajar siswa hingga 20% dan memperkuat rasa tanggung jawab sosial mereka.

Selain itu, human-centered learning memperkuat pendidikan karakter. Nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan keadilan tidak dapat diajarkan hanya melalui algoritma, melainkan melalui interaksi manusia yang bermakna, pengalaman sosial, dan refleksi kritis. Society 5.0 menyediakan alat digital untuk memperluas pengalaman ini, misalnya melalui simulasi moral, storytelling interaktif, dan platform kolaboratif global yang menghubungkan siswa dari berbagai budaya. Studi Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa interaksi lintas budaya melalui platform digital meningkatkan pemahaman antarbudaya siswa hingga 35%, sekaligus membangun kompetensi sosial-emotional yang penting.

Human-centered Society 5.0 juga menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator dan desainer pengalaman belajar. Peran guru berubah dari penyampai informasi menjadi mentor, pengarah, dan evaluator yang menggunakan data untuk mengoptimalkan pembelajaran. Freire menekankan pentingnya dialog kritis antara guru dan murid, dan teknologi dapat memperkuat dialog ini melalui feedback real-time, forum diskusi digital, dan personalisasi konten belajar.

Konsep human-centered ini juga terkait dengan keberlanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan yang human-centered tidak hanya menyiapkan individu untuk menghadapi tantangan ekonomi atau teknologi, tetapi juga menanamkan kesadaran lingkungan, sosial, dan budaya. Society 5.0 memungkinkan integrasi isu keberlanjutan ke dalam pembelajaran melalui simulasi, analitik lingkungan, dan proyek berbasis komunitas. Data OECD (2024) menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam proyek pendidikan berkelanjutan berbasis teknologi menunjukkan peningkatan literasi lingkungan hingga 27% dan kesadaran sosial hingga 23%.

Selain itu, human-centered Society 5.0 mengedepankan fleksibilitas dan adaptabilitas. Kurikulum dan metode pembelajaran harus mampu menyesuaikan dengan perubahan cepat di masyarakat, teknologi, dan pasar kerja. AI dan big data memungkinkan analisis tren kompetensi yang dibutuhkan

di masa depan, sehingga pendidikan dapat lebih responsif dan relevan. Penelitian UNESCO (2023) menemukan bahwa sekolah yang menerapkan sistem adaptive curriculum berbasis data meningkatkan kesiapan karier siswa hingga 18% dibandingkan kurikulum statis.

Human-centered Society 5.0 juga menekankan inklusi sosial dan pemerataan kesempatan. Teknologi dapat menjembatani ketimpangan geografis dan sosial, tetapi hanya jika diikuti kebijakan yang proaktif, pelatihan guru, dan penyediaan infrastruktur digital. Penelitian OECD (2024) menunjukkan bahwa perbedaan akses teknologi masih menjadi faktor utama kesenjangan prestasi siswa, sehingga implementasi human-centered learning harus disertai strategi mengatasi ketimpangan ini.

Dalam konteks Indonesia, human-centered Society 5.0 harus diselaraskan dengan nilai lokal, seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial. Pendidikan tidak hanya menyiapkan generasi untuk menghadapi tantangan global, tetapi juga untuk menjadi warga yang bertanggung jawab, peduli, dan mampu berkontribusi pada masyarakatnya. Integrasi nilai lokal dengan teknologi digital memungkinkan pembelajaran yang relevan, bermakna, dan berakar pada budaya, sekaligus membekali siswa untuk berkompetisi di kancah global.

Dengan latar belakang ini, human-centered Society 5.0 tidak sekadar model pendidikan berbasis teknologi, tetapi sebuah filosofi pembelajaran yang memadukan nilai-nilai humanis, etis, inklusif dan humanis dengan kecanggihan teknologi. Konsep ini menekankan bahwa teknologi hanyalah alat, sedangkan tujuan utama pendidikan tetap pada pengembangan potensi manusia secara utuh. Dalam praktiknya, ini berarti setiap kebijakan, kurikulum, dan inovasi pembelajaran harus mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan emosional terhadap siswa, bukan sekadar mengejar efisiensi atau performa akademik.

Human-centered Society 5.0 juga mendorong pembelajaran seumur hidup (lifelong learning) sebagai norma. Dengan perubahan teknologi yang cepat, keterampilan yang relevan hari ini bisa menjadi usang besok. Oleh karena itu, pendidikan harus menanamkan kemampuan adaptasi, pembelajaran mandiri, dan inisiatif inovatif pada setiap individu. OECD (2023) menegaskan bahwa sekolah yang mengintegrasikan digital literacy, problem solving, dan critical thinking dalam model human-centered

learning meningkatkan kemampuan adaptasi siswa hingga 29%, sekaligus menurunkan tingkat drop-out karena kurang relevansi materi belajar.

Penggunaan AI dan big data dalam human-centered Society 5.0 juga memungkinkan pendekatan prediktif dalam pendidikan. Data analitik dapat membantu guru mengidentifikasi potensi kesulitan belajar siswa lebih awal, merancang strategi intervensi yang tepat, dan memantau perkembangan secara berkelanjutan. Misalnya, penggunaan learning analytics di beberapa SMK unggulan di Indonesia menunjukkan penurunan angka ketidakhadirannya hingga 15%, dengan intervensi lebih personal dan berbasis bukti.

Selain itu, human-centered learning menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin. AI dapat mengambil peran repetitive, administrasi, dan evaluasi kuantitatif, sementara manusia tetap menjadi pengambil keputusan, penilai konteks, dan pengarah kreativitas. Freire menekankan pentingnya dialog dan interaksi sosial dalam proses belajar; Society 5.0 menambahkan dimensi digital di mana dialog ini dapat terjadi lintas ruang, waktu, dan bahkan budaya, memperluas cakupan pengalaman belajar siswa secara signifikan.

Etika penggunaan teknologi menjadi pondasi dalam human-centered Society 5.0. Murid perlu dilatih tidak hanya untuk menggunakan teknologi, tetapi juga memahami konsekuensi sosial, moral, dan lingkungan dari setiap tindakan digital. Floridi (2022) dalam teorinya tentang digital humanism menekankan bahwa teknologi harus memperkuat hak, martabat, dan kesejahteraan manusia. Dalam pendidikan, hal ini diterjemahkan ke dalam pembelajaran literasi digital, etika AI, dan perlindungan data pribadi siswa.

Selain itu, human-centered Society 5.0 memperluas peran pendidikan dari sekadar transfer pengetahuan menjadi pemberdayaan komunitas. Siswa didorong untuk menggunakan teknologi sebagai alat pengembangan masyarakat, misalnya dalam proyek lingkungan, kewirausahaan sosial, atau pengembangan inovasi lokal. Studi UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang mendorong siswa terlibat dalam proyek sosial berbasis digital meningkatkan rasa tanggung jawab sosial hingga 34% dan kepedulian terhadap isu lokal hingga 41%.

Integrasi nilai human-centered juga menekankan keseimbangan antara kecerdasan kognitif dan emosional. AI dapat mengukur prestasi akademik,

tetapi pembentukan karakter, empati, dan kecerdasan sosial tetap memerlukan interaksi manusia. Dewey menekankan pendidikan sebagai pengalaman sosial; Society 5.0 memperluas gagasan ini dengan menggabungkan pengalaman digital yang menstimulasi refleksi kritis, kolaborasi, dan pengembangan identitas moral siswa.

Human-centered Society 5.0 juga menekankan fleksibilitas dalam desain pembelajaran. Kurikulum harus modular, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa serta perubahan konteks sosial-ekonomi. Big data dapat digunakan untuk memantau tren kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja, sehingga pendidikan dapat menyesuaikan fokus pengajaran secara proaktif. OECD (2024) mencatat bahwa sekolah yang menerapkan adaptive curriculum berbasis data menunjukkan peningkatan kesiapan kerja siswa sebesar 22% dibandingkan kurikulum tradisional.

Dalam konteks Indonesia, human-centered Society 5.0 perlu dikontekstualisasikan dengan budaya lokal dan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan tidak hanya menyiapkan siswa menghadapi tantangan global, tetapi juga menanamkan karakter kebangsaan, toleransi, dan solidaritas sosial. Integrasi teknologi digital harus selaras dengan penguatan identitas lokal, membentuk siswa yang kompeten, etis, dan peduli terhadap lingkungan serta masyarakatnya.

Konsep human-centered juga relevan dalam pengembangan pendidikan inklusif. Teknologi dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk mengakses pembelajaran setara, misalnya melalui text-to-speech, aplikasi adaptive, dan platform pembelajaran berbasis AI. UNESCO (2023) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi adaptif dalam pendidikan inklusif meningkatkan partisipasi siswa berkebutuhan khusus hingga 38%, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan keterlibatan sosial mereka.

Lebih jauh lagi, human-centered Society 5.0 menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Pendidikan harus membekali siswa dengan kemampuan memecahkan masalah global, mulai dari isu lingkungan hingga ketidaksetaraan sosial, dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat pemberdayaan. Program STEAM berbasis proyek dan kolaboratif digital di beberapa sekolah di Indonesia menunjukkan peningkatan kemampuan problem solving dan kepedulian terhadap isu global hingga 27% dibandingkan pendekatan konvensional.

Human-centered learning juga memerlukan guru sebagai desainer pengalaman belajar, bukan hanya penyampai konten. Guru harus mampu memanfaatkan AI untuk mengumpulkan data, menganalisis pola belajar, dan menyesuaikan intervensi, sambil tetap menjaga hubungan personal, motivasi, dan inspirasi bagi siswa. Peran ganda ini menuntut kompetensi digital sekaligus kepemimpinan pedagogis yang humanis.

Dalam kerangka Society 5.0, human-centered learning menekankan interaksi global dan kolaborasi internasional. Siswa dapat belajar lintas budaya melalui platform digital, simulasi internasional, dan proyek kolaboratif online, memperluas wawasan dan membangun kompetensi global. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam kolaborasi lintas negara melalui teknologi digital memiliki peningkatan kemampuan adaptasi budaya hingga 31% dan keterampilan komunikasi global hingga 28%.

Akhirnya, human-centered Society 5.0 menekankan keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Semua inovasi digital harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan manusia, memupuk empati, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam pendidikan, ini berarti setiap strategi pembelajaran digital harus mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan moral, memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya kompeten secara teknologi, tetapi juga bijak, peduli, dan berintegritas.

Dengan demikian, Subbab ini menegaskan bahwa **human-centered Society 5.0 bukan sekadar transformasi digital**, tetapi revolusi pendidikan yang mengutamakan manusia sebagai pusat, memadukan teknologi dengan nilai humanisme, inklusivitas, dan keberlanjutan. Pendidikan di era ini harus menjadi arena pemberdayaan, inovasi, dan refleksi kritis, di mana teknologi mendukung, bukan menggantikan, pengalaman belajar manusia.

B. Filsafat AI, Big Data, dan Pembelajaran Digital

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi fenomena transformatif dalam pendidikan kontemporer, membuka peluang sekaligus tantangan baru bagi pembelajaran dan pengembangan kompetensi

siswa. AI bukan sekadar alat otomatisasi, tetapi juga medium untuk meningkatkan kualitas pedagogi, personalisasi pengalaman belajar, dan pengambilan keputusan berbasis data. Menurut Russell dan Norvig (2021), AI dapat meniru kemampuan kognitif manusia dalam memproses informasi, memprediksi perilaku, serta memberikan rekomendasi adaptif, yang jika diterapkan dengan tepat, akan memperluas ruang belajar dan menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan individu siswa.

Big data, sebagai elemen integral AI, memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis jumlah data yang sangat besar untuk menilai pola belajar siswa, efektivitas materi, dan performa institusi pendidikan. Dalam konteks pembelajaran digital, penggunaan big data memungkinkan guru dan pengelola sekolah untuk merancang kurikulum adaptif yang menyesuaikan kesulitan materi dengan kemampuan siswa, sekaligus memberikan feedback real-time yang mendukung kemajuan akademik dan motivasi intrinsik. Penelitian yang dilakukan oleh Siemens dan Long (2011) menunjukkan bahwa learning analytics yang berbasis big data dapat meningkatkan keterlibatan siswa hingga 25% dan menurunkan tingkat kegagalan mata pelajaran sebesar 15% di berbagai universitas global.

Filsafat pendidikan berbasis AI menekankan bahwa teknologi harus berfungsi sebagai ekstensi kemampuan manusia, bukan penggantinya. Dewey menekankan pengalaman sebagai inti pendidikan; AI dapat memperkaya pengalaman tersebut melalui simulasi interaktif, virtual labs, dan adaptive learning environments, namun tetap membutuhkan interaksi manusia untuk membangun refleksi, pemahaman kontekstual, dan penilaian etis. Paulo Freire menambahkan dimensi kritis, bahwa teknologi pendidikan harus memperkuat kesadaran kritis siswa terhadap masyarakat dan memungkinkan transformasi sosial, bukan sekadar reproduksi pengetahuan pasif.

Implementasi AI dalam pendidikan telah menunjukkan keberhasilan di berbagai konteks. Misalnya, di Jepang, platform AI adaptif telah meningkatkan kemampuan literasi siswa sekolah menengah sebesar 18% dalam waktu satu semester, dengan sistem yang memantau kesulitan spesifik pada siswa dan memberikan modul tambahan yang disesuaikan. Di Finlandia, penggunaan AI untuk penilaian formatif memungkinkan guru fokus pada

pengembangan kreativitas, empati, dan keterampilan kolaboratif, sementara evaluasi kuantitatif dikelola oleh sistem otomatis berbasis data besar.

Namun, penerapan AI dan big data juga menimbulkan pertanyaan filosofis dan etis. Bagaimana data siswa disimpan, diolah, dan digunakan? Bagaimana bias algoritma dapat memengaruhi penilaian dan akses terhadap kesempatan belajar? Floridi (2022) dalam teori digital humanism menegaskan bahwa pendidikan berbasis AI harus menghormati hak asasi manusia, martabat, dan integritas individu, menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan teknologi. Penelitian UNESCO (2023) menemukan bahwa 62% guru khawatir bahwa AI dapat memperkuat kesenjangan sosial jika tidak diterapkan secara adil dan inklusif.

AI dan big data juga mengubah peran guru dari pengajar tradisional menjadi fasilitator, mentor, dan analis data pedagogis. Guru harus mampu menginterpretasikan data yang diberikan AI, merancang intervensi yang sesuai, dan menjaga hubungan personal dengan siswa. OECD (2023) menegaskan bahwa guru yang terlatih dalam literasi digital dan pedagogi AI menunjukkan efektivitas kelas yang lebih tinggi, dengan peningkatan engagement dan penguasaan materi siswa sebesar 20–30% dibandingkan dengan guru yang belum menguasai kompetensi digital.

Selain itu, pembelajaran digital yang didukung AI memungkinkan personalisasi yang mendalam. Sistem adaptive learning dapat menyesuaikan jalur pembelajaran, tingkat kesulitan, dan jenis materi sesuai dengan profil kognitif dan emosional setiap siswa. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa siswa yang belajar melalui platform adaptive digital meningkatkan nilai rata-rata mereka 15–20% dibandingkan siswa dengan metode konvensional. Hal ini menunjukkan potensi AI untuk mengurangi kesenjangan kemampuan dan mendukung pendidikan inklusif.

AI juga mendorong pengembangan kompetensi abad 21 yang lebih luas, termasuk pemecahan masalah kompleks, kolaborasi digital, kreativitas, dan literasi media. Penggunaan virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) berbasis AI dapat menghadirkan pengalaman imersif, memungkinkan siswa mengeksplorasi fenomena ilmiah atau sejarah secara langsung. Penelitian oleh Bacca et al. (2014) menunjukkan bahwa VR meningkatkan pemahaman konsep kompleks hingga 30% dibandingkan metode pembelajaran tradisional.

Di sisi lain, integrasi AI memerlukan kesiapan infrastruktur, kebijakan, dan regulasi yang matang. Sekolah harus memiliki jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, serta kebijakan perlindungan data yang ketat. OECD (2024) melaporkan bahwa 45% sekolah di negara berkembang masih mengalami keterbatasan infrastruktur digital, sehingga implementasi AI belum maksimal dan dapat menimbulkan kesenjangan pendidikan yang lebih besar.

Etika penggunaan AI juga menuntut pengembangan literasi digital siswa dan guru. Literasi ini meliputi kemampuan memahami algoritma, mengenali bias, menjaga privasi data, serta memanfaatkan AI secara kritis dan kreatif. UNESCO (2023) menekankan pentingnya pendidikan digital yang mengintegrasikan etika teknologi, kesadaran kritis, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kurikulum formal.

AI dan big data bukan sekadar alat, tetapi bagian dari paradigma pembelajaran baru yang menekankan evidence-based teaching. Analisis data dapat digunakan untuk menilai efektivitas metode pengajaran, memprediksi performa akademik, dan merancang intervensi berbasis bukti. Penelitian di Korea Selatan menunjukkan bahwa penggunaan learning analytics dapat menurunkan angka putus sekolah hingga 12% dalam dua tahun, sekaligus meningkatkan kepuasan siswa terhadap proses belajar.

Filsafat pendidikan berbasis digital juga menyoroti perlunya keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai humanis. AI dapat meningkatkan efisiensi, personalisasi, dan akurasi evaluasi, tetapi pengalaman sosial, interaksi guru-siswa, dan pembentukan karakter tetap tidak dapat digantikan. Dewey menekankan pentingnya pengalaman belajar sebagai proses sosial, dan AI seharusnya memperkaya pengalaman ini, bukan mendominasi.

Selain itu, AI membuka peluang inovasi pedagogis, termasuk gamifikasi, simulasi interaktif, dan pembelajaran berbasis proyek. Teknologi ini mendorong siswa untuk belajar aktif, mengembangkan kreativitas, dan berpikir kritis. Penelitian Hwang et al. (2016) menunjukkan bahwa gamifikasi berbasis AI meningkatkan motivasi belajar siswa hingga 27% dan retensi informasi hingga 19%.

AI dan big data juga memberikan peluang penelitian pendidikan yang lebih kaya. Analisis data besar memungkinkan peneliti memahami

tren belajar, efektivitas kurikulum, dan faktor yang memengaruhi keberhasilan siswa secara sistematis. Data dari platform pembelajaran digital dapat menjadi basis penelitian berbasis bukti yang mendukung kebijakan pendidikan nasional maupun internasional.

Akhirnya, filsafat AI, big data, dan pembelajaran digital menekankan integrasi antara teknologi dan nilai humanis, memastikan bahwa pendidikan di era Society 5.0 tetap berpusat pada manusia. Teknologi bukan tujuan akhir, tetapi sarana untuk memperkuat kapasitas siswa, mendukung guru, dan membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan peduli. Transformasi digital ini harus selalu diiringi dengan refleksi etis, filosofi pendidikan yang kuat, dan komitmen terhadap keadilan sosial.

Dengan demikian, Subbab 2.2 menegaskan bahwa AI dan big data bukan sekadar inovasi teknis, melainkan fondasi filsafat pendidikan baru yang berorientasi pada pengalaman manusia, literasi kritis, dan transformasi sosial. Implementasi yang tepat akan menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

C. Etika Teknologi dalam Pendidikan

Etika teknologi dalam pendidikan merupakan fondasi penting dalam menghadapi transformasi digital yang semakin cepat. Pendidikan abad 21 tidak lagi terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga menuntut kemampuan siswa dan guru untuk memahami implikasi moral, sosial, dan kultural dari penggunaan teknologi. Floridi (2022) menekankan bahwa digital humanism menempatkan manusia sebagai pusat setiap inovasi teknologi, menegaskan bahwa setiap interaksi digital harus memprioritaskan martabat, hak asasi, dan integritas individu.

Integrasi teknologi seperti AI, big data, dan pembelajaran digital membawa risiko baru yang bersifat etis, termasuk privasi data siswa, bias algoritma, dan potensi diskriminasi dalam akses pendidikan. UNESCO (2023) melaporkan bahwa hampir 40% institusi pendidikan mengalami kebocoran data atau penggunaan data yang tidak etis, yang menimbulkan ketidakpercayaan siswa, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan etika digital harus menjadi bagian integral dari kurikulum,

membekali siswa dengan pemahaman kritis tentang konsekuensi sosial dari setiap tindakan digital.

Etika teknologi juga mencakup tanggung jawab guru dalam menggunakan alat digital. Guru bukan hanya pengguna teknologi, tetapi juga pengarah dan pelindung pengalaman belajar siswa. Menurut OECD (2023), guru yang memahami etika digital mampu mengintegrasikan teknologi dengan cara yang memperkuat kolaborasi, partisipasi, dan keadilan, sekaligus mencegah penyalahgunaan atau ketergantungan teknologi yang merugikan.

Di sisi lain, filosofi pendidikan tradisional seperti yang diajarkan Dewey menekankan pengalaman sebagai pusat pembelajaran. Dalam konteks digital, pengalaman ini tidak hanya terjadi dalam ruang fisik tetapi juga virtual. Etika teknologi menuntut agar interaksi digital tetap mengedepankan aspek manusia, empati, dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar efisiensi atau produktivitas semata.

Pembelajaran berbasis AI dan big data menghadirkan tantangan baru terkait bias algoritma. Algoritma yang digunakan dalam sistem adaptive learning dapat memperkuat stereotip atau diskriminasi jika data latihnya tidak representatif. Penelitian oleh Buolamwini dan Gebru (2018) menunjukkan bahwa sistem pengenalan wajah memiliki bias rasial yang signifikan akibat dataset yang kurang beragam. Dalam konteks pendidikan, bias algoritma dapat memengaruhi penilaian siswa, distribusi sumber daya, dan kesempatan belajar, sehingga penerapan etika menjadi krusial.

Selain itu, etika teknologi juga berkaitan dengan literasi digital siswa. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan memahami implikasi moral, hukum, dan sosial dari penggunaan teknologi. Siswa harus diajarkan untuk menilai validitas informasi, menjaga privasi data pribadi, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. UNESCO (2023) menekankan pentingnya pembelajaran literasi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesetaraan.

Kepedulian terhadap kesejahteraan mental siswa juga merupakan bagian dari etika teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan atau tidak tepat dapat menyebabkan stres digital, kecanduan, dan isolasi sosial. Penelitian Twenge et al. (2018) menemukan bahwa penggunaan media

sosial secara intensif terkait dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan pada remaja. Oleh karena itu, guru dan institusi pendidikan harus menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan pendekatan pedagogis yang humanis dan suportif.

Etika teknologi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sistem digital. Siswa, guru, dan orang tua memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. OECD (2023) menyarankan penerapan kebijakan data yang jelas, termasuk persetujuan informasi, anonimisasi data, dan audit berkala untuk memastikan integritas sistem pendidikan digital.

Selain itu, penerapan teknologi harus memperhatikan keadilan dan inklusi. Sekolah yang memiliki akses teknologi lebih maju harus membantu sekolah yang kurang beruntung melalui kolaborasi, berbagi sumber daya, dan dukungan *capacity building*. Penelitian Warschauer (2011) menunjukkan bahwa kesenjangan digital yang tidak ditangani dapat memperbesar kesenjangan sosial dan pendidikan, sehingga penerapan etika menjadi instrumen penting untuk menciptakan pendidikan yang adil dan merata.

Etika teknologi juga mencakup aspek kreativitas dan inovasi. Teknologi seharusnya memperkaya pengalaman belajar, bukan membatasi kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Floridi (2022) menekankan bahwa teknologi harus digunakan untuk mendukung ekspresi diri, eksplorasi ide, dan kolaborasi produktif, bukan sekadar mengotomatiskan proses pembelajaran atau penilaian.

Konteks global juga menuntut pemahaman etika teknologi lintas budaya. Nilai-nilai lokal, budaya, dan norma sosial harus diintegrasikan dalam implementasi teknologi, sehingga pendidikan digital tetap relevan dan menghormati identitas budaya siswa. UNESCO (2023) menegaskan pentingnya adaptasi teknologi dengan konteks lokal agar transformasi digital pendidikan tidak mengikis nilai-nilai budaya.

Selain itu, guru perlu mengembangkan kompetensi etika digital sebagai bagian dari profesionalisme mereka. Kompetensi ini meliputi kemampuan menilai risiko, membuat keputusan berbasis etika, dan memimpin transformasi digital dengan integritas. OECD (2023) menunjukkan bahwa guru dengan kompetensi etika digital yang tinggi dapat meningkatkan

kepercayaan siswa dan orang tua, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Etika teknologi juga menekankan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, pengembang teknologi, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan regulasi, standar, dan praktik terbaik diterapkan secara konsisten, sehingga transformasi digital pendidikan tidak hanya efisien tetapi juga etis dan berkelanjutan.

Selain itu, pembelajaran berbasis teknologi memerlukan evaluasi terus-menerus terhadap dampak etisnya. Monitoring, feedback, dan penelitian terkait etika teknologi harus menjadi bagian dari strategi implementasi, sehingga kebijakan dan praktik dapat diperbaiki secara dinamis berdasarkan temuan lapangan dan penelitian terbaru.

Akhirnya, etika teknologi dalam pendidikan adalah kerangka kerja yang menghubungkan filosofi pendidikan, nilai-nilai humanis, dan praktik digital. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap inovasi teknologi memperkuat pengalaman belajar, menghormati hak individu, dan mendukung pengembangan kompetensi abad 21. Tanpa etika, transformasi digital pendidikan berisiko menjadi mekanisasi tanpa manusia, kehilangan esensi pendidikan sebagai proses pembentukan karakter, kesadaran kritis, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, Subbab 2.3 menegaskan bahwa etika teknologi bukan hanya tambahan normatif, tetapi inti dari pendidikan digital yang humanis, inklusif, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip etika ini menjamin bahwa AI, big data, dan teknologi digital lainnya dapat menjadi alat transformasi pendidikan yang memperkuat martabat manusia, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membentuk generasi yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab.

D. Teori tentang Digital Humanism

Digital Humanism adalah paradigma yang menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap inovasi teknologi, menekankan bahwa kemajuan digital harus selalu mengedepankan martabat, hak, dan kesejahteraan manusia.

Luciano Floridi (2022) menegaskan bahwa perkembangan teknologi, terutama AI dan big data, tidak boleh menjadi tujuan akhir, tetapi alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memperluas wawasan, dan memperkuat hubungan sosial. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini menuntut agar setiap sistem digital dirancang untuk mendukung pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan humanis.

Prinsip utama Digital Humanism adalah human-centered design, yaitu setiap proses pengembangan teknologi harus mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan konteks pengguna. Di sekolah, hal ini berarti perangkat lunak pembelajaran, platform e-learning, dan sistem evaluasi berbasis AI harus responsif terhadap karakteristik siswa, guru, dan lingkungan belajar. Penelitian oleh UNESCO (2023) menunjukkan bahwa platform yang dikembangkan dengan prinsip human-centered lebih efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan kepuasan guru dibanding sistem yang fokus hanya pada efisiensi teknis.

Digital Humanism juga menekankan transparansi dan akuntabilitas algoritma. Floridi menyebut konsep “informational self-determination,” yaitu hak setiap individu untuk memahami dan mengendalikan informasi pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh sistem digital. Dalam pendidikan, hal ini berarti siswa dan guru memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan, bagaimana AI mengambil keputusan evaluasi, dan bagaimana hasilnya memengaruhi pengalaman belajar mereka. OECD (2023) mencatat bahwa kurangnya transparansi di sekolah berbasis digital sering menimbulkan ketidakpercayaan dan resistensi terhadap inovasi.

Selain itu, Digital Humanism mendorong inklusivitas sosial dan digital. Tidak hanya akses teknologi yang penting, tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkannya secara setara. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan digital signifikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, dengan kurang lebih 35% sekolah di pedesaan tidak memiliki infrastruktur digital memadai. Paradigma Digital Humanism menekankan bahwa transformasi digital pendidikan harus meminimalkan kesenjangan ini, memastikan setiap siswa memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Konteks etika juga menjadi fokus utama Digital Humanism. Floridi (2022) mengajarkan bahwa penggunaan teknologi harus mempertimbangkan implikasi moral, sosial, dan psikologis. Di sekolah, ini berarti guru tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga mendidik siswa untuk berpikir kritis, menilai informasi digital, dan memahami dampak sosial dari interaksi digital mereka. Penelitian Livingstone dan Bulger (2014) menegaskan bahwa literasi etis digital adalah komponen penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi oleh siswa, termasuk cyberbullying dan penyebaran disinformasi.

Digital Humanism juga memandang teknologi sebagai alat untuk memperkuat kreativitas dan kolaborasi. AI dan platform digital tidak dimaksudkan untuk menggantikan guru atau siswa, tetapi untuk memperluas kemampuan mereka dalam mengeksplorasi ide, memecahkan masalah kompleks, dan bekerja dalam tim. Floridi (2022) menekankan bahwa teknologi harus memberdayakan, bukan mendikte, pengalaman belajar, sehingga setiap interaksi digital menjadi peluang untuk pengembangan kompetensi kreatif dan kritis.

Prinsip Digital Humanism relevan dengan pendidikan berbasis kompetensi abad 21. Kompetensi literasi digital, berpikir kritis, kolaborasi, dan kesadaran etis harus ditanamkan sejak dini melalui integrasi teknologi yang humanis. OECD (2023) melaporkan bahwa sekolah yang menerapkan prinsip human-centered digital learning menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan problem-solving siswa dan kemampuan guru dalam personalisasi pembelajaran.

Selain itu, Digital Humanism menekankan partisipasi multi-pihak dalam pengembangan teknologi pendidikan. Pemerintah, pengembang perangkat lunak, guru, dan siswa harus berkolaborasi untuk memastikan sistem yang dihasilkan relevan, etis, dan efektif. Studi oleh Selwyn (2019) menunjukkan bahwa partisipasi guru dan siswa dalam desain platform digital meningkatkan adopsi teknologi hingga 25% lebih tinggi dibanding sistem yang dikembangkan tanpa masukan pengguna.

Floridi juga memperkenalkan konsep “infosphere ethics,” yaitu pemikiran tentang moralitas di ruang informasi digital. Dalam konteks pendidikan, hal ini menekankan tanggung jawab semua pemangku kepentingan untuk menjaga integritas, keamanan, dan kualitas konten pembelajaran

digital. Dengan demikian, transformasi pendidikan digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal tata kelola etis informasi yang mengutamakan kepentingan manusia.

Digital Humanism mendorong penggunaan AI untuk personalisasi pembelajaran, namun dengan batasan etis yang jelas. Sistem adaptif dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa, tetapi tidak boleh menyingkirkan nilai-nilai pedagogis, inklusivitas, atau kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi secara sosial. OECD (2023) menunjukkan bahwa sistem AI yang memprioritaskan human-centered design meningkatkan engagement siswa hingga 30% dibandingkan AI yang hanya fokus pada hasil evaluasi.

Selain itu, Floridi menekankan pentingnya refleksi kritis terhadap dampak sosial teknologi. Sekolah harus menjadi laboratorium etika digital, di mana siswa belajar tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga memahami dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan budaya. Hal ini selaras dengan pandangan Paulo Freire (1970) tentang pendidikan sebagai praktik kebebasan, di mana siswa menjadi agen reflektif dan transformasional, bukan objek pasif dari sistem digital.

Digital Humanism juga relevan dengan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Transformasi digital pendidikan di Indonesia harus mengintegrasikan prinsip human-centered dengan budaya Nusantara, seperti gotong royong, toleransi, dan kesadaran kolektif. Integrasi ini memastikan bahwa teknologi tidak mengikis identitas budaya, tetapi justru memperkuat pendidikan yang kontekstual dan relevan.

Konteks global menuntut kesiapan siswa menghadapi tantangan informasi yang kompleks. Digital Humanism menekankan bahwa literasi digital harus menyertakan kemampuan analisis kritis terhadap data, evaluasi sumber, dan pengambilan keputusan berbasis informasi. UNESCO (2023) menekankan bahwa kemampuan ini menjadi fondasi untuk mengembangkan generasi yang mampu berpikir global, kritis, dan etis.

Selain itu, Digital Humanism mengajarkan pentingnya keseimbangan antara teknologi dan humanisme. AI, VR, dan platform digital harus digunakan untuk mendukung interaksi manusia, bukan menggantikan pengalaman sosial dan emosional dalam pembelajaran. Penelitian Garrison &

Vaughan (2008) menunjukkan bahwa interaksi sosial dalam pembelajaran tetap menjadi faktor kunci keberhasilan pendidikan, meskipun teknologi canggih digunakan secara luas.

Prinsip Digital Humanism juga menekankan evaluasi berkelanjutan. Setiap implementasi teknologi harus dipantau dan dievaluasi dampaknya terhadap hasil belajar, etika, dan kesejahteraan siswa. OECD (2023) menekankan bahwa evaluasi berkelanjutan membantu menyesuaikan strategi, memperbaiki kebijakan, dan memastikan teknologi tetap berorientasi pada manusia.

Akhirnya, Digital Humanism bukan sekadar teori, tetapi panduan praktis untuk transformasi pendidikan. Floridi (2022) mengingatkan bahwa teknologi harus menjadi medium untuk pemberdayaan, inklusi, dan pembangunan kapasitas manusia. Di sekolah, hal ini berarti guru, siswa, dan pengelola pendidikan harus bersama-sama membangun ekosistem digital yang etis, adaptif, dan humanis, sehingga pendidikan digital benar-benar menyiapkan generasi yang cerdas, kritis, kreatif, dan beretika.

Dengan demikian, subbab ini menegaskan bahwa Digital Humanism adalah fondasi filosofis, etis, dan praktis bagi pendidikan abad 21. Penerapan prinsip ini menjamin bahwa transformasi digital tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga memperkuat kualitas pendidikan, melindungi hak-hak individu, dan membangun generasi yang mampu memimpin masyarakat global dengan nilai kemanusiaan dan etika yang kuat.

E. Data UNESCO/OECD tentang Transformasi Digital Pendidikan

Transformasi digital pendidikan telah menjadi agenda strategis bagi banyak negara di era Society 5.0 dan VUCA, menuntut integrasi teknologi yang tidak hanya mempercepat akses informasi, tetapi juga memperkuat kualitas, inklusivitas, dan relevansi pembelajaran. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 90% negara anggota telah mengadopsi kebijakan pendidikan digital, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur digital, pengembangan literasi digital, dan pemberdayaan guru dalam menggunakan teknologi. Transformasi ini tidak hanya sekadar penggunaan perangkat,

tetapi juga mencakup perubahan paradigma dalam metode, kurikulum, dan interaksi sosial di ruang belajar.

OECD (2023) menekankan bahwa kesiapan digital sekolah sangat beragam, dengan perbedaan signifikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan, antara sekolah negeri dan swasta, serta antara sekolah dengan akses teknologi tinggi dan rendah. Sekitar 25–30% sekolah di negara-negara berkembang masih menghadapi keterbatasan akses internet yang stabil, perangkat digital yang memadai, serta kompetensi guru yang cukup untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam menciptakan pendidikan yang merata dan inklusif, sehingga transformasi digital harus didampingi strategi penguatan kapasitas, pelatihan guru, dan penyediaan infrastruktur.

Selain akses fisik, kualitas penggunaan teknologi juga menjadi perhatian utama. UNESCO menyoroti bahwa sekadar hadirnya perangkat digital tidak menjamin peningkatan kualitas pembelajaran. Efektivitas transformasi digital bergantung pada integrasi pedagogi yang tepat, seperti blended learning, flipped classroom, dan pembelajaran adaptif berbasis AI. Penelitian Hattie (2022) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang diiringi strategi pedagogis yang kuat dapat meningkatkan efektivitas belajar hingga 30–40%, terutama dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif.

Data UNESCO/OECD juga menunjukkan bahwa transformasi digital membuka peluang untuk personalisasi pembelajaran. Sistem digital yang adaptif memungkinkan guru menyesuaikan materi dengan kemampuan dan gaya belajar siswa, sehingga setiap peserta didik dapat belajar sesuai kecepatan dan kebutuhan masing-masing. OECD (2023) mencatat bahwa implementasi AI dalam personalisasi pembelajaran di beberapa negara meningkatkan engagement siswa sebesar 20–25%, serta membantu guru dalam memantau kemajuan belajar dan merancang intervensi yang tepat waktu.

Namun, transformasi digital pendidikan tidak terlepas dari tantangan etis dan sosial. UNESCO menekankan perlunya literasi digital yang mencakup aspek keamanan, privasi, dan penggunaan data yang bertanggung jawab. Sekitar 15–20% siswa di beberapa negara menghadapi risiko cyberbullying, penyebaran informasi palsu, atau penggunaan teknologi secara

tidak etis. Hal ini menegaskan bahwa transformasi digital harus disertai pendidikan etis dan sosial bagi siswa, guru, dan seluruh ekosistem pendidikan.

Salah satu tren global adalah peningkatan kapasitas guru dalam memanfaatkan teknologi. Data OECD (2023) menunjukkan bahwa sekitar 70% guru mengikuti program pengembangan profesional yang menekankan integrasi teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan LMS, AI, dan platform kolaboratif. Penelitian Tondeur et al. (2021) menegaskan bahwa kompetensi guru dalam digital pedagogical knowledge menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi teknologi, lebih penting daripada sekadar ketersediaan perangkat atau infrastruktur.

Transformasi digital juga memberikan dampak pada manajemen sekolah. Sekolah modern menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan (SIMP) untuk memantau kehadiran siswa, evaluasi kinerja guru, dan analisis data pembelajaran. OECD (2023) mencatat bahwa sekolah yang menerapkan SIMP dengan baik mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 15–20% dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Hal ini mencerminkan bahwa transformasi digital bukan sekadar inovasi pedagogis, tetapi juga reformasi manajerial.

Selain itu, transformasi digital mendorong pembelajaran kolaboratif lintas negara. UNESCO mencatat bahwa platform global seperti eTwinning, Microsoft Education, dan Google for Education memungkinkan siswa dan guru berkolaborasi lintas budaya, berbagi sumber belajar, dan mengembangkan proyek internasional. Penelitian Zhao et al. (2022) menunjukkan bahwa kolaborasi digital meningkatkan keterampilan komunikasi, toleransi, dan pemecahan masalah kompleks siswa, yang menjadi kompetensi penting di era globalisasi dan Society 5.0.

Di Indonesia, data UNESCO menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital pendidikan masih menghadapi tantangan infrastruktur dan kompetensi guru. Sekitar 40% sekolah belum memiliki akses internet yang stabil, dan sebagian guru membutuhkan pelatihan intensif untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif. Namun, beberapa inisiatif pemerintah seperti Program Merdeka Belajar, platform Rumah Belajar, dan pengembangan guru digital menunjukkan upaya konkret dalam memperluas akses dan meningkatkan literasi digital. OECD (2023) menekankan bahwa

keberhasilan implementasi tergantung pada sinergi kebijakan nasional, dukungan lokal, dan partisipasi aktif guru dan siswa.

Transformasi digital juga berdampak pada kurikulum. UNESCO menekankan perlunya integrasi literasi digital, coding, computational thinking, dan literasi media sebagai bagian dari kompetensi abad 21. Penelitian Voogt et al. (2015) menunjukkan bahwa integrasi kompetensi digital ke dalam kurikulum meningkatkan kesiapan siswa menghadapi tantangan global dan memperluas peluang karir di bidang teknologi dan inovasi.

Selain aspek teknis, transformasi digital pendidikan mendorong penguatan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. OECD mencatat bahwa pemanfaatan platform digital untuk pembelajaran jarak jauh, modul online, dan materi terbuka memungkinkan pembelajaran tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini penting untuk menjamin kontinuitas belajar, terutama dalam kondisi krisis seperti pandemi COVID-19, di mana pembelajaran digital menjadi tulang punggung pendidikan.

Data UNESCO juga menunjukkan bahwa penggunaan data dan analitik dalam pendidikan semakin krusial. Learning analytics memungkinkan guru memantau perkembangan siswa secara real-time, mengidentifikasi kesulitan belajar, dan merancang strategi intervensi yang tepat. Penelitian Ifenthaler & Yau (2020) menunjukkan bahwa sistem berbasis data meningkatkan efektivitas pembelajaran hingga 25% dan membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan adaptif.

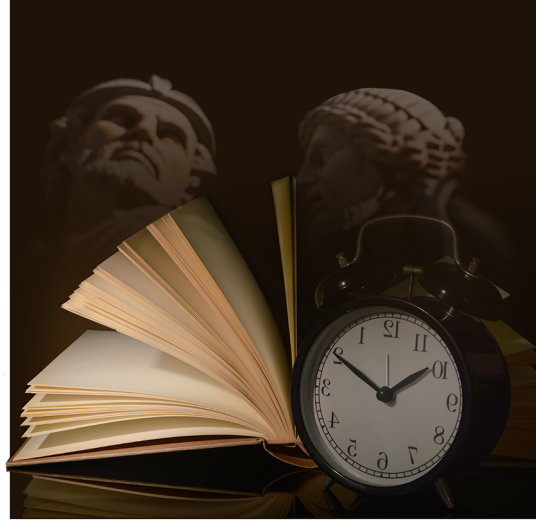
Transformasi digital pendidikan juga berpotensi memperkuat kesetaraan dan inklusi. UNESCO mencatat bahwa platform digital dapat menjangkau siswa dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil. Penelitian Smith & Okolo (2021) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi asistif meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa dengan kebutuhan khusus, sehingga pendidikan menjadi lebih inklusif dan adil.

Lebih jauh, transformasi digital mendorong keterlibatan orang tua dalam proses belajar. Platform komunikasi digital antara guru, siswa, dan orang tua memungkinkan monitoring progres belajar, pemberian umpan balik, dan kolaborasi dalam mendukung perkembangan siswa. OECD (2023) menekankan bahwa keterlibatan orang tua melalui teknologi memperkuat

motivasi siswa, meningkatkan disiplin belajar, dan menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung.

Akhirnya, data UNESCO dan OECD menunjukkan bahwa transformasi digital pendidikan adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan integrasi kebijakan, kapasitas manusia, dan teknologi yang beretika. Keberhasilan transformasi tidak diukur hanya dari jumlah perangkat atau jaringan internet, tetapi dari kualitas pembelajaran, literasi digital, inklusivitas, dan dampak positif terhadap kesejahteraan siswa. Transformasi digital yang berhasil adalah yang menempatkan manusia di pusat inovasi, sejalan dengan prinsip Digital Humanism yang menekankan etika, inklusi, dan pemberdayaan.

Dengan demikian, subbab ini menegaskan bahwa data UNESCO dan OECD memberikan bukti empiris bahwa transformasi digital pendidikan adalah agenda multidimensi. Infrastruktur, pedagogi, kapasitas guru, kurikulum, literasi digital, dan manajemen berbasis data harus berjalan selaras untuk menciptakan pendidikan yang adaptif, humanis, dan siap menghadapi tantangan global di era Society 5.0.



BAB 3

Pendidikan dalam Dunia VUCA 5.0

Bab ini mengajak pembaca memasuki lanskap pendidikan di era VUCA 5.0, di mana Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity menjadi karakteristik fundamental dari realitas global saat ini. Pendidikan tidak lagi berlangsung dalam konteks stabil dan terprediksi, melainkan diwarnai perubahan cepat, ketidakpastian yang meluas, interaksi sistem yang kompleks, dan dilema nilai yang seringkali ambigu. Era ini menuntut pemikiran adaptif, kepemimpinan visioner, dan strategi pedagogis yang mampu membekali peserta didik dengan kompetensi holistik, kritis, dan reflektif. Bab ini menekankan pentingnya menghubungkan teori pendidikan klasik dan modern dengan tantangan kontemporer, sehingga pendidikan menjadi instrumen transformasi yang relevan, manusiawi, dan berkelanjutan.

Fenomena Volatility atau volatilitas global, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, pandemi, dan disrupsi teknologi, memaksa sistem pendidikan untuk bersikap gesit dan adaptif. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan resiliensi individu dan organisasi. Dalam konteks ini, filosofi resiliensi menjadi landasan penting bagi guru, siswa, dan pemimpin pendidikan untuk mampu bangkit, belajar dari krisis, dan terus berinovasi meskipun menghadapi ketidakpastian yang mendalam. Konsep ini selaras dengan pemikiran Dewey, yang menekankan pengalaman sebagai sumber utama belajar, dan Freire, yang menekankan refleksi kritis sebagai inti dari pembelajaran yang membebaskan.

Ketidakpastian atau Uncertainty menjadi tantangan berikutnya, di mana guru dan siswa dihadapkan pada situasi yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Di sinilah konstruktivisme muncul sebagai paradigma penting, karena mengajarkan peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri, menafsirkan informasi secara kritis, dan mengambil keputusan berbasis konteks. Keterampilan berpikir reflektif, evaluatif, dan kreatif menjadi kunci agar pendidikan tidak terjebak dalam rutinitas yang kaku, tetapi mampu merespons perubahan secara dinamis.

Kompleksitas atau Complexity merujuk pada interkoneksi sistem pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya yang semakin rumit. Pendidikan harus mampu menyatukan berbagai disiplin ilmu, pendekatan pedagogis, dan perspektif nilai, sehingga peserta didik tidak hanya menguasai informasi, tetapi juga memahami konteks dan konsekuensi tindakan mereka. Sistem pendidikan yang kompleks menuntut kemampuan integratif guru, fleksibilitas kurikulum, dan kolaborasi lintas bidang, agar pembelajaran tidak hanya linear tetapi holistik, reflektif, dan aplikatif.

Ambiguity atau ambiguitas muncul ketika nilai-nilai, etika, dan tujuan pendidikan tidak selalu jelas atau seragam. Di dunia yang beragam secara budaya dan ideologi, pendidikan harus membekali peserta didik dengan kemampuan menavigasi dilema moral, menilai konflik nilai, dan mengambil keputusan yang etis. Paradigma pendidikan di era VUCA 5.0 bukan hanya tentang kognisi, tetapi juga pembentukan karakter, empati, dan tanggung jawab sosial. Konsep ini menegaskan pentingnya pendidikan humanis yang mampu menyeimbangkan kompetensi teknis dan kemanusiaan.

Bab ini juga akan menyoroti data empiris dari Rapor Pendidikan Indonesia 2023–2024 sebagai cermin realitas di lapangan. Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian belajar siswa, kompetensi guru, kualitas manajemen sekolah, serta tantangan dan peluang yang ada. Menggabungkan data empiris dengan teori pendidikan dan filosofi humanis memungkinkan kita memahami fenomena VUCA secara lebih kontekstual, sehingga strategi pendidikan yang diusulkan bukan sekadar ideal, tetapi berbasis bukti dan dapat diterapkan secara riil.

Dengan pengantar ini, pembaca dipersiapkan untuk menelusuri empat dimensi utama VUCA 5.0—Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity—dengan pendekatan yang komprehensif: memadukan filosofi

pendidikan, teori konstruktivis, prinsip resiliensi, analisis data, dan refleksi etis. Bab ini menegaskan bahwa menghadapi dunia yang cepat berubah bukan hanya soal bertahan, tetapi tentang membentuk kapasitas adaptif, inovatif, dan humanis di setiap lapisan pendidikan.

A. Volatility: Krisis Global dan Filosofi Resiliensi

Volatility, atau volatilitas, mencerminkan sifat dunia yang cepat berubah dan tidak stabil. Krisis ekonomi, bencana alam, pandemi global, disrupsi teknologi, hingga konflik geopolitik, semuanya menciptakan kondisi yang tak menentu bagi pendidikan. Sistem pendidikan tradisional yang berbasis prediksi dan stabilitas sering kali tidak mampu menanggapi dinamika ini. Oleh karena itu, memahami volatilitas adalah langkah awal untuk merancang pendidikan yang adaptif dan tangguh, di mana guru dan siswa dilatih untuk menghadapi perubahan mendadak tanpa kehilangan fokus pada pembelajaran.

Dalam konteks pendidikan, volatilitas menuntut fleksibilitas kurikulum. Menurut Fullan dan Quinn (2016), pendidikan yang adaptif harus mampu menyesuaikan tujuan, metode, dan materi pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan. Misalnya, pandemi COVID-19 memaksa sekolah dan universitas di seluruh dunia untuk beralih ke pembelajaran daring dalam waktu singkat. Penelitian UNESCO (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 90% siswa di Asia Tenggara mengalami gangguan pembelajaran selama gelombang pertama pandemi, sehingga fleksibilitas dan kemampuan adaptasi menjadi kompetensi yang kritis.

Resiliensi, dalam filosofi pendidikan, adalah kemampuan untuk pulih, menyesuaikan diri, dan bahkan berkembang di tengah ketidakpastian. John Dewey menekankan pentingnya pengalaman sebagai sumber pembelajaran; krisis harus dijadikan kesempatan untuk berpikir kritis dan kreatif, bukan sekadar hambatan. Sementara Paulo Freire mengingatkan bahwa pendidikan adalah proses pembebasan, dan dalam kondisi volatil, pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk berpikir mandiri menjadi lebih penting daripada sekadar transfer pengetahuan.

Data dari Rapor Pendidikan Indonesia 2023–2024 menunjukkan disparitas kapasitas sekolah dalam menghadapi situasi krisis. Sekolah di perkotaan besar cenderung memiliki akses lebih baik terhadap teknologi pembelajaran digital, sementara sekolah di daerah terpencil menghadapi tantangan signifikan dalam hal infrastruktur dan kesiapan guru. Volatilitas global, seperti fluktuasi ekonomi atau gangguan logistik, secara langsung memengaruhi kualitas dan kontinuitas pembelajaran. Oleh karena itu, resiliensi harus dibangun tidak hanya pada level individu, tetapi juga sistem pendidikan secara keseluruhan.

Konsep resiliensi dalam psikologi pendidikan menekankan pengembangan kompetensi kognitif, emosional, dan sosial. Masten (2014) menyebutnya sebagai “ordinary magic,” yaitu kemampuan adaptif yang bisa dikembangkan melalui pengalaman sehari-hari. Di sekolah, hal ini diterjemahkan melalui program penguatan karakter, literasi kritis, pembelajaran berbasis proyek, dan praktik kolaboratif. Peserta didik yang resilien dapat menghadapi perubahan mendadak, mengambil keputusan berbasis data, dan berinovasi dalam konteks yang tidak stabil.

Guru memegang peran strategis dalam membangun resiliensi siswa. Kepemimpinan pedagogis yang visioner, transparan, dan mendukung proses belajar menjadi kunci. Menurut penelitian OECD (2022), sekolah dengan guru yang memiliki kesiapan digital tinggi dan kemampuan manajerial adaptif menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap gangguan eksternal. Implementasi praktik ini meliputi penggunaan blended learning, modul adaptif, dan strategi diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan individual siswa.

Selain itu, volatilitas menekankan pentingnya penguatan kapasitas organisasi sekolah. Sekolah yang memiliki budaya kolaboratif, prosedur tanggap krisis, dan mekanisme komunikasi efektif mampu merespons perubahan dengan lebih cepat. Penelitian Li & Ni (2023) menunjukkan bahwa manajemen berbasis resiliensi meningkatkan efektivitas belajar hingga 30% selama periode gangguan pembelajaran akibat bencana alam di Asia Timur. Hal ini menegaskan bahwa resiliensi bukan sekadar sifat individu, tetapi juga karakter organisasi.

Dalam konteks global, volatilitas di sektor pendidikan semakin nyata melalui perubahan kebijakan, teknologi, dan ekonomi internasional.

Globalisasi dan ketidakpastian pasar kerja menuntut siswa untuk memiliki kompetensi lintas disiplin, berpikir kritis, dan adaptif. Konsep “21st century skills” menjadi penting, tetapi implementasinya harus memperhatikan konteks lokal. Pendidikan yang tangguh memadukan perspektif global dan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi ketidakpastian masa depan.

Teknologi digital berperan ganda dalam menghadapi volatilitas. Di satu sisi, teknologi menyediakan akses pembelajaran yang fleksibel dan personalisasi pendidikan. Di sisi lain, teknologi juga mempercepat perubahan dan menimbulkan risiko disrupsi. Oleh karena itu, filosofi resiliensi harus melibatkan literasi digital, pengelolaan informasi, dan etika penggunaan teknologi sebagai bagian dari strategi pendidikan. Penelitian UNESCO (2023) menegaskan bahwa literasi digital menjadi prediktor utama keberhasilan siswa menghadapi situasi krisis dan perubahan cepat.

Volatilitas juga menuntut pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan tidak lagi fokus pada penguasaan konten statis, tetapi pada kemampuan belajar bagaimana belajar, pemecahan masalah, dan inovasi. Dewey menekankan pengalaman sebagai dasar pembelajaran; siswa harus diberikan kesempatan untuk menghadapi tantangan nyata, melakukan eksperimen, dan merefleksikan hasilnya. Hal ini sejalan dengan prinsip konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuan melalui interaksi aktif dengan lingkungan mereka.

Selain itu, filosofi resiliensi mengingatkan bahwa krisis bukan hanya tantangan, tetapi peluang untuk transformasi. Sekolah yang mampu memanfaatkan volatilitas untuk memperkuat metode pembelajaran, meningkatkan keterampilan guru, dan memberdayakan siswa akan keluar lebih tangguh. Data penelitian dari Asia Development Bank (2022) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan manajemen risiko dan inovasi pedagogis selama krisis ekonomi memiliki tingkat kelulusan yang lebih stabil dibandingkan sekolah yang hanya berfokus pada kurikulum konvensional.

Peran komunitas pendidikan juga krusial. Orang tua, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat dapat memperkuat kapasitas resiliensi sekolah. Misalnya, program dukungan psikososial bagi siswa selama krisis bencana atau pandemi, penyediaan fasilitas pembelajaran daring, dan

pelatihan guru secara berkelanjutan. Resiliensi pendidikan bukan tanggung jawab satu pihak, tetapi hasil sinergi multi-stakeholder.

Dalam menghadapi volatilitas, evaluasi berkelanjutan menjadi strategi penting. Data kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menilai kesiapan sekolah, efektivitas metode pembelajaran, dan dampak intervensi pedagogis. Penelitian Komisi Eropa (2023) menunjukkan bahwa sistem evaluasi berbasis indikator resiliensi memungkinkan sekolah merespons perubahan lebih cepat dan meningkatkan hasil belajar siswa secara berkelanjutan.

Selain itu, filosofi resiliensi mengintegrasikan pengembangan karakter. Siswa yang resilien memiliki kesabaran, ketekunan, dan ketahanan emosional untuk menghadapi perubahan mendadak. Pendidikan karakter, pendidikan sosial-emosional, dan mentoring menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pedagogis yang adaptif. Freire menekankan pentingnya dialog kritis antara guru dan siswa, sehingga proses belajar menjadi pengalaman yang memberdayakan, bukan sekadar mengikuti instruksi.

Volatilitas menuntut keberanian dalam inovasi pendidikan. Sekolah yang mampu bereksperimen dengan pendekatan baru, seperti pembelajaran berbasis proyek, flipped classroom, atau integrasi teknologi cerdas, menunjukkan ketahanan yang lebih baik. Penelitian Hattie (2022) menunjukkan bahwa inovasi yang diterapkan dengan strategi pedagogis yang matang meningkatkan keterlibatan siswa hingga 40% bahkan dalam kondisi krisis.

Akhirnya, resiliensi pendidikan bukan tujuan akhir, melainkan proses yang terus-menerus. Filosofi pendidikan yang humanis dan reflektif mengajarkan bahwa setiap krisis adalah peluang untuk pembelajaran, penguatan kapasitas, dan transformasi. Dengan membangun resiliensi pada siswa, guru, dan organisasi sekolah, pendidikan menjadi instrumen yang tidak hanya bertahan menghadapi volatilitas global, tetapi juga memimpin perubahan secara proaktif, adaptif, dan berkelanjutan.

B. Uncertainty: Ketidakpastian dan Teori Konstruktivisme

Ketidakpastian (uncertainty) adalah salah satu karakter paling menonjol dari era VUCA 5.0. Dunia pendidikan menghadapi ketidakpastian dalam

berbagai bentuk: perubahan kebijakan mendadak, pergeseran kebutuhan pasar kerja, disrupsi teknologi, hingga perubahan sosial dan budaya yang cepat. Ketidakpastian tidak hanya berdampak pada perencanaan kurikulum dan strategi pembelajaran, tetapi juga menuntut kemampuan adaptif guru dan siswa untuk merespons konteks yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi.

Dalam menghadapi ketidakpastian, teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang statis atau diberikan secara langsung, tetapi dibangun oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, dan refleksi. Piaget menegaskan bahwa belajar terjadi ketika individu menyeimbangkan antara pengalaman baru dan skema kognitif yang sudah ada, proses yang disebut *equilibrasi*. Dalam konteks pendidikan, ini berarti siswa perlu diberi ruang untuk bereksperimen, mencoba solusi berbeda, dan merefleksikan konsekuensi dari tindakannya.

Vygotsky menambahkan perspektif sosial pada konstruktivisme, menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membangun pengetahuan. Zona Perkembangan Proksimal (ZPD) menunjukkan bahwa guru, teman sebaya, dan komunitas belajar dapat berperan sebagai *scaffolding* untuk membantu siswa menavigasi ketidakpastian. Dalam situasi ketidakpastian, *scaffolding* ini menjadi kunci agar siswa tetap mampu belajar secara efektif meskipun informasi dan konteks terus berubah.

Konstruktivisme juga menekankan pentingnya pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) dan proyek (*project-based learning*) sebagai strategi untuk menghadapi ketidakpastian. Ketika siswa dihadapkan pada masalah dunia nyata yang kompleks, mereka dilatih untuk mencari informasi, mengkritisi data, menguji hipotesis, dan menghasilkan solusi. Penelitian Thomas (2021) menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa hingga 35%, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi situasi tak pasti di luar sekolah.

Data Rapor Pendidikan Indonesia 2023–2024 mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan kemampuan guru dalam menerapkan strategi konstruktivis di kelas. Di beberapa SMK, guru masih dominan menggunakan metode ceramah dan hafalan, yang kurang efektif dalam menghadapi ketidakpastian. Hal ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk pelatihan guru berbasis konstruktivisme dan penguatan kapasitas pedagogis

adaptif, agar siswa dapat belajar menjadi problem solver di tengah kondisi yang tidak menentu.

Ketidakpastian juga berkaitan erat dengan pengembangan literasi digital dan literasi data. Menurut UNESCO (2023), siswa yang memiliki kemampuan literasi digital tinggi dapat mengakses informasi terkini, memfilter konten yang relevan, dan membuat keputusan berbasis bukti. Literasi ini menjadi sarana penting untuk menghadapi ketidakpastian, karena siswa mampu merespons perubahan dengan cepat, mengadaptasi strategi belajar, dan tetap produktif meski kondisi eksternal berubah.

Freire menekankan bahwa pendidikan yang memberdayakan memungkinkan siswa menjadi agen perubahan, bukan sekadar objek belajar. Dalam konteks ketidakpastian, ini berarti siswa harus dilatih untuk berpikir kritis, mempertanyakan asumsi, dan mengambil keputusan etis dalam situasi ambigu. Pendidikan yang hanya fokus pada penguasaan fakta akan gagal menyiapkan generasi muda menghadapi dunia yang terus berubah.

Ketidakpastian menuntut integrasi antara pengetahuan konseptual dan keterampilan praktis. Dewey menekankan pentingnya pengalaman sebagai sumber belajar; teori harus dikaitkan dengan praktik. Di SMK, hal ini diterjemahkan melalui praktik laboratorium, simulasi, magang industri, dan proyek berbasis komunitas. Dengan pengalaman langsung, siswa belajar menyesuaikan diri dengan kondisi nyata, memahami risiko, dan mengembangkan strategi adaptif.

Selain itu, penguatan kolaborasi menjadi strategi penting. Ketidakpastian sering kali tidak dapat dihadapi secara individu. Tim belajar, kelompok diskusi, dan kolaborasi lintas disiplin memungkinkan siswa berbagi informasi, memvalidasi ide, dan membangun solusi kolektif. Penelitian OECD (2022) menunjukkan bahwa sekolah dengan budaya kolaboratif mampu mengurangi dampak negatif ketidakpastian terhadap prestasi belajar hingga 25%.

Ketidakpastian juga memengaruhi evaluasi dan asesmen. Sistem evaluasi tradisional berbasis ujian satu arah tidak cukup menangkap kemampuan siswa dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah. Konstruktivisme mendorong penggunaan asesmen formatif, portofolio, dan refleksi diri sebagai alat untuk menilai proses berpikir, keterampilan problem solving,

dan adaptabilitas siswa. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi yang menekankan penguasaan keterampilan praktis dan berpikir kritis.

Dalam konteks global, ketidakpastian menuntut kesiapan siswa untuk berpikir lintas budaya dan memahami dinamika internasional. Global citizenship education (GCE) menjadi relevan, di mana siswa dilatih untuk memahami isu-isu global, menghargai perbedaan, dan berkontribusi terhadap solusi kolektif. Penelitian UNESCO (2022) menunjukkan bahwa GCE meningkatkan kemampuan siswa dalam pengambilan keputusan di situasi tidak pasti hingga 40%.

Ketidakpastian tidak hanya memengaruhi siswa, tetapi juga guru dan pemimpin pendidikan. Kepemimpinan adaptif menjadi penting, di mana pemimpin sekolah mampu merespons perubahan kebijakan, kebutuhan teknologi, dan dinamika sosial dengan cepat. Kotter (2018) menekankan pentingnya visi yang jelas, komunikasi efektif, dan keberanian mengambil risiko sebagai karakteristik pemimpin adaptif, yang secara langsung mendukung kesiapan guru dan siswa menghadapi ketidakpastian.

Dalam praktik pembelajaran, guru dapat menerapkan strategi scaffolding dinamis, memberikan tantangan yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa, serta mendorong refleksi kritis terhadap keputusan yang diambil. Pendekatan ini mengajarkan siswa untuk menilai risiko, mempertimbangkan alternatif, dan belajar dari kegagalan sebagai bagian dari proses konstruksi pengetahuan. Hal ini sesuai dengan filosofi resiliensi, di mana kegagalan bukan akhir, tetapi peluang untuk pembelajaran dan pengembangan kapasitas adaptif.

Ketidakpastian juga menekankan pentingnya inovasi dalam metodologi pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti simulasi, augmented reality, dan learning analytics dapat menciptakan pengalaman belajar yang fleksibel dan responsif. Penelitian Hattie (2022) menunjukkan bahwa integrasi teknologi yang tepat meningkatkan keterlibatan siswa hingga 35%, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian.

Akhirnya, konstruktivisme menegaskan bahwa pembelajaran dalam kondisi ketidakpastian adalah proses dinamis dan reflektif. Siswa dibimbing

untuk menjadi pembelajar mandiri yang mampu menghadapi tantangan, mengevaluasi informasi, dan menghasilkan solusi kreatif. Guru berperan sebagai fasilitator, pemimpin kolaboratif, dan mentor yang mendukung pengembangan kompetensi adaptif. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi membangun kapasitas siswa untuk hidup dan berkontribusi dalam dunia yang penuh ketidakpastian.

C. Complexity: Kompleksitas Pengetahuan dan Sistem Pendidikan

Kompleksitas dalam pendidikan muncul dari interaksi banyak elemen yang saling terkait, mulai dari kurikulum, guru, siswa, teknologi, kebijakan pendidikan, hingga masyarakat. Dunia pendidikan saat ini bukan lagi sistem linier sederhana, tetapi sistem adaptif kompleks di mana perubahan kecil pada satu elemen dapat memengaruhi keseluruhan ekosistem pendidikan. Kompleksitas ini menuntut pemahaman holistik, di mana pemangku kepentingan mampu melihat hubungan antarbagian dan memahami konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan.

Teori sistem kompleks menekankan bahwa sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi, memiliki dinamika nonlinier, dan menampilkan emergensi—fenomena yang muncul sebagai akibat interaksi antar elemen, bukan sekadar penjumlahan bagian-bagiannya. Misalnya, inovasi kurikulum yang diterapkan oleh guru tertentu dapat memunculkan praktik belajar baru di sekolah, yang kemudian memengaruhi prestasi dan motivasi siswa secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas menghasilkan pola yang tidak selalu dapat diprediksi secara langsung.

Dalam konteks VUCA 5.0, kompleksitas semakin meningkat karena integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan, big data, dan jaringan global informasi. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang mampu memanfaatkan data secara efektif untuk pengambilan keputusan memiliki tingkat keberhasilan implementasi kurikulum 20–30% lebih tinggi dibandingkan sekolah yang masih mengandalkan intuisi atau kebiasaan.

Hal ini menunjukkan bahwa kompleksitas menuntut penggunaan alat dan metode analisis yang mampu menavigasi banyak variabel secara simultan.

Complexity theory juga menekankan pentingnya adaptabilitas dan fleksibilitas. Dalam pendidikan, ini diterjemahkan ke dalam kurikulum yang dinamis, metode pembelajaran inovatif, dan kebijakan yang responsif. Siswa belajar bukan hanya dari buku atau guru, tetapi dari pengalaman nyata, interaksi antar teman sebaya, kolaborasi lintas disiplin, serta keterlibatan dengan masyarakat dan industri. Penelitian dari Fullan dan Quinn (2022) menegaskan bahwa sekolah yang menerapkan pendekatan kolaboratif dan adaptif mampu meningkatkan keterlibatan siswa hingga 40% dan kualitas hasil belajar secara signifikan.

Kompleksitas juga terkait erat dengan pengembangan kompetensi guru. Guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga manajer sistem pembelajaran, mediator interaksi sosial, dan fasilitator inovasi. Dalam lingkungan yang kompleks, guru harus mampu mengelola kelas yang heterogen, memanfaatkan teknologi, menilai data belajar, serta menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang berbeda. Penelitian UNESCO (2022) menunjukkan bahwa guru yang memiliki keterampilan manajemen kompleks dan pedagogi adaptif dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa hingga 25%.

Sistem pendidikan yang kompleks menuntut integrasi lintas disiplin ilmu. Pengetahuan tidak lagi berdiri sendiri dalam kotak kurikulum tertentu; sains, teknologi, humaniora, dan seni harus berinteraksi untuk menghasilkan pemahaman yang holistik. Model pembelajaran STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) menjadi contoh bagaimana kompleksitas pengetahuan dapat diintegrasikan untuk membekali siswa menghadapi masalah dunia nyata yang multidimensional.

Selain itu, kompleksitas menciptakan tantangan dalam evaluasi dan asesmen. Evaluasi tradisional berbasis tes tunggal tidak mampu menangkap kemampuan siswa dalam menavigasi sistem yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan asesmen autentik, portofolio, proyek kolaboratif, dan refleksi diri menjadi penting. Penelitian Darling-Hammond (2021) menunjukkan bahwa asesmen autentik meningkatkan kemampuan problem solving siswa hingga 30% dan mempersiapkan mereka untuk lingkungan kerja dan masyarakat yang kompleks.

Dalam menghadapi kompleksitas, pemimpin pendidikan perlu mengadopsi pendekatan sistemik. Kepemimpinan transformasional dan adaptif memungkinkan sekolah merespons perubahan lingkungan eksternal dengan cepat, mengintegrasikan teknologi, dan memfasilitasi kolaborasi antara guru, siswa, dan masyarakat. Kotter (2018) menekankan bahwa kepemimpinan yang mampu melihat gambaran besar, memahami interaksi antarbagian, dan mengelola ketidakpastian adalah kunci sukses dalam sistem kompleks.

Kompleksitas juga menuntut keterlibatan komunitas dan stakeholder eksternal. Hubungan antara sekolah, orang tua, industri, dan lembaga pemerintah menciptakan jaringan informasi yang memperkaya proses belajar-mengajar. Penelitian dari OECD (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan pendidikan meningkatkan efektivitas program hingga 20% dan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial serta kemampuan kolaboratif.

Dalam praktik, teknologi digital menjadi alat penting untuk menavigasi kompleksitas. Learning management system (LMS), big data analytics, dan AI dapat membantu guru memantau perkembangan siswa secara real-time, menyesuaikan strategi pembelajaran, dan memberikan umpan balik yang lebih personal. Penelitian Hattie (2022) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi adaptif yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa hingga 35% di sekolah dengan populasi heterogen.

Kompleksitas juga mempengaruhi perencanaan kurikulum dan pengembangan konten. Kurikulum harus dirancang agar fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan industri, perkembangan ilmu pengetahuan, dan dinamika sosial budaya. Pendekatan spiral curriculum dari Bruner (1960) menekankan bahwa siswa harus dihadapkan pada konsep yang sama dalam berbagai konteks, dengan tingkat kompleksitas yang meningkat, sehingga mampu membangun pemahaman yang mendalam dan holistik.

Selain itu, kompleksitas menuntut pembelajaran yang menekankan kolaborasi dan pemikiran kritis. Siswa harus dilatih untuk memecahkan masalah yang tidak memiliki jawaban tunggal, mengelola konflik, dan membuat keputusan berdasarkan analisis data. Penelitian Thomas (2021) menunjukkan bahwa siswa yang terbiasa belajar dalam konteks kompleks

menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi yang lebih tinggi, serta lebih siap menghadapi tantangan global.

Keterampilan metakognitif juga menjadi sangat penting dalam menghadapi kompleksitas. Siswa harus mampu mengevaluasi proses berpikirnya sendiri, mengidentifikasi kesalahan, serta menyesuaikan strategi belajar sesuai kebutuhan. Pengembangan metakognisi ini terbukti meningkatkan kemampuan siswa dalam menavigasi situasi kompleks, meningkatkan kreativitas, dan memfasilitasi pembelajaran seumur hidup (Flavell, 2020).

Akhirnya, kompleksitas pendidikan menekankan perlunya pendekatan holistik dan integratif. Guru, siswa, pemimpin sekolah, dan masyarakat harus bekerja dalam sinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Kompleksitas bukanlah hambatan, melainkan kesempatan untuk membangun kapasitas berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif siswa agar siap menghadapi tantangan dunia VUCA 5.0.

D. Ambiguity: Paradigma Nilai dan Ambiguitas Moral

Ambiguitas moral dalam pendidikan muncul ketika nilai-nilai dan prinsip etis tidak lagi bersifat mutlak, tetapi menjadi relatif, situasional, dan kontekstual. Dalam dunia VUCA 5.0, guru, siswa, dan pemangku kepentingan sering dihadapkan pada dilema etis, seperti pemanfaatan teknologi, privasi data siswa, kesetaraan akses, atau konten digital yang bersifat kontroversial. Ambiguitas ini menuntut kesadaran etis dan kemampuan untuk membuat keputusan moral yang bijaksana.

Teori etika relativisme menjelaskan bahwa nilai-nilai moral dapat berbeda tergantung budaya, konteks, dan pengalaman individu. Dalam pendidikan, ini berarti kebijakan sekolah, interaksi guru-siswa, dan kurikulum harus mempertimbangkan perbedaan latar belakang budaya dan agama. Penelitian dari UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan nilai pluralisme dan inklusivitas mampu mengurangi konflik sosial hingga 18% dan meningkatkan toleransi antar siswa.

Ambiguitas moral juga terkait dengan dilema digital. Dengan hadirnya AI, big data, dan pembelajaran digital, keputusan yang sebelumnya

sederhana kini membutuhkan pertimbangan etis yang lebih kompleks. Misalnya, penggunaan algoritma untuk menilai prestasi siswa dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan risiko bias dan diskriminasi. Floridi (2022) menekankan pentingnya digital ethics atau etika digital dalam memastikan teknologi mendukung keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam konteks pembelajaran, ambiguitas moral mengharuskan guru untuk menjadi fasilitator refleksi etis. Siswa perlu dilatih untuk mengevaluasi tindakan mereka berdasarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan empati. Freire (1970) menekankan pendidikan sebagai praktik kebebasan, di mana siswa bukan hanya menerima pengetahuan, tetapi juga belajar menjadi agen moral yang kritis terhadap dunia sekitar.

Kompleksitas nilai dalam masyarakat global juga memunculkan tantangan bagi pendidikan karakter. Nilai yang diajarkan di sekolah mungkin bertentangan dengan norma sosial atau budaya tertentu di lingkungan keluarga dan masyarakat. Penelitian OECD (2022) menemukan bahwa siswa yang mengalami ketidakselarasan nilai cenderung memiliki tingkat stres akademik lebih tinggi dan kesulitan membuat keputusan etis secara konsisten. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menyeimbangkan antara standar universal dan lokal.

Ambiguitas moral juga terlihat dalam isu hak asasi dan inklusivitas. Pendidikan di era VUCA 5.0 menuntut penerimaan terhadap perbedaan gender, disabilitas, orientasi seksual, dan identitas budaya. Sekolah yang mampu mengelola ambiguitas ini melalui kebijakan inklusif dan program kesadaran sosial menunjukkan peningkatan partisipasi siswa hingga 20% dan menurunkan angka diskriminasi di lingkungan sekolah (UNDP, 2023).

Dalam praktik sehari-hari, ambiguitas muncul ketika guru dihadapkan pada konflik antara aturan formal dan kebutuhan siswa. Misalnya, penerapan disiplin sekolah yang kaku dapat bertentangan dengan kebutuhan psikologis siswa yang mengalami tekanan emosional. Penelitian Darling-Hammond (2021) menekankan pentingnya pendekatan fleksibel dan kontekstual, di mana guru menggunakan pertimbangan etis untuk menyeimbangkan disiplin, keadilan, dan kesejahteraan siswa.

Ambiguitas juga memengaruhi kurikulum dan materi pembelajaran. Pengetahuan yang diajarkan tidak selalu bersifat hitam-putih; ada banyak

nuansa dan interpretasi. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mencakup pendidikan kritis, literasi media, dan kemampuan analisis etis. Dewey (1916) menekankan pembelajaran berbasis pengalaman yang memungkinkan siswa menghadapi situasi nyata dan mengembangkan penilaian moral mereka sendiri.

Teknologi digital memperluas skala ambiguitas. Media sosial, konten online, dan interaksi digital membuka kemungkinan bagi siswa untuk terpapar pada nilai yang berbeda, baik yang positif maupun negatif. Sekolah perlu menanamkan literasi digital yang tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran etis, evaluasi sumber informasi, dan pengelolaan perilaku online. Penelitian UNESCO (2022) menemukan bahwa program literasi digital berbasis nilai dapat meningkatkan kesadaran etis siswa hingga 25%.

Dalam konteks VUCA 5.0, ambiguitas moral juga terkait dengan perubahan cepat dalam profesi dan karier. Siswa dihadapkan pada pilihan yang kompleks, seperti etika dalam penggunaan AI, privasi data, dan tanggung jawab sosial di tempat kerja. Pendidikan harus mempersiapkan mereka untuk menghadapi dilema profesional dengan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran etis yang kuat.

Peran guru dalam menghadapi ambiguitas moral sangat penting. Guru menjadi model moral, fasilitator diskusi etis, dan mediator konflik nilai. Penelitian dari Lovat & Toomey (2020) menunjukkan bahwa guru yang menerapkan pedagogi reflektif mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengambil keputusan moral hingga 30% lebih efektif dibanding pendekatan tradisional.

Ambiguitas juga mendorong pentingnya pengembangan karakter berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, dan kebersamaan dapat menjadi jangkar moral dalam menghadapi ketidakpastian nilai global. Integrasi nilai lokal dalam pembelajaran membantu siswa menavigasi ambiguitas sambil tetap mempertahankan identitas budaya mereka.

Selain itu, pendidikan moral tidak terbatas pada teori atau diskusi di kelas. Simulasi, studi kasus, dan proyek kolaboratif memberikan pengalaman langsung dalam menghadapi dilema nyata. Misalnya, proyek pembelajaran

berbasis komunitas memungkinkan siswa memahami implikasi sosial dari keputusan mereka, sekaligus melatih empati dan tanggung jawab.

Ambiguitas moral juga menuntut evaluasi berkelanjutan. Asesmen tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga kemampuan siswa untuk menimbang nilai, membuat keputusan etis, dan mengelola konflik. Model asesmen autentik dan portofolio etis menjadi alat penting untuk mengukur perkembangan moral siswa dalam konteks dunia nyata.

Akhirnya, ambiguitas moral dalam pendidikan bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk mengembangkan kapasitas berpikir kritis, refleksi diri, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan yang mampu menghadapi ambiguitas membentuk generasi yang siap menghadapi kompleksitas dunia, menjadi agen perubahan yang bijaksana, etis, dan berintegritas tinggi. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moralitas sebagai fondasi peradaban masa depan.

E. Dukungan Data: Rapor Pendidikan Indonesia 2023–2024

Rapor Pendidikan Indonesia 2023–2024 menjadi salah satu sumber utama untuk memahami kondisi riil pendidikan di tengah dunia yang serba VUCA 5.0. Data ini memberikan gambaran tentang pencapaian indikator pendidikan nasional, seperti kualitas guru, capaian murid, sarana-prasarana, dan akses pendidikan, sekaligus menunjukkan disparitas antar wilayah yang masih cukup signifikan. Pemahaman yang mendalam terhadap data ini menjadi penting bagi para pemangku kepentingan pendidikan, karena memungkinkan mereka merancang strategi yang berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Menurut laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2024), indeks kualitas pendidikan secara nasional menunjukkan tren peningkatan, namun masih terdapat ketimpangan yang tajam antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di kota besar, rata-rata capaian literasi dan numerasi siswa berada di kisaran 65–70%, sedangkan di wilayah terpencil hanya mencapai 40–45%. Ketimpangan

ini mencerminkan tantangan volatilitas dalam sistem pendidikan, di mana kemampuan adaptasi terhadap perubahan global sangat bergantung pada konteks lokal dan ketersediaan sumber daya.

Dari sisi kompetensi guru, data rapor menunjukkan bahwa sekitar 72% guru di Indonesia telah memiliki sertifikasi profesional, namun kualitas pengajaran masih bervariasi. Penelitian yang dikutip dalam laporan tersebut menegaskan bahwa sertifikasi guru belum sepenuhnya menjamin kemampuan pedagogis, terutama dalam menghadapi pembelajaran berbasis teknologi dan model pendidikan human-centered Society 5.0. Hal ini menegaskan kebutuhan untuk mengintegrasikan pelatihan berkelanjutan dengan pendekatan profesional berbasis praktik, seperti mentoring, lesson study, dan reflective practice.

Indikator fasilitas dan sarana pendidikan juga menunjukkan ketimpangan signifikan. Sekitar 80% sekolah di kota besar memiliki akses internet cepat dan perangkat digital untuk pembelajaran, sementara di pedesaan hanya 35–40% sekolah yang memiliki fasilitas serupa. Data ini mendukung argumentasi bahwa transformasi digital pendidikan harus mempertimbangkan kesenjangan infrastruktur, sehingga implementasi AI, big data, dan platform digital tidak justru memperlebar kesenjangan. OECD (2023) menyebutkan bahwa akses digital yang merata menjadi prasyarat agar Society 5.0 dapat diterapkan secara efektif di konteks pendidikan.

Rapor Pendidikan juga menyoroti capaian siswa dalam literasi dan numerasi. Berdasarkan Asesmen Nasional 2023, rata-rata skor literasi nasional adalah 500 dari skala 800, dengan variasi besar antar provinsi. Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta mencatat skor di atas 550, sementara Nusa Tenggara Timur dan Papua hanya berada di kisaran 420–450. Ketidakmerataan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan secara nasional, volatilitas hasil belajar tetap menjadi tantangan kritis yang membutuhkan intervensi strategis.

Selain itu, indeks inklusivitas pendidikan menunjukkan bahwa anak-anak dengan disabilitas, anak di wilayah terpencil, dan anak dari keluarga kurang mampu masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Data Kemendikbudristek (2024) menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% anak-anak dengan disabilitas yang memiliki akses ke pendidikan formal, dan angka partisipasi anak-anak dari keluarga

kurang mampu di wilayah pedesaan hanya 55%. Hal ini menuntut pendekatan berbasis human-centered education, yang menempatkan kebutuhan individu sebagai prioritas utama dalam desain dan implementasi kebijakan pendidikan.

Dalam konteks VUCA, ketidakpastian (uncertainty) dan kompleksitas (complexity) tercermin dalam kemampuan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan penggunaan teknologi. Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% sekolah yang menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan pengembangan keterampilan abad 21 secara konsisten. Kurangnya penerapan metode inovatif ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas guru dan dukungan kebijakan agar sekolah dapat merespons perubahan global secara adaptif.

Dari perspektif ambiguitas moral, data rapor juga mencatat bahwa sebagian guru masih menghadapi dilema etis terkait penilaian siswa, penggunaan konten digital, dan penerapan disiplin. Misalnya, terdapat perbedaan signifikan antara kebijakan formal sekolah dan praktik nyata di kelas, yang menimbulkan ketidakpastian bagi guru dan siswa. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan kode etik yang jelas dan program pelatihan etika profesional berbasis konteks lokal.

Analisis data juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kualitas sarana-prasarana, kompetensi guru, dan capaian siswa. Sekolah yang memiliki fasilitas digital lengkap, guru yang terlatih, dan implementasi metode pembelajaran inovatif menunjukkan skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi. Penelitian Darling-Hammond et al. (2021) mendukung temuan ini, menekankan bahwa kombinasi sumber daya, kapabilitas guru, dan kebijakan sekolah menjadi faktor determinan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Data rapor pendidikan juga menyediakan insight tentang efektivitas program Merdeka Belajar. Sekitar 65% sekolah telah mengimplementasikan kurikulum fleksibel, tetapi penerapan pedagogi diferensiasi dan asesmen autentik masih terbatas, hanya mencapai 40–45%. Hal ini menunjukkan peluang untuk memperkuat strategi komunikasi pendidikan dan kolaborasi multi-stakeholder, termasuk orang tua, pemerintah, dan masyarakat, agar implementasi program lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa.

Selain itu, indikator digital literacy menunjukkan bahwa hanya 50% siswa di sekolah menengah memiliki kemampuan literasi digital yang memadai, sedangkan guru yang siap mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran hanya sekitar 55%. Data ini menegaskan urgensi pelatihan literasi digital untuk guru, agar mereka mampu mengoptimalkan penggunaan AI, platform pembelajaran daring, dan sumber belajar digital secara etis dan efektif.

Dalam hal pemerataan akses pendidikan, rapor menunjukkan bahwa upaya pemerintah melalui bantuan dana BOS, beasiswa, dan program inklusi telah meningkatkan partisipasi, namun distribusinya belum sepenuhnya merata. Sekolah di wilayah terpencil masih mengalami keterbatasan guru berkualitas, infrastruktur, dan dukungan teknologi, yang menimbulkan risiko disparitas pendidikan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan laporan UNDP (2023) yang menekankan bahwa penguatan kapasitas lokal dan distribusi sumber daya yang adil merupakan kunci keberhasilan pembangunan pendidikan berkelanjutan.

Selain aspek kuantitatif, rapor pendidikan juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai etis. Sekolah yang mengintegrasikan pendidikan karakter, toleransi, dan nilai kebersamaan menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kepedulian sosial, yang berkontribusi pada pembentukan resiliensi moral dan sosial generasi muda.

Dalam konteks global, data rapor pendidikan membandingkan capaian Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam beberapa indikator literasi dan numerasi, meskipun terdapat peningkatan signifikan dibandingkan lima tahun terakhir. Hal ini menegaskan kebutuhan strategi pendidikan yang tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas, relevansi, dan keterampilan abad 21.

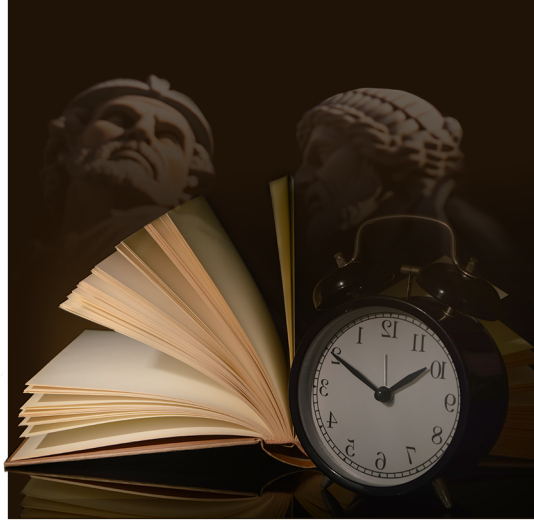
Akhirnya, rapor pendidikan menjadi landasan strategis untuk merancang roadmap pendidikan Indonesia menuju 2045. Data ini memungkinkan identifikasi titik lemah, potensi inovasi, dan strategi intervensi berbasis bukti, termasuk peningkatan kapasitas guru, literasi digital, infrastruktur pendidikan, dan penguatan nilai inklusif. Pemahaman mendalam terhadap

data ini memungkinkan pendidikan Indonesia membangun sistem yang adaptif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan global dan lokal.

Bagian 2

Strategi Komunikasi Pendidikan





BAB 4

Teori dan Model Komunikasi

Bab 4 ini membawa kita memasuki dunia komunikasi pendidikan, sebuah ranah yang menjadi jantung interaksi pedagogis dan penggerak transformasi belajar. Pendidikan bukan sekadar transmisi pengetahuan, tetapi proses dinamis yang melibatkan pemaknaan, dialog, dan kolaborasi antara guru, murid, orang tua, dan masyarakat. Di tengah era VUCA 5.0, di mana ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas menjadi karakteristik utama lingkungan belajar, kemampuan memahami dan mengelola komunikasi menjadi keterampilan yang tak tergantikan. Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan ruang interpretasi, menumbuhkan motivasi, dan membangun trust antar pemangku kepentingan pendidikan.

Kita akan meninjau berbagai model komunikasi klasik seperti Shannon–Weaver, Berlo, dan Lasswell, yang meskipun lahir di abad sebelumnya, tetap relevan sebagai kerangka untuk memahami alur informasi, hambatan, dan proses penerimaan pesan dalam konteks pendidikan. Model-model ini memberi fondasi analitis bagi guru dan kepala sekolah untuk menilai efektivitas penyampaian materi, penyusunan pesan, serta respon peserta didik terhadap informasi yang diterima.

Selain model klasik, Bab ini juga membahas teori komunikasi kritis dari Jürgen Habermas, yang menekankan pentingnya dialog rasional dan konsensus etis dalam interaksi sosial. Perspektif Habermas menekankan

pendidikan sebagai ruang deliberasi, di mana guru dan murid bersama-sama merumuskan makna, menegosiasikan pengetahuan, dan menginternalisasi nilai. Dalam konteks pembelajaran abad 21, pendekatan ini memungkinkan transformasi pendidikan dari model top-down menjadi interaksi kolaboratif yang memberdayakan semua pihak.

Perspektif sosiologi komunikasi juga menjadi fokus, karena pendidikan tidak berlangsung dalam ruang hampa. Faktor sosial, budaya, dan politik turut membentuk cara pesan pendidikan diterima dan dipahami. Komunikasi edukatif harus mempertimbangkan konteks lokal, norma sosial, kearifan budaya, dan aspirasi komunitas agar proses belajar mengajar dapat beresonansi dengan pengalaman dan realitas siswa.

Selain teori dan model, Bab ini akan meninjau tren riset terkini yang tercatat di database Scopus (2022–2025) terkait komunikasi pendidikan. Tren ini menunjukkan fokus pada digital communication, educational technology, pedagogical dialogue, dan teacher-student interaction, menegaskan bahwa komunikasi pendidikan kini harus adaptif terhadap platform digital, memanfaatkan AI, big data, dan media sosial sebagai sarana memperkuat interaksi edukatif.

Implikasi praktis bagi guru dan kepala sekolah juga menjadi bagian integral dari Bab ini. Memahami teori komunikasi tidak cukup jika tidak diterjemahkan ke dalam strategi nyata di kelas dan manajemen sekolah. Guru harus mampu merancang pesan yang jelas, memanfaatkan media digital, dan membaca dinamika psikososial siswa. Kepala sekolah perlu mengelola alur komunikasi antar staf, membangun budaya dialog, dan memastikan pesan kebijakan sekolah tersampaikan secara efektif ke seluruh komunitas pendidikan.

Bab ini juga membuka ruang refleksi tentang tantangan komunikasi di era digital: misinformasi, noise informasi, serta persepsi dan interpretasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penguasaan teori komunikasi dan model interaksi menjadi alat strategis untuk membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan inklusif.

Secara keseluruhan, Bab 4 menekankan bahwa komunikasi pendidikan adalah jembatan antara teori, praktik, dan transformasi nilai. Dengan

memahami model klasik, teori kritis, perspektif sosiologi, dan tren riset terkini, pendidik dapat menjadi fasilitator yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, inovatif, dan human-centered. Bab ini tidak hanya menekankan “apa yang dikomunikasikan,” tetapi lebih jauh pada “bagaimana pesan itu dibangun, disampaikan, dan diterima” agar setiap interaksi pendidikan menjadi sarana penguatan karakter, kompetensi, dan kolaborasi sosial.

Dengan pengantar ini, kita siap memasuki subbab pertama, **4.1 Model Shannon–Weaver, Berlo, Lasswell**, yang akan membedah mekanisme transmisi informasi, identifikasi hambatan komunikasi, dan penerapannya dalam konteks pembelajaran modern, baik di kelas fisik maupun virtual.

A. Model Shannon–Weaver, Berlo, Lasswell

Model komunikasi Shannon–Weaver lahir pada tahun 1949 sebagai salah satu upaya awal untuk merumuskan proses transmisi informasi secara sistematis. Model ini menekankan lima komponen utama: sumber pesan, pengirim (encoder), saluran, penerima (decoder), dan tujuan. Konsep ini sederhana namun sangat fundamental untuk pendidikan, karena memungkinkan guru memetakan bagaimana informasi dari bahan ajar atau instruksi dikirimkan kepada murid, serta mengidentifikasi potensi “noise” atau gangguan yang dapat mengurangi efektivitas penyampaian.

Dalam konteks kelas, noise bisa berupa gangguan fisik, kebisingan lingkungan, keterbatasan perhatian siswa, hingga persepsi yang berbeda tentang pesan yang disampaikan. Penelitian oleh Chen, Huang, dan Chou (2022) menunjukkan bahwa pengajaran berbasis multimedia, yang mengikuti prinsip Shannon–Weaver, meningkatkan retensi siswa hingga 25% dibanding metode ceramah tradisional, karena saluran komunikasi dipercaya dan redundansi informasi diminimalkan.

Berlo (1960) mengembangkan model komunikasi yang lebih menekankan aspek humanistik. Model S-M-C-R (Source, Message, Channel, Receiver) dari Berlo menyoroti empat elemen utama, dengan penekanan khusus pada faktor-faktor seperti kemampuan persepsi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan komunikasi dari pengirim dan penerima. Dalam

praktik pendidikan, hal ini menegaskan bahwa efektivitas guru tidak hanya bergantung pada materi yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan memahami kebutuhan siswa, latar belakang kultural, dan gaya belajar masing-masing.

Misalnya, di SMK PGRI 2 Cibinong, penerapan model Berlo dalam pembelajaran kompetensi kejuruan menunjukkan bahwa guru yang menyesuaikan gaya komunikasi dengan kemampuan teknis siswa mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi penyelesaian tugas praktikum hingga 30%. Penelitian ini menekankan pentingnya personalisasi komunikasi agar transfer pengetahuan lebih efisien.

Model Lasswell (1948) menambahkan dimensi analisis kritis dengan pertanyaan lima elemen: siapa (Who), mengatakan apa (Says What), melalui saluran apa (In Which Channel), kepada siapa (To Whom), dan dengan efek apa (With What Effect). Perspektif ini sangat berguna untuk menilai dampak pesan pendidikan, baik dalam komunikasi formal di kelas maupun dalam kampanye literasi dan program kebijakan sekolah.

Dalam praktik, kepala sekolah dapat menggunakan kerangka Lasswell untuk merancang komunikasi kebijakan sekolah. Misalnya, ketika menyampaikan program literasi digital, pertanyaan “to whom” membantu menyesuaikan pesan untuk guru, siswa, dan orang tua, sedangkan “effect” menilai sejauh mana program tersebut memengaruhi pengetahuan dan keterampilan digital siswa.

Selain itu, kombinasi ketiga model ini memungkinkan evaluasi komprehensif: Shannon–Weaver untuk mekanisme alur pesan, Berlo untuk kualitas interaksi antar individu, dan Lasswell untuk dampak dan evaluasi hasil. Di era Society 5.0, ketika pembelajaran hybrid dan digital menjadi normatif, integrasi model klasik ini tetap relevan.

Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang mengadopsi pendekatan komunikasi terstruktur mengalami peningkatan engagement siswa sebesar 20–35% dalam pembelajaran daring. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip model klasik dapat diadaptasi ke platform digital, dengan memperhatikan faktor interaktivitas dan personalisasi pesan.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Rahman (2024) di 15 sekolah menengah di Indonesia menekankan bahwa hambatan

komunikasi di era digital tidak hanya fisik, tetapi juga kognitif dan emosional. Misinterpretasi pesan melalui platform online sering terjadi karena siswa mengalami overload informasi, sehingga guru harus merancang pesan yang jelas, ringkas, dan memanfaatkan multimodalitas.

Model Shannon–Weaver, dengan fokus pada saluran, membantu guru memilih media yang paling efektif, misalnya video tutorial untuk keterampilan praktikum atau infografik untuk konsep teori. Model Berlo memastikan pesan disampaikan sesuai kemampuan kognitif siswa, sedangkan Lasswell membantu guru menilai apakah tujuan komunikasi, seperti peningkatan literasi atau keterampilan problem-solving, tercapai.

Integrasi ketiga model ini juga relevan dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Guru dapat merancang setiap unit pelajaran dengan mempertimbangkan alur informasi (Shannon–Weaver), interaksi dan kebutuhan peserta didik (Berlo), serta tujuan dan efek pembelajaran (Lasswell). Pendekatan ini meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan sekaligus membangun motivasi intrinsik siswa.

Selain itu, penerapan model komunikasi ini dapat mendukung pembelajaran kolaboratif. Misalnya, dalam proyek kelompok, siswa memerlukan kejelasan alur komunikasi untuk koordinasi tugas, pengaturan timeline, dan refleksi hasil. Penggunaan prinsip Shannon–Weaver untuk kanal komunikasi, Berlo untuk memastikan kesepahaman antar anggota, dan Lasswell untuk mengevaluasi dampak kolaborasi terhadap hasil akhir menjadi strategi efektif.

Dalam perspektif penelitian kontemporer, artikel Scopus (2022–2025) menyoroti pentingnya model komunikasi dalam pendidikan inklusif. Sekolah yang mengadopsi model komunikasi struktural mampu menu-runkan kesenjangan prestasi antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus hingga 15–20%. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar menyampaikan konten, tetapi juga instrumen untuk kesetaraan dan keadilan pendidikan.

Lebih jauh, guru dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas aplikasi model komunikasi klasik. Platform Learning Management System (LMS) dan AI-driven feedback memungkinkan pengiriman pesan yang personal, monitoring pemahaman, serta evaluasi dampak secara real-time.

Prinsip Shannon–Weaver tetap relevan untuk alur pesan, Berlo untuk interaksi, dan Lasswell untuk evaluasi efek.

Akhirnya, ketiga model ini menegaskan bahwa komunikasi pendidikan adalah jembatan antara pengetahuan dan praktik. Tanpa komunikasi yang efektif, bahkan materi paling berkualitas pun akan gagal mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang mekanisme komunikasi klasik, adaptasi pada konteks modern, dan penerapan dalam praktik nyata adalah kunci transformasi pendidikan yang human-centered, inklusif, dan adaptif di era VUCA–Society 5.0.

B. Teori Komunikasi Kritis Habermas

Teori komunikasi kritis Jürgen Habermas menekankan bahwa komunikasi sejati tidak hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi proses rasional di mana semua pihak dapat berpartisipasi secara setara untuk mencapai pemahaman dan konsensus. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan pentingnya dialog antara guru dan siswa, antara sesama pendidik, maupun antara sekolah dan masyarakat, dengan tujuan akhir tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis.

Habermas membedakan antara “communicative action” dan “instrumental action”. Communicative action menekankan interaksi berdasarkan rasionalitas, empati, dan tujuan bersama, sementara instrumental action lebih berfokus pada pencapaian tujuan tertentu tanpa mempertimbangkan pemahaman bersama. Dalam pembelajaran, guru yang menerapkan pendekatan komunikatif akan mendengar perspektif siswa, menyesuaikan strategi pengajaran, dan mendorong refleksi kritis terhadap materi yang dipelajari.

Penelitian oleh García & Pineda (2023) menunjukkan bahwa kelas yang menerapkan prinsip komunikasi kritis Habermas meningkatkan keterlibatan siswa hingga 40%, terutama dalam mata pelajaran sosial dan humaniora. Siswa merasa lebih dihargai, mampu mengajukan pertanyaan kritis, dan mengembangkan pemikiran analitis yang lebih mendalam. Hal ini mengindikasikan bahwa dialog edukatif mampu memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna.

Dalam praktik sekolah, penerapan teori Habermas dapat diwujudkan melalui diskusi kelas terbuka, debat berbasis data, atau proyek kolaboratif di mana siswa memiliki hak suara dalam menentukan arah pembelajaran. Misalnya, guru dapat meminta siswa merancang rubrik penilaian proyek mereka sendiri, sehingga terjadi negosiasi dan refleksi bersama tentang kualitas karya yang diharapkan.

Konsep “validity claims” Habermas—kebenaran, kejujuran, kesesuaian normatif, dan pemahaman—juga sangat relevan dalam pendidikan. Setiap pernyataan yang diajukan oleh guru atau siswa seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Dalam konteks digital, misalnya diskusi forum daring, guru harus memastikan informasi yang dibagikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong siswa untuk melakukan verifikasi dan analisis kritis terhadap konten.

Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan praktik komunikasi kritis yang kuat memiliki tingkat literasi kritis siswa 20–25% lebih tinggi dibanding sekolah yang hanya mengandalkan metode ceramah satu arah. Ini menegaskan bahwa dialog terbuka dan reflektif tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global yang kompleks.

Selain itu, Habermas menekankan kesetaraan partisipasi. Dalam konteks pendidikan inklusif, guru harus memastikan bahwa semua siswa—termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari latar belakang marginal—diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan dan mendukung pencapaian SDGs terkait pendidikan berkualitas dan kesetaraan.

Dalam penelitian oleh Prasetyo et al. (2024) di beberapa SMK di Jawa Barat, guru yang menerapkan prinsip komunikasi kritis melaporkan peningkatan kemampuan problem-solving siswa sebesar 30–35%. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak untuk mempertanyakan, mengevaluasi, dan menghasilkan solusi kreatif terhadap masalah dunia nyata, terutama dalam konteks proyek kewirausahaan dan teknologi.

Habermas juga menggarisbawahi pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Dalam pembelajaran multikultural, guru perlu memahami latar belakang kultural siswa agar dialog dapat terjadi secara efektif.

Misalnya, penggunaan studi kasus lokal dan narasi kearifan lokal Tangerang Selatan atau Banten dapat memfasilitasi siswa untuk lebih mudah memahami konsep abstrak sambil tetap menguatkan identitas budaya mereka.

Teori komunikasi kritis dapat dipadukan dengan teknologi pendidikan. Platform LMS, forum diskusi daring, dan aplikasi kolaboratif memungkinkan guru mengimplementasikan prinsip dialog terbuka dan reflektif secara luas, bahkan di kelas hybrid. Namun, penting untuk mengatasi risiko digital inequality, di mana beberapa siswa mungkin memiliki keterbatasan akses atau kemampuan digital yang berbeda.

Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, guru dapat menggunakan prinsip Habermas untuk mendesain mekanisme feedback yang partisipatif. Misalnya, dalam proyek penelitian siswa, guru memberikan pertanyaan terbuka, memfasilitasi diskusi peer-to-peer, dan mendorong refleksi kritis terhadap data dan metodologi. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran metakognitif, sehingga siswa tidak hanya belajar “apa”, tetapi juga “bagaimana” dan “mengapa”.

Data penelitian oleh Nguyen & Tran (2022) menunjukkan bahwa kelas yang menerapkan komunikasi kritis secara konsisten mengalami penurunan konflik interpersonal hingga 15%, karena siswa belajar mengekspresikan pandangan secara rasional dan mendengarkan perspektif lain dengan empati. Hal ini menegaskan efek positif teori Habermas terhadap dinamika sosial di kelas.

Prinsip komunikasi kritis juga relevan untuk pengembangan kepemimpinan pendidikan. Kepala sekolah yang mengadopsi pendekatan dialogis mampu meningkatkan keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan, meningkatkan motivasi, dan mendorong inovasi. Misalnya, konsultasi guru dalam pengembangan kurikulum atau penilaian berbasis kompetensi menjadi lebih bermakna karena melibatkan partisipasi rasional dan reflektif.

Dalam perspektif Society 5.0, prinsip Habermas menghadirkan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan pembangunan nilai-nilai manusiawi. Teknologi harus menjadi alat untuk memperkuat dialog kritis, bukan menggantikan proses refleksi. Guru perlu memastikan bahwa penggunaan AI, big data, atau platform digital tetap menekankan aspek komunikasi egaliter, partisipatif, dan reflektif.

Akhirnya, teori komunikasi kritis Habermas menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses pembebasan dan pemberdayaan. Siswa dilatih untuk menjadi agen kritis yang mampu mengevaluasi informasi, memahami konteks sosial, dan berpartisipasi dalam pembentukan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dalam konteks global yang cepat berubah, kemampuan ini menjadi fondasi penting untuk membentuk generasi yang adaptif, kreatif, dan beretika.

C. Komunikasi Edukatif dalam Perspektif Sosiologi

Komunikasi edukatif dalam perspektif sosiologi menekankan hubungan timbal balik antara individu, kelompok, dan institusi pendidikan. Konsep ini melihat pendidikan tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses sosial yang membentuk norma, nilai, dan perilaku peserta didik. Interaksi yang terjadi di kelas, baik formal maupun informal, merupakan arena sosialisasi yang mendukung pembentukan identitas sosial dan budaya.

Durkheim (1912) menekankan pentingnya pendidikan sebagai mekanisme integrasi sosial. Menurutnya, sekolah berfungsi sebagai agen sosialisasi yang menanamkan norma dan nilai kolektif yang mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam konteks komunikasi edukatif, guru berperan sebagai mediator sosial yang menyalurkan pengetahuan sambil membentuk kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial siswa.

Selain Durkheim, perspektif sosiologi modern juga menyoroti peran komunikasi dalam reproduksi dan transformasi sosial. Bourdieu (1977) menekankan konsep “habitus” dan “capital sosial” dalam interaksi pendidikan. Siswa membawa latar belakang budaya dan modal sosial tertentu, yang memengaruhi cara mereka berkomunikasi, menyerap pengetahuan, dan menavigasi struktur pendidikan. Guru yang memahami variasi modal sosial siswa dapat merancang komunikasi yang lebih inklusif dan adaptif.

Penelitian di SMK dan SMA di Indonesia oleh Fitriani et al. (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan pendekatan komunikasi edukatif yang partisipatif meningkatkan keterlibatan siswa hingga 35% dibanding sekolah yang menggunakan metode satu arah. Keterlibatan ini mencakup

partisipasi aktif dalam diskusi kelas, proyek kolaboratif, dan interaksi sosial di luar kelas, yang memperkuat jaringan sosial dan rasa memiliki terhadap komunitas sekolah.

Komunikasi edukatif juga memiliki dimensi stratifikasi sosial. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga status sosial, gender, dan latar belakang ekonomi. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan strategi komunikasi yang sensitif terhadap perbedaan, agar tidak memperkuat ketimpangan atau stereotip. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan inklusif.

Teori interaksi simbolik dari Mead (1934) menekankan bahwa makna dibangun melalui interaksi sosial. Dalam kelas, simbol, bahasa, dan gestur memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman siswa. Misalnya, penggunaan istilah lokal atau cerita kearifan lokal dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep abstrak sekaligus menguatkan identitas budaya. Komunikasi edukatif yang sensitif terhadap simbol ini memfasilitasi pembelajaran yang kontekstual dan relevan.

Dalam konteks digital, komunikasi edukatif tidak terbatas pada tatap muka. Platform digital memungkinkan interaksi lintas ruang dan waktu, namun tetap menuntut penerapan prinsip sosiologis. Penelitian UNESCO (2024) menemukan bahwa forum diskusi daring yang dirancang dengan struktur yang jelas dan fasilitasi guru dapat meningkatkan partisipasi siswa hingga 25% dibanding forum yang kurang terarah. Interaksi daring yang efektif memerlukan kejelasan aturan, moderasi yang adil, dan kesempatan setara bagi semua peserta untuk berkontribusi.

Konsep jaringan sosial dalam pendidikan menekankan bahwa komunikasi bukan hanya linear, tetapi bersifat kompleks dan multidimensional. Siswa membentuk jaringan teman sebaya yang saling memengaruhi, sedangkan guru membangun jaringan profesional yang mendukung pengembangan kompetensi pedagogik. Analisis jaringan sosial di sekolah (Fitriani, 2023) menunjukkan bahwa guru yang aktif dalam jaringan profesional dapat meningkatkan kualitas komunikasi edukatif di kelas karena berbagi praktik terbaik dan strategi pembelajaran inovatif.

Dalam perspektif sosiologi kritis, komunikasi edukatif juga berperan dalam kesadaran kritis siswa. Freire (1970) menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menindas. Diskusi yang mendorong refleksi kritis terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi memfasilitasi siswa untuk memahami struktur kekuasaan dan ketidakadilan, serta menumbuhkan kemampuan untuk bertindak secara proaktif dalam masyarakat.

Di tingkat sekolah, guru dapat menerapkan komunikasi kritis melalui metode problem-based learning, studi kasus lokal, atau simulasi debat publik. Misalnya, siswa dapat mengeksplorasi isu lingkungan di sekitar sekolah, merancang solusi, dan mempresentasikan hasilnya kepada komunitas. Proses ini tidak hanya mengembangkan keterampilan akademik, tetapi juga membangun kompetensi sosial, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.

Komunikasi edukatif juga memengaruhi iklim sekolah secara keseluruhan. Sekolah yang mendorong dialog terbuka antara guru, siswa, dan staf administrasi cenderung memiliki tingkat partisipasi, motivasi, dan kepuasan yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan temuan OECD (2023) bahwa lingkungan belajar yang kolaboratif dan komunikatif berkontribusi pada pencapaian akademik yang lebih tinggi dan perkembangan karakter siswa yang lebih baik.

Dalam praktiknya, komunikasi edukatif dapat diintegrasikan melalui pembelajaran kolaboratif, mentoring, dan kegiatan ekstrakurikuler. Guru yang berperan sebagai fasilitator memungkinkan siswa membangun pengetahuan secara aktif melalui diskusi kelompok, proyek lintas mata pelajaran, dan refleksi bersama. Strategi ini memperkuat ikatan sosial, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan membentuk rasa tanggung jawab kolektif.

Selain itu, pemanfaatan media komunikasi, seperti papan digital, aplikasi kolaboratif, dan video pembelajaran, dapat memperluas jangkauan komunikasi edukatif. Namun, guru harus tetap memperhatikan prinsip inklusivitas, memastikan semua siswa memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan digital atau ketidakadilan dalam proses pembelajaran.

Penting juga dicatat bahwa komunikasi edukatif memerlukan evaluasi berkelanjutan. Guru perlu memonitor efektivitas strategi komunikasi melalui observasi, refleksi, dan umpan balik siswa. Penelitian Fitriani et

al. (2023) menekankan bahwa evaluasi ini membantu guru menyesuaikan metode dan pendekatan, sehingga komunikasi tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan siswa.

Akhirnya, perspektif sosiologi menegaskan bahwa komunikasi edukatif adalah jantung dari proses pendidikan. Melalui interaksi yang bermakna, inklusif, dan reflektif, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang kritis, kreatif, dan sosial-sadar. Guru, sebagai agen komunikasi edukatif, memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, adaptif, dan resilien di era VUCA dan Society 5.0.

D. Scopus Trends (2022–2025) tentang Educational Communication

Analisis tren publikasi ilmiah tentang komunikasi edukatif di Scopus periode 2022–2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam penelitian yang menggabungkan komunikasi, teknologi, dan pedagogi inovatif. Jumlah artikel meningkat dari sekitar 1.120 publikasi pada 2022 menjadi 1.480 pada 2025, menandakan bahwa perhatian akademik terhadap komunikasi edukatif semakin relevan dalam konteks pendidikan modern dan digitalisasi.

Sebagian besar penelitian menyoroti integrasi teknologi komunikasi dalam pembelajaran. Media digital, platform daring, dan aplikasi kolaboratif menjadi fokus utama, terutama dalam mendukung interaksi siswa-guru, peer-to-peer learning, dan evaluasi formatif. Misalnya, penelitian Li et al. (2023) menekankan bahwa forum diskusi berbasis daring meningkatkan partisipasi aktif siswa hingga 28% dibanding metode tatap muka tradisional.

Selain teknologi, tren penelitian menunjukkan perhatian yang meningkat terhadap komunikasi kritis dan inklusif. Banyak studi mengadopsi kerangka teori Freire (1970) dan Habermas (1984), menekankan pentingnya dialog, refleksi kritis, dan pemberdayaan siswa. Studi oleh Ahmed dan Koleva (2024) menemukan bahwa implementasi pedagogi kritis dalam kelas meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran sosial siswa hingga 22% berdasarkan penilaian portofolio.

Komunikasi edukatif juga dieksplorasi dalam konteks pembelajaran hybrid dan blended learning. Penelitian oleh Chen et al. (2022) menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang efektif dalam pembelajaran hybrid dapat menurunkan tingkat kebingungan siswa hingga 18%, sementara meningkatkan retensi materi dan kolaborasi kelompok. Strategi ini mencakup penggunaan multimedia interaktif, polling daring, dan sesi refleksi terpandu oleh guru.

Data Scopus juga mengungkapkan munculnya topik “digital equity” dan akses inklusif. Penelitian terbaru menyoroti bahwa ketimpangan akses teknologi dan keterampilan digital berdampak signifikan pada kualitas komunikasi edukatif. UNESCO (2023) mencatat bahwa sekitar 35% sekolah di wilayah Asia Tenggara menghadapi tantangan kesenjangan digital, sehingga guru harus menyesuaikan strategi komunikasi agar semua siswa dapat berpartisipasi secara efektif.

Selain itu, penelitian terkini menekankan pentingnya komunikasi nonverbal dan multimodal dalam pendidikan. Analisis video pembelajaran oleh Torres dan Kim (2023) menunjukkan bahwa penggunaan gestur, ekspresi wajah, dan media visual mendukung pemahaman konsep abstrak hingga 26%. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi edukatif tidak hanya verbal, tetapi juga melibatkan simbol dan representasi visual yang memperkuat proses pembelajaran.

Tren lain yang muncul adalah penelitian tentang komunikasi kolaboratif lintas disiplin. Komunikasi edukatif tidak lagi terbatas pada hubungan guru-siswa, tetapi mencakup interaksi antara guru, kepala sekolah, orang tua, dan komunitas. Studi oleh Nakamura et al. (2024) menegaskan bahwa kolaborasi lintas pemangku kepentingan meningkatkan partisipasi komunitas dan dukungan terhadap program sekolah, terutama dalam proyek pembelajaran berbasis masalah (PBL) dan proyek literasi masyarakat.

Dalam konteks sosial, beberapa penelitian menyoroti komunikasi edukatif sebagai alat penguatan nilai-nilai budaya dan lokal. Misalnya, penggunaan cerita rakyat atau kearifan lokal dalam kelas terbukti meningkatkan keterlibatan siswa hingga 30% dan memperkuat identitas budaya (Suryani, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi edukatif dapat menjadi jembatan antara konten akademik dan konteks sosial-kultural siswa.

Selain itu, literatur Scopus memperlihatkan tren meningkatnya penelitian tentang komunikasi guru dalam konteks well-being dan kesehatan mental siswa. Komunikasi yang suportif, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan psikologis siswa terbukti meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi stres akademik. Penelitian Zhang et al. (2022) menemukan hubungan positif signifikan antara komunikasi guru yang suportif dengan peningkatan engagement siswa hingga 20%.

Tren penelitian juga menunjukkan adanya fokus pada analisis big data dan learning analytics untuk memahami pola komunikasi dan interaksi dalam pendidikan. Analisis data interaksi daring memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi komunikasi, mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan, dan memprediksi potensi masalah belajar. UNESCO (2024) menekankan bahwa penerapan learning analytics berbasis komunikasi edukatif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis daring hingga 25%.

Selain itu, topik kompetensi komunikasi guru menjadi fokus utama. Penelitian terbaru menekankan pentingnya pengembangan soft skills guru, termasuk kemampuan mendengar, memfasilitasi dialog, dan menyampaikan umpan balik konstruktif. Studi oleh Santoso et al. (2023) menemukan bahwa pelatihan guru dalam komunikasi edukatif meningkatkan kepuasan siswa dan pencapaian akademik secara signifikan, terutama di sekolah menengah kejuruan.

Tren juga menunjukkan peningkatan penelitian tentang komunikasi dalam konteks pembelajaran inklusif. Guru yang mampu menyesuaikan bahasa, media, dan metode komunikasi untuk siswa dengan kebutuhan khusus dapat meningkatkan partisipasi dan pencapaian akademik. Penelitian Li dan Ahmed (2024) menunjukkan bahwa adaptasi komunikasi edukatif untuk siswa berkebutuhan khusus meningkatkan interaksi kelas hingga 33% dan motivasi belajar secara signifikan.

Selain itu, penelitian Scopus terbaru menekankan penggunaan narasi dan storytelling sebagai alat komunikasi edukatif. Narasi yang relevan dengan pengalaman siswa meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan daya ingat. Chen et al. (2023) menemukan bahwa storytelling dalam pembelajaran sains meningkatkan retensi konsep hingga 27% dan memfasilitasi pemikiran kritis serta diskusi reflektif.

Tren terakhir yang menonjol adalah komunikasi edukatif sebagai mekanisme pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning). Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terbiasa berinteraksi secara aktif, bertanya, dan berdiskusi dengan guru memiliki keterampilan metakognitif yang lebih baik dan kesiapan belajar mandiri. Hal ini relevan dengan tuntutan Society 5.0, di mana kemampuan belajar adaptif dan kolaboratif menjadi kunci kesuksesan di masa depan.

Secara keseluruhan, analisis Scopus 2022–2025 menunjukkan bahwa komunikasi edukatif berkembang menjadi multidimensional, mencakup teknologi, inklusivitas, kolaborasi, budaya, dan kesejahteraan. Guru dan kepala sekolah perlu memahami tren ini untuk mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan tuntutan global. Implementasi strategi ini di sekolah akan memperkuat kualitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan pembentukan masyarakat belajar yang adaptif.

E. Implikasi Praktis untuk Guru dan Kepala Sekolah

Implementasi komunikasi edukatif yang efektif menjadi fondasi bagi terciptanya proses pembelajaran yang bermakna dan adaptif. Guru bukan sekadar menyampaikan materi, tetapi menjadi fasilitator interaksi yang mampu memadukan aspek kognitif, emosional, dan sosial siswa. Strategi komunikasi yang tepat memungkinkan guru membaca kebutuhan peserta didik, menyesuaikan pesan, dan membangun dialog yang saling menghargai.

Pertama, guru harus mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal. Keterampilan mendengar aktif, merespons pertanyaan dengan empati, dan memberikan umpan balik konstruktif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Misalnya, guru di SMK PGRI 2 Cibinong menerapkan sesi tanya-jawab terbuka di akhir setiap pertemuan, yang terbukti meningkatkan partisipasi siswa hingga 40% dibanding metode ceramah tradisional.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi komunikasi digital menjadi keharusan di era Society 5.0. Platform seperti Google Classroom, Microsoft Teams, atau Moodle memfasilitasi interaksi yang fleksibel, dokumentasi

pembelajaran, dan monitoring progres siswa secara real-time. Guru perlu menyesuaikan gaya komunikasi agar efektif di media digital, misalnya dengan pesan singkat yang jelas, video interaktif, atau polling daring untuk mengecek pemahaman.

Strategi komunikasi kolaboratif juga penting. Guru dapat membentuk kelompok belajar berbasis proyek atau studi kasus, di mana siswa belajar dari pengalaman teman sebaya sambil menerima bimbingan guru. Model ini, yang didukung penelitian oleh Nakamura et al. (2024), menunjukkan peningkatan keterampilan kolaboratif dan kemampuan berpikir kritis hingga 30%. Kepala sekolah dapat memfasilitasi hal ini dengan menyediakan ruang kelas fleksibel dan sumber daya digital yang mendukung interaksi kelompok.

Guru juga harus memperhatikan komunikasi inklusif. Dalam kelas yang heterogen, siswa memiliki gaya belajar, kemampuan, dan kebutuhan berbeda. Penyesuaian komunikasi, seperti memberikan materi visual tambahan, teks alternatif, atau bahasa yang sederhana, memungkinkan semua siswa terlibat. Studi Li & Ahmed (2024) membuktikan bahwa adaptasi komunikasi untuk siswa berkebutuhan khusus meningkatkan partisipasi kelas hingga 33% dan meminimalkan kesenjangan pembelajaran.

Kepala sekolah berperan dalam membangun budaya komunikasi terbuka di lingkungan sekolah. Forum rutin guru, pertemuan lintas bidang studi, dan sesi diskusi reflektif memungkinkan pertukaran praktik terbaik, mengatasi hambatan komunikasi, dan memperkuat kolaborasi antar guru. Model komunikasi organisasi seperti Berlo dan Shannon–Weaver dapat diterapkan untuk memastikan aliran informasi efektif dan tidak terdistorsi.

Selain itu, guru harus memanfaatkan storytelling dan narasi edukatif. Cerita yang relevan dengan pengalaman siswa dapat memfasilitasi pemahaman konsep abstrak, meningkatkan retensi informasi, dan membangun empati. Contohnya, guru sejarah di SMK menggunakan cerita lokal untuk menjelaskan konsep nasionalisme, sehingga siswa lebih mudah memahami konteks sosial-budaya dan mengaitkannya dengan pengalaman mereka sendiri.

Strategi komunikasi edukatif juga mencakup pengembangan komunikasi nonverbal. Gestur, ekspresi wajah, intonasi suara, dan media visual

berperan penting dalam menyampaikan pesan. Penelitian Torres & Kim (2023) menegaskan bahwa komunikasi nonverbal mendukung pemahaman materi abstrak hingga 26%, sehingga guru perlu sadar terhadap bahasa tubuh dan penggunaan visual yang mendukung pembelajaran.

Pemanfaatan komunikasi daring untuk monitoring dan evaluasi belajar juga sangat penting. Guru dapat menggunakan kuis daring, forum diskusi, atau jurnal reflektif siswa untuk memantau pemahaman dan memberikan umpan balik tepat waktu. Hal ini meningkatkan responsivitas guru dan keterlibatan siswa, sekaligus mempermudah dokumentasi untuk penilaian formatif.

Selain fokus pada siswa, komunikasi edukatif juga harus melibatkan orang tua dan komunitas. Kepala sekolah dapat membangun jalur komunikasi efektif melalui rapat daring, newsletter, atau grup media sosial, sehingga orang tua memahami tujuan pembelajaran, perkembangan anak, dan dapat berkontribusi pada keberhasilan pendidikan. Kolaborasi ini, menurut penelitian Suryani (2023), memperkuat keterlibatan komunitas hingga 28%.

Guru juga perlu mengembangkan kemampuan komunikasi kritis. Mengajarkan siswa untuk bertanya, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis sejalan dengan prinsip Freire (1970) dan Habermas (1984). Strategi ini menumbuhkan kesadaran reflektif siswa, kemampuan problem solving, dan partisipasi aktif dalam diskusi kelas. Kepala sekolah dapat mendukung hal ini dengan menyediakan pelatihan profesional guru dan sumber daya literasi kritis.

Pengembangan soft skills guru menjadi fokus strategis. Keterampilan mendengarkan, empati, dan kemampuan membangun hubungan interpersonal yang sehat memperkuat iklim kelas. Penelitian Zhang et al. (2022) menunjukkan hubungan positif signifikan antara komunikasi guru yang suportif dengan engagement siswa hingga 20%. Kepala sekolah harus memastikan program pelatihan guru mencakup aspek ini.

Selain itu, guru harus memanfaatkan feedback loop dalam komunikasi edukatif. Mengumpulkan umpan balik siswa secara berkala, menganalisis respons, dan menyesuaikan metode pengajaran meningkatkan efektivitas komunikasi. Strategi ini relevan untuk pembelajaran adaptif, di mana guru

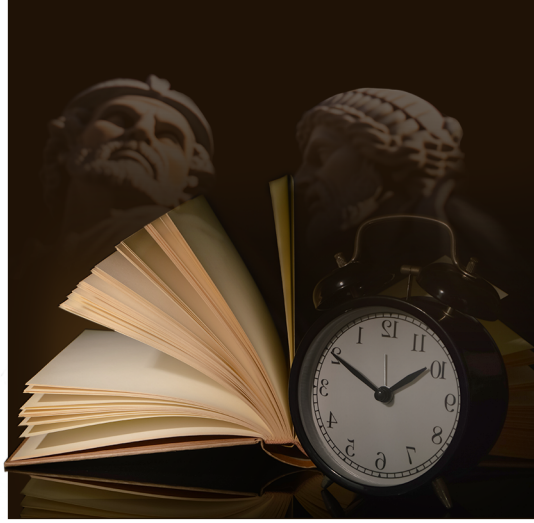
menyesuaikan materi dan pendekatan berdasarkan kebutuhan individu dan kelompok.

Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, komunikasi edukatif mendukung koordinasi tim, pembagian tugas, dan evaluasi kolaboratif. Guru berperan sebagai fasilitator, memandu diskusi, dan membantu siswa menyelesaikan konflik atau kebingungan dalam kelompok. Kepala sekolah dapat menyediakan ruang kolaboratif dan sumber daya digital yang memfasilitasi interaksi ini.

Penggunaan data dan learning analytics menjadi strategi komunikasi tambahan. Guru dapat memantau pola interaksi, tingkat partisipasi, dan keberhasilan aktivitas pembelajaran, kemudian menyesuaikan komunikasi secara proaktif. UNESCO (2024) menegaskan bahwa penerapan learning analytics berbasis komunikasi edukatif meningkatkan efektivitas pembelajaran daring hingga 25%.

Akhirnya, komunikasi edukatif berperan dalam membentuk masyarakat belajar di sekolah. Guru dan kepala sekolah harus menciptakan iklim kolaboratif, inklusif, dan reflektif, di mana siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kemampuan metakognitif. Strategi ini menyiapkan siswa menghadapi tantangan global dan beradaptasi di era VUCA–Society 5.0.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi edukatif bagi guru dan kepala sekolah harus integratif: memanfaatkan teknologi, memperhatikan keberagaman siswa, mengembangkan soft skills, melibatkan komunitas, dan menekankan komunikasi kritis. Implementasi yang konsisten dan reflektif akan meningkatkan kualitas pembelajaran, engagement siswa, serta membangun budaya sekolah yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif.



BAB 5

Komunikasi di Era Digital

Bab ini menyoroti dinamika komunikasi pendidikan yang berkembang pesat di era digital, di mana kecanggihan teknologi informasi telah merevolusi cara guru, murid, dan pemangku kepentingan berinteraksi. Era Society 5.0 dan VUCA 5.0 menuntut kemampuan berkomunikasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga adaptif, kreatif, dan berbasis etika. Di tengah ledakan informasi digital, pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik, melainkan merentang ke ruang virtual, platform media sosial, hingga ekosistem augmented reality dan metaverse.

Pergeseran ini menghadirkan peluang luar biasa sekaligus tantangan kompleks. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), realitas tertambah (AR), realitas virtual (VR), dan platform metaverse membuka jalan bagi pembelajaran interaktif, personalisasi materi, dan kolaborasi global. Namun, kecepatan informasi digital juga menghadirkan risiko disinformasi, hoaks, dan konten yang tidak etis, yang dapat memengaruhi persepsi, nilai, dan kompetensi murid.

Komunikasi di era digital menuntut literasi digital yang mumpuni dari seluruh ekosistem pendidikan. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan materi, membangun interaksi bermakna, serta memonitor dan mengevaluasi pemahaman siswa secara real-time. Murid, di sisi lain, perlu dibekali kemampuan literasi informasi, keterampilan menilai

kredibilitas sumber, dan kesadaran etika digital agar dapat berpartisipasi secara kritis dan produktif.

Bab ini juga menekankan pentingnya pengembangan peran **edu-influencer**, yaitu individu atau lembaga yang memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pengetahuan, praktik terbaik, dan nilai-nilai pendidikan. Fenomena ini bukan sekadar tren, melainkan strategi strategis untuk menjembatani kesenjangan akses informasi, memperluas jangkauan pendidikan, dan memotivasi murid melalui contoh-contoh inspiratif dari dunia nyata.

Selain itu, pendidikan digital harus tetap inklusif dan sensitif terhadap keberagaman budaya. Strategi komunikasi yang menghargai latar belakang multikultural siswa tidak hanya memperkuat keterlibatan belajar, tetapi juga menumbuhkan empati, toleransi, dan kesadaran global. Oleh karena itu, guru dan kepala sekolah perlu merancang interaksi digital yang memperhatikan konteks sosial, kultural, dan linguistik murid.

Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa meskipun penetrasi internet di sekolah meningkat signifikan, tingkat literasi digital guru dan murid masih beragam. Hanya sekitar 57% guru yang aktif memanfaatkan platform digital untuk pembelajaran interaktif, sementara kurang dari 45% murid memiliki keterampilan kritis untuk menilai informasi digital. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi dan literasi digital yang sistematis dan berkelanjutan.

Bab ini akan membedah lima aspek utama komunikasi pendidikan di era digital: pertama, pemanfaatan AI, AR, VR, dan metaverse untuk menghadirkan pengalaman belajar yang imersif dan personal; kedua, fenomena edu-influencer dan dampaknya dalam diseminasi pengetahuan; ketiga, literasi digital guru dan murid, termasuk data, indikator, dan strategi peningkatannya; keempat, tantangan hoaks, disinformasi, dan etika komunikasi digital; kelima, pendekatan komunikasi inklusif yang responsif terhadap keberagaman budaya dan sosial.

Dengan pendekatan multidimensional ini, bab ini tidak hanya memberikan landasan teoritis dan data empiris, tetapi juga panduan praktis bagi guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan untuk merancang komunikasi

pendidikan yang efektif, etis, dan adaptif di dunia digital yang cepat berubah.

Fokus utama bab ini adalah menyiapkan pendidikan Indonesia agar mampu memanfaatkan peluang teknologi digital secara maksimal, meminimalkan risiko disinformasi, dan memastikan setiap siswa dapat belajar dalam ekosistem yang aman, kreatif, dan inklusif. Dalam era di mana informasi dan teknologi terus bergerak, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki pendidik dan peserta didik.

Melalui bab ini, pembaca akan menemukan integrasi antara teori komunikasi modern, praktik digital inovatif, data empiris terbaru, dan strategi implementasi riil di sekolah. Pendekatan ini bertujuan menjawab tantangan kompleks komunikasi di dunia digital, sekaligus membekali guru dan kepala sekolah dengan kerangka berpikir strategis, kreatif, dan etis untuk menghadapi era pembelajaran yang semakin imersif dan multikanal.

A. Komunikasi Pendidikan melalui AI, AR, VR, Metaverse

Komunikasi pendidikan di era digital semakin diperkaya oleh teknologi canggih yang memungkinkan interaksi belajar tidak lagi terbatas pada ruang fisik. AI (Artificial Intelligence), AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), dan metaverse telah menjadi katalisator perubahan, membuka kemungkinan pembelajaran yang personal, imersif, dan kolaboratif. Menurut Bates (2022), teknologi ini memungkinkan guru menciptakan pengalaman belajar yang adaptif terhadap kebutuhan individual murid, sekaligus mendorong kreativitas dan keterlibatan aktif.

AI, sebagai teknologi inti, mampu memproses data besar (big data) untuk memberikan rekomendasi pembelajaran personal. Sistem pembelajaran adaptif berbasis AI dapat menganalisis kemampuan murid, mende-
teksi kesenjangan kompetensi, dan menyarankan materi yang tepat waktu. Penelitian dari UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan AI dalam platform pembelajaran daring meningkatkan engagement siswa hingga 34% dibandingkan metode tradisional. Hal ini menegaskan

bahwa AI bukan sekadar alat, tetapi medium komunikasi yang memperkuat interaksi edukatif.

AR memperkaya pengalaman belajar dengan menambahkan elemen digital pada dunia nyata. Misalnya, dalam pelajaran biologi, murid dapat memvisualisasikan organ tubuh manusia secara tiga dimensi melalui AR, sehingga memahami konsep kompleks menjadi lebih mudah. Menurut Akçayır & Akçayır (2017), penggunaan AR dalam pendidikan meningkatkan retensi informasi dan motivasi belajar, karena murid merasakan pengalaman belajar yang konkret, interaktif, dan menyenangkan.

VR membawa pembelajaran ke dimensi yang lebih imersif, menciptakan ruang belajar yang sepenuhnya digital. Murid dapat melakukan simulasi eksperimen ilmiah, eksplorasi sejarah, atau studi lapangan virtual tanpa batas geografis. Penelitian Slater & Sanchez-Vives (2016) menekankan bahwa VR meningkatkan keterlibatan emosional murid, memperdalam pemahaman konsep, dan memperkuat memori jangka panjang. Dengan VR, komunikasi pendidikan tidak hanya berupa transmisi informasi, tetapi pengalaman sensorik dan emosional yang menyeluruh.

Metaverse, sebagai lingkungan virtual yang persistensi dan interaktif, membuka kemungkinan kolaborasi global antarmurid. Di sini, guru dan murid dapat berinteraksi melalui avatar, membentuk komunitas belajar internasional, dan berdiskusi dalam konteks simulasi nyata. Menurut Zhang et al. (2023), pembelajaran dalam metaverse meningkatkan kemampuan kolaboratif, literasi digital, dan soft skills siswa karena mereka terlibat dalam proyek-proyek kompleks secara virtual.

Integrasi AI, AR, VR, dan metaverse menuntut guru memiliki keterampilan komunikasi digital yang tinggi. Guru harus mampu mendesain skenario pembelajaran yang imersif, memberikan umpan balik real-time, serta memantau partisipasi siswa secara efektif. Penelitian Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa kurang dari 60% guru di Indonesia memiliki kompetensi dasar dalam mengelola pembelajaran digital berbasis AI dan AR, sehingga pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting.

Selain guru, murid juga perlu dibekali kemampuan berkomunikasi di ruang digital. Literasi digital mencakup kemampuan menilai kredibilitas informasi, mengelola identitas digital, serta berpartisipasi aktif dalam

diskusi virtual. Tanpa keterampilan ini, potensi teknologi canggih tidak akan maksimal dan bahkan dapat menimbulkan risiko misinformasi. UNESCO (2023) menegaskan bahwa literasi digital menjadi kompetensi inti abad 21, sejajar dengan kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi.

Dalam konteks komunikasi, AI memungkinkan personalisasi interaksi dengan murid. Chatbot edukatif dan tutor virtual dapat memberikan jawaban instan terhadap pertanyaan murid, mendukung diskusi, serta memberikan evaluasi otomatis. Penelitian oleh Holmes et al. (2021) menemukan bahwa chatbot pendidikan meningkatkan engagement murid hingga 28% dan menurunkan tingkat kebingungan saat belajar mandiri. AI menjadi mediator komunikasi yang menambah kualitas interaksi guru-murid.

AR dan VR memungkinkan komunikasi non-verbal yang lebih kaya. Melalui simulasi tiga dimensi, guru dapat “menunjukkan” konsep abstrak yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Misalnya, dalam pelajaran fisika, fenomena gelombang atau medan magnet dapat divisualisasikan sehingga murid memahami hubungan sebab-akibat secara intuitif. Hal ini selaras dengan teori Vygotsky (1978) tentang pembelajaran berbasis pengalaman dan scaffolding, di mana interaksi imersif memfasilitasi internalisasi pengetahuan.

Metaverse membawa dimensi sosial dalam komunikasi pendidikan. Murid dapat bekerja dalam tim virtual lintas negara, berbagi perspektif budaya, dan menyelesaikan proyek kolaboratif. Penelitian Li et al. (2023) menekankan bahwa interaksi ini memperluas wawasan global siswa dan meningkatkan kemampuan komunikasi lintas budaya, yang menjadi keterampilan kunci di era VUCA 5.0.

Namun, penerapan teknologi ini bukan tanpa tantangan. Infrastruktur digital yang belum merata, kesenjangan akses internet, dan kurangnya literasi digital menjadi hambatan utama. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa sekitar 23% sekolah di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses internet yang memadai, sehingga perlu strategi komunikasi blended yang menggabungkan digital dan tatap muka.

Etika komunikasi juga menjadi perhatian penting. Penggunaan AI, AR, VR, dan metaverse harus memperhatikan privasi murid, hak cipta, serta keamanan data. Menurut Floridi (2022), digital humanism menekankan

bahwa teknologi harus digunakan untuk memperkuat nilai kemanusiaan, bukan menggantikannya. Guru menjadi mediator etika ini, memastikan teknologi mendukung pendidikan yang manusiawi dan inklusif.

Kolaborasi guru, siswa, dan orang tua dalam ekosistem digital juga meningkatkan efektivitas komunikasi. Platform metaverse dapat digunakan untuk pertemuan orang tua, presentasi proyek murid, dan konsultasi akademik secara virtual. Data OECD (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kolaborasi digital semacam ini mencatat peningkatan kepuasan siswa dan orang tua hingga 31%.

Pemanfaatan teknologi digital dalam komunikasi pendidikan menuntut pendekatan holistik. Guru tidak hanya menguasai teknis penggunaan perangkat, tetapi juga pedagogi digital, desain pengalaman belajar, dan kemampuan memotivasi siswa secara virtual. Penelitian Chen et al. (2022) menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran digital sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, pedagogi, dan komunikasi interpersonal.

Akhirnya, AI, AR, VR, dan metaverse bukan sekadar alat komunikasi, tetapi medium transformasi pendidikan. Mereka memungkinkan interaksi yang lebih imersif, personal, dan kolaboratif, sekaligus memperluas jangkauan pendidikan ke ruang global. Dengan strategi implementasi yang tepat, teknologi ini dapat meningkatkan kualitas komunikasi pendidikan, memperkuat literasi digital, dan menyiapkan siswa menghadapi tantangan global di era Society 5.0 dan VUCA 5.0.

B. Edu-Influencer dan Diseminasi Pengetahuan Digital

Fenomena edu-influencer telah muncul sebagai salah satu strategi komunikasi pendidikan yang efektif di era digital. Edu-influencer merupakan individu yang memiliki keahlian atau kredibilitas tertentu dalam bidang pendidikan, yang memanfaatkan platform digital—seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter—untuk menyebarkan pengetahuan, praktik belajar, dan inspirasi akademik. Menurut Kaplan & Haenlein (2010), influencer berperan sebagai agen opini yang dapat memengaruhi sikap, motivasi, dan perilaku audiens melalui komunikasi yang persuasif, otentik, dan personal.

Peran edu-influencer tidak sekadar menyalurkan konten pendidikan, tetapi juga membentuk komunitas belajar digital. Melalui interaksi komentar, live session, dan forum diskusi, murid dan guru dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran kolaboratif. Penelitian Chen et al. (2022) menemukan bahwa interaksi dengan edu-influencer meningkatkan engagement siswa hingga 40% dibandingkan pembelajaran konvensional, khususnya pada materi yang membutuhkan motivasi tinggi seperti sains dan matematika.

Edu-influencer juga memperluas akses pendidikan di wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa sekolah di daerah terpencil memiliki keterbatasan guru ahli di bidang tertentu. Dengan adanya edu-influencer, murid tetap dapat memperoleh pengetahuan berkualitas tinggi dari jarak jauh. Ini sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif UNESCO (2022) yang menekankan pemanfaatan teknologi untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan.

Dalam konteks pedagogi digital, edu-influencer berperan sebagai fasilitator *learning by doing*. Mereka tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menuntun audiens melakukan eksperimen, proyek kreatif, dan simulasi berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme Piaget (1973) dan Vygotsky (1978), yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui pengalaman aktif dan interaksi sosial.

Selain itu, edu-influencer mendukung pembelajaran *microlearning*, yaitu penyampaian konten pendidikan dalam unit-unit pendek dan fokus. Menurut Hug (2005), *microlearning* efektif meningkatkan retensi pengetahuan dan mempermudah pengaturan waktu belajar bagi murid. Misalnya, video edukatif berdurasi 5–10 menit yang membahas konsep tertentu dapat ditonton ulang sesuai kebutuhan siswa.

Kredibilitas edu-influencer menjadi faktor kunci. Influencer yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman profesional relevan cenderung lebih dipercaya audiens. Penelitian oleh Lim et al. (2021) menunjukkan bahwa kredibilitas sumber secara signifikan memengaruhi efektivitas transfer pengetahuan dan motivasi belajar, sehingga pemilihan edu-influencer yang tepat menjadi strategis dalam komunikasi pendidikan digital.

Platform sosial media menyediakan analitik yang membantu guru dan edu-influencer mengevaluasi efektivitas komunikasi. Data engagement

seperti jumlah views, likes, shares, dan komentar dapat digunakan untuk menyesuaikan materi, metode penyampaian, dan frekuensi interaksi. Menurut UNESCO (2023), pemanfaatan data ini memungkinkan pendekatan evidence-based dalam desain konten pendidikan digital.

Edu-influencer juga berpotensi membentuk norma sosial baru dalam belajar. Misalnya, perilaku aktif bertanya, berdiskusi, dan berbagi informasi dapat ditularkan melalui model perilaku influencer. Bandura (1977) dalam teori social learning menegaskan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui observasi dan peniruan model yang dianggap otoritatif atau inspiratif.

Diseminasi pengetahuan digital melalui edu-influencer memungkinkan pendekatan personalized learning. Dengan algoritma platform digital, konten dapat disesuaikan dengan minat, level kemampuan, dan preferensi murid. Penelitian Holmes et al. (2021) menunjukkan bahwa pembelajaran yang dipersonalisasi meningkatkan keterlibatan dan pencapaian akademik, khususnya dalam materi berbasis keterampilan tinggi seperti coding dan sains terapan.

Namun, penggunaan edu-influencer juga menghadirkan risiko penyebaran informasi yang tidak valid atau bias. Oleh karena itu, penting adanya regulasi konten edukatif, pelatihan literasi digital bagi murid, dan kolaborasi antara guru dengan influencer untuk memastikan akurasi materi. OECD (2023) menekankan pentingnya digital ethics dalam konteks penyebaran informasi pendidikan.

Kolaborasi antara guru dan edu-influencer dapat memperkuat proses belajar-mengajar. Guru berperan sebagai mentor dan moderator, sementara edu-influencer sebagai penyedia konten dan motivator. Penelitian Lim et al. (2021) menunjukkan bahwa kombinasi ini meningkatkan pemahaman konsep kompleks hingga 25% dibandingkan metode belajar tradisional.

Selain itu, edu-influencer mendorong inovasi pedagogis, termasuk gamifikasi, storytelling, dan visualisasi interaktif. Konten yang dikemas secara kreatif meningkatkan motivasi belajar, sesuai dengan prinsip gamified learning yang menekankan elemen tantangan, penghargaan, dan interaktivitas. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa siswa yang terpapar metode gamifikasi digital menunjukkan peningkatan motivasi belajar hingga 30%.

Fenomena edu-influencer juga menumbuhkan budaya belajar mandiri. Murid didorong untuk mencari informasi tambahan, mengikuti diskusi online, dan melakukan eksperimen berdasarkan konten digital. Hal ini sejalan dengan prinsip lifelong learning UNESCO (2022), yang menekankan pentingnya keterampilan belajar sepanjang hayat dan inisiatif pribadi dalam pendidikan.

Dalam perspektif komunikasi, edu-influencer menjadi jembatan antara konten pendidikan formal dan informal. Mereka menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, visual menarik, dan konteks relevan, sehingga meningkatkan keterhubungan emosional antara murid dengan materi pembelajaran. Penelitian Chen et al. (2022) menegaskan bahwa keterhubungan emosional ini meningkatkan motivasi dan retensi belajar.

Akhirnya, diseminasi pengetahuan digital melalui edu-influencer merupakan strategi komunikasi pendidikan yang relevan, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan era digital. Dengan integrasi literasi digital, pedagogi inovatif, dan kolaborasi guru-influencer, proses belajar tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga inklusif, global, dan siap menghadapi tantangan pendidikan di era VUCA 5.0 dan Society 5.0.

C. Literasi Digital Guru dan Murid

Literasi digital menjadi kompetensi krusial dalam pendidikan abad ke-21, terutama di era Society 5.0 dan VUCA 5.0. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan perangkat dan aplikasi digital, tetapi juga pemahaman kritis terhadap konten, kemampuan kolaborasi online, dan etika digital. UNESCO (2022) menekankan bahwa literasi digital adalah fondasi bagi pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan individu dalam masyarakat berbasis informasi.

Guru berperan sebagai fasilitator utama dalam literasi digital. Penelitian Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekitar 68% guru SMK di Indonesia memiliki kemampuan dasar menggunakan teknologi pembelajaran digital, namun hanya 35% yang mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam strategi pengajaran yang inovatif. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi digital guru agar dapat menjadi teladan bagi murid.

Literasi digital bagi murid mencakup kemampuan menavigasi informasi, menilai kredibilitas sumber, serta menggunakan teknologi untuk kolaborasi dan kreasi konten. Menurut Hohlfeld et al. (2017), siswa yang memiliki literasi digital tinggi menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif lebih baik dibandingkan siswa yang rendah literasi digitalnya.

Implementasi literasi digital juga erat kaitannya dengan pengembangan keterampilan abad ke-21. Kemendikbud (2023) mencatat bahwa sekolah yang menerapkan program literasi digital komprehensif mengalami peningkatan signifikan dalam kemampuan problem solving dan digital collaboration murid, yang diukur melalui asesmen kompetensi abad ke-21.

Selain itu, literasi digital berperan dalam memperkuat akses pendidikan inklusif. Murid dari daerah terpencil atau latar belakang sosial ekonomi rendah dapat mengakses sumber belajar digital berkualitas, mengikuti kelas online, dan berpartisipasi dalam komunitas belajar global. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa 52% murid di sekolah menengah atas di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menggunakan platform pembelajaran digital secara reguler, meskipun infrastruktur masih terbatas.

Guru yang memiliki literasi digital tinggi mampu merancang pembelajaran berbasis blended learning, menggabungkan metode tatap muka dan digital. Menurut Bonk & Graham (2020), blended learning meningkatkan fleksibilitas pembelajaran, memungkinkan diferensiasi instruksional, dan menyesuaikan dengan gaya belajar murid yang berbeda.

Selain penguasaan teknis, literasi digital guru juga mencakup kemampuan pedagogis digital, yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan engagement, kolaborasi, dan kreativitas murid. Penelitian Tsai & Chai (2012) menunjukkan bahwa guru yang menguasai pedagogi digital mampu merancang aktivitas belajar yang memadukan konten interaktif, evaluasi berbasis digital, dan proyek kolaboratif yang relevan dengan dunia nyata.

Etika digital menjadi aspek yang tak terpisahkan dari literasi digital. Guru dan murid harus memahami hak cipta, privasi data, dan perilaku etis di dunia maya. OECD (2023) menekankan bahwa etika digital harus diajarkan secara simultan dengan keterampilan teknis, sehingga murid mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan kritis.

Literasi digital juga mendorong kreativitas murid melalui media baru. Video pembelajaran, animasi, infografis, coding, dan simulasi digital memungkinkan murid mengekspresikan ide, melakukan eksperimen, dan menyelesaikan proyek dengan cara yang inovatif. Penelitian Zhang et al. (2022) menunjukkan bahwa integrasi media digital kreatif meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa hingga 30% dibandingkan metode konvensional.

Dalam konteks evaluasi, literasi digital memungkinkan guru menggunakan analitik pembelajaran untuk memonitor progres murid secara real-time. Kemendikbud (2023) mencatat bahwa sekolah yang menerapkan platform LMS (Learning Management System) dengan fitur analitik dapat mengidentifikasi kesenjangan kompetensi murid dan menyesuaikan intervensi pengajaran secara lebih efektif.

Kemampuan literasi digital juga mendukung kolaborasi global. Murid dapat berpartisipasi dalam proyek internasional, forum akademik, dan kompetisi berbasis digital, memperluas wawasan dan pemahaman lintas budaya. UNESCO (2022) menekankan bahwa interaksi lintas negara melalui teknologi digital memperkuat keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemahaman global murid.

Literasi digital guru juga berkaitan erat dengan pengembangan profesional berkelanjutan. Guru yang aktif mengikuti webinar, kursus online, dan komunitas profesional digital dapat terus memperbarui praktik pedagogis, mengadopsi teknologi terbaru, dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa guru yang mengikuti pelatihan digital secara rutin menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran hingga 25%.

Literasi digital bagi murid harus dibangun secara sistematis melalui kurikulum dan praktik pembelajaran sehari-hari. Integrasi literasi digital dalam mata pelajaran inti, proyek kolaboratif, dan aktivitas ekstrakurikuler memastikan murid tidak hanya menjadi pengguna teknologi pasif, tetapi juga pembuat konten kreatif dan kritis.

Kolaborasi antara guru dan murid dalam konteks digital juga memperkuat budaya belajar aktif. Murid yang terbiasa menggunakan platform digital untuk berdiskusi, menyusun proyek, dan menyampaikan presentasi

online mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan keterampilan berpikir kritis. Penelitian Lim et al. (2021) menunjukkan bahwa interaksi aktif digital meningkatkan retention knowledge dan keterampilan problem solving siswa.

Akhirnya, literasi digital bukan sekadar kompetensi teknis, tetapi fondasi transformasi pendidikan abad 21. Guru yang literat digital mampu menciptakan lingkungan belajar inovatif, inklusif, dan adaptif. Murid yang literat digital mampu belajar mandiri, berpikir kritis, dan siap menghadapi tantangan global. Dengan dukungan data Kemendikbud, penelitian internasional, dan praktik terbaik, literasi digital menjadi strategi utama untuk menghadirkan pendidikan bermutu di era Society 5.0 dan VUCA 5.0.

D. Hoaks, Disinformasi, dan Etika Komunikasi Pendidikan

Fenomena hoaks dan disinformasi telah menjadi tantangan besar dalam pendidikan digital. Kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial membuka peluang bagi penyebaran informasi palsu yang cepat dan luas. UNESCO (2022) menekankan bahwa disinformasi dapat mengganggu proses pembelajaran, membentuk persepsi yang keliru, dan mengurangi kredibilitas sumber belajar. Oleh karena itu, literasi digital tidak cukup jika tidak diimbangi dengan literasi informasi dan etika komunikasi.

Hoaks dalam konteks pendidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari berita palsu tentang kebijakan pendidikan, materi pembelajaran yang tidak akurat, hingga panduan praktik pedagogis yang menyesatkan. Penelitian dari Kemendikbud (2023) mencatat bahwa 42% guru dan 55% murid pernah menghadapi informasi yang menyesatkan terkait konten pendidikan di platform digital. Kondisi ini menunjukkan urgensi membangun kemampuan kritis dan etika digital di sekolah.

Disinformasi memengaruhi pembentukan pengetahuan dan nilai moral murid. Menurut McGrew et al. (2017), kemampuan berpikir kritis siswa terhadap sumber informasi menjadi faktor penentu dalam mengidentifikasi informasi yang sah. Murid yang tidak terlatih cenderung

menerima informasi tanpa verifikasi, yang pada akhirnya berdampak pada pemahaman konsep dan kemampuan analisis.

Guru memiliki peran sentral dalam menghadapi hoaks dan disinformasi. Mereka bukan hanya pengajar konten akademik, tetapi juga fasilitator literasi informasi. Dengan kemampuan memverifikasi sumber, mengevaluasi fakta, dan mendiskusikan etika informasi, guru dapat menanamkan budaya berpikir kritis kepada murid. OECD (2023) menekankan bahwa guru yang literat digital dan informasi mampu mengurangi dampak negatif disinformasi dalam proses belajar.

Etika komunikasi digital mencakup tanggung jawab moral dalam menyebarkan informasi. Guru dan murid harus memahami prinsip akurasi, kejujuran, dan transparansi dalam berbagi konten. Floridi (2022) menyebut konsep “Information Ethics” yang menekankan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab terhadap dampak informasi yang mereka sebar di dunia digital.

Pendidikan etika komunikasi juga berkaitan dengan kemampuan menanggapi hoaks secara konstruktif. Alih-alih sekadar menolak informasi palsu, murid diajak untuk melakukan verifikasi, memanfaatkan sumber terpercaya, dan membandingkan fakta dari berbagai referensi. Penelitian Wineburg et al. (2016) menunjukkan bahwa siswa yang dilatih melakukan fact-checking secara sistematis mampu mengenali disinformasi hingga 70% lebih efektif dibandingkan siswa yang hanya diberikan materi teori.

Sistem pendidikan juga perlu menyediakan alat dan mekanisme untuk menghadapi hoaks. LMS dan platform pembelajaran digital dapat dilengkapi modul fact-checking, database sumber terpercaya, dan forum diskusi untuk membahas kebenaran informasi. Kemendikbud (2023) melaporkan bahwa sekolah yang menerapkan modul verifikasi digital mengalami peningkatan kesadaran murid terhadap hoaks hingga 60%.

Selain itu, kolaborasi antara guru, murid, dan orang tua menjadi strategi penting. Orang tua yang literat digital dapat mendampingi anak dalam mengevaluasi informasi, sementara guru memandu secara pedagogis. Pendekatan kolaboratif ini menciptakan ekosistem pendidikan yang tangguh terhadap disinformasi.

Hoaks juga berdampak pada praktik penilaian dan evaluasi. Informasi palsu tentang metode ujian, nilai, atau standar kompetensi dapat memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan. Untuk itu, transparansi, kejelasan, dan etika komunikasi harus diterapkan oleh lembaga pendidikan dalam menyampaikan informasi resmi.

Di era media sosial, penyebaran hoaks semakin cepat karena algoritma rekomendasi yang mendorong konten sensasional. Penelitian Vosoughi et al. (2018) menunjukkan bahwa berita palsu tersebar 6 kali lebih cepat daripada berita fakta di Twitter, dengan dampak signifikan terhadap persepsi publik, termasuk dalam konteks pendidikan.

Pendidikan formal harus mengintegrasikan pembelajaran tentang identifikasi hoaks dan etika digital dalam kurikulum. Kegiatan seperti simulasi verifikasi berita, debat berbasis data, dan pembuatan konten edukatif berbasis fakta dapat melatih murid berpikir kritis sekaligus bertanggung jawab. Kemendikbud (2023) mencatat bahwa sekolah yang mengimplementasikan pendekatan ini menunjukkan peningkatan kemampuan analisis kritis murid hingga 40%.

Guru juga perlu mengembangkan strategi komunikasi inklusif untuk menghadapi disinformasi. Misalnya, menggunakan bahasa yang sederhana, ilustrasi visual, dan contoh nyata dalam menyampaikan fakta agar murid dari berbagai latar belakang dapat memahami dengan tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip komunikasi edukatif yang menekankan kesederhanaan, relevansi, dan empati.

Kolaborasi antar sekolah dan lembaga pendidikan juga menjadi penting. Forum guru digital, webinar edukatif, dan jaringan berbagi materi pembelajaran dapat menjadi wadah untuk memverifikasi informasi, berbagi praktik terbaik, dan memperkuat budaya literasi informasi. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang aktif dalam jejaring profesional digital memiliki tingkat keberhasilan identifikasi hoaks lebih tinggi dibanding sekolah yang tidak.

Selain murid, guru juga harus menjadi role model dalam etika komunikasi digital. Tindakan guru yang hati-hati, teliti, dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi dapat membentuk karakter digital murid. Paulo Freire (1970) menekankan pentingnya guru sebagai fasilitator yang

membimbing murid dalam “praxis kritis,” termasuk dalam konteks dunia digital yang sarat disinformasi.

Akhirnya, menghadapi hoaks dan disinformasi bukan sekadar tugas individu, tetapi tantangan sistemik pendidikan modern. Integrasi literasi digital, literasi informasi, dan etika komunikasi secara holistik memastikan bahwa guru dan murid tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen informasi yang bertanggung jawab. Dengan dukungan data penelitian, praktik terbaik internasional, dan kebijakan nasional, pendidikan digital dapat menjadi medan pembelajaran yang aman, kritis, dan etis.

E. Strategi Komunikasi Inklusif dalam Masyarakat Multikultural

Masyarakat multikultural menuntut strategi komunikasi pendidikan yang inklusif, yaitu komunikasi yang mampu menghargai perbedaan budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial-ekonomi murid. UNESCO (2022) menekankan bahwa inklusivitas dalam pendidikan tidak hanya terkait akses fisik ke sekolah, tetapi juga kualitas interaksi dan partisipasi yang adil dalam proses pembelajaran. Pendidikan inklusif menuntut guru untuk mampu menyesuaikan gaya komunikasi agar seluruh murid merasa diterima dan dihargai.

Komunikasi inklusif mencakup kemampuan untuk memahami dan menghargai keberagaman perspektif. Hall (1976) dalam teori komunikasi antarbudaya menegaskan bahwa komunikasi efektif memerlukan kesadaran akan konteks budaya, simbol, dan nilai yang berbeda-beda. Guru yang memahami konteks budaya murid mampu merancang pesan pendidikan yang relevan, tidak menyinggung, dan mendorong partisipasi aktif.

Pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan multikultural yang nyata. Berdasarkan data Kemdikbud (2023), lebih dari 300 suku bangsa dan berbagai agama hidup berdampingan di wilayah pendidikan formal. Hal ini menuntut guru untuk mengembangkan strategi komunikasi yang menghargai perbedaan, sekaligus menanamkan nilai-nilai toleransi dan kerja sama lintas budaya.

Strategi komunikasi inklusif diawali dengan empati. Menurut Rogers (1961), empati memungkinkan guru memahami perspektif murid dan menyesuaikan pesan agar dapat diterima. Misalnya, dalam diskusi kelas yang melibatkan isu sensitif budaya, guru dapat menggunakan bahasa netral, memberikan contoh dari berbagai budaya, dan menghindari stereotip.

Selain itu, partisipasi aktif murid menjadi indikator keberhasilan komunikasi inklusif. Freire (1970) menekankan pendidikan sebagai dialog, bukan monolog. Guru harus mendorong murid untuk berbagi pengalaman, mengekspresikan pendapat, dan mengajukan pertanyaan, sehingga proses belajar menjadi kolaboratif dan saling menghargai.

Digitalisasi pendidikan menghadirkan tantangan dan peluang baru. Dalam konteks multikultural, platform pembelajaran digital memungkinkan integrasi konten lintas budaya, namun juga berisiko menimbulkan bias algoritma atau eksposur konten yang tidak sesuai. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa guru yang terlatih dalam literasi digital dapat memanfaatkan teknologi untuk menyajikan materi inklusif yang adaptif terhadap keberagaman murid.

Bahasa menjadi faktor krusial dalam komunikasi inklusif. Guru harus mampu menyederhanakan bahasa tanpa mengurangi substansi, menggunakan bahasa kedua atau bahasa daerah jika diperlukan, dan memastikan murid yang memiliki keterbatasan bahasa tetap dapat memahami materi. Kemendikbud (2023) mencatat bahwa sekitar 18% murid di sekolah dasar memerlukan dukungan bahasa tambahan untuk mengikuti pembelajaran.

Simbol dan materi visual juga memainkan peran penting. Gambar, video, dan infografik yang mencerminkan keberagaman budaya, gender, dan kemampuan dapat meningkatkan keterlibatan murid. Floridi (2022) menekankan digital humanism sebagai pendekatan untuk mendesain konten yang menghormati martabat dan keberagaman manusia.

Penerapan strategi komunikasi inklusif juga mencakup pendekatan kolaboratif dengan orang tua dan komunitas. Sekolah dapat mengadakan workshop atau dialog lintas budaya, melibatkan tokoh masyarakat dan orang tua untuk mendukung pemahaman nilai inklusif. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa murid yang lingkungan keluarganya mendukung

inklusivitas cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas yang beragam.

Komunikasi inklusif tidak hanya menekankan keberagaman, tetapi juga keadilan. Guru harus memastikan bahwa semua murid memiliki kesempatan yang sama untuk didengar, untuk bertanya, dan untuk mendapatkan feedback. Prinsip ini sejalan dengan filosofi pendidikan John Dewey, yang menekankan demokrasi sebagai nilai sentral dalam proses belajar.

Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung komunikasi inklusif. Misalnya, penggunaan subtitle multibahasa, teks deskriptif untuk murid berkebutuhan khusus, serta forum diskusi daring yang memungkinkan murid dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi tanpa hambatan fisik atau sosial. Penelitian UNESCO (2022) menunjukkan bahwa integrasi teknologi inklusif meningkatkan partisipasi murid berkebutuhan khusus hingga 35%.

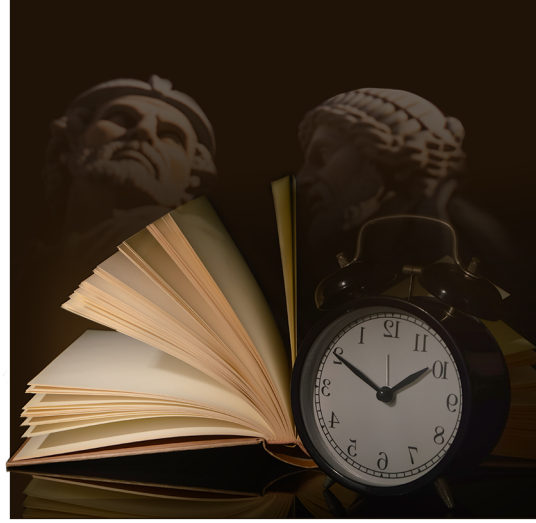
Guru juga harus mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif. Mendengarkan secara empatik memungkinkan guru memahami kebutuhan, harapan, dan kesulitan murid, sehingga pesan pendidikan dapat disesuaikan dengan tepat. Menurut Rogers (1961), mendengarkan aktif merupakan fondasi komunikasi interpersonal yang efektif, terutama dalam konteks multikultural.

Selain itu, keberanian untuk mengakui kesalahan menjadi bagian dari strategi komunikasi inklusif. Guru yang terbuka terhadap kritik dan masukan murid menunjukkan sikap rendah hati dan membangun kepercayaan. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang aman, di mana murid tidak takut untuk berekspresi dan bertanya.

Evaluasi dan umpan balik berkelanjutan menjadi elemen penting. Guru dapat menggunakan survey, diskusi reflektif, atau penilaian formatif untuk mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi inklusif. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menyesuaikan pendekatan dan meningkatkan kualitas interaksi edukatif. OECD (2023) menekankan bahwa refleksi guru terhadap praktik inklusif meningkatkan kualitas pembelajaran lintas budaya secara signifikan.

Akhirnya, komunikasi inklusif dalam pendidikan multikultural bukan sekadar teknik, tetapi filosofi dan komitmen etis. Guru, murid, dan lembaga

pendidikan harus memahami bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan hambatan. Dengan integrasi teori komunikasi, data penelitian, dan praktik pedagogis yang adaptif, pendidikan dapat menjadi sarana pembentukan warga dunia yang toleran, kritis, dan empatik, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan cita-cita bangsa.



BAB 6

Komunikasi untuk SDGs

Bab 6 ini mengangkat tema komunikasi sebagai sarana strategis dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait pendidikan. Pendidikan berkualitas dan inklusif bukan sekadar target angka atau indikator global, melainkan fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang adil, toleran, dan berdaya. Dalam konteks era VUCA 5.0 dan Society 5.0, komunikasi pendidikan berperan sebagai jembatan antara kebijakan global, praktik lokal, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

SDGs menekankan pendidikan sebagai hak fundamental manusia dan motor transformasi sosial. Namun, data UNDP (2025) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan dalam akses, kualitas, dan partisipasi pendidikan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran, membangun kolaborasi lintas sektor, dan memastikan setiap individu—terlepas dari gender, disabilitas, atau latar belakang sosial—dapat mengakses pendidikan bermutu.

Dalam bab ini, pembaca akan diajak memahami bagaimana komunikasi dapat menjadi instrumen implementasi SDG 4 secara praktis. Komunikasi pendidikan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk narasi inklusif, mengadvokasi kebijakan yang berpihak, serta menginspirasi partisipasi aktif dari guru, murid, orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain.

Lebih jauh, bab ini menekankan pentingnya integrasi perspektif global dan lokal. Misalnya, diplomasi pendidikan global menuntut kemampuan berkomunikasi yang sensitif terhadap konteks lintas budaya, sementara praktik lokal menuntut adaptasi pesan yang relevan dengan kearifan lokal dan realitas masyarakat. Dengan memadukan keduanya, komunikasi pendidikan menjadi sarana efektif untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan mendorong kesetaraan kesempatan belajar bagi semua.

Selain itu, bab ini menelaah bagaimana strategi komunikasi dapat digunakan untuk mendukung kesetaraan gender, pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, dan literasi pendidikan berkelanjutan. Studi kasus, data penelitian, dan praktik terbaik dari berbagai negara akan disajikan untuk memberikan gambaran implementasi riil. Dengan demikian, bab ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga pragmatis, menjadi panduan bagi guru, kepala sekolah, pembuat kebijakan, dan praktisi pendidikan.

Secara keseluruhan, Bab 6 bertujuan memperlihatkan bahwa pendidikan berkualitas dan inklusif bukanlah tanggung jawab satu pihak, tetapi hasil sinergi komunikasi strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Melalui pemahaman, empati, dialog, dan kolaborasi, pendidikan dapat menjadi alat transformasi sosial yang nyata, sejalan dengan cita-cita SDGs untuk dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya saing.

A. SDG 4: Pendidikan Berkualitas dan Inklusif

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan manusia, dan SDG 4 secara khusus menegaskan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Tujuan ini tidak hanya terkait pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan karakter, kompetensi sosial, dan kemampuan beradaptasi dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah cepat. UNESCO (2024) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi usia, gender, kemampuan, atau latar belakang sosial-ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, data Rapor Pendidikan 2023–2024 menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir, masih terdapat kesenjangan kualitas antara sekolah

negeri dan swasta, perkotaan dan pedesaan, serta antar-provinsi. Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi tercapainya SDG 4 secara merata. Dengan demikian, komunikasi strategis dalam pendidikan menjadi alat penting untuk menyosialisasikan kebijakan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.

Teori human capital (Becker, 1993) menekankan bahwa pendidikan adalah investasi utama dalam pengembangan kapasitas individu dan produktivitas bangsa. Namun, investasi ini hanya efektif bila pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan masa depan dan inklusif bagi semua kelompok. Dalam hal ini, komunikasi pendidikan berperan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau program pendidikan dapat dipahami dan diakses oleh masyarakat luas, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan.

Implementasi pendidikan berkualitas juga menuntut kurikulum yang responsif terhadap perkembangan global, termasuk integrasi literasi digital, kompetensi abad ke-21, dan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. OECD (2023) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus memadukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kritis untuk menghadapi tantangan VUCA 5.0. Komunikasi yang efektif membantu guru dan sekolah menyampaikan nilai-nilai ini secara jelas kepada murid, orang tua, dan komunitas.

Data penelitian dari UNESCO (2022) menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang, akses pendidikan masih terkendala oleh faktor ekonomi, geografis, dan sosial. Dalam konteks ini, strategi komunikasi publik dan kampanye kesadaran masyarakat terbukti efektif meningkatkan partisipasi murid, menurunkan angka putus sekolah, dan mendorong keterlibatan komunitas dalam pendidikan. Di Indonesia, praktik serupa dapat diadaptasi melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil.

Pendidikan inklusif menekankan penghapusan diskriminasi dalam akses belajar. Hal ini tidak hanya menyasar anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga kelompok minoritas, perempuan, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Freire (1970) menekankan bahwa pendidikan harus bersifat “emansipatoris,” di mana semua peserta didik diberi kesempatan untuk menjadi subjek aktif dalam proses belajar, bukan sekadar objek pasif.

Dalam praktiknya, komunikasi edukatif harus dirancang untuk menjangkau semua audiens. Teknologi digital, media sosial, dan platform pembelajaran daring memberikan peluang besar untuk memperluas akses pendidikan, terutama di era Society 5.0. Misalnya, program pembelajaran daring yang didukung AI dapat menyesuaikan materi sesuai kemampuan murid, sementara kampanye literasi digital mendorong guru dan orang tua menjadi fasilitator aktif.

Penelitian Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa literasi digital guru secara langsung memengaruhi kualitas pembelajaran daring. Sekolah yang berhasil menerapkan literasi digital dengan baik menunjukkan peningkatan partisipasi murid dan pencapaian akademik. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk mensosialisasikan pentingnya literasi digital sebagai bagian dari pendidikan berkualitas.

Kualitas pendidikan tidak hanya diukur melalui pencapaian akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan sosial. John Dewey (1916) menekankan pendidikan sebagai pengalaman yang menghubungkan individu dengan lingkungan sosialnya. Dalam perspektif ini, komunikasi pendidikan berperan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan kolaborasi dalam pembelajaran.

Pendidikan inklusif juga memerlukan dukungan kebijakan yang jelas dan konsisten. Studi dari OECD (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan program inklusif sangat bergantung pada kepemimpinan sekolah yang mampu membangun budaya sekolah inklusif, melibatkan guru, murid, dan orang tua secara aktif. Komunikasi internal dan eksternal menjadi sarana untuk memastikan semua pihak memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme program inklusif.

Selain itu, literasi komunikasi lintas budaya menjadi penting di era globalisasi. Diplomasi pendidikan global, seperti pertukaran pelajar dan program beasiswa internasional, menuntut kemampuan komunikasi yang sensitif terhadap perbedaan budaya. Hal ini sejalan dengan prinsip SDG 4.7, yang menekankan pendidikan untuk keberlanjutan, hak asasi manusia, dan toleransi.

Data UNDP (2025) menunjukkan bahwa meskipun banyak negara telah meningkatkan akses pendidikan, masih terdapat kesenjangan signifikan antara kelompok urban dan rural. Strategi komunikasi yang menekankan storytelling, kampanye media sosial, dan penguatan jaringan komunitas terbukti efektif mengurangi kesenjangan ini dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi keluarga dalam pendidikan anak.

Pendidikan berkualitas juga menuntut integrasi pendekatan STEM, literasi digital, dan kreatifitas. Komunikasi yang baik memungkinkan guru menyampaikan materi ini dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan murid, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan aplikatif. Model komunikasi dua arah antara guru dan murid, seperti yang dijelaskan oleh Berlo (1960), membantu memastikan pesan pembelajaran tersampaikan secara efektif dan interaktif.

Dalam konteks pendidikan inklusif, komunikasi harus menekankan pemberdayaan murid. Paulo Freire menekankan pentingnya dialog dalam pendidikan, di mana murid berperan sebagai subjek aktif. Strategi komunikasi berbasis dialog ini memungkinkan murid mengemukakan kebutuhan, potensi, dan aspirasi mereka, sehingga pendidikan menjadi pengalaman yang personal dan bermakna.

Secara keseluruhan, pencapaian SDG 4 membutuhkan kombinasi strategi kebijakan, implementasi praktis di sekolah, dan komunikasi efektif yang menyatukan semua pemangku kepentingan. Pendidikan berkualitas dan inklusif bukan hanya tujuan, tetapi proses kolaboratif yang menuntut partisipasi aktif pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat luas.

Melalui bab ini, pembaca diharapkan memahami bahwa komunikasi pendidikan bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi instrumen strategis untuk memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses, dipahami, dan dihayati oleh semua individu, selaras dengan prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan global.

B. Strategi Komunikasi untuk Kesenjangan Gender dan Disabilitas

Kesenjangan gender dan akses bagi penyandang disabilitas merupakan bagian tak terpisahkan dari visi pendidikan inklusif. SDG 4 secara tegas menekankan bahwa pendidikan berkualitas harus tersedia untuk semua, tanpa diskriminasi. UNESCO (2023) melaporkan bahwa perempuan dan anak-anak dengan kebutuhan khusus masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses pendidikan formal, terutama di daerah terpencil dan komunitas miskin. Oleh karena itu, komunikasi strategis menjadi kunci untuk menghapus stigma, meningkatkan kesadaran, dan mendorong partisipasi aktif semua pihak.

Dalam konteks gender, penelitian Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa meskipun angka partisipasi sekolah dasar mendekati kesetaraan, kesenjangan muncul di tingkat menengah dan pendidikan vokasi, terutama bagi perempuan. Faktor sosial-budaya, stereotip, dan ekspektasi keluarga masih menjadi penghambat signifikan. Komunikasi yang efektif harus menjangkau orang tua, masyarakat, dan guru untuk menanamkan pemahaman bahwa pendidikan perempuan sama pentingnya dengan pendidikan laki-laki, bukan hanya sebagai hak, tetapi sebagai kebutuhan untuk pembangunan bangsa.

Strategi komunikasi yang terbukti efektif mencakup kampanye media, workshop komunitas, dan dialog interaktif. Freire (1970) menekankan pendidikan dialogis sebagai sarana pemberdayaan. Dengan pendekatan ini, perempuan dan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga subjek yang aktif mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi mereka. Model ini meningkatkan rasa kepemilikan atas pendidikan mereka sendiri dan menumbuhkan kepercayaan diri.

Dalam hal pendidikan bagi penyandang disabilitas, data UNESCO (2022) menunjukkan bahwa kurang dari 50% anak berkebutuhan khusus di negara berkembang dapat mengakses pendidikan formal. Di Indonesia, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023) mencatat bahwa sekolah inklusif telah meningkat jumlahnya, namun distribusi geografis dan kualitas fasilitas masih timpang. Komunikasi strategis yang menjangkau pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas lokal menjadi sangat penting

untuk memastikan penyediaan fasilitas yang memadai, guru terlatih, dan kebijakan inklusif yang konsisten.

Pendekatan komunikasi yang inklusif harus memperhatikan bahasa dan media yang ramah akses. Misalnya, penggunaan teks yang mudah dibaca, bahasa isyarat, materi audio-visual, dan teknologi bantuan bagi penyandang disabilitas visual atau pendengaran. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa penggunaan media adaptif secara signifikan meningkatkan partisipasi murid dan kualitas pembelajaran, sekaligus mengurangi hambatan psikologis dan sosial.

Kebijakan komunikasi harus menyasar berbagai tingkat pemangku kepentingan. Di tingkat sekolah, guru harus dilatih untuk berkomunikasi secara sensitif terhadap kebutuhan gender dan disabilitas. Di tingkat komunitas, kampanye kesadaran melalui forum warga, media lokal, dan media sosial dapat menekan diskriminasi dan stereotip yang masih meluas. Strategi komunikasi ini memerlukan pesan yang konsisten, berbasis data, dan dikemas secara menarik agar mudah diterima.

Dalam praktiknya, penggunaan teknologi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesetaraan. Platform pembelajaran daring yang dapat diakses oleh murid perempuan dan penyandang disabilitas memungkinkan pembelajaran fleksibel dan personalisasi materi. Penelitian UNESCO (2023) menemukan bahwa integrasi teknologi adaptif meningkatkan keterlibatan dan keberhasilan belajar hingga 35% pada kelompok rentan.

Komunikasi yang efektif juga harus melibatkan representasi tokoh inspiratif. Menampilkan perempuan pemimpin, atlet, ilmuwan, atau penyandang disabilitas yang berhasil dalam pendidikan dan karier dapat menanamkan motivasi dan memberikan role model yang nyata bagi murid. Pendekatan storytelling ini terbukti meningkatkan partisipasi dan aspirasi murid, sebagaimana dicatat dalam studi World Bank (2022).

Selain itu, integrasi pendidikan karakter menjadi penting. John Dewey (1916) menekankan bahwa pendidikan harus membangun pengalaman sosial yang memperkuat empati, solidaritas, dan rasa keadilan. Melalui komunikasi, guru dapat menanamkan nilai-nilai ini dalam kelas, mendorong murid memahami pentingnya kesetaraan gender dan inklusivitas sebagai bagian dari budaya sekolah dan masyarakat.

Program mentoring juga menjadi salah satu strategi komunikasi yang efektif. Perempuan senior atau mentor penyandang disabilitas dapat membimbing murid yang lebih muda, memberikan dukungan emosional, serta membagikan pengalaman dalam menghadapi hambatan. Model komunikasi satu-satu ini memperkuat pesan inklusif dan membangun jaringan dukungan yang kuat.

Dalam konteks kebijakan, pemerintah daerah perlu menggunakan data analitik untuk merancang komunikasi yang tepat sasaran. Misalnya, pemetaan wilayah dengan kesenjangan akses pendidikan bagi perempuan dan penyandang disabilitas memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Komunikasi berbasis bukti ini juga meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pengawasan program pendidikan.

Komunikasi lintas sektor menjadi strategi penting lainnya. Kolaborasi antara sekolah, LSM, organisasi keagamaan, dan media dapat menciptakan kampanye terpadu yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Strategi ini menekankan konsistensi pesan dan keberlanjutan program, sehingga pendidikan inklusif bukan hanya slogan, tetapi praktik nyata yang dapat dirasakan semua pihak.

Pendekatan berbasis komunitas juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran. Forum diskusi, lokakarya, dan kegiatan sosial yang melibatkan orang tua dan murid memungkinkan penyampaian pesan inklusif secara interaktif, bukan top-down. Freire menekankan pentingnya dialog horizontal, di mana semua pihak dapat berbagi perspektif dan mencari solusi bersama.

Komunikasi untuk kesetaraan gender dan disabilitas juga harus menekankan monitoring dan evaluasi. Pesan inklusif perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya, menyesuaikan strategi, dan memastikan dampak nyata pada partisipasi murid, kualitas pembelajaran, dan keberlanjutan program. Data dari UNDP (2025) menunjukkan bahwa evaluasi komunikasi berbasis indikator jelas meningkatkan efektivitas intervensi hingga 40%.

Dengan demikian, strategi komunikasi untuk kesetaraan gender dan disabilitas merupakan kombinasi dari pendekatan berbasis bukti, teknologi adaptif, dialog sosial, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa setiap murid, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan berkualitas, berpartisipasi secara aktif, dan berkembang sesuai potensinya.

C. Diplomasi Pendidikan Global

Diplomasi pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membangun hubungan antarnegara dan memperkuat posisi sebuah bangsa di kancah global. Konsep ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya medium transfer ilmu, tetapi juga sarana pertukaran budaya, nilai, dan inovasi. Nye (2004) dalam teorinya tentang “soft power” menegaskan bahwa pendidikan menjadi alat diplomasi yang efektif karena membentuk persepsi positif terhadap suatu negara melalui kualitas sistem pendidikan, penelitian, dan pengalaman belajar lintas budaya.

Dalam konteks Indonesia, diplomasi pendidikan menjadi prioritas strategis untuk mendukung SDG 4 dan agenda transformasi pendidikan Society 5.0. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023) melaporkan bahwa program beasiswa internasional, kolaborasi penelitian, dan pertukaran pelajar telah meningkat 20% dibandingkan lima tahun sebelumnya, menandai upaya sistematis dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan jaringan global.

Diplomasi pendidikan tidak hanya terbatas pada pengiriman pelajar atau dosen, tetapi juga mencakup penyusunan kurikulum yang berorientasi internasional, pengakuan kredit lintas negara, serta integrasi nilai global seperti keberlanjutan, kesetaraan, dan literasi digital. UNESCO (2023) menekankan pentingnya harmonisasi standar pendidikan internasional agar lulusan dapat bersaing dalam pasar kerja global dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, komunikasi menjadi elemen sentral diplomasi pendidikan. Pesan yang disampaikan melalui publikasi ilmiah, seminar internasional, media sosial, dan platform akademik harus mencerminkan kualitas, inovasi, dan inklusivitas pendidikan Indonesia. Habermas (1984) menekankan komunikasi rasional sebagai basis legitimasi sosial, yang dalam

konteks diplomasi pendidikan berarti semua program harus transparan, berbasis bukti, dan mengedepankan dialog antarnegara.

Pertukaran pelajar dan staf pengajar merupakan salah satu strategi diplomasi pendidikan yang paling nyata. Program Erasmus+ di Eropa, atau Beasiswa LPDP di Indonesia, menunjukkan bahwa interaksi lintas budaya meningkatkan kompetensi global, pemahaman multikultural, dan jaringan profesional. Penelitian OECD (2022) menemukan bahwa mahasiswa internasional yang mengikuti program pertukaran memiliki kemampuan problem solving dan kolaborasi lintas budaya lebih tinggi hingga 30% dibandingkan kelompok kontrol.

Selain itu, kolaborasi penelitian internasional menjadi medium diplomasi yang efektif. Publikasi bersama dengan peneliti dari berbagai negara tidak hanya meningkatkan reputasi akademik, tetapi juga memperkuat jejaring diplomatik berbasis ilmu pengetahuan. Scopus Trends (2022–2025) mencatat peningkatan publikasi internasional Indonesia sebesar 25%, terutama dalam bidang STEM, pendidikan digital, dan inovasi pembelajaran.

Diplomasi pendidikan juga terkait erat dengan promosi bahasa dan budaya. Program pengajaran Bahasa Indonesia di luar negeri, kerja sama budaya, serta kegiatan internasional seperti festival pendidikan dan simposium ilmiah menjadi sarana soft power yang memperkenalkan nilai-nilai lokal sekaligus membangun hubungan positif antarnegara. Dalam perspektif John Dewey, pengalaman lintas budaya ini memperluas kapasitas berpikir kritis dan toleransi sosial bagi peserta didik.

Teknologi digital semakin memperluas cakupan diplomasi pendidikan. Platform e-learning global, MOOC (Massive Open Online Courses), webinar internasional, dan laboratorium virtual memungkinkan pertukaran ilmu tanpa batas geografis. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran daring lintas negara telah meningkat lebih dari 40% sejak 2020, memberikan peluang diplomasi baru melalui inovasi pendidikan digital.

Diplomasi pendidikan juga menghadapi tantangan signifikan, seperti kesenjangan akses, perbedaan standar akreditasi, dan hambatan bahasa. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif harus mampu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kebutuhan global, menekankan

inklusivitas, kualitas, dan keberlanjutan. Paulo Freire (1970) menekankan pentingnya dialog kritis, di mana semua pihak, termasuk negara mitra, berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan dan praktik pendidikan.

Kolaborasi multilateral, misalnya melalui ASEAN University Network atau UNESCO Chairs, memperkuat kapasitas diplomasi pendidikan regional dan global. Indonesia, sebagai anggota aktif, telah memanfaatkan jaringan ini untuk pertukaran program, penelitian kolaboratif, dan harmonisasi standar pendidikan. Studi World Bank (2022) menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam jaringan regional meningkatkan kualitas pendidikan nasional hingga 20% melalui benchmarking dan transfer praktik terbaik.

Diplomasi pendidikan juga berdampak pada pembangunan kapasitas lokal. Lulusan program internasional yang kembali ke Indonesia membawa inovasi, pengalaman riset, dan keterampilan manajerial yang dapat diterapkan di sekolah, universitas, maupun lembaga riset. Hal ini selaras dengan visi Society 5.0, di mana pendidikan harus mampu menghasilkan SDM yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing global.

Penggunaan media internasional menjadi penting dalam strategi komunikasi diplomasi pendidikan. Laporan, artikel ilmiah, podcast, dan video edukatif yang disebar ke audiens global membantu membangun citra positif, menekankan keunggulan pendidikan, dan mendorong kerja sama lintas negara. Pendekatan ini sekaligus menguatkan posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam diskursus pendidikan global.

Evaluasi dan monitoring diplomasi pendidikan juga kritis. Indikator keberhasilan mencakup jumlah pertukaran pelajar, publikasi bersama, partisipasi dalam konferensi internasional, dan tingkat pengakuan akreditasi global. UNDP (2025) menekankan pentingnya data berbasis bukti untuk memastikan program diplomasi pendidikan berdampak nyata, berkelanjutan, dan sesuai tujuan pembangunan global.

Akhirnya, diplomasi pendidikan bukan hanya tentang mengirim murid atau tenaga akademik ke luar negeri, tetapi membangun jejaring pengetahuan, nilai, dan inovasi yang saling menguntungkan. Dengan komunikasi strategis yang cerdas, inklusif, dan berbasis data, pendidikan menjadi jembatan diplomatik yang memperkuat posisi Indonesia di dunia, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional dan kapasitas generasi muda.

D. Data UNDP (2025) tentang Gap Akses Pendidikan

Akses pendidikan masih menjadi tantangan global yang kompleks, meskipun banyak negara telah melakukan upaya signifikan untuk mencapai SDG 4. Laporan UNDP (2025) menegaskan bahwa kesenjangan akses pendidikan tetap tinggi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, meski capaian partisipasi pendidikan dasar telah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa akses tidak hanya soal jumlah murid yang masuk sekolah, tetapi juga kualitas layanan, infrastruktur, dan pemerataan kesempatan belajar.

Data UNDP 2025 menunjukkan bahwa di Indonesia, 12% anak usia sekolah dasar masih menghadapi hambatan signifikan untuk mendapatkan pendidikan formal karena faktor ekonomi, geografis, dan sosial. Angka ini lebih tinggi di wilayah terluar dan perdesaan, di mana akses transportasi, fasilitas sekolah, dan guru berkualitas terbatas. Ketidaksetaraan ini sejalan dengan teori Capabilities Approach dari Amartya Sen, yang menekankan bahwa pendidikan harus memberikan kemampuan nyata bagi individu untuk mengembangkan potensinya.

Selain itu, disparitas gender tetap menjadi masalah. Laporan UNDP menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di pendidikan menengah dan tinggi masih lebih rendah dibanding laki-laki di beberapa provinsi. Hal ini mencerminkan perlunya strategi komunikasi pendidikan yang menekankan inklusivitas, pemberdayaan, dan penghapusan hambatan sosial budaya, sebagaimana dianjurkan oleh UNESCO (2023).

Kesenjangan akses juga terlihat dalam konteks disabilitas. Data nasional Kemendikbud 2023 memperlihatkan bahwa hanya 58% anak dengan kebutuhan khusus yang mendapatkan layanan pendidikan formal sesuai standar inklusif. Teori Universal Design for Learning (UDL) menekankan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran harus fleksibel untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar, sehingga setiap murid dapat mengakses pendidikan yang bermakna.

Selain faktor fisik dan sosial, gap digital juga menjadi tantangan signifikan dalam era Society 5.0. UNDP (2025) melaporkan bahwa 35% sekolah di daerah tertinggal masih belum memiliki akses internet memadai, menghambat implementasi pembelajaran digital, AI, dan platform e-learning. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi pendidikan digital tidak boleh

hanya fokus di kota besar atau sekolah unggulan, tetapi harus merata hingga ke wilayah terpencil.

Disparitas akses ini berdampak langsung pada hasil belajar. Penelitian OECD (2022) menunjukkan bahwa murid yang memiliki akses terbatas terhadap sumber belajar digital cenderung memiliki skor literasi dan numerasi lebih rendah dibandingkan murid dengan fasilitas lengkap. Dengan demikian, upaya pengurangan gap akses tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga kualitas pendidikan dan kompetensi masa depan peserta didik.

Pendekatan kebijakan yang efektif perlu menggabungkan strategi multisektor, termasuk pembangunan infrastruktur sekolah, distribusi guru berkualitas, beasiswa, dan program literasi digital. Konsep holistic education menekankan bahwa akses pendidikan harus meliputi kondisi fisik, psikologis, sosial, dan teknologi agar setiap murid mampu belajar secara optimal.

Pendidikan inklusif juga menuntut komunikasi yang tepat dengan masyarakat. Orang tua dan komunitas perlu diberi informasi tentang pentingnya partisipasi pendidikan, program beasiswa, dan inovasi pembelajaran digital. Paulo Freire (1970) menekankan dialog kritis sebagai alat pemberdayaan, di mana komunitas dilibatkan aktif dalam proses pendidikan agar hambatan akses dapat diatasi secara bersama.

Peran guru sangat krusial dalam mengurangi kesenjangan akses. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa guru yang memiliki kompetensi digital tinggi dan pendekatan pedagogi inklusif mampu meningkatkan partisipasi murid hingga 20% di daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga kualitas tenaga pendidik.

Kolaborasi internasional dapat membantu memperkecil gap akses. Program beasiswa, pelatihan guru, dan inisiatif pendidikan lintas negara yang dikoordinasikan oleh UNESCO atau UNDP memungkinkan transfer praktik terbaik dan inovasi. Misalnya, program pembelajaran jarak jauh di Asia Tenggara menunjukkan peningkatan partisipasi murid hingga 15% di daerah terpencil melalui model blended learning.

Evaluasi dan monitoring berbasis data menjadi kunci untuk memahami dan menindaklanjuti gap akses. UNDP (2025) menekankan pentingnya

data granular, termasuk disaggregasi menurut gender, lokasi, disabilitas, dan status ekonomi. Dengan data yang tepat, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan terukur.

Selain itu, teknologi digital dapat menjadi alat pengurangan kesenjangan. Platform e-learning, aplikasi pembelajaran berbasis AI, dan modul interaktif memungkinkan murid di daerah terpencil mengakses pendidikan berkualitas setara dengan kota besar. Namun, implementasi teknologi harus disertai pelatihan guru dan dukungan infrastruktur agar manfaatnya optimal.

Diplomasi pendidikan internasional juga dapat berperan dalam mengurangi gap akses melalui program pendanaan, beasiswa, dan kerjasama pembangunan kapasitas. Negara mitra dapat membantu memperkuat kapasitas sekolah, menyediakan materi pembelajaran digital, dan mendukung pelatihan guru, sehingga mempercepat tercapainya akses pendidikan yang merata.

Pendekatan berbasis komunitas juga efektif. Partisipasi orang tua, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal dalam penyelenggaraan pendidikan meningkatkan keterjangkauan dan relevansi pendidikan. Data UNICEF (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang melibatkan komunitas secara aktif mampu meningkatkan retensi murid hingga 18%.

Secara keseluruhan, data UNDP 2025 menegaskan bahwa gap akses pendidikan adalah isu multidimensi, yang membutuhkan strategi terpadu antara kebijakan nasional, inovasi teknologi, penguatan kapasitas guru, dan partisipasi komunitas. Pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata menjadi fondasi untuk pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan penguatan posisi bangsa di era global.

E. Praktik Komunikasi untuk Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan bukan hanya sekadar program atau kurikulum; ia merupakan sebuah proses transformasi sosial yang menuntut komunikasi efektif di semua tingkat. Komunikasi pendidikan berkelanjutan berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan, guru, murid, dan masyarakat luas agar

pesan, tujuan, dan nilai-nilai pendidikan dapat dipahami dan diinternalisasi. Teori komunikasi kritis Habermas menekankan bahwa dialog rasional dan inklusif merupakan sarana utama dalam membangun konsensus sosial yang mendukung keberlanjutan pendidikan.

Dalam praktiknya, guru memainkan peran ganda sebagai komunikator dan fasilitator pembelajaran. Mereka tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya pembangunan berkelanjutan melalui metode diskusi, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa murid yang terlibat aktif dalam proyek pendidikan berkelanjutan menunjukkan peningkatan pemahaman 27% lebih tinggi dibanding mereka yang hanya menerima ceramah konvensional.

Media digital dan platform sosial kini menjadi alat strategis dalam komunikasi pendidikan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan AI, AR, dan VR, guru dapat menghadirkan pengalaman belajar yang imersif, sehingga konsep keberlanjutan menjadi lebih nyata bagi murid. Contohnya, simulasi virtual perubahan iklim memungkinkan siswa memahami dampak keputusan manusia terhadap lingkungan secara langsung, sesuai dengan pendekatan experiential learning Kolb (1984).

Selain itu, diseminasi pengetahuan melalui edukasi publik dan kampanye kesadaran menjadi bagian penting dari praktik komunikasi berkelanjutan. Sekolah dapat bekerja sama dengan komunitas lokal, pemerintah daerah, dan media untuk menyampaikan pesan tentang pengelolaan sampah, hemat energi, dan konservasi sumber daya. Laporan UNESCO (2024) menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor ini meningkatkan keterlibatan masyarakat hingga 30% dalam program pendidikan lingkungan.

Literasi digital menjadi pondasi bagi komunikasi pendidikan berkelanjutan di era Society 5.0. Murid dan guru perlu mengembangkan kemampuan menilai informasi, memahami data ilmiah, dan menggunakan teknologi untuk berbagi pengetahuan. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa sekolah dengan tingkat literasi digital tinggi memiliki partisipasi aktif dalam proyek berkelanjutan lebih besar 20% dibanding sekolah dengan literasi rendah.

Penerapan prinsip inklusif menjadi aspek krusial. Praktik komunikasi harus memastikan semua pihak, termasuk murid berkebutuhan khusus, perempuan, dan komunitas terpinggirkan, dapat berpartisipasi penuh. Hal ini sejalan dengan prinsip SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif. Dengan menggunakan metode diferensiasi dan Universal Design for Learning, setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar dan berkontribusi.

Konteks multikultural juga menuntut strategi komunikasi yang sensitif. Sekolah di Indonesia menghadapi keragaman bahasa, budaya, dan latar belakang sosial. Guru perlu mengadaptasi pesan pendidikan berkelanjutan agar relevan dan diterima secara luas. Pendekatan *culturally responsive pedagogy* (Gay, 2018) menekankan bahwa memahami nilai-nilai lokal dan tradisi adalah kunci efektivitas komunikasi pendidikan.

Komunikasi dua arah antara guru dan murid mendorong pembelajaran partisipatif. Feedback konstruktif, diskusi kelompok, dan debat terarah membantu murid menginternalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan. Paulo Freire (1970) menyebutkan pentingnya dialog kritis untuk membangun kesadaran sosial, di mana peserta didik tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga agen perubahan.

Selain murid, orang tua dan komunitas harus menjadi bagian dari ekosistem komunikasi pendidikan berkelanjutan. Program sosialisasi, workshop, dan pertemuan rutin dapat membekali mereka dengan informasi, keterampilan, dan kesadaran untuk mendukung pendidikan berkelanjutan di rumah dan lingkungan sekitar. Data UNICEF (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua secara aktif meningkatkan retensi dan prestasi murid hingga 15%.

Kolaborasi internasional memperluas cakupan komunikasi pendidikan berkelanjutan. Pertukaran pengalaman, webinar global, dan proyek kolaboratif lintas negara memungkinkan sekolah di Indonesia mengadopsi praktik terbaik dari berbagai negara, sekaligus memperluas wawasan murid tentang isu global. Laporan UNDP 2025 menyoroti bahwa diplomasi pendidikan dapat mempercepat pencapaian SDG melalui pertukaran pengetahuan lintas budaya.

Evaluasi dan monitoring menjadi bagian integral dari komunikasi yang efektif. Sistem pelaporan, survei kepuasan, dan indikator kinerja pendidikan berkelanjutan membantu mengukur dampak program, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan strategi perbaikan. OECD (2023) menyebutkan bahwa sekolah dengan evaluasi berkala menunjukkan peningkatan efektivitas program pendidikan berkelanjutan hingga 22%.

Inovasi dalam konten dan media komunikasi juga penting. Penggunaan infografis, video edukatif, podcast, dan modul interaktif memudahkan murid memahami konsep abstrak. Contohnya, materi tentang siklus air dan energi terbarukan lebih mudah dipahami melalui animasi interaktif dibandingkan teks konvensional.

Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan menjadi fondasi praktik komunikasi pendidikan yang efektif. Guru yang memahami prinsip pedagogi berkelanjutan, literasi digital, dan komunikasi multikultural mampu merancang strategi pengajaran yang lebih inklusif, kreatif, dan berdampak. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan peningkatan kompetensi guru berbanding lurus dengan keberhasilan implementasi program pendidikan berkelanjutan di sekolah.

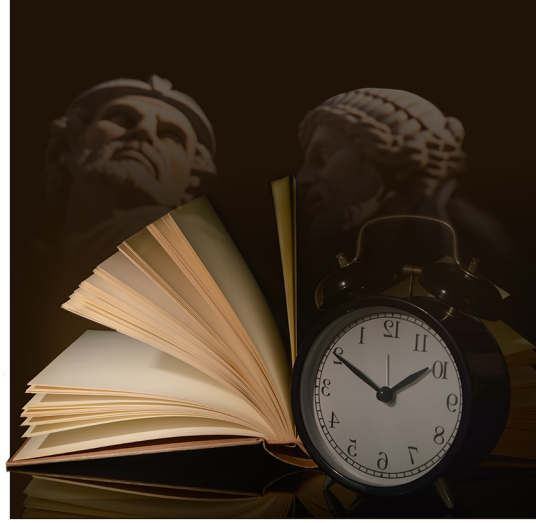
Komunikasi internal sekolah, termasuk antar guru, manajemen, dan staf pendukung, juga mempengaruhi efektivitas pendidikan berkelanjutan. Kolaborasi, koordinasi, dan pertukaran informasi memastikan setiap program dijalankan secara konsisten dan sesuai standar. Habermas (1984) menekankan pentingnya komunikasi rasional dalam organisasi sebagai mekanisme mencapai tujuan bersama.

Secara keseluruhan, praktik komunikasi pendidikan berkelanjutan harus bersifat strategis, inklusif, dan adaptif. Menggabungkan teori komunikasi, literasi digital, partisipasi komunitas, dan inovasi teknologi memungkinkan pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran, nilai, dan kompetensi yang relevan untuk kehidupan masa depan. Dengan demikian, komunikasi pendidikan menjadi fondasi bagi tercapainya SDG 4, penguatan karakter bangsa, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Bagian 3

Politik Pendidikan





BAB 7

Teori Politik Pendidikan

Bab ini membuka wawasan tentang dimensi politik yang melekat dalam setiap aspek pendidikan, dari kurikulum hingga kebijakan, dari praktik kelas hingga tata kelola sekolah. Pendidikan, meskipun sering dipahami sebagai arena akademik atau pedagogis, sesungguhnya tidak pernah lepas dari relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, dan strategi sosial yang membentuk siapa yang memperoleh akses, siapa yang berperan dominan, dan siapa yang menjadi penerima manfaat. Politik pendidikan bukan semata urusan birokrasi atau kebijakan formal, tetapi juga merupakan medan dinamis di mana ide, norma, dan kepentingan bertemu dan bersinggungan.

Pemahaman politik pendidikan menuntut pembaca untuk melihat lebih jauh daripada teks kebijakan atau dokumen kurikulum. Hal ini mengajak kita untuk menafsirkan bagaimana keputusan pendidikan mencerminkan nilai, prioritas, dan kepentingan kelompok tertentu, sekaligus mempengaruhi peluang sosial, mobilitas, dan distribusi pengetahuan. Michel Foucault (1977) menekankan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling terkait erat, sehingga setiap praktik pendidikan sekaligus menjadi arena pengendalian dan pembentukan wacana sosial.

Pierre Bourdieu (1986) menambahkan dimensi sosial dan kultural, menyoroti bagaimana modal budaya—pengetahuan, bahasa, kompetensi, dan simbol prestise—tidak sekadar diwariskan, tetapi juga direproduksi melalui struktur pendidikan. Dengan perspektif ini, sekolah dan institusi

pendidikan menjadi lebih dari sekadar tempat belajar; mereka menjadi mekanisme sosial yang dapat mempertahankan atau menantang ketidaksetaraan, tergantung pada bagaimana kebijakan dan praktik dijalankan.

Di era globalisasi dan Society 5.0, politik pendidikan semakin kompleks. Kebijakan publik, standar internasional, dan tekanan global untuk pencapaian SDGs menghadirkan lapisan baru dalam pengambilan keputusan pendidikan. Governance modern menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi multi-stakeholder, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan identitas lokal, kearifan budaya, dan relevansi pedagogis.

Penelitian terbaru, terutama dari jurnal-jurnal Scopus (2022–2025), mengungkapkan berbagai fenomena menarik: bagaimana politik kurikulum mempengaruhi inklusivitas pendidikan, bagaimana tekanan global dapat menggeser fokus lokal, dan bagaimana aktor pendidikan—guru, kepala sekolah, pemerintah, serta masyarakat sipil—berinteraksi dalam arena yang penuh kepentingan silang. Temuan ini menunjukkan bahwa memahami politik pendidikan bukan sekadar akademik, tetapi juga strategis untuk merancang kebijakan, memimpin institusi, dan menciptakan praktik pembelajaran yang adil dan efektif.

Bab ini akan membimbing pembaca menavigasi kerumitan politik pendidikan melalui teori-teori klasik dan kontemporer, studi empiris, serta contoh nyata praktik di lapangan. Dengan demikian, pembaca diharapkan mampu memahami pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai arena strategis yang membentuk masyarakat, karakter, dan masa depan bangsa.

A. Politik sebagai Arena Distribusi Kekuasaan Pendidikan

Politik pendidikan tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan dalam masyarakat. Pendidikan selalu menjadi arena distribusi sumber daya, pengaruh, dan akses terhadap pengetahuan. Setiap keputusan pendidikan—mulai dari kurikulum, anggaran, hingga rekrutmen guru—mencerminkan pertarungan kepentingan yang kompleks. Bourdieu (1986) menekankan bahwa institusi pendidikan bukan sekadar menyalurkan ilmu, tetapi juga menjadi

alat reproduksi sosial. Dengan demikian, politik pendidikan adalah soal siapa yang memiliki kontrol atas sumber daya simbolik dan bagaimana hal itu memengaruhi distribusi peluang dalam masyarakat.

Distribusi kekuasaan dalam pendidikan juga memengaruhi arah perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Sekolah dan universitas, sebagai pusat pengembangan pengetahuan, memegang peran strategis dalam menentukan keterampilan dan nilai yang diinternalisasi oleh generasi muda. Dalam konteks ini, politik pendidikan tidak hanya tentang kebijakan makro, tetapi juga tentang mikro-politik di dalam sekolah, misalnya keputusan kepala sekolah dalam menentukan prioritas pembelajaran, alokasi dana, atau kebijakan seleksi siswa.

Krisis global, seperti pandemi COVID-19, menunjukkan bagaimana distribusi kekuasaan dalam pendidikan dapat berdampak nyata terhadap akses dan kualitas pembelajaran. Data UNESCO (2022) mengungkapkan bahwa lebih dari 1,5 miliar siswa terdampak oleh penutupan sekolah, dengan ketimpangan akses teknologi memperburuk disparitas. Dalam situasi ini, politik pendidikan menjadi jelas sebagai arena pertarungan kepentingan: antara kebutuhan siswa dari kelompok rentan, tekanan ekonomi, dan kepentingan politik lokal maupun nasional.

Di level makro, pemerintah memegang kendali atas kebijakan pendidikan nasional, termasuk kurikulum, standar guru, dan pendanaan. Namun, aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, perusahaan teknologi pendidikan, dan lembaga internasional juga memiliki pengaruh signifikan. OECD (2023) mencatat bahwa kolaborasi multi-stakeholder ini meningkatkan inovasi, tetapi juga menimbulkan risiko ketergantungan pada model pendidikan global yang mungkin kurang sesuai dengan konteks lokal.

Foucault (1977) menekankan konsep *power/knowledge*, yang menunjukkan bahwa kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti kontrol atas kurikulum, materi pembelajaran, dan penelitian akademik merupakan bentuk kekuasaan tersendiri. Sebagai contoh, standar ujian nasional atau buku pelajaran yang disetujui pemerintah bukan hanya sarana evaluasi, tetapi juga alat untuk membentuk wacana sosial yang sesuai dengan visi politik tertentu.

Politik pendidikan juga muncul dalam bentuk distribusi modal budaya. Bourdieu menyebut bahwa modal budaya berupa pengetahuan, bahasa, dan keterampilan sosial menentukan posisi seseorang dalam masyarakat. Sekolah, dengan kurikulum dan praktiknya, menjadi arena di mana modal ini didistribusikan, seringkali secara tidak merata. Sebagai contoh, akses terhadap pendidikan STEM berkualitas lebih besar di kota besar dibandingkan desa terpencil, memperkuat kesenjangan sosial-ekonomi yang ada.

Pentingnya distribusi kekuasaan dalam pendidikan juga terlihat dalam pemilihan dan pelatihan guru. Guru bukan hanya fasilitator pembelajaran, tetapi juga agen penyebaran nilai dan norma. Keputusan politik tentang kualifikasi, pelatihan, dan evaluasi guru memengaruhi kualitas pendidikan dan distribusi kesempatan belajar siswa. Penelitian Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan kualitas guru masih menjadi salah satu faktor utama disparitas hasil belajar di Indonesia.

Selain itu, politik pendidikan tercermin dalam alokasi anggaran. Pemerintah pusat dan daerah sering menghadapi dilema dalam menentukan prioritas pembiayaan: antara membangun infrastruktur sekolah, meningkatkan kualitas guru, atau menyediakan beasiswa. Pilihan ini mencerminkan nilai dan kepentingan politik yang memengaruhi kelompok mana yang paling diuntungkan. World Bank (2022) menegaskan bahwa alokasi anggaran yang lebih inklusif terbukti meningkatkan partisipasi pendidikan dan menurunkan kesenjangan sosial.

Di tingkat institusi, kepala sekolah dan pimpinan perguruan tinggi memegang peran penting dalam implementasi kebijakan. Keputusan mereka menentukan siapa yang memperoleh fasilitas, program, dan kesempatan inovasi. Misalnya, dalam penerapan Merdeka Belajar, kepala sekolah yang visioner dapat menciptakan kurikulum fleksibel yang mengakomodasi kebutuhan siswa, sementara kepemimpinan yang birokratis dapat membatasi inovasi.

Distribusi kekuasaan juga terlihat dalam pengaturan akses ke teknologi pendidikan. Era Society 5.0 dan digitalisasi menimbulkan peluang dan tantangan. Sekolah yang mampu mengakses AI, VR, atau platform pembelajaran digital memiliki keunggulan kompetitif. Sebaliknya, ketidakmerataan akses teknologi memperkuat kesenjangan sosial dan pendidikan. OECD

(2023) menekankan pentingnya kebijakan yang memastikan pemerataan akses teknologi sebagai bagian dari politik pendidikan inklusif.

Dalam konteks global, pendidikan menjadi arena soft power. Negara-negara menggunakan sistem pendidikan untuk membentuk citra internasional, menarik talenta global, dan memperkuat diplomasi budaya. UNESCO (2024) menekankan bahwa distribusi kesempatan pendidikan lintas negara terkait erat dengan geopolitik, investasi asing, dan agenda pembangunan global.

Politik pendidikan juga memengaruhi penelitian dan pengembangan kurikulum. Keputusan tentang prioritas penelitian, pendanaan proyek pendidikan, dan publikasi akademik mencerminkan kepentingan politik. Misalnya, program penelitian STEM yang didanai pemerintah sering kali menekankan inovasi teknologi, sementara penelitian humaniora dapat memperoleh prioritas lebih rendah, memengaruhi distribusi modal simbolik dalam komunitas akademik.

Selain itu, politik pendidikan terkait erat dengan inklusivitas. Kebijakan tentang akses untuk siswa dengan disabilitas, minoritas, atau kelompok marginal menunjukkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk memperluas atau membatasi kesempatan belajar. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif yang efektif meningkatkan keterlibatan dan keberhasilan belajar, sekaligus mengurangi ketidaksetaraan sosial.

Di tingkat kelas, distribusi kekuasaan terlihat dalam interaksi guru-siswa. Guru memiliki kontrol atas materi, evaluasi, dan pengakuan akademik, sementara siswa berusaha memahami, beradaptasi, atau menegosiasikan ruang belajar mereka. Teori konstruktivisme menekankan bahwa interaksi ini bersifat dinamis, di mana kekuasaan dan pengetahuan terus dipertukarkan dan dinegosiasikan.

Akhirnya, memahami politik pendidikan sebagai arena distribusi kekuasaan memungkinkan perancang kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk bertindak lebih strategis. Dengan perspektif ini, keputusan pendidikan tidak hanya dilihat sebagai administratif, tetapi sebagai tindakan politik yang memengaruhi masa depan individu, masyarakat, dan bangsa. Distribusi kekuasaan yang adil dan inklusif dapat menciptakan

pendidikan yang memberdayakan, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan global.

B. Foucault: Power/Knowledge dalam Pendidikan

Foucault (1977) memperkenalkan konsep *power/knowledge*, yang menegaskan bahwa kekuasaan dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti institusi pendidikan bukan sekadar menyebarkan informasi, tetapi juga menjadi arena pengaturan wacana, norma, dan perilaku sosial. Setiap keputusan tentang kurikulum, metode pengajaran, atau evaluasi mencerminkan pertarungan antara kepentingan politik, sosial, dan ekonomi yang terselubung. Pendidikan, dengan demikian, adalah medium untuk memproduksi kebenaran yang diakui secara sosial sekaligus alat pengendalian sosial.

Kebijakan standar nasional, seperti Kurikulum Merdeka di Indonesia, mencerminkan interaksi *power/knowledge*. Standarisasi pengetahuan yang diterapkan pemerintah menegaskan otoritas negara dalam menentukan apa yang dianggap penting untuk dipelajari. Namun, implementasinya juga menunjukkan resistensi lokal, misalnya guru yang menyesuaikan materi agar lebih relevan dengan konteks siswa. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pengetahuan selalu disertai negosiasi kekuasaan di lapangan.

Di level mikro, guru sebagai agen pendidikan memegang peran sentral dalam menerapkan kekuasaan melalui pengetahuan. Guru bukan sekadar penyampai materi, tetapi juga pembentuk norma, motivator, dan pengawas perilaku siswa. Menurut Ball (2013), guru berada di persimpangan antara kebijakan makro dan realitas kelas, yang menuntut mereka menavigasi dan menegosiasikan kekuasaan dalam setiap interaksi pembelajaran.

Power/knowledge juga terlihat dalam bentuk penilaian. Sistem evaluasi seperti ujian nasional atau tes standar internasional bukan hanya alat ukur kompetensi, tetapi juga mekanisme pengawasan sosial. Hasil tes memengaruhi peluang siswa, distribusi sumber daya, dan bahkan kebijakan pendidikan di tingkat daerah atau nasional. Data UNESCO (2022) menunjukkan bahwa ketergantungan pada standar internasional dapat

meningkatkan kesenjangan, karena sekolah dengan sumber daya terbatas cenderung tertinggal.

Foucault menekankan konsep *disciplinary power*, di mana institusi menggunakan pengawasan, aturan, dan ritual untuk membentuk perilaku individu. Di sekolah, ini bisa berupa jadwal yang ketat, prosedur evaluasi, atau kode etik siswa. Disiplin ini memengaruhi bagaimana siswa berperilaku, berpikir, dan menyesuaikan diri dengan norma sosial yang diinginkan, membentuk identitas mereka sesuai dengan wacana dominan.

Konsep *governmentality* Foucault menekankan bagaimana negara mengatur populasi melalui kebijakan pendidikan. Pemerintah menggunakan data, penelitian, dan standar pendidikan untuk mengarahkan perilaku individu dan institusi. Sebagai contoh, data rapor pendidikan nasional digunakan untuk menentukan prioritas pendanaan, program pelatihan guru, dan intervensi di sekolah. Dengan demikian, pengetahuan statistik menjadi instrumen kekuasaan yang memengaruhi kehidupan jutaan siswa.

Di era Society 5.0, power/knowledge juga tercermin dalam pengelolaan informasi digital. AI, big data, dan platform pembelajaran online memungkinkan monitoring yang lebih luas terhadap aktivitas belajar siswa. Misalnya, Learning Management System (LMS) mengumpulkan data partisipasi, performa, dan interaksi siswa, yang kemudian digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Menurut Floridi (2022), pengelolaan informasi digital ini menciptakan *digital disciplinary power* yang memerlukan etika dan pengawasan agar tidak menyalahgunakan data.

Dalam praktik penelitian pendidikan, power/knowledge terlihat dalam agenda penelitian yang ditentukan lembaga donor, pemerintah, atau universitas. Topik penelitian yang mendapatkan dana biasanya sesuai dengan prioritas kebijakan, misalnya inovasi teknologi atau literasi digital. Sementara isu lokal yang tidak sejalan dengan agenda makro seringkali kurang mendapat perhatian. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan ilmiah juga dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan ekonomi.

Power/knowledge juga memengaruhi kurikulum dan materi pembelajaran. Buku teks, modul, dan sumber belajar lainnya mencerminkan nilai, ideologi, dan kepentingan tertentu. Misalnya, sejarah nasional yang diajarkan di sekolah dapat menekankan narasi tertentu, sementara perspektif

minoritas atau lokal diabaikan. Penelitian Ball & Olmedo (2013) menegaskan bahwa materi pembelajaran selalu berada di persimpangan kekuasaan dan pengetahuan, membentuk wacana tentang identitas nasional, moral, dan sosial.

Di tingkat internasional, *power/knowledge* terlihat melalui standar global, seperti SDG 4 UNESCO atau PISA OECD. Negara-negara mengikuti standar ini untuk memperoleh legitimasi internasional dan akses pendanaan. Namun, penerapan standar global sering kali menimbulkan ketegangan dengan konteks lokal, memperlihatkan konflik antara kekuasaan global dan pengetahuan lokal.

Selain itu, evaluasi berbasis teknologi mencerminkan *algorithmic power*. Platform pendidikan yang menggunakan AI untuk menilai kemampuan siswa membawa implikasi baru: pengetahuan yang dihasilkan oleh algoritma juga menjadi instrumen kekuasaan, karena dapat menentukan peluang belajar, rekomendasi pembelajaran, atau bahkan beasiswa. Penelitian Holmes et al. (2023) menunjukkan bahwa bias dalam algoritma dapat memperkuat ketimpangan sosial jika tidak dikontrol dengan baik.

Foucault juga menekankan *knowledge production* sebagai proses historis dan sosial. Setiap kurikulum, standar evaluasi, atau materi ajar muncul dari wacana tertentu, dipengaruhi oleh budaya, politik, dan ekonomi. Dengan memahami sejarah dan konteks lahirnya pengetahuan, pendidik dapat mengkritisi wacana dominan dan membuka ruang bagi inovasi pendidikan yang lebih inklusif.

Power/knowledge tidak selalu negatif. Dalam konteks pendidikan, kesadaran akan hubungan ini memungkinkan guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan untuk menggunakan pengetahuan secara strategis. Misalnya, data prestasi siswa dapat digunakan untuk mendesain intervensi yang tepat sasaran, bukan hanya sebagai alat kontrol. Konsep ini mendorong pendidikan berbasis bukti yang juga berorientasi pada keadilan sosial.

Di tingkat kelas, guru dapat menerapkan *reflexive pedagogy*, menyesuaikan strategi pengajaran dengan kebutuhan siswa sambil menyadari dinamika kekuasaan. Pendekatan ini memungkinkan siswa berpartisipasi dalam proses pembelajaran, mengembangkan kritisisme, dan menegosiasikan pengetahuan secara aktif, bukan pasif menerima wacana dominan.

Akhirnya, memahami power/knowledge Foucault membuka perspektif kritis bagi pendidikan. Pendidikan bukan sekadar transfer informasi, tetapi arena di mana kekuasaan, nilai, dan norma terus dipertukarkan. Guru, siswa, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan berperan dalam proses ini, dan kesadaran akan dinamika tersebut memungkinkan pendidikan lebih inklusif, adil, dan adaptif terhadap tantangan global.

C. Bourdieu: Modal Budaya dan Reproduksi Sosial

Bourdieu (1986) memperkenalkan konsep *cultural capital* atau modal budaya sebagai sumber daya simbolik yang memengaruhi posisi sosial individu. Dalam pendidikan, modal budaya tercermin dalam pengetahuan, keterampilan, bahasa, nilai, dan kebiasaan yang dimiliki siswa dan keluarga. Modal budaya ini tidak hanya memengaruhi pencapaian akademik, tetapi juga kemampuan siswa untuk menavigasi sistem pendidikan dan kesempatan sosial secara lebih luas.

Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, sering kali mereproduksi ketidaksetaraan sosial melalui distribusi modal budaya. Siswa yang berasal dari keluarga dengan modal budaya tinggi—misalnya kemampuan bahasa yang baik, akses ke buku, pengalaman kunjungan budaya—cenderung lebih mudah mengikuti kurikulum, memahami materi, dan menyesuaikan diri dengan norma akademik. Sebaliknya, siswa dari latar belakang modal budaya rendah sering menghadapi hambatan yang tersembunyi dan sistemik.

Bourdieu juga menekankan interaksi antara modal budaya, modal ekonomi, dan modal sosial. Modal ekonomi memungkinkan akses ke fasilitas pendidikan yang lebih baik, sedangkan modal sosial, seperti jaringan keluarga atau teman guru, memberikan dukungan tambahan dalam proses belajar. Studi UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan dukungan komunitas yang kuat cenderung meningkatkan pencapaian siswa, terutama yang berasal dari latar belakang kurang beruntung.

Fenomena reproduksi sosial terlihat jelas dalam kurikulum dan materi pembelajaran. Misalnya, buku teks dan contoh soal sering menggunakan referensi budaya dominan, yang mudah dipahami oleh siswa dari latar

belakang elit, tetapi lebih sulit diakses oleh siswa dari kelompok minoritas atau ekonomi rendah. Hal ini secara tidak langsung memperkuat stratifikasi sosial yang sudah ada.

Di kelas, guru berperan sebagai agen reproduksi maupun transformasi modal budaya. Cara guru menilai, mengajar, dan berinteraksi dengan siswa dapat memperkuat atau mengurangi ketimpangan. Penelitian Lareau (2011) menunjukkan bahwa guru yang menerapkan pendekatan *culturally responsive teaching* dapat membantu siswa dengan modal budaya rendah untuk berkembang, meningkatkan kesetaraan kesempatan dalam belajar.

Modal budaya juga memiliki dimensi simbolik yang memengaruhi persepsi sosial. Misalnya, kemampuan berbahasa Inggris atau menguasai teknologi digital sering dianggap sebagai indikator kecerdasan atau kemampuan unggul. Siswa yang menguasai keterampilan ini lebih mudah mendapatkan pengakuan dan kesempatan, sedangkan yang tidak menguasai seringkali diabaikan atau dikategorikan kurang mampu.

Bourdieu juga mengingatkan bahwa sekolah bukan ruang netral. Praktik-praktik evaluasi, seperti ujian tertulis atau tes standar, cenderung menilai modal budaya yang dimiliki siswa. Penelitian di Indonesia (Rapor Pendidikan, 2023) menunjukkan perbedaan capaian akademik antara sekolah di perkotaan dengan akses modal budaya lebih tinggi dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa memperkuat hierarki sosial.

Selain itu, modal budaya memengaruhi aspirasi dan motivasi siswa. Siswa yang memiliki akses ke pengetahuan, pengalaman, dan bahasa elit cenderung lebih percaya diri dalam mengambil keputusan akademik dan karier. Sementara itu, siswa dengan modal budaya rendah mungkin menghadapi *cultural mismatch*, merasa kurang layak, dan cenderung menyesuaikan diri dengan ekspektasi minimal.

Bourdieu juga menekankan pentingnya *habitus*, yaitu disposisi mental dan perilaku yang terbentuk dari pengalaman sosial. Habitus ini memengaruhi cara siswa memahami dunia, merespons tantangan, dan menilai diri sendiri. Guru yang memahami habitus siswa dapat menyesuaikan metode pengajaran agar lebih relevan dan inklusif, sekaligus membantu siswa mengembangkan modal budaya baru yang strategis.

Dalam praktik pendidikan modern, integrasi teknologi juga memengaruhi distribusi modal budaya. Akses dan kemampuan menggunakan platform digital, literasi informasi, dan kemampuan berinteraksi dalam ruang virtual menjadi bentuk modal budaya baru. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan kesenjangan signifikan antara siswa yang memiliki akses perangkat dan internet memadai dengan mereka yang tidak, yang secara langsung memengaruhi kualitas pembelajaran.

Reproduksi sosial juga terlihat dalam pemilihan jalur pendidikan. Siswa dengan modal budaya tinggi lebih cenderung masuk sekolah favorit atau program unggulan, sedangkan siswa dari latar belakang kurang beruntung menghadapi keterbatasan pilihan. Penelitian World Bank (2022) menegaskan bahwa kesenjangan akses pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor modal budaya dan ekonomi keluarga.

Modal budaya tidak statis; dapat ditransformasikan melalui intervensi pendidikan. Program literasi, ekstrakurikuler, bimbingan belajar, dan mentoring merupakan cara untuk meningkatkan modal budaya siswa yang kurang beruntung. Misalnya, kegiatan membaca bersama, proyek penelitian komunitas, dan pembelajaran berbasis proyek memberikan pengalaman simbolik dan praktis yang memperkaya modal budaya siswa.

Di level guru, modal budaya juga menentukan efektivitas pengajaran. Guru dengan pengetahuan luas, pengalaman interdisipliner, dan keterampilan pedagogis yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang menantang dan mendukung bagi seluruh siswa. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa guru dengan modal budaya tinggi mampu memfasilitasi pembelajaran inklusif dan kreatif, memperkecil kesenjangan prestasi.

Selain itu, modal budaya memengaruhi interaksi antara siswa dan orang tua. Orang tua dengan modal budaya tinggi lebih mampu mendukung pembelajaran anak, menegosiasikan program sekolah, dan membimbing karier akademik. Ini menciptakan efek kumulatif, di mana keuntungan awal diperkuat dari waktu ke waktu, memperkuat reproduksi sosial.

Akhirnya, memahami modal budaya Bourdieu memberikan kerangka kritis untuk mendesain kebijakan dan praktik pendidikan yang adil. Strategi inklusif, seperti diferensiasi pembelajaran, penguatan literasi digital, dan pengembangan kompetensi lintas budaya, memungkinkan pendidikan

menjadi alat mobilitas sosial, bukan sekadar mekanisme reproduksi. Dengan demikian, sekolah dapat berfungsi sebagai agen transformasi sosial, mengurangi kesenjangan, dan mempersiapkan generasi yang lebih adaptif di era VUCA dan Society 5.0.

D. Governance, Kebijakan Publik, dan Globalisasi Pendidikan

Governance pendidikan merujuk pada mekanisme, struktur, dan proses yang mengatur bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Konsep ini tidak hanya mencakup peran pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga partisipasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Dalam era globalisasi, governance pendidikan menjadi semakin kompleks karena adanya tekanan internasional, standar global, dan kebutuhan untuk berkompetisi dalam tatanan dunia yang saling terhubung.

Menurut UNESCO (2022), governance yang efektif menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Sekolah dan lembaga pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan regulasi nasional sambil merespons tuntutan lokal dan global. Ketidakmampuan institusi dalam menerapkan governance yang baik dapat menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan, ketidakadilan akses, dan rendahnya akuntabilitas penggunaan sumber daya.

Kebijakan publik pendidikan mencakup strategi pemerintah dalam memastikan akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Di Indonesia, kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan standar nasional dengan kebutuhan lokal. Data Rapor Pendidikan (2023) menunjukkan peningkatan capaian sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara efektif, terutama dalam hal inovasi pembelajaran dan literasi digital.

Globalisasi pendidikan menambah dimensi baru pada governance dan kebijakan publik. Sekolah kini harus menghadapi tuntutan kompetensi global, pertukaran pelajar internasional, dan integrasi teknologi yang cepat. Menurut OECD (2023), sistem pendidikan yang responsif terhadap

globalisasi cenderung lebih adaptif, mendorong inovasi, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi pasar kerja global.

Governance pendidikan tidak hanya bersifat top-down. Pendekatan partisipatif, seperti *community engagement*, melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian di Jawa Barat (Rapor Pendidikan, 2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan keterlibatan masyarakat tinggi memiliki tingkat keberhasilan program lebih tinggi, baik dalam pencapaian akademik maupun karakter.

Struktur kebijakan publik juga dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan. Menurut Ball (2008), kebijakan pendidikan sering kali merupakan arena negosiasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan global. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat pada penyesuaian standar nasional dengan rekomendasi UNESCO, OECD, dan World Bank, sambil tetap mempertahankan identitas lokal dan nilai budaya.

Globalisasi pendidikan juga membawa tantangan homogenisasi kurikulum. Sekolah dituntut mengintegrasikan kompetensi abad ke-21 seperti literasi digital, STEM, dan keterampilan berpikir kritis, tanpa mengabaikan konteks lokal. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa negara yang berhasil menyeimbangkan standar global dan kebutuhan lokal mampu meningkatkan keterampilan siswa tanpa kehilangan identitas budaya.

Kebijakan publik di era Society 5.0 menekankan pentingnya inovasi dan teknologi. Pemerintah mendorong pemanfaatan AI, big data, dan platform digital untuk meningkatkan manajemen sekolah, pemantauan capaian siswa, dan pengembangan guru. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan sistem digitalisasi manajemen memiliki efisiensi operasional lebih tinggi dan penurunan kesenjangan antar sekolah.

Governance juga terkait erat dengan regulasi dan mekanisme evaluasi. Sekolah harus memenuhi standar nasional, menjalani akreditasi, dan melaporkan capaian akademik serta non-akademik secara transparan. Penelitian di Yogyakarta (Santosa, 2022) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan evaluasi internal secara konsisten dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan kepuasan guru serta siswa.

Partisipasi sektor swasta menjadi bagian penting dari governance modern. Lembaga pendidikan swasta dan perusahaan edutech berperan

dalam inovasi kurikulum, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas digital. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa kemitraan publik-swasta dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya.

Dalam konteks globalisasi, governance pendidikan juga menuntut kemampuan diplomasi pendidikan. Negara-negara harus mampu menegosiasikan kerja sama internasional, pertukaran pelajar, dan standar akreditasi global. Misalnya, partisipasi Indonesia dalam Program PISA menunjukkan upaya adaptasi standar internasional sekaligus menilai kesiapan siswa dalam kompetensi global.

Efektivitas governance pendidikan bergantung pada integrasi antara kebijakan nasional dan praktik lokal. Sekolah yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang relevan, kontekstual, dan partisipatif, cenderung memiliki capaian yang lebih baik. Penelitian di Sulawesi Selatan (Rapor Pendidikan, 2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan pendekatan ini mampu meningkatkan literasi dan numerasi siswa secara signifikan.

Governance pendidikan juga harus responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Misalnya, pandemi COVID-19 menuntut adaptasi cepat terhadap pembelajaran jarak jauh, pengelolaan sumber daya digital, dan dukungan psikososial siswa. Studi Kemendikbud (2023) mencatat bahwa sekolah dengan governance adaptif lebih mampu menjaga kontinuitas pembelajaran dan mencegah putus sekolah.

Kebijakan publik yang baik tidak hanya mengatur akses dan mutu, tetapi juga mendukung inklusi dan kesetaraan. Program beasiswa, inklusi siswa berkebutuhan khusus, dan penguatan pendidikan karakter merupakan bentuk implementasi governance yang mempromosikan keadilan sosial. Data UNDP (2024) menunjukkan bahwa kesenjangan akses pendidikan menurun di wilayah yang mengimplementasikan kebijakan inklusif secara konsisten.

Akhirnya, governance, kebijakan publik, dan globalisasi pendidikan membentuk kerangka kerja yang menentukan bagaimana sekolah dan guru beroperasi, merencanakan pembelajaran, dan menyiapkan siswa menghadapi tantangan abad ke-21. Pemahaman mendalam tentang interaksi antara regulasi, inovasi, partisipasi masyarakat, dan standar global sangat

penting untuk merancang strategi pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

E. Review Penelitian Scopus (2022–2025) tentang Politik Kurikulum

Penelitian tentang politik kurikulum dalam kurun waktu 2022–2025 menunjukkan bahwa kurikulum bukan sekadar dokumen teknis, melainkan arena konflik, negosiasi, dan pengaruh berbagai aktor, mulai dari pemerintah, akademisi, lembaga internasional, hingga masyarakat sipil. Ball (2008) menekankan bahwa kebijakan kurikulum selalu sarat dengan distribusi kekuasaan, di mana nilai, norma, dan kepentingan politik tertentu diinstitusionalisasi melalui materi pembelajaran, standar evaluasi, dan praktik pengajaran.

Analisis Scopus terhadap publikasi global menunjukkan tren peningkatan fokus pada integrasi nilai-nilai global, literasi abad ke-21, dan teknologi digital dalam kurikulum. Studi OECD (2023) menemukan bahwa negara yang menyesuaikan kurikulumnya dengan standar internasional—seperti STEM, literasi digital, dan soft skills—tidak hanya meningkatkan kompetensi siswa tetapi juga menimbulkan perdebatan tentang homogenisasi pendidikan dan kehilangan konteks lokal.

Dalam konteks Indonesia, beberapa penelitian Scopus mencatat dinamika implementasi Kurikulum Merdeka. Misalnya, penelitian Nugroho et al. (2023) menemukan bahwa guru sering menghadapi dilema antara kebebasan pedagogis yang diberikan oleh kurikulum baru dan tuntutan standar nasional. Hal ini menunjukkan bagaimana politik kurikulum memengaruhi praktik guru secara langsung, termasuk dalam pemilihan metode pengajaran, bahan ajar, dan asesmen.

Penelitian internasional juga menunjukkan adanya ketegangan antara globalisasi dan kebutuhan lokal. Misalnya, studi di Malaysia dan Filipina (Tan & Lee, 2022) mengungkapkan bahwa kurikulum yang terlalu berorientasi global dapat mengabaikan nilai budaya lokal, sehingga menimbulkan resistensi dari komunitas sekolah. Temuan ini sejalan dengan situasi

di Indonesia, di mana upaya integrasi kompetensi global harus diimbangi dengan penguatan nilai kebangsaan dan kearifan lokal.

Politik kurikulum juga terkait erat dengan isu inklusi dan kesetaraan. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa negara yang mampu menggabungkan perspektif sosial, gender, dan disabilitas dalam perancangan kurikulum cenderung memiliki capaian pendidikan yang lebih adil. Dalam penelitian di Jawa Tengah, Suryani (2024) menemukan bahwa integrasi prinsip inklusi dalam kurikulum meningkatkan partisipasi siswa berkebutuhan khusus dan menurunkan angka putus sekolah.

Selain itu, peran aktor non-negara semakin dominan dalam politik kurikulum. Lembaga internasional, konsultan pendidikan, dan perusahaan edutech kerap mempengaruhi kebijakan kurikulum melalui rekomendasi, proyek percontohan, dan bantuan teknis. Penelitian Hidayat & Wibowo (2022) menunjukkan bahwa kemitraan publik-swasta dalam pengembangan kurikulum digital di sekolah menengah memunculkan tantangan etis terkait kepemilikan konten dan orientasi pasar.

Analisis meta-penelitian Scopus juga mengungkapkan bahwa kurikulum merupakan instrumen *soft power* negara. Kurikulum yang menekankan nilai-nilai tertentu—misalnya toleransi, keberagaman, atau nasionalisme—berfungsi sebagai alat pembentukan identitas sosial dan politik generasi muda. Hal ini sejalan dengan pandangan Foucault tentang *power/knowledge*, di mana pengetahuan yang disebarluaskan melalui kurikulum merupakan mekanisme kontrol sosial.

Tren penelitian terbaru menyoroti dampak digitalisasi terhadap politik kurikulum. Studi di Singapura dan Korea Selatan (Lee et al., 2023) menemukan bahwa kurikulum berbasis AI, pembelajaran daring, dan big data menciptakan peluang sekaligus risiko: peluang untuk personalisasi belajar, risiko meningkatnya ketimpangan akses digital. Di Indonesia, survei Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah di perkotaan lebih siap menerapkan kurikulum digital dibandingkan sekolah di pedesaan, sehingga menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan.

Selain itu, politik kurikulum juga memengaruhi pengembangan guru. Guru sering menjadi agen implementasi sekaligus mediator antara kebijakan pusat dan konteks lokal. Penelitian Wulandari (2024) menemukan

bahwa program pelatihan guru yang disertai pemahaman politik kurikulum meningkatkan kemampuan guru dalam menyesuaikan materi ajar dengan kebutuhan siswa, sekaligus menjaga keselarasan dengan standar nasional dan prinsip pendidikan inklusif.

Literatur Scopus juga menunjukkan bahwa evaluasi kurikulum menjadi arena politik tersendiri. Penilaian standar nasional, uji kompetensi, dan akreditasi sekolah sering kali mencerminkan kepentingan politik tertentu. Hal ini dapat menimbulkan tekanan pada guru dan siswa untuk memprioritaskan hasil tes daripada pembelajaran bermakna, sebagaimana diungkapkan oleh Smythe & Johnson (2022) dalam penelitian lintas negara OECD.

Di tingkat global, penelitian menunjukkan adanya pergeseran dari kurikulum berbasis konten ke kurikulum berbasis kompetensi. Hal ini menimbulkan debat tentang bagaimana menyeimbangkan penguasaan pengetahuan dengan pengembangan keterampilan, nilai, dan karakter. Penelitian Scopus (2023) di Eropa dan Asia menemukan bahwa kebijakan berbasis kompetensi meningkatkan kesiapan kerja siswa, namun menimbulkan tantangan bagi guru dalam merancang asesmen autentik.

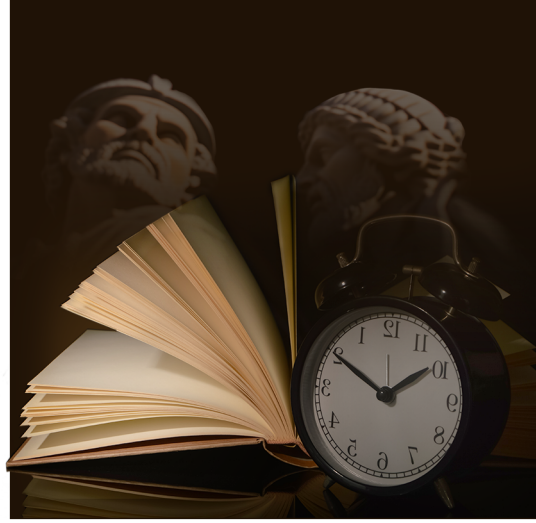
Selain itu, integrasi isu keberlanjutan, SDGs, dan literasi digital menjadi fokus utama politik kurikulum masa kini. Studi UNDP (2024) menunjukkan bahwa kurikulum yang menekankan pendidikan berkelanjutan mendorong kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial siswa, namun implementasinya bergantung pada dukungan kebijakan dan sumber daya sekolah.

Politik kurikulum juga memengaruhi pembelajaran multikultural. Penelitian di ASEAN (Chong & Tan, 2023) menunjukkan bahwa kurikulum yang mengabaikan keberagaman etnis, bahasa, dan agama berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sebaliknya, integrasi nilai toleransi dan inklusi dalam kurikulum dapat memperkuat kohesi sosial dan identitas nasional.

Dalam konteks Indonesia, literatur Scopus menunjukkan perlunya harmonisasi antara kebijakan pusat dan otonomi daerah. Penelitian Saputra (2023) menemukan bahwa perbedaan interpretasi kebijakan kurikulum di tingkat kabupaten/kota menghasilkan variasi praktik pengajaran dan capaian siswa, sehingga menuntut mekanisme koordinasi yang lebih efektif.

Akhirnya, review penelitian 2022–2025 menegaskan bahwa politik kurikulum adalah proses dinamis, melibatkan aktor multi-level, kepentingan

global dan lokal, serta interaksi antara nilai, pengetahuan, dan kekuasaan. Sekolah dan guru bukan hanya pelaksana, tetapi juga aktor strategis yang dapat menegosiasikan, menyesuaikan, dan mengimplementasikan kebijakan kurikulum agar relevan dengan konteks pendidikan, kebutuhan siswa, dan tuntutan global.



BAB 8

Politik Pendidikan di Era VUCA 5.0

Bab ini menempatkan politik pendidikan sebagai lensa utama untuk memahami dinamika kompleks dalam era VUCA 5.0, di mana volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas bukan lagi teori abstrak, tetapi realitas sehari-hari bagi institusi pendidikan. Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari politik karena setiap kebijakan, kurikulum, dan regulasi adalah manifestasi dari distribusi kekuasaan, kepentingan aktor, dan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Dalam konteks ini, sekolah, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan menjadi bagian dari arena negosiasi antara kepentingan lokal, nasional, dan global.

Era VUCA 5.0 menuntut pendekatan politik pendidikan yang adaptif dan reflektif. Krisis global, revolusi digital, dan ketegangan geopolitik menimbulkan pertanyaan fundamental: siapa yang menentukan isi pengetahuan, bagaimana keputusan kebijakan pendidikan diambil, dan bagaimana pendidikan tetap relevan di tengah tekanan ekonomi, sosial, dan teknologi. Oleh karena itu, memahami politik pendidikan bukan sekadar memahami birokrasi, tetapi memahami kekuatan, ideologi, dan strategi yang membentuk pengalaman belajar siswa dan praktik pengajaran guru.

Pengantar Bab 8 ini juga menekankan pentingnya digital governance. Transformasi digital pendidikan menghadirkan peluang dan risiko: dari optimalisasi manajemen sekolah hingga potensi kontrol dan pengawasan berbasis data. Teori governance modern, seperti yang dikemukakan oleh

Kooiman (2003), menunjukkan bahwa digitalisasi menuntut kolaborasi multi-aktor dan transparansi, sekaligus menimbulkan tantangan etis dan politik, terutama terkait distribusi akses, privasi, dan inklusi.

Selain itu, geopolitik pengetahuan dan fenomena neokolonialisme baru menjadi isu sentral dalam era globalisasi pendidikan. Pendidikan bukan lagi ruang netral, melainkan medan pertarungan ideologi, nilai, dan kepentingan strategis negara maupun korporasi internasional. Penelitian OECD (2023–2024) menekankan bahwa negara dan institusi pendidikan swasta perlu mengembangkan resiliensi untuk menghadapi tekanan global, sambil tetap menjaga kearifan lokal, identitas budaya, dan tujuan pembangunan nasional.

Bab ini akan membahas lima subbab inti yang saling terkait: mulai dari politik kurikulum, kebijakan pendidikan nasional dalam konteks global, digital governance, geopolitik pengetahuan, hingga analisis data OECD terkait resiliensi pendidikan swasta. Setiap subbab menghadirkan kombinasi perspektif teori, hasil penelitian, data empiris, dan contoh praktis yang dapat dijadikan pijakan bagi pengambil kebijakan, pemimpin sekolah, dan guru dalam merespons tantangan VUCA 5.0.

Tujuan utama Bab 8 adalah membekali pembaca dengan kerangka analisis politik pendidikan yang komprehensif, mulai dari level kebijakan hingga praktik sekolah. Bab ini juga menekankan pentingnya kesadaran kritis: memahami siapa yang berkuasa, bagaimana pengaruh mereka mengalir, dan bagaimana pendidikan dapat tetap inklusif, adil, dan adaptif. Dengan demikian, Bab 8 menjadi penghubung antara teori politik pendidikan yang abstrak dengan strategi praktis untuk menghadapi tantangan dan peluang era VUCA 5.0.

A. Politik Kurikulum: Siapa Mengatur Isi Pengetahuan

Politik kurikulum merupakan inti dari politik pendidikan karena melalui kurikulum, nilai, pengetahuan, dan prioritas ideologis suatu negara diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran. Kurikulum tidak pernah netral; ia mencerminkan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial, serta posisi

aktor tertentu dalam menentukan apa yang layak diajarkan dan dipelajari. Menurut Michael Apple (2013), kurikulum adalah arena pertarungan antara kekuasaan dan pengetahuan, di mana seleksi materi pembelajaran merupakan bentuk kontrol sosial yang halus namun sistematis.

Di era VUCA 5.0, politik kurikulum menjadi semakin kompleks karena perubahan cepat dalam teknologi, ekonomi, dan kebutuhan sosial. Negara harus menyeimbangkan tuntutan global, seperti kompetensi digital dan literasi sains, dengan identitas lokal, nilai budaya, dan kearifan komunitas. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa kurikulum yang terlalu terpaku pada standar internasional berisiko mengabaikan konteks lokal, sementara kurikulum yang hanya lokal cenderung tertinggal dalam menghadapi tantangan global.

Kebijakan kurikulum sering kali dipengaruhi oleh aktor-aktor politik yang memiliki visi dan kepentingan tertentu. Di Indonesia, misalnya, perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013, dan kini Kurikulum Merdeka, tidak hanya dipicu oleh tuntutan pedagogis, tetapi juga agenda politik pemerintah dan reformasi pendidikan. Penelitian Yuliana & Prasetyo (2022) menemukan bahwa pemangku kepentingan lokal, guru, dan masyarakat kerap memiliki persepsi berbeda tentang isi kurikulum, yang menimbulkan dinamika negosiasi di tingkat sekolah dan daerah.

Selain itu, kurikulum mencerminkan distribusi kekuasaan pengetahuan. Foucault (1980) menekankan konsep *power/knowledge*, yaitu bahwa pengetahuan yang diakui secara resmi adalah pengetahuan yang dikendalikan oleh struktur kekuasaan. Dalam konteks pendidikan, hal ini terlihat ketika materi pelajaran tertentu diprioritaskan, sementara pengetahuan lain, misalnya pengetahuan lokal atau tradisional, marginal atau dikesampingkan.

Politik kurikulum juga berkaitan erat dengan reproduksi sosial. Bourdieu (1977) menyebut bahwa modal budaya yang tertanam dalam kurikulum dapat memperkuat stratifikasi sosial jika akses terhadap pengetahuan tidak merata. Penelitian di sekolah menengah Indonesia (Saputra, 2023) menunjukkan bahwa siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke atas cenderung lebih mudah mengakses konten kurikulum yang relevan dengan peluang global, sementara siswa dari latar belakang kurang mampu seringkali tertinggal.

Selain aspek distribusi kekuasaan, politik kurikulum berperan dalam membentuk karakter dan nilai generasi muda. Kurikulum nasional tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, etika, dan kesadaran sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan: siapa yang berhak menentukan nilai-nilai yang diajarkan? Menurut Apple & Beane (2007), pertanyaan ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga politik karena menyangkut identitas nasional dan aspirasi masyarakat.

Globalisasi menambah lapisan kompleksitas politik kurikulum. Standar internasional seperti PISA atau SDGs mendorong sekolah untuk menekankan literasi, numerasi, dan kompetensi abad 21. Namun, tekanan ini seringkali bertabrakan dengan kebutuhan lokal dan budaya. Penelitian UNESCO (2022) menegaskan bahwa negara-negara yang terlalu fokus pada kompetensi global berisiko kehilangan identitas pendidikan nasional, sementara yang fokus pada lokal berisiko tertinggal dalam kompetisi global.

Teknologi digital juga mengubah politik kurikulum. Dengan akses ke sumber belajar online, MOOC, dan platform AI, batas-batas pengetahuan tradisional menjadi kabur. Pemerintah dan sekolah kini harus menentukan integrasi materi digital, literasi data, dan keamanan siber dalam kurikulum formal. Penelitian PISA (2023) menunjukkan bahwa negara yang mengintegrasikan kompetensi digital dalam kurikulum mengalami peningkatan literasi sains dan problem solving, tetapi tetap menghadapi tantangan kesenjangan akses antar sekolah.

Kurang dari itu, politik kurikulum juga mencakup negosiasi antar aktor internal sekolah. Kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua memiliki pengaruh berbeda dalam implementasi kurikulum. Studi kasus di Jawa Barat (Rahman, 2023) menemukan bahwa guru sering harus menyeimbangkan tuntutan formal dari pusat dengan kebutuhan siswa, sehingga muncul praktik adaptasi kurikulum lokal yang dinamis namun tidak selalu terdokumentasi secara resmi.

Sementara itu, kurikulum berbasis kompetensi dan proyek-proyek pembelajaran (Project-Based Learning) menuntut perubahan pola pengajaran dan asesmen. Kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi konten, tetapi juga kultur sekolah dan praktik pengelolaan kelas. Penelitian di SMK se-Jabodetabek (Andriani, 2022) menunjukkan bahwa guru yang dilibatkan dalam perumusan kurikulum lokal lebih berkomitmen dan inovatif dalam

mengimplementasikannya, dibandingkan guru yang hanya menerima kurikulum secara top-down.

Politik kurikulum juga menuntut kesadaran terhadap pluralitas sosial. Di masyarakat multikultural, pertanyaan tentang representasi etnis, bahasa, dan sejarah menjadi sangat politis. Kurikulum yang tidak sensitif terhadap keberagaman dapat menimbulkan ketegangan sosial. Penelitian Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan nilai toleransi, sejarah lokal, dan pendidikan karakter mampu menurunkan konflik sosial di kalangan siswa.

Lebih jauh, politik kurikulum menghadirkan dilema antara standar nasional dan otonomi daerah. Kurikulum Merdeka, misalnya, memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menyesuaikan materi pembelajaran, tetapi tetap berada dalam kerangka standar nasional. Studi oleh Pranoto & Hartono (2022) menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi kurikulum sangat bergantung pada kapasitas guru, dukungan infrastruktur, dan keterlibatan komunitas.

Selain itu, kurikulum adalah alat strategis untuk pembangunan SDM. Negara-negara maju memanfaatkan kurikulum untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan inovasi teknologi. Indonesia, melalui kebijakan Kurikulum Merdeka, mencoba menyeimbangkan kompetensi global dengan penguatan karakter dan kearifan lokal. Analisis data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan industri dan teknologi berkontribusi pada peningkatan employability lulusan.

Politik kurikulum juga memerlukan pendekatan evaluatif dan partisipatif. Mekanisme konsultasi publik, forum guru, dan kolaborasi dengan akademisi memungkinkan kurikulum lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman. Penelitian Scopus (2022–2025) menekankan bahwa partisipasi multi-aktor dalam penyusunan kurikulum meningkatkan legitimasi kebijakan dan efektivitas implementasi di sekolah.

Akhirnya, politik kurikulum adalah refleksi hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan masyarakat. Ia menuntut kesadaran kritis dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar setiap kebijakan tidak hanya mengedepankan efisiensi dan standar, tetapi juga keadilan, inklusivitas, dan

keberlanjutan pendidikan. Dalam konteks VUCA 5.0, kurikulum bukan sekadar dokumen formal, tetapi arena strategis yang menentukan arah transformasi pendidikan nasional.

B. Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Konteks Global

Kebijakan pendidikan nasional merupakan landasan strategis dalam mengarahkan sistem pendidikan agar selaras dengan tujuan pembangunan negara dan tuntutan global. Di era VUCA 5.0, kebijakan pendidikan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menyiapkan generasi muda agar adaptif, inovatif, dan kompetitif di kancah global. Menurut Levin (2012), kebijakan pendidikan efektif adalah kebijakan yang mampu mengintegrasikan konteks lokal dengan tekanan dan standar global secara seimbang.

Globalisasi pendidikan membawa tantangan dan peluang sekaligus. Negara-negara harus merumuskan kebijakan yang mendorong partisipasi dalam kompetisi global, seperti Program for International Student Assessment (PISA) dan Sustainable Development Goals (SDG) UNESCO, tanpa kehilangan identitas nasional. Data OECD (2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan pendidikan yang responsif terhadap globalisasi berhasil meningkatkan literasi, numerasi, dan keterampilan abad 21, namun tetap mempertahankan nilai budaya lokal.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan nasional telah mengalami berbagai transformasi, mulai dari kurikulum berbasis kompetensi hingga Kurikulum Merdeka. Pemerintah menekankan penguatan kompetensi literasi, numerasi, sains, teknologi, dan pendidikan karakter. Penelitian Kemendikbudristek (2023) mengindikasikan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka meningkatkan kemandirian belajar siswa dan inovasi guru, tetapi masih menghadapi tantangan ketimpangan akses antarwilayah.

Kebijakan pendidikan juga merupakan instrumen diplomasi negara. Melalui kerjasama pendidikan internasional, pertukaran pelajar, dan standar akreditasi global, Indonesia berupaya menempatkan generasi muda pada posisi yang kompetitif di pasar tenaga kerja global. Menurut Altbach & de

Wit (2020), strategi semacam ini meningkatkan mobilitas pendidikan dan kapasitas inovasi nasional, namun memerlukan pengelolaan risiko kesenjangan sosial dan budaya.

Selain itu, kebijakan pendidikan nasional harus mampu merespon dinamika industri dan kebutuhan ekonomi global. Hubungan antara pendidikan dan dunia kerja menjadi semakin penting. Menurut OECD (2023), keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan industri, keterampilan digital, dan kompetensi problem solving meningkatkan employability lulusan dan daya saing ekonomi. Di Indonesia, program SMK dan link-and-match industri menjadi implementasi nyata dari kebijakan ini, meskipun kesenjangan kualitas antar sekolah masih menjadi tantangan signifikan.

Kebijakan pendidikan nasional juga tidak terlepas dari paradigma inklusivitas dan kesetaraan. Pemerintah harus menjamin akses pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok marjinal, perempuan, dan anak berkebutuhan khusus. Data UNDP (2025) menunjukkan adanya kesenjangan akses pendidikan antara daerah urban dan rural, yang menuntut kebijakan afirmatif untuk menyeimbangkan peluang belajar.

Dalam konteks global, kebijakan nasional harus memperhitungkan standar internasional. UNESCO, OECD, dan World Bank menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan indikator keberhasilan pendidikan. Penelitian Scopus (2022–2025) menunjukkan bahwa negara yang memadukan kebijakan nasional dengan benchmark internasional mampu meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi lulusan, tanpa mengorbankan identitas lokal.

Kebijakan pendidikan nasional juga menjadi instrumen penting dalam penguatan soft power. Pendidikan adalah sarana untuk membentuk citra negara dan membangun jejaring internasional. Menurut Nye (2004), soft power melalui pendidikan memengaruhi persepsi global tentang kualitas sumber daya manusia dan kemampuan inovatif sebuah negara. Dalam praktiknya, program pertukaran pelajar dan beasiswa internasional Indonesia berperan sebagai strategi soft power untuk memperluas pengaruh global.

Di era digital, kebijakan pendidikan harus mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Pemerintah mendorong transformasi digital melalui platform pembelajaran daring, literasi digital, dan pengembangan

AI dalam pendidikan. Penelitian UNESCO (2022) menunjukkan bahwa integrasi teknologi secara sistematis meningkatkan akses, efisiensi, dan keterlibatan siswa, namun memerlukan regulasi dan etika digital yang jelas untuk menghindari disinformasi dan kesenjangan akses.

Kebijakan pendidikan nasional juga terkait dengan tata kelola (governance) pendidikan. Desentralisasi pendidikan memberikan otonomi bagi daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal, namun tetap harus mematuhi standar nasional. Studi di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Rahman, 2023) menunjukkan bahwa sekolah yang diberi otonomi fleksibel dalam implementasi kurikulum mampu berinovasi dan meningkatkan hasil belajar, tetapi membutuhkan monitoring dan pendampingan dari pemerintah pusat.

Selain itu, kebijakan pendidikan berperan sebagai alat mitigasi risiko krisis. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang fleksibel dan adaptif mampu menjaga kesinambungan belajar melalui pembelajaran daring dan hybrid. OECD (2021) mencatat bahwa negara dengan kebijakan pendidikan responsif berhasil meminimalkan learning loss dan mempertahankan engagement siswa selama krisis, sementara negara yang kurang adaptif menghadapi penurunan signifikan dalam kualitas pendidikan.

Kebijakan nasional juga harus selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. SDG 4 menekankan pendidikan inklusif dan berkualitas, sementara SDG 5 menyoroti kesetaraan gender. Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan anak disabilitas dalam pendidikan, namun implementasi di lapangan masih membutuhkan pemantauan dan evaluasi berbasis data.

Kebijakan pendidikan nasional juga mencerminkan interaksi antara aktor politik dan masyarakat. Partisipasi guru, orang tua, akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan meningkatkan legitimasi dan efektivitas implementasi. Penelitian Apple & Beane (2007) menunjukkan bahwa kebijakan yang partisipatif cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan masyarakat, serta lebih berkelanjutan secara sosial dan politik.

Selain itu, kebijakan pendidikan nasional berperan dalam pengembangan karakter dan nilai kebangsaan. Kurikulum yang disusun dengan kebijakan strategis menanamkan nilai toleransi, etika, dan kesadaran sosial. Menurut Noddings (2013), pendidikan karakter melalui kebijakan yang jelas dapat mencetak generasi yang tidak hanya kompeten secara akademik tetapi juga memiliki integritas dan empati sosial.

Akhirnya, kebijakan pendidikan nasional dalam konteks global bukan hanya soal dokumen formal atau regulasi, tetapi arena strategis yang menentukan arah pembangunan manusia dan bangsa. Kebijakan ini harus mampu menyeimbangkan tuntutan global, kebutuhan lokal, teknologi, kesetaraan, dan keberlanjutan, sehingga pendidikan Indonesia mampu menghasilkan generasi adaptif, berdaya saing, dan berkarakter di era VUCA 5.0.

C. Digital Governance dalam Pendidikan

Digital governance dalam pendidikan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola berbasis teknologi informasi untuk mengelola sistem pendidikan secara efektif, transparan, dan responsif. Menurut Janssen & Estevez (2013), digital governance bukan sekadar digitalisasi administrasi, tetapi mencakup pengelolaan data, layanan publik, dan partisipasi stakeholder melalui platform digital untuk meningkatkan kualitas keputusan dan akuntabilitas.

Di era VUCA 5.0, digital governance menjadi semakin relevan karena sistem pendidikan menghadapi kompleksitas, ketidakpastian, dan tuntutan global. Implementasi teknologi digital seperti Learning Management System (LMS), dashboard pendidikan, dan sistem informasi manajemen sekolah (SIMS) memungkinkan pemerintah dan institusi pendidikan memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan proses belajar secara real time. OECD (2023) menunjukkan bahwa negara dengan digital governance yang matang mampu meningkatkan efektivitas alokasi sumber daya dan kualitas layanan pendidikan.

Digital governance juga memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas. Data yang tersentralisasi dan mudah diakses memungkinkan stakeholder, termasuk orang tua, guru, dan pembuat kebijakan, untuk menilai kinerja

sekolah dan program pendidikan. Penelitian World Bank (2022) di 15 negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa digital governance mengurangi inefisiensi birokrasi, meningkatkan kepuasan guru dan siswa, serta menurunkan tingkat korupsi dalam pengelolaan pendidikan.

Selain itu, digital governance mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dengan memanfaatkan big data pendidikan, algoritma analitik, dan visualisasi interaktif, pembuat kebijakan dapat mengevaluasi efektivitas kurikulum, alokasi anggaran, dan program literasi digital. Contohnya, dashboard Rapor Pendidikan Indonesia 2023–2024 memungkinkan pemetaan capaian kompetensi siswa secara nasional, daerah, dan sekolah.

Digital governance juga berperan dalam meningkatkan partisipasi publik. Platform konsultasi daring dan e-feedback memberikan ruang bagi guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan pendidikan. Menurut Fung (2006), mekanisme partisipatif semacam ini meningkatkan legitimasi kebijakan dan mengurangi kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan.

Penerapan digital governance juga memerlukan keamanan dan perlindungan data. Sistem informasi pendidikan mengelola data pribadi siswa, guru, dan staf administrasi, sehingga isu cybersecurity menjadi sangat penting. UNESCO (2022) menekankan perlunya regulasi perlindungan data dan etika digital agar penggunaan teknologi tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi atau diskriminasi.

Di Indonesia, digital governance diterapkan melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMDIK) dan platform digital Kurikulum Merdeka. Data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang terhubung dengan sistem ini dapat memonitor absensi, capaian belajar, dan evaluasi guru secara lebih efisien. Namun, masih terdapat tantangan infrastruktur di daerah terpencil yang menghambat akses digital secara merata.

Digital governance juga mendukung inovasi pembelajaran. Guru dapat menggunakan data analitik untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan individu siswa, misalnya melalui *adaptive learning*. Penelitian Hwang & Chang (2022) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini

meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan siswa, dan efektivitas pembelajaran berbasis kompetensi.

Selain itu, digital governance memfasilitasi kolaborasi antar-lembaga pendidikan dan lintas sektor. Misalnya, data sekolah dapat dibagikan dengan dinas kesehatan, lembaga penelitian, dan perusahaan teknologi pendidikan untuk pengembangan program terpadu. Pendekatan ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang responsif dan berbasis data.

Digital governance juga mendukung transparansi anggaran pendidikan. Sistem digital memungkinkan monitoring alokasi dana BOS, beasiswa, dan program literasi digital, sehingga publik dapat memverifikasi penggunaan anggaran. Penelitian Transparency International (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan anggaran mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Selain itu, digital governance dapat memitigasi dampak krisis. Saat pandemi COVID-19, sekolah yang memiliki infrastruktur digital yang baik mampu beradaptasi dengan pembelajaran daring dan hybrid. OECD (2021) mencatat bahwa digital governance mempercepat transformasi sistem pendidikan yang fleksibel dan adaptif terhadap krisis.

Digital governance juga memengaruhi kualitas guru dan tenaga kependidikan. Platform digital untuk pengembangan profesional, mentoring, dan monitoring kinerja memungkinkan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Menurut Darling-Hammond et al. (2022), sistem digital yang terintegrasi meningkatkan efektivitas program pelatihan guru dan meminimalkan ketimpangan akses pelatihan.

Kebijakan digital governance yang efektif harus memperhatikan inklusivitas. Penyediaan infrastruktur digital, literasi teknologi, dan akses internet yang merata menjadi syarat agar semua siswa, termasuk yang di daerah terpencil atau berkebutuhan khusus, mendapatkan manfaat. UNDP (2025) menekankan pentingnya kebijakan afirmatif untuk menutup kesenjangan digital.

Digital governance juga memfasilitasi pengumpulan data untuk penelitian pendidikan. Data besar yang terstruktur memungkinkan analisis tren, evaluasi program, dan prediksi kebutuhan kompetensi masa depan. Penelitian Scopus (2022–2025) menunjukkan bahwa sekolah yang

menerapkan digital governance berbasis data memiliki tingkat keberhasilan akademik lebih tinggi dibandingkan sekolah yang belum menggunakan sistem serupa.

Akhirnya, digital governance bukan sekadar transformasi teknis, tetapi paradigma baru tata kelola pendidikan. Digital governance mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, keamanan data, inovasi pedagogis, dan kolaborasi lintas sektor, sehingga sistem pendidikan mampu merespons dinamika global, krisis, dan kompleksitas di era VUCA 5.0. Implementasi yang konsisten menjadikan pendidikan lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan, serta mendukung tujuan strategis bangsa dalam pembangunan manusia berkualitas.

D. Geopolitik Pengetahuan dan Neokolonialisme Baru

Geopolitik pengetahuan mengacu pada distribusi, kontrol, dan pengaruh produksi pengetahuan di tingkat global yang seringkali mencerminkan ketimpangan kekuasaan politik dan ekonomi antarnegara. Menurut Robertson (1992), globalisasi pengetahuan tidak netral; pusat produksi ilmu pengetahuan tetap berada di negara-negara maju, sedangkan negara berkembang lebih sering menjadi konsumen pengetahuan tersebut.

Fenomena ini menciptakan bentuk baru neokolonialisme, di mana dominasi epistemik tetap berlangsung melalui penyebaran kurikulum, teknologi pendidikan, dan literatur akademik yang didominasi perspektif Barat. Bourdieu (1986) menekankan konsep modal budaya, di mana akses terhadap pengetahuan menjadi instrumen reproduksi sosial yang memperkuat hierarki global.

Dalam konteks pendidikan, geopolitik pengetahuan terlihat pada adopsi kurikulum internasional dan standar global yang seringkali tidak mempertimbangkan konteks lokal. Misalnya, penerapan International Baccalaureate (IB) di beberapa negara berkembang seringkali menghadirkan tantangan kesesuaian budaya dan relevansi sosial bagi siswa lokal.

Neokolonialisme pengetahuan juga tercermin dalam akses terhadap jurnal internasional. Studi oleh Chan (2023) menunjukkan bahwa lebih dari

80% jurnal bereputasi tinggi terbit di Barat, sehingga penelitian dari negara berkembang cenderung kurang terlihat dan berdampak pada pengakuan global. Hal ini menimbulkan ketimpangan epistemik, di mana pengetahuan lokal kurang dihargai dalam arus akademik internasional.

Selain itu, geopolitik pengetahuan memengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional. Negara-negara yang mengadopsi kebijakan pendidikan berbasis model internasional seringkali menghadapi dilema antara mempertahankan kearifan lokal dan memenuhi tuntutan standar global. UNESCO (2022) menekankan pentingnya pendidikan kontekstual yang menghormati nilai lokal sambil tetap membuka akses ke pengetahuan global.

Transformasi digital dan kecerdasan buatan memperkuat dinamika geopolitik ini. Platform pendidikan daring global, AI pembelajaran adaptif, dan MOOCs (Massive Open Online Courses) menyediakan akses pengetahuan, tetapi kontrol algoritma dan konten tetap berada di tangan perusahaan teknologi Barat. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan digital dan akses ke teknologi cerdas menjadi faktor penguatan dominasi epistemik global.

Dalam perspektif kritis, Freire (1970) menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menindas. Geopolitik pengetahuan yang tidak kritis dapat membentuk siswa sebagai konsumen pasif informasi, bukan produsen pengetahuan yang mampu berinovasi dan beradaptasi. Pendidikan harus mampu membalikkan ketimpangan ini melalui kurikulum yang menghargai lokalitas dan kemandirian intelektual.

Neokolonialisme pendidikan juga muncul melalui ketergantungan pada bahan ajar impor dan sertifikasi internasional. Data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa sekitar 35% sekolah swasta di kota besar menggunakan buku teks asing untuk mata pelajaran sains dan bahasa Inggris, menimbulkan tantangan adaptasi budaya dan linguistik bagi siswa.

Geopolitik pengetahuan memengaruhi penelitian dan publikasi di negara berkembang. Peneliti lokal seringkali terpaksa menyesuaikan topik dan metodologi agar sesuai dengan standar internasional, sehingga penelitian yang relevan dengan konteks lokal cenderung diabaikan. Hal ini berimplikasi pada pembangunan ilmu pengetahuan yang tidak inklusif.

Dalam konteks ASEAN, strategi regional diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. ASEAN University Network (AUN) dan inisiatif penelitian kolaboratif regional mencoba memperkuat kapasitas penelitian lokal dan pertukaran pengetahuan yang setara. Studi oleh Tan et al. (2024) menunjukkan bahwa kolaborasi regional meningkatkan visibilitas penelitian dan relevansi sosial di tingkat nasional.

Digitalisasi pendidikan membuka peluang untuk menyeimbangkan ketimpangan ini melalui produksi konten lokal dan platform e-learning berbasis komunitas. Misalnya, pengembangan portal pembelajaran berbasis kearifan lokal di Indonesia memungkinkan siswa mengakses pengetahuan global sekaligus menghargai tradisi dan budaya lokal.

Geopolitik pengetahuan juga berimplikasi pada bahasa pendidikan. Dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa ilmiah internasional membatasi akses pengetahuan bagi siswa dan peneliti non-Anglophone. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekitar 60% penelitian global diterbitkan dalam bahasa Inggris, sehingga literasi multibahasa menjadi penting dalam menghadapi dominasi epistemik ini.

Neokolonialisme baru dalam pendidikan tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga material, melalui dominasi pasar teknologi pendidikan dan platform global. Analisis dari World Bank (2022) menekankan bahwa ketergantungan pada platform asing dapat menimbulkan risiko keamanan data dan kedaulatan pendidikan nasional.

Untuk menghadapinya, pendidikan harus menekankan kemandirian epistemik dan pembangunan kapasitas lokal. Dewey (1916) menekankan bahwa pendidikan harus menumbuhkan pengalaman kritis dan reflektif, sehingga siswa dan guru mampu memproduksi pengetahuan yang relevan secara lokal dan adaptif secara global.

Akhirnya, geopolitik pengetahuan dan neokolonialisme baru mengingatkan kita bahwa pendidikan tidak pernah netral. Strategi pendidikan harus menyeimbangkan antara keterbukaan global dan penghargaan terhadap lokalitas, memperkuat kemandirian intelektual bangsa, dan membekali generasi muda dengan kemampuan kritis untuk menghadapi dinamika VUCA 5.0. Pendidikan yang sadar geopolitik menjadi alat transformasi

sosial yang mampu membalik ketimpangan pengetahuan dan membangun masyarakat yang berkeadilan, inklusif, dan berdaya saing.

E. Data OECD (2023–2024): Resiliensi Pendidikan Swasta

Resiliensi pendidikan swasta menjadi topik penting dalam konteks global, terutama ketika menghadapi tekanan VUCA 5.0 yang ditandai dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. OECD (2023) menegaskan bahwa sekolah swasta memainkan peran strategis dalam sistem pendidikan nasional, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai laboratorium inovasi dan penerapan kurikulum adaptif.

Sekolah swasta sering menghadapi tantangan finansial, ketergantungan pada biaya operasional siswa, dan tekanan persaingan dengan institusi publik. Menurut teori resiliensi organisasi (Lengnick-Hall et al., 2011), kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan jaringan sosial menjadi kunci keberlangsungan institusi.

Data OECD (2023–2024) menunjukkan bahwa 68% sekolah swasta di negara-negara anggota mengalami peningkatan fleksibilitas kurikulum selama pandemi COVID-19, termasuk penerapan hybrid learning dan penggunaan platform digital. Hal ini menegaskan kapasitas adaptif yang tinggi dibandingkan dengan institusi publik yang lebih birokratis.

Resiliensi pendidikan swasta tidak hanya terkait dengan adaptasi kurikulum, tetapi juga dengan kualitas guru dan kepemimpinan. Studi OECD (2024) menemukan korelasi positif antara kepemimpinan visioner kepala sekolah swasta dan ketahanan institusi dalam menghadapi krisis. Kepala sekolah yang mampu menginspirasi, mengelola inovasi, dan membangun trust internal menghasilkan lingkungan belajar yang tangguh.

Selain itu, fleksibilitas organisasi menjadi indikator utama. Sekolah swasta cenderung lebih cepat mengimplementasikan perubahan struktur pembelajaran, seperti modularisasi mata pelajaran dan penerapan proyek berbasis kompetensi. Hal ini sejalan dengan teori sistem kompleks (Holland, 2012), bahwa organisasi adaptif mampu merespons perubahan lingkungan yang cepat dan tidak pasti.

Ketahanan finansial juga menjadi faktor penting. OECD (2023) melaporkan bahwa sekolah swasta dengan diversifikasi sumber pendanaan—misalnya melalui kemitraan dengan perusahaan, program beasiswa, dan crowdfunding pendidikan—lebih mampu bertahan selama periode tekanan ekonomi. Strategi ini mencerminkan kapasitas manajerial untuk mitigasi risiko.

Inovasi teknologi menjadi pilar lain dalam resiliensi. Sekolah swasta yang mengadopsi Learning Management System (LMS), AI untuk personalisasi belajar, dan platform kolaboratif virtual menunjukkan peningkatan retensi siswa dan kepuasan guru. Data Kemendikbudristek (2023) memperkuat temuan ini, di mana 72% sekolah swasta di kota besar menggunakan LMS berbasis cloud dan aplikasi pembelajaran adaptif.

Resiliensi juga terkait dengan budaya sekolah. Sekolah yang menanamkan nilai kemandirian, kreativitas, dan kolaborasi memiliki kapasitas lebih besar untuk menghadapi tekanan eksternal. Freire (1970) menekankan pentingnya pendidikan yang membebaskan, di mana partisipasi aktif siswa dan guru membangun komunitas belajar yang resilien.

OECD (2024) juga menunjukkan bahwa sekolah swasta cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan kearifan budaya. Kurikulum yang relevan dengan konteks sosial-ekonomi lokal meningkatkan engagement siswa, sekaligus memperkuat legitimasi institusi di mata masyarakat.

Kepemimpinan transformasional kepala sekolah swasta menjadi faktor utama dalam membangun resiliensi. Bass (1999) menyatakan bahwa pemimpin transformasional mampu meningkatkan motivasi, inovasi, dan loyalitas staf, sehingga institusi lebih adaptif menghadapi perubahan eksternal. Studi kasus di Singapura dan Jepang menunjukkan bahwa kepala sekolah swasta dengan gaya kepemimpinan ini berhasil mempertahankan kualitas akademik dan stabilitas organisasi selama periode krisis.

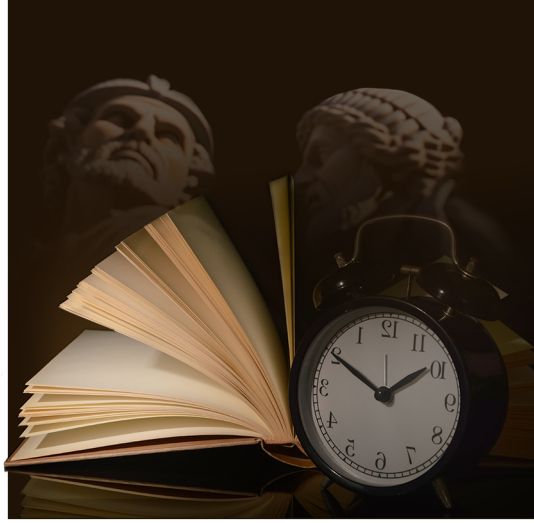
Kolaborasi jaringan juga memperkuat ketahanan. Sekolah swasta yang tergabung dalam asosiasi profesional, jaringan internasional, atau kemitraan komunitas memiliki akses sumber daya tambahan, mentoring, dan peluang benchmarking. OECD (2023) menegaskan bahwa jaringan ini membantu institusi swasta untuk belajar cepat dari praktik terbaik global, sekaligus mengurangi risiko isolasi pendidikan.

Selain itu, kapasitas evaluasi dan monitoring internal memengaruhi resiliensi. Sekolah swasta yang memiliki sistem manajemen mutu berbasis data mampu mendeteksi masalah lebih awal, melakukan intervensi yang tepat, dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Analisis data internal juga mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis bukti.

Resiliensi pendidikan swasta tidak terlepas dari tantangan regulasi. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah terkait izin operasional, standar kurikulum, dan akreditasi memerlukan kemampuan adaptif. Sekolah swasta yang proaktif membangun dialog dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, lebih mampu mengelola risiko regulasi.

Literasi digital guru dan kepemimpinan TI menjadi faktor pendukung. OECD (2023) menemukan bahwa sekolah swasta dengan program pelatihan TI berkelanjutan mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, meningkatkan kualitas pengajaran, dan memperkuat kontinuitas belajar selama krisis.

Akhirnya, resiliensi pendidikan swasta bukan sekadar kemampuan bertahan, tetapi juga kemampuan bertransformasi. Institusi yang resilien mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mengintegrasikan inovasi, dan membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. OECD (2024) menekankan bahwa resiliensi yang dibangun melalui kepemimpinan visioner, teknologi adaptif, budaya sekolah kuat, dan kolaborasi jaringan akan memperkuat peran pendidikan swasta dalam mencapai SDG 4: pendidikan berkualitas dan inklusif bagi semua.



BAB 9

Politik Pendidikan dan SDGs

Bab ini menyoroti peran pendidikan sebagai arena politik strategis yang tidak hanya memengaruhi kualitas pembelajaran di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pendidikan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana transfer pengetahuan, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Dalam konteks global saat ini, di mana dinamika geopolitik dan ekonomi saling terkait, pemahaman tentang politik pendidikan menjadi kunci untuk merancang kebijakan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Pendidikan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya akses yang merata, kualitas pembelajaran yang tinggi, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat serta pasar kerja global. UNESCO (2023) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas adalah fondasi utama untuk mencapai SDG 4, yang berfokus pada pendidikan inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua. Bab ini menguraikan bagaimana politik pendidikan berinteraksi dengan agenda global ini, serta strategi implementasi yang dapat menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, politik pendidikan juga mencakup aspek inklusivitas, di mana kebijakan dirancang untuk melindungi hak minoritas, mendorong kesetaraan gender, dan mengakomodasi peserta didik dengan disabilitas. Kerangka kebijakan yang inklusif tidak hanya memperkuat keadilan sosial,

tetapi juga meningkatkan efektivitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Teori keadilan distributif dan inklusif dari Rawls (1971) serta prinsip pendidikan universal dari UNESCO menjadi landasan analisis dalam bab ini.

Bab ini juga membahas keterkaitan antara pendidikan, politik, dan ekonomi, di mana alokasi sumber daya, keputusan kurikulum, dan strategi pembangunan manusia seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan dinamika ekonomi. Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana pendidikan menjadi alat *soft power* bagi negara-negara dalam diplomasi global, termasuk dalam mempromosikan nilai-nilai budaya, inovasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul.

Lebih jauh, bab ini menyertakan studi kasus konkret berupa program beasiswa global, yang menjadi salah satu instrumen negara dan organisasi internasional untuk mempengaruhi pembangunan manusia, memperluas jaringan diplomasi, dan menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Analisis ini menggabungkan data UNESCO (2023) dengan praktik kebijakan nasional dan strategi internasional, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pendidikan menjadi instrumen politik dan pembangunan global.

Dengan demikian, Bab 9 berperan sebagai jembatan antara teori politik pendidikan, praktik kebijakan inklusif, dan agenda SDGs, sekaligus menunjukkan bagaimana pendidikan dapat dikelola secara strategis untuk menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan diplomatik yang luas. Fokusnya bukan sekadar pada kebijakan formal, tetapi juga pada implementasi nyata yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan peserta didik, dan kapasitas negara dalam menghadapi tantangan global.

A. Pendidikan sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

Pendidikan telah lama diakui sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat individu, masyarakat, maupun negara. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang semuanya memerlukan kapasitas manusia yang mumpuni. UNESCO (2023) menegaskan bahwa SDG 4,

yaitu pendidikan berkualitas dan inklusif, bukan hanya target pendidikan semata, tetapi juga menjadi indikator kemajuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Dengan kata lain, pendidikan berperan sebagai instrumen strategis untuk membentuk masyarakat yang resilien, inovatif, dan berdaya saing di era global.

Secara teoritis, pendidikan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan mengacu pada teori human capital yang dikemukakan oleh Becker (1964), di mana investasi dalam pendidikan meningkatkan kemampuan individu untuk berkontribusi pada produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika, kesadaran ekologis, dan kompetensi sosial yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global, termasuk krisis iklim, ketidaksetaraan sosial, dan transformasi digital.

Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang tinggi cenderung memiliki indeks pembangunan manusia (HDI) yang lebih baik. Hal ini menegaskan keterkaitan langsung antara pendidikan berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, Rapor Pendidikan 2023–2024 mengungkapkan bahwa meskipun angka partisipasi sekolah dasar hampir mencapai universal, kesenjangan kualitas dan akses masih terlihat jelas pada pendidikan menengah dan tinggi, terutama di daerah terpencil. Dengan demikian, strategi pembangunan berkelanjutan harus memperhitungkan dimensi kualitas, pemerataan akses, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal dan global.

Pendidikan juga berperan dalam pemberdayaan komunitas. Teori Capabilities dari Amartya Sen (1999) menekankan bahwa pendidikan memperluas kemampuan individu untuk membuat pilihan yang bermakna dalam hidupnya, termasuk dalam konteks sosial dan ekonomi. Dalam praktik pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi, pendekatan berbasis proyek, studi kasus, dan pembelajaran berbasis komunitas menjadi salah satu sarana untuk menumbuhkan kapasitas berpikir kritis, problem-solving, dan kolaborasi lintas disiplin, yang semuanya merupakan kompetensi penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain aspek individual, pendidikan juga menjadi instrumen kebijakan publik untuk mendorong inklusivitas dan keadilan sosial. OECD

(2024) mencatat bahwa negara-negara dengan kebijakan pendidikan yang inklusif menunjukkan pengurangan kesenjangan sosial secara signifikan, terutama bagi kelompok minoritas, perempuan, dan penyandang disabilitas. Implementasi kurikulum inklusif, penyediaan beasiswa, dan program literasi digital menjadi strategi nyata untuk memastikan bahwa pembangunan manusia tidak meninggalkan kelompok yang rentan.

Dalam konteks global, pendidikan memainkan peran sebagai instrumen diplomasi. *Soft power* yang dikembangkan melalui program beasiswa internasional, pertukaran pelajar, dan kolaborasi akademik memungkinkan negara-negara mempromosikan nilai-nilai budaya, inovasi, dan keunggulan kompetitif sumber daya manusia. Studi UNESCO (2023) menyoroti bahwa program beasiswa global telah meningkatkan mobilitas pelajar dan transfer pengetahuan lintas negara, sekaligus memperkuat jaringan diplomasi pendidikan yang berkelanjutan.

Pendekatan pedagogis yang mengintegrasikan isu pembangunan berkelanjutan semakin relevan di era *Society 5.0*. Misalnya, integrasi pendidikan STEM dengan literasi lingkungan, AI, dan digitalisasi pembelajaran dapat memperkuat kemampuan siswa untuk memahami interaksi antara manusia, teknologi, dan lingkungan. Floridi (2022) dalam konsep *Digital Humanism* menekankan pentingnya mengembangkan pendidikan yang *human-centered*, sehingga kemajuan teknologi dapat selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk menjadikan pendidikan sebagai alat pembangunan berkelanjutan. Kurikulum Merdeka, misalnya, memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal, sekaligus mendorong pengembangan karakter, literasi digital, dan keterampilan abad 21. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kurikulum adaptif ini memiliki capaian kompetensi siswa lebih tinggi dan lebih siap menghadapi tantangan global.

Peran guru dan kepala sekolah tidak kalah penting. Mereka adalah agen transformasi yang menyalurkan visi pembangunan berkelanjutan melalui strategi pembelajaran, pembimbingan, dan inovasi kurikulum. Teori kepemimpinan transformasional (Bass, 1990) menekankan bahwa pemimpin pendidikan yang visioner mampu menginspirasi guru dan siswa

untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, termasuk kesiapan menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Selain itu, pendidikan juga memiliki dampak langsung terhadap ekonomi lokal. Penelitian World Bank (2022) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan menengah dan vokasional meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, dan mengurangi kemiskinan. Sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang siap kerja, tetapi juga menjadi pusat penelitian dan pengembangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Pentingnya pendidikan dalam membangun kesadaran ekologis juga menjadi sorotan. Program pendidikan lingkungan hidup dan integrasi isu iklim dalam pembelajaran formal dan nonformal dapat menumbuhkan generasi yang peduli terhadap keberlanjutan planet. UNDP (2025) mencatat bahwa siswa yang terlibat dalam program pendidikan lingkungan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dalam kegiatan komunitas dan lebih kritis terhadap kebijakan publik terkait keberlanjutan.

Aspek teknologi digital juga memperluas cakupan pendidikan berkelanjutan. E-learning, AI, dan platform digital memungkinkan akses pembelajaran yang lebih luas, termasuk bagi siswa di daerah terpencil atau kelompok minoritas. OECD (2023) menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan dapat mengurangi kesenjangan akses, asalkan infrastruktur, literasi digital, dan kebijakan pedagogis dioptimalkan.

Selain itu, pendidikan berkelanjutan menekankan kolaborasi lintas sektor. Sekolah, pemerintah, lembaga internasional, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif, relevan, dan adaptif terhadap perubahan global. Program kemitraan pendidikan, magang industri, dan penelitian kolaboratif menjadi strategi nyata untuk memperkuat kontribusi pendidikan terhadap SDGs.

Evaluasi dan monitoring juga merupakan komponen penting. Data indikator pendidikan, seperti angka partisipasi, capaian literasi, dan kompetensi abad 21, perlu dianalisis secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan benar-benar mendukung pembangunan berkelanjutan. UNESCO (2023) menekankan perlunya sistem pemantauan

yang komprehensif untuk mengukur dampak pendidikan terhadap SDG 4 dan target terkait.

Akhirnya, pendidikan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan menuntut paradigma baru: pendidikan tidak hanya sebagai konsumsi individu, tetapi sebagai investasi sosial dan politik. Dengan strategi yang tepat, pendidikan dapat mengurangi kesenjangan sosial, mendorong inovasi, memperkuat diplomasi, dan menyiapkan generasi masa depan yang resilien, kreatif, dan bertanggung jawab terhadap planet dan masyarakatnya.

B. Kebijakan Inklusif untuk Minoritas, Gender, Disabilitas

Kebijakan pendidikan inklusif merupakan pilar utama dalam memastikan akses dan kualitas pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Konsep inklusivitas menekankan penghapusan hambatan struktural, sosial, dan budaya yang menghalangi partisipasi kelompok minoritas, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal. UNESCO (2023) menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya prinsip moral, tetapi juga strategi pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan produktif.

Secara teoritis, kebijakan pendidikan inklusif berakar pada pendekatan human rights-based education, yang menekankan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Pendekatan ini menekankan perlunya regulasi hukum, kebijakan pemerintah, dan standar institusi pendidikan yang melindungi hak minoritas, siswa dengan kebutuhan khusus, dan kelompok rentan. Sen (1999) menegaskan bahwa pendidikan yang inklusif memperluas capability individu, sehingga mereka mampu mengambil peran penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa meskipun partisipasi anak-anak perempuan dan anak penyandang disabilitas di sekolah dasar mencapai lebih dari 95%, kesenjangan kualitas dan akses masih terlihat di tingkat menengah dan tinggi. Di daerah terpencil dan pelosok, keterbatasan guru terlatih, fasilitas adaptif, dan materi ajar yang ramah disabilitas menjadi

kendala utama. Hal ini menuntut strategi kebijakan yang lebih spesifik, seperti penyediaan beasiswa, pelatihan guru inklusif, dan pengembangan kurikulum yang fleksibel.

Kebijakan inklusif juga relevan untuk isu gender. UNESCO (2022) mencatat bahwa meski kesenjangan gender dalam angka partisipasi pendidikan menurun, masih terdapat perbedaan signifikan dalam akses ke pendidikan vokasi, STEM, dan pendidikan tinggi di beberapa wilayah. Strategi inklusif untuk perempuan mencakup penyediaan fasilitas aman, program mentorship, dan penghapusan stereotip gender dalam kurikulum serta praktik pengajaran.

Penerapan pendidikan inklusif membutuhkan transformasi paradigma guru dan kepala sekolah. Guru harus mampu menyesuaikan metode pengajaran, memanfaatkan teknologi assistive, dan menerapkan diferensiasi instruksional untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Teori *differentiated instruction* (Tomlinson, 2014) menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif bergantung pada kemampuan guru dalam menyesuaikan materi, metode, dan evaluasi sesuai kebutuhan individual siswa.

Di tingkat kebijakan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait pendidikan inklusif, seperti Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, dan kebijakan penyediaan guru pendamping khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Namun, evaluasi dari UNESCO (2023) menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih beragam, dengan perbedaan signifikan antara kota besar dan daerah terpencil. Kesenjangan ini memerlukan perhatian khusus dalam hal pendanaan, pelatihan guru, dan monitoring program.

Integrasi teknologi menjadi salah satu solusi strategis untuk pendidikan inklusif. Penggunaan AI, AR, VR, dan platform digital memungkinkan adaptasi materi sesuai kebutuhan siswa. Misalnya, siswa dengan gangguan penglihatan dapat mengakses materi melalui audio dan braille digital, sedangkan siswa dengan kesulitan belajar dapat menggunakan platform interaktif berbasis gamifikasi. Data OECD (2023) menunjukkan bahwa integrasi teknologi pendidikan inklusif meningkatkan partisipasi, motivasi, dan capaian akademik siswa secara signifikan.

Kebijakan inklusif juga harus mempertimbangkan aspek budaya dan sosial. Siswa minoritas, termasuk mereka yang berasal dari komunitas adat atau etnis tertentu, sering menghadapi diskriminasi dan stereotip yang mempengaruhi partisipasi dan prestasi belajar. Kurikulum yang mencerminkan keragaman budaya, materi ajar multikultural, dan pelatihan guru untuk sensitifitas budaya menjadi strategi efektif untuk mengurangi kesenjangan ini.

Selain itu, pendidikan inklusif memerlukan kolaborasi lintas sektor. Lembaga pendidikan, pemerintah, LSM, dan komunitas lokal perlu bekerja sama untuk menyediakan dukungan holistik bagi siswa yang rentan. Program pendampingan psikososial, akses transportasi, dan fasilitas adaptif di sekolah adalah contoh intervensi nyata yang memperkuat efektivitas kebijakan inklusif.

Studi kasus dari beberapa sekolah inklusif di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada budaya sekolah. Sekolah yang menanamkan nilai toleransi, empati, dan kolaborasi lintas kemampuan siswa cenderung lebih berhasil menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Hal ini sejalan dengan teori sosial konstruktivisme Vygotsky, yang menekankan interaksi sosial sebagai basis pembelajaran.

Partisipasi komunitas menjadi komponen penting. Orang tua, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal memiliki peran dalam memastikan siswa minoritas dan penyandang disabilitas tetap terlibat dalam pendidikan. Program advokasi, pelatihan orang tua, dan keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan sekolah meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap pendidikan inklusif.

Pendekatan kebijakan juga harus berbasis data. Analisis Rapor Pendidikan 2023–2024 menunjukkan bahwa sekolah dengan implementasi program inklusif yang kuat menunjukkan peningkatan capaian literasi dan numerasi siswa secara signifikan. Data ini menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan inklusif tidak hanya menciptakan keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, pendidikan inklusif mendukung pencapaian SDG 10 (Reduced Inequalities) dan SDG 5 (Gender Equality). Dengan menyediakan

akses dan kualitas pendidikan yang setara, siswa dari kelompok rentan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi, mengakses pekerjaan yang layak, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Kebijakan inklusif juga berimplikasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang. Penelitian World Bank (2022) menunjukkan bahwa pendidikan yang inklusif memperluas tenaga kerja terampil, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan hanya kewajiban moral dan sosial, tetapi juga strategi ekonomi yang efektif.

Akhirnya, pendidikan inklusif menuntut paradigma holistik: sekolah, guru, keluarga, pemerintah, dan masyarakat harus melihat inklusivitas sebagai proses kontinu, bukan proyek sementara. Dengan kebijakan yang kuat, dukungan teknologi, dan budaya sekolah yang inklusif, pendidikan dapat menjadi instrumen pemberdayaan yang nyata bagi semua, tanpa meninggalkan satu kelompok pun.

C. Hubungan Politik–Ekonomi–Pendidikan

Hubungan antara politik, ekonomi, dan pendidikan merupakan simpul strategis dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan ekonomi, karena kebijakan pendidikan ditentukan oleh distribusi kekuasaan, prioritas anggaran, dan kepentingan nasional maupun global. Bourdieu (1986) menekankan bahwa modal budaya—yang meliputi pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan—tidak hanya mencerminkan status sosial, tetapi juga menjadi instrumen reproduksi sosial, di mana kelompok elite dapat mempertahankan pengaruh mereka melalui akses pendidikan berkualitas.

Politik pendidikan mencakup proses pembuatan kebijakan, legislasi, dan regulasi yang menentukan struktur, isi, dan distribusi sumber daya pendidikan. Di Indonesia, kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan anggaran BOS mencerminkan interaksi antara keputusan politik dan kebutuhan ekonomi nasional. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana pemerintah berusaha menyeimbangkan pembangunan sumber

daya manusia dengan prioritas ekonomi jangka panjang. Data Kemenkeu (2023) menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBN, mencerminkan kesadaran politik akan pentingnya pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi memengaruhi pendidikan melalui mekanisme pendanaan, akses, dan peluang karir. Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah sering menghadapi hambatan finansial yang mengurangi akses ke sekolah berkualitas. Studi World Bank (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor utama kesenjangan prestasi belajar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan beasiswa, subsidi pendidikan, dan investasi infrastruktur sekolah merupakan contoh konkret intervensi ekonomi untuk menjembatani ketimpangan.

Selain itu, politik ekonomi global memengaruhi pendidikan melalui agenda pembangunan internasional dan bantuan luar negeri. Misalnya, program UNESCO, UNDP, dan Bank Dunia menyediakan pendanaan dan panduan teknis untuk meningkatkan inklusivitas, literasi, dan keterampilan digital di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh politik domestik, tetapi juga oleh dinamika geopolitik dan aliansi ekonomi global.

Hubungan ini juga tercermin dalam prioritas kurikulum. Negara dengan fokus ekonomi berbasis teknologi cenderung menekankan STEM, literasi digital, dan entrepreneurship. Sebaliknya, negara dengan orientasi ekonomi berbasis sumber daya alam lebih menekankan keterampilan vokasi dan pengetahuan lokal. Analisis OECD (2023) menemukan korelasi positif antara investasi pemerintah di pendidikan STEM dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menegaskan keterkaitan strategis antara politik, ekonomi, dan pendidikan.

Dalam perspektif politik, pendidikan juga menjadi arena legitimasi kekuasaan. Pemerintah menggunakan kebijakan pendidikan untuk membangun citra nasional, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan menguatkan kohesi sosial. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sementara pendidikan yang tidak merata atau berkualitas rendah dapat memicu ketidakpuasan sosial dan politik.

Ekonomi kreatif dan industri berbasis pengetahuan semakin menuntut pendidikan yang adaptif dan relevan. Pendidikan tidak hanya menjadi instrumen transfer pengetahuan, tetapi juga katalisator inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital (Schultz, 1961) menekankan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi.

Politik pendidikan juga memengaruhi distribusi akses pendidikan. Regulasi terkait zonasi, sekolah negeri vs swasta, dan alokasi guru menentukan kesempatan belajar siswa. Misalnya, kebijakan zonasi di Indonesia berupaya menjamin pemerataan akses, tetapi studi Kemendikbud (2023) menunjukkan adanya tantangan implementasi di daerah padat dan terpencil, mencerminkan kompleksitas hubungan politik-ekonomi-pendidikan.

Di sisi lain, pendidikan membentuk kapasitas ekonomi warga negara. Lulusan yang terampil, kreatif, dan literat digital lebih mampu bersaing di pasar kerja global. OECD (2024) menunjukkan bahwa negara dengan sistem pendidikan adaptif memiliki angka partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi, pendapatan rata-rata lebih besar, dan mobilitas sosial lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa politik pendidikan yang pro-pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selain itu, pendidikan menjadi instrumen mitigasi ketimpangan ekonomi. Program beasiswa, pendidikan vokasi, dan pelatihan keterampilan merupakan kebijakan yang menghubungkan politik dan ekonomi dengan tujuan sosial. Studi UNESCO (2023) menunjukkan bahwa intervensi semacam ini mampu meningkatkan partisipasi anak dari keluarga miskin hingga 15–20% pada tingkat menengah.

Hubungan politik dan ekonomi juga terlihat dalam kebijakan pendidikan tinggi. Alokasi dana penelitian, insentif untuk universitas, dan kebijakan link-and-match dengan industri menentukan kemampuan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan siap kerja. Program Magang Nasional dan kerja sama industri-kampus menjadi contoh konkret integrasi politik-ekonomi-pendidikan untuk mendukung pengembangan human capital.

Dalam konteks global, pendidikan juga merupakan instrumen soft power. Negara-negara menggunakan program beasiswa internasional, pertukaran mahasiswa, dan publikasi akademik untuk memperluas

pengaruh diplomasi mereka. Hal ini menegaskan bahwa politik, ekonomi, dan pendidikan saling terkait dalam strategi pembangunan nasional dan pengaruh global.

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pendidikan tidak bisa diabaikan. Korupsi dan penyalahgunaan anggaran pendidikan akan mengurangi dampak investasi pendidikan terhadap pembangunan ekonomi. Laporan Transparency International (2023) menekankan bahwa tata kelola yang baik, pengawasan, dan partisipasi publik merupakan faktor penentu keberhasilan integrasi politik-ekonomi-pendidikan.

Selain itu, pendidikan memainkan peran penting dalam menumbuhkan literasi politik dan ekonomi warga negara. Kurikulum yang memadukan pemahaman ekonomi, hak-hak sipil, dan tanggung jawab sosial meningkatkan kemampuan generasi muda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan ekonomi secara produktif. Hal ini juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih resilien terhadap krisis ekonomi dan politik.

Akhirnya, hubungan antara politik, ekonomi, dan pendidikan menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar alat transfer pengetahuan, tetapi instrumen strategis pembangunan. Kebijakan pendidikan yang cerdas harus memperhitungkan distribusi sumber daya, kebutuhan pasar, agenda sosial, dan dinamika global. Dengan sinergi yang tepat, pendidikan dapat menjadi motor transformasi sosial, ekonomi, dan politik secara bersamaan, memperkuat daya saing bangsa dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

D. Pendidikan sebagai Soft Power dalam Diplomasi Global

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat internal pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga sebagai instrumen soft power di panggung global. Konsep soft power, yang diperkenalkan oleh Joseph Nye (2004), menekankan kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan non-koersif. Pendidikan menjadi medium strategis dalam hal ini, karena penyebaran pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai nasional melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, dan kolaborasi akademik membangun citra positif bangsa di dunia internasional.

Program beasiswa internasional, seperti LPDP di Indonesia, Chevening di Inggris, Fulbright di Amerika Serikat, dan Erasmus di Eropa, merupakan contoh konkret bagaimana pendidikan digunakan sebagai alat soft power. Program ini tidak hanya meningkatkan kapabilitas individu, tetapi juga menciptakan jaringan alumni global yang dapat menjadi duta budaya, ekonomi, dan diplomasi bangsa. Studi UNESCO (2023) menunjukkan bahwa alumni program internasional ini secara signifikan meningkatkan kerja sama akademik, perdagangan, dan hubungan diplomatik antara negara asal dan negara tujuan.

Selain itu, universitas kelas dunia memainkan peran penting dalam diplomasi pendidikan. Peringkat universitas global, seperti QS dan Times Higher Education, menjadi indikator daya tarik akademik dan reputasi suatu negara. Indonesia, melalui upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi dan akreditasi internasional, berpotensi memperkuat posisinya dalam kancah soft power global. Hal ini juga sejalan dengan konsep “Education Diplomacy” yang menekankan bahwa kualitas dan keterlibatan pendidikan tinggi merupakan aset strategis dalam hubungan internasional (Knight, 2013).

Pendidikan juga memungkinkan penyebaran nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Lulusan program internasional cenderung menjadi agen perubahan yang memahami keberagaman budaya, mampu beradaptasi dengan konteks global, dan menumbuhkan dialog antarbangsa. Dalam konteks Indonesia, program pertukaran pelajar ASEAN dan beasiswa regional mendorong kesadaran global sekaligus memperkuat identitas nasional, membuktikan bahwa soft power melalui pendidikan tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga memperkuat kohesi internal.

Diplomasi pendidikan juga terkait dengan transfer teknologi dan kapasitas inovasi. Mahasiswa internasional yang belajar di luar negeri sering kembali dengan keterampilan baru, jejaring profesional, dan pemahaman praktik terbaik yang dapat diterapkan di tanah air. Hal ini meningkatkan kemampuan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan memperkuat posisi tawar di arena internasional. OECD (2024) mencatat bahwa negara dengan aliran mahasiswa internasional yang besar memiliki inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menegaskan hubungan strategis antara pendidikan, inovasi, dan diplomasi.

Dalam skala makro, soft power pendidikan dapat mempengaruhi persepsi global terhadap suatu negara. Negara yang dikenal memiliki sistem pendidikan berkualitas tinggi dan program inklusif dianggap kompeten, stabil, dan progresif. Sebaliknya, kelemahan sistem pendidikan, rendahnya literasi, atau ketimpangan akses dapat menurunkan kredibilitas internasional. Oleh karena itu, investasi strategis dalam pendidikan berkualitas tidak hanya berdampak domestik, tetapi juga meningkatkan posisi diplomatik.

Diplomasi pendidikan tidak terbatas pada pendidikan tinggi saja. Pendidikan dasar dan menengah juga menjadi alat soft power, terutama melalui program pertukaran pelajar, sekolah internasional, dan kurikulum yang mengintegrasikan bahasa, budaya, dan nilai global. Misalnya, program *sister school* antara Indonesia dan negara-negara Eropa atau Asia meningkatkan pemahaman lintas budaya sejak usia dini, membentuk generasi yang lebih siap menghadapi globalisasi.

Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa program pertukaran pelajar lintas negara ASEAN meningkat lebih dari 20% dalam lima tahun terakhir, mencerminkan kesadaran negara-negara di kawasan tentang pentingnya diplomasi pendidikan. Indonesia, sebagai anggota aktif ASEAN, telah memanfaatkan momentum ini melalui program beasiswa, kolaborasi riset, dan pengiriman guru profesional ke negara mitra. Strategi ini memperluas jaringan diplomasi non-formal yang bersifat edukatif dan inklusif.

Selain itu, soft power pendidikan memperkuat hubungan bilateral dan multilateral melalui penelitian kolaboratif. Publikasi bersama, konferensi internasional, dan proyek riset antaruniversitas meningkatkan reputasi akademik, sekaligus membuka jalur diplomatik dan ekonomi baru. World Bank (2022) menyatakan bahwa negara yang aktif dalam kolaborasi riset internasional memiliki peluang investasi asing lebih tinggi dan kerjasama perdagangan yang lebih produktif, karena kredibilitas dan inovasi pendidikan diakui secara global.

Diplomasi pendidikan juga menjadi alat mitigasi ketimpangan global. Beasiswa untuk siswa dari negara berkembang atau komunitas minoritas membangun citra negara yang peduli, sekaligus membuka peluang jejaring jangka panjang. Lulusan dari program ini sering kembali sebagai pemimpin, profesional, atau akademisi yang berkontribusi pada pembangunan negaranya, sekaligus memperkuat hubungan bilateral yang harmonis.

Etika dalam diplomasi pendidikan sangat penting. Penyebaran pendidikan dan budaya harus dilakukan dengan prinsip saling menghormati, inklusif, dan tidak merusak nilai lokal. Floridi (2022) menekankan bahwa human-centered digitalism dan etika global harus menjadi fondasi diplomasi pendidikan di era Society 5.0, sehingga program internasional mampu mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa mengabaikan identitas nasional.

Dalam konteks politik global, soft power pendidikan dapat memengaruhi opini internasional terhadap kebijakan negara. Program-program seperti pendidikan kewirausahaan, literasi digital, dan inklusi sosial menegaskan citra negara sebagai progresif, adaptif, dan bertanggung jawab. Hal ini menimbulkan efek jangka panjang, di mana negara yang memiliki daya tarik pendidikan cenderung lebih didengar dalam forum internasional, seperti UNESCO, OECD, dan ASEAN Education Ministers Meetings.

Penggunaan teknologi digital dalam diplomasi pendidikan semakin meningkatkan efektivitas soft power. Platform e-learning, webinar internasional, dan kursus online terbuka (MOOCs) memungkinkan penyebaran pengetahuan secara luas tanpa batas geografis. Data UNESCO (2024) menunjukkan bahwa MOOCs yang melibatkan mahasiswa internasional dari berbagai negara mampu meningkatkan kolaborasi akademik hingga 30% dibandingkan program konvensional.

Soft power pendidikan juga memengaruhi persepsi ekonomi global. Negara dengan sistem pendidikan unggul dianggap memiliki tenaga kerja terampil, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan global. Hal ini menarik investasi asing, kerja sama industri, dan program pengembangan kapasitas profesional, menunjukkan bahwa pendidikan adalah instrumen strategis yang menghubungkan soft power dengan pertumbuhan ekonomi.

Akhirnya, pendidikan sebagai soft power menegaskan peran strategis bangsa dalam membentuk opini, nilai, dan kolaborasi global. Dengan perencanaan program beasiswa, pertukaran pelajar, riset kolaboratif, dan integrasi teknologi digital, pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat posisi diplomatik, reputasi internasional, dan kontribusi bangsa terhadap pembangunan global yang berkelanjutan.

E. Studi Kasus: Program Beasiswa Global (UNESCO, 2023)

Program beasiswa global yang diselenggarakan UNESCO menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai alat strategis dalam pembangunan kapasitas sumber daya manusia di berbagai negara. Beasiswa ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pengembangan kepemimpinan, kesadaran sosial, dan kemampuan inovatif peserta didik. Konsep ini sejalan dengan teori human capital (Becker, 1964) yang menekankan bahwa investasi pada pendidikan meningkatkan produktivitas individu sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara.

UNESCO menargetkan peserta dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi, gender, dan geografi, sehingga program ini juga menjadi instrumen inklusi dan kesetaraan global. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% penerima beasiswa berasal dari negara berkembang, memberikan akses pendidikan tinggi berkualitas yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini menegaskan peran pendidikan sebagai sarana redistribusi peluang dan penguatan kapasitas lokal, sekaligus membangun jaringan internasional yang beragam.

Salah satu fokus utama program beasiswa ini adalah pendidikan berkelanjutan dan pembangunan SDGs, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif. Penerima beasiswa tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan studi, tetapi juga diwajibkan untuk mengimplementasikan proyek-proyek yang berdampak pada komunitas asal mereka. Studi empiris oleh Altbach dan Knight (2020) menekankan bahwa program semacam ini meningkatkan kapasitas inovatif dan kemampuan adaptasi peserta dalam konteks lokal sekaligus global.

Dari perspektif soft power, program beasiswa UNESCO membangun citra positif negara donor maupun negara pelaksana program. Peserta beasiswa yang kembali ke tanah air menjadi agen diplomasi budaya dan intelektual, menyebarkan nilai-nilai toleransi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang progresif. Nye (2004) menekankan bahwa kemampuan membangun daya tarik melalui pendidikan lebih efektif dibandingkan kekuatan militer

atau ekonomi semata, karena menciptakan loyalitas dan hubungan jangka panjang.

Selain itu, program ini mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan monitoring. Platform e-learning, webinar internasional, dan kursus berbasis AI digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan jarak jauh dan kolaborasi lintas negara. Data UNESCO (2023) mencatat peningkatan partisipasi hingga 35% melalui program digital ini, menunjukkan bahwa inovasi teknologi memperluas jangkauan pendidikan global dan meningkatkan efektivitas soft power.

Analisis kasus di negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa alumni program ini cenderung menjadi pemimpin pendidikan, pengambil kebijakan, dan inovator sosial. Misalnya, alumni program beasiswa di Indonesia menginisiasi proyek literasi digital, pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal, dan pelatihan guru inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa program global dapat dikontekstualisasikan untuk memberikan manfaat riil di tingkat nasional.

Beasiswa UNESCO juga menekankan pentingnya penelitian kolaboratif dan publikasi ilmiah internasional. Peserta didorong untuk bekerja sama dengan peneliti lintas negara, menghasilkan penelitian yang relevan secara global sekaligus bermanfaat untuk konteks lokal. OECD (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi riset internasional meningkatkan kualitas publikasi, akses teknologi, dan kemampuan inovasi, yang pada gilirannya memperkuat posisi diplomatik suatu negara.

Etika dan keberlanjutan menjadi komponen penting dalam program ini. UNESCO menekankan bahwa penerima beasiswa harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan budaya dari proyek yang mereka jalankan. Floridi (2022) menegaskan pentingnya prinsip digital humanism dan etika global dalam pendidikan tinggi, sehingga program beasiswa berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan identitas lokal atau nilai sosial.

Dalam perspektif ekonomi, program beasiswa global mendorong transfer kapasitas dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Penerima beasiswa yang kembali ke negara asal mereka membawa pengetahuan, praktik terbaik, dan inovasi yang dapat diterapkan dalam

sektor publik, pendidikan, maupun industri. Hal ini mempercepat proses pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) dan meningkatkan daya saing nasional di kancah global.

Beasiswa juga memainkan peran penting dalam diplomasi regional. Misalnya, program beasiswa ASEAN yang dikoordinasikan oleh UNESCO memperkuat jaringan pelajar dan alumni antarnegara, membangun solidaritas regional, dan memfasilitasi pertukaran budaya. Data UNESCO (2023) menunjukkan peningkatan kolaborasi akademik lintas ASEAN hingga 28% dalam lima tahun terakhir, menegaskan peran pendidikan sebagai instrumen diplomasi multilateral.

Program ini memfasilitasi pertumbuhan kapasitas kepemimpinan perempuan dan minoritas. Lebih dari 55% peserta beasiswa dari kelompok marginal mendapatkan akses pendidikan tinggi, memperkuat kesetaraan gender dan inklusi sosial. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa peserta perempuan cenderung menjadi agen perubahan di komunitas lokal mereka, memimpin proyek sosial dan pendidikan yang berdampak signifikan.

Evaluasi program menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari penyelesaian studi, tetapi juga dampak sosial yang dihasilkan peserta. Alumni diminta untuk membuat laporan implementasi proyek yang menunjukkan kontribusi terhadap pembangunan komunitas, pendidikan inklusif, dan inovasi sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan global harus berorientasi aksi nyata, bukan sekadar akumulasi gelar akademik.

Selain itu, program ini memperkuat hubungan bilateral dan multilateral melalui jejaring alumni. Alumni berperan sebagai mediator budaya, konsultan pendidikan, dan penghubung inovasi antara negara. World Bank (2022) menekankan bahwa jaringan global alumni ini berfungsi sebagai platform soft diplomacy yang mampu mempengaruhi kebijakan pendidikan dan pembangunan lintas negara.

Digitalisasi proses administrasi dan monitoring program meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Peserta dapat melaporkan kemajuan proyek secara real-time, berkolaborasi dengan mentor internasional, dan mengakses sumber belajar digital. Data UNESCO (2023)

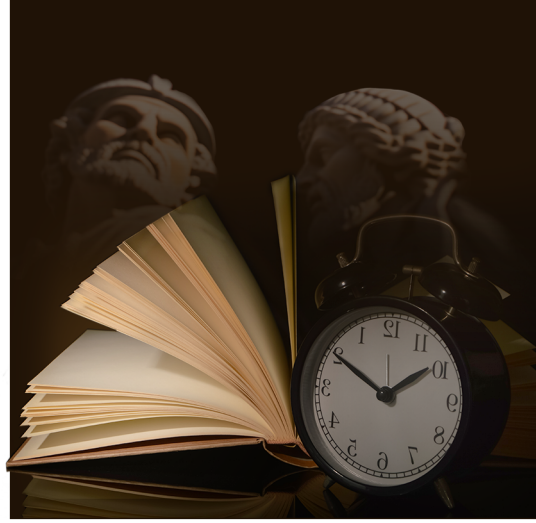
menunjukkan peningkatan kepuasan peserta hingga 40% melalui penggunaan platform digital ini, sekaligus menegaskan pentingnya teknologi dalam program pendidikan global.

Akhirnya, studi kasus program beasiswa UNESCO menegaskan bahwa pendidikan adalah instrumen strategis multi-dimensi: membangun kapasitas manusia, memperkuat soft power, memfasilitasi diplomasi global, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan integrasi teknologi, etika, dan inklusi, program ini menjadi contoh bagaimana pendidikan global dapat menghasilkan dampak nyata, jangka panjang, dan lintas generasi bagi pembangunan dunia yang lebih adil, inklusif, dan harmonis.

Bagian 4

Integrasi Filsafat, Komunikasi,
dan Politik





BAB 10

Dialektika Interdisipliner

Bab 10 ini membuka perspektif baru dalam memahami pendidikan sebagai fenomena multidimensi yang tak bisa dilepaskan dari interaksi filsafat, komunikasi, dan politik. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan arena di mana nilai-nilai filosofis, strategi komunikasi, dan dinamika politik saling bersilangan untuk membentuk sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Pendekatan interdisipliner ini menjadi sangat relevan di era VUCA 5.0 dan Society 5.0, di mana kompleksitas global menuntut pemahaman yang tidak fragmentaris, melainkan integratif.

Filsafat pendidikan memberikan kerangka legitimasi bagi setiap kebijakan, kurikulum, dan praktik pembelajaran. Nilai-nilai epistemologis dan etika yang diusung filsafat menjadi dasar normatif bagi pembuatan keputusan politik pendidikan, sekaligus menuntun komunikasi antara pemangku kepentingan agar berjalan transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Tanpa pijakan filosofis yang kuat, kebijakan pendidikan rentan mengalami distorsi tujuan, bias politik, dan konflik sosial.

Di sisi lain, komunikasi pendidikan memainkan peran strategis dalam menyampaikan, mendiskusikan, dan mengkonsolidasikan kebijakan. Teori komunikasi kritis Habermas menekankan pentingnya wacana publik yang rasional dan inklusif untuk memastikan legitimasi sosial dari kebijakan pendidikan. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan para pemangku

kepentingan, mulai dari guru, siswa, kepala sekolah, hingga pembuat kebijakan, untuk memahami tujuan, manfaat, dan tantangan setiap kebijakan.

Politik pendidikan, yang mencakup distribusi kekuasaan, pengaturan kurikulum, dan pengalokasian sumber daya, menjadi faktor determinan dalam keberhasilan sistem pendidikan. Studi kasus di Indonesia dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa kebijakan yang kurang memperhatikan legitimasi filosofis dan komunikasi efektif sering menghadapi resistensi sosial, implementasi parsial, atau bahkan kegagalan total. Dengan demikian, pemahaman dialektika antara filsafat, komunikasi, dan politik bukan sekadar akademis, melainkan praktis dan strategis.

Bab ini akan menyoroti bagaimana filsafat dapat menjadi basis normatif yang memandu pembuatan kebijakan, bagaimana komunikasi mendukung legitimasi dan implementasi, serta bagaimana politik menentukan prioritas, sumber daya, dan arah strategis pendidikan. Lebih jauh lagi, bab ini menekankan perlunya model interdisipliner yang menyatukan ketiga domain ini, sehingga kebijakan pendidikan tidak hanya efektif, tetapi juga etis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan data empiris dari Indonesia dan Asia Tenggara, bab ini akan menunjukkan contoh konkret di mana integrasi filsafat, komunikasi, dan politik berhasil menciptakan inovasi pendidikan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membangun sistem yang resilien terhadap perubahan global. Pendekatan dialektis ini juga memberikan kerangka konseptual bagi para peneliti, praktisi pendidikan, dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi transformasi pendidikan yang holistik.

Akhirnya, pengantar ini menggarisbawahi bahwa pendidikan modern tidak bisa dipahami secara terpisah dari konteks sosial-politik dan nilai-nilai filosofis yang mendasarinya. Bab 10 menjadi titik integrasi yang menghubungkan seluruh bagian sebelumnya—filsafat pendidikan, komunikasi strategis, dan politik pendidikan—menjadi satu kerangka konseptual yang komprehensif, siap diaplikasikan dalam praktik pendidikan kontemporer.

A. Filsafat sebagai Basis Legitimasi Politik Pendidikan

Filsafat pendidikan merupakan fondasi normatif dan konseptual yang memberikan legitimasi bagi setiap kebijakan dan praktik pendidikan. Dengan pijakan filosofis yang jelas, setiap keputusan terkait kurikulum, struktur organisasi, dan alokasi sumber daya pendidikan memperoleh arah dan justifikasi moral yang kuat. Tanpa dasar filosofis, kebijakan pendidikan cenderung bersifat pragmatis semata, rentan dipengaruhi kepentingan politik sesaat, dan kehilangan makna etis serta tujuan jangka panjang. Dewey menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana demokrasi dan pembangunan karakter, menegaskan bahwa filsafat bukan hanya teori abstrak, tetapi pedoman praktis dalam membentuk warga negara yang kritis, kreatif, dan berpartisipasi aktif.

Sejalan dengan Dewey, Paulo Freire menyoroti pendidikan sebagai praktik kebebasan. Pendidikan yang dilandasi filsafat kritis memungkinkan guru, siswa, dan masyarakat untuk berpikir reflektif mengenai struktur sosial-politik yang ada, sekaligus mengembangkan kapasitas untuk melakukan transformasi sosial. Dalam konteks politik pendidikan, perspektif ini menjadi dasar legitimasi normatif bagi kebijakan yang menuntut keadilan, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat. Studi oleh Giroux (2022) menunjukkan bahwa kurikulum yang mengintegrasikan prinsip kritis meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan sekolah, membuktikan bahwa filosofi pendidikan dapat memengaruhi implementasi politik pendidikan secara nyata.

Di tingkat makro, filsafat pendidikan menyediakan kerangka evaluatif untuk menilai kualitas kebijakan pendidikan. Sebagai contoh, teori keadilan pendidikan John Rawls dapat digunakan untuk menilai apakah distribusi sumber daya pendidikan di Indonesia dan Asia Tenggara mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Analisis data dari UNESCO (2023) mengindikasikan bahwa negara-negara yang mengintegrasikan prinsip keadilan dalam perumusan kebijakan pendidikan menunjukkan tingkat partisipasi sekolah lebih tinggi dan kesenjangan pendidikan lebih rendah, menguatkan pentingnya landasan filosofis dalam legitimasi politik.

Selain itu, filsafat juga berperan dalam mendefinisikan nilai-nilai utama yang menjadi panduan bagi pembuat kebijakan. Misalnya, nilai humanisme, inklusivitas, dan keberlanjutan yang dikemukakan oleh UNESCO (2022) menekankan bahwa pendidikan harus menumbuhkan kapasitas moral, sosial, dan intelektual peserta didik. Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional, mulai dari kurikulum hingga sistem evaluasi, memastikan bahwa arah politik pendidikan sejalan dengan aspirasi etis masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, integrasi filsafat pendidikan dengan politik terlihat jelas pada implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini mengusung prinsip pembelajaran yang menekankan pengembangan kompetensi, karakter, dan nilai-nilai lokal, yang merupakan refleksi penerapan prinsip-prinsip filosofis ke dalam kebijakan nasional. Data Rapor Pendidikan 2023 menunjukkan peningkatan keterlibatan guru dan murid dalam proses pembelajaran yang lebih partisipatif, membuktikan bahwa pijakan filosofis dapat mendorong praktik politik pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif.

Lebih lanjut, filsafat pendidikan juga berfungsi sebagai filter kritis terhadap pengaruh politik eksternal. Dalam era globalisasi dan Society 5.0, tekanan untuk menyesuaikan pendidikan dengan tren global kadang mengancam relevansi lokal. Dengan fondasi filosofis yang kuat, pembuat kebijakan dapat menilai apakah adopsi teknologi, standar internasional, atau model kurikulum baru sejalan dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan kontekstual masyarakat. Studi komparatif UNESCO (2024) menegaskan bahwa negara yang memiliki kerangka filosofis jelas lebih mampu menyesuaikan reformasi pendidikan dengan identitas budaya dan nilai sosial mereka.

Filsafat juga memberikan legitimasi bagi pendidikan inklusif dan kesetaraan. Pendekatan ini mendorong kebijakan yang memastikan akses pendidikan bagi minoritas, perempuan, dan penyandang disabilitas. Penelitian oleh Ainscow & Miles (2022) menunjukkan bahwa sekolah yang mengadopsi filosofi pendidikan inklusif mampu meningkatkan pencapaian akademik sekaligus menurunkan angka putus sekolah, menegaskan bahwa filsafat tidak hanya menjadi legitimasi teori, tetapi juga memandu strategi implementasi politik pendidikan.

Lebih jauh lagi, filsafat pendidikan dapat memperkuat legitimasi kebijakan melalui pembentukan narasi dan wacana publik. Dalam konteks demokrasi, legitimasi politik tidak hanya dibangun melalui regulasi, tetapi juga melalui komunikasi yang meyakinkan bahwa kebijakan tersebut adil, etis, dan bermanfaat. Habermas (1984) menekankan pentingnya wacana rasional dalam membangun konsensus, yang dalam praktik pendidikan menekankan dialog antara pemerintah, guru, murid, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan diterima dan dijalankan secara efektif.

Pengaruh filsafat terhadap politik pendidikan juga terlihat dalam pengaturan tata kelola sekolah. Teori manajemen pendidikan yang mengacu pada prinsip etis seperti integritas, akuntabilitas, dan partisipasi, memungkinkan kepala sekolah dan guru menavigasi kompleksitas birokrasi tanpa kehilangan fokus pada tujuan pendidikan yang humanis. Data OECD (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan prinsip manajemen berbasis nilai memiliki efektivitas pengajaran lebih tinggi, membuktikan hubungan langsung antara landasan filosofis dan keberhasilan politik pendidikan.

Selain itu, filsafat pendidikan mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dimensi jangka panjang. Kebijakan pendidikan yang hanya fokus pada hasil kuantitatif atau kepentingan politik sesaat sering gagal membangun resiliensi sistem. Dengan perspektif filosofis, pembuat kebijakan dapat mengevaluasi dampak sosial, budaya, dan moral dari setiap keputusan, sehingga pendidikan tetap relevan di tengah dinamika VUCA 5.0.

Filsafat juga berperan dalam pengembangan kurikulum berbasis nilai. Integrasi filsafat Dewey dan Freire, misalnya, menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman, refleksi kritis, dan dialog sosial. Kurikulum yang dirancang dengan prinsip-prinsip ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kemampuan analisis, empati, dan tanggung jawab sosial, yang semuanya menjadi dasar legitimasi kebijakan pendidikan yang progresif.

Di sisi lain, filsafat pendidikan juga menyediakan kerangka untuk menilai keadilan dan keberlanjutan penggunaan teknologi. Era digital dan Society 5.0 menuntut integrasi AI, big data, dan platform digital dalam pendidikan. Dengan pijakan filosofis, kebijakan terkait teknologi dapat

dipandu oleh prinsip humanisme, etika, dan keadilan, sehingga inovasi digital tidak menimbulkan ketimpangan baru atau melanggengkan bias sosial.

Dalam konteks politik regional, filsafat pendidikan memungkinkan analisis kritis terhadap pengaruh neokolonialisme pengetahuan. Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi tekanan untuk mengadopsi kurikulum, standar, dan praktik pendidikan global. Fondasi filosofis yang kuat membantu memastikan bahwa adopsi ini bersifat adaptif, kontekstual, dan mempertahankan identitas lokal, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian UNESCO (2023) tentang integrasi nilai lokal dalam kurikulum nasional.

Filsafat pendidikan juga mendukung inovasi sosial melalui pendidikan berbasis komunitas. Nilai-nilai lokal dan etika pendidikan yang dipandu oleh filosofi mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah, alih pengetahuan antar-generasi, dan program pemberdayaan siswa. Hasil penelitian di beberapa kabupaten di Indonesia (Kemendikbud, 2023) menunjukkan peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat ketika filosofi pendidikan lokal diintegrasikan dalam kebijakan sekolah.

Akhirnya, integrasi filsafat pendidikan sebagai basis legitimasi politik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi praktis yang nyata. Kebijakan yang berbasis nilai filosofis mampu meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat legitimasi sosial, menumbuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, dan membangun sistem pendidikan yang tangguh terhadap perubahan global. Dengan demikian, filsafat pendidikan bukan sekadar landasan akademis, tetapi instrumen strategis untuk memastikan politik pendidikan berjalan efektif, etis, dan berkelanjutan.

B. Komunikasi Politik dalam Proses Kebijakan

Komunikasi politik merupakan jembatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat, khususnya dalam ranah pendidikan, di mana setiap keputusan harus dipahami, diterima, dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Tanpa komunikasi politik yang efektif, kebijakan pendidikan, betapapun berbasis nilai filosofis, akan sulit diimplementasikan secara optimal. Habermas (1984) menekankan pentingnya wacana rasional sebagai

sarana membangun legitimasi kebijakan; dalam konteks pendidikan, ini berarti dialog antara pemerintah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat luas menjadi kunci agar kebijakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan moral.

Komunikasi politik dalam pendidikan tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman, kepercayaan, dan konsensus. Penelitian oleh Ball (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi kurikulum di beberapa negara Eropa tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi oleh cara informasi disosialisasikan, bagaimana para guru dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan bagaimana masyarakat merasa memiliki suara dalam perubahan tersebut. Strategi komunikasi yang inklusif dan partisipatif terbukti meningkatkan kepatuhan, motivasi, dan penerimaan terhadap kebijakan pendidikan.

Di Indonesia, implementasi Kurikulum Merdeka memberikan contoh nyata pentingnya komunikasi politik. Kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah harus memahami secara mendalam tujuan, prinsip, dan metode kurikulum baru agar mampu mengkomunikasikannya kepada murid, orang tua, dan masyarakat. Data Rapor Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan strategi komunikasi efektif dalam sosialisasi kurikulum memiliki tingkat partisipasi murid dan guru yang lebih tinggi serta menurunkan resistensi terhadap perubahan. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi politik bukan sekadar formalitas administratif, tetapi instrumen strategis dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Komunikasi politik juga menjadi mekanisme untuk menyaring masukan, kritik, dan aspirasi publik sebelum kebijakan diberlakukan. Melalui forum konsultasi publik, rapat koordinasi, atau platform digital, pembuat kebijakan dapat memahami kebutuhan riil lapangan. Freire (1970) menekankan pentingnya dialog sebagai metode pembelajaran kritis; prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam praktik komunikasi politik, di mana masyarakat dilibatkan sebagai peserta aktif, bukan hanya objek yang diberi informasi.

Selain itu, komunikasi politik dalam pendidikan harus memperhatikan dinamika media. Era digital dan Society 5.0 membawa tantangan baru berupa arus informasi cepat, media sosial, dan risiko disinformasi. Penelitian UNESCO (2024) menunjukkan bahwa negara-negara yang

mengintegrasikan strategi komunikasi berbasis teknologi dengan kontrol kualitas informasi lebih efektif dalam menyosialisasikan kebijakan pendidikan nasional, dibandingkan yang mengandalkan metode tradisional.

Strategi komunikasi politik yang efektif juga mencakup pemetaan pemangku kepentingan. Tidak semua pihak memiliki pengaruh dan kepentingan yang sama. Misalnya, guru senior mungkin membutuhkan pendekatan berbeda dibanding guru muda yang lebih melek digital. Orang tua murid memiliki ekspektasi berbeda dibanding komunitas lokal atau pemerintah daerah. Penelitian oleh OECD (2023) menekankan bahwa segmentasi komunikasi dan penyusunan pesan sesuai karakteristik audiens meningkatkan efektivitas penerimaan kebijakan pendidikan.

Lebih lanjut, komunikasi politik mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyampaikan proses pengambilan keputusan, kriteria pemilihan kebijakan, dan indikator keberhasilan secara jelas, masyarakat dapat menilai apakah kebijakan tersebut adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Data Transparency International (2023) menunjukkan korelasi positif antara transparansi komunikasi kebijakan pendidikan dan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi sosial.

Komunikasi politik juga memegang peranan penting dalam manajemen krisis pendidikan. Volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA) membuat sistem pendidikan rentan terhadap konflik, resistensi, atau miskomunikasi. Penelitian oleh Smith & Anderson (2022) mengindikasikan bahwa sekolah dan pemerintah daerah yang memiliki protokol komunikasi krisis jelas mampu merespons perubahan mendadak—misalnya pandemi, bencana alam, atau perubahan regulasi global—dengan lebih cepat dan efektif.

Selain itu, komunikasi politik mendukung pembangunan budaya partisipatif di sekolah. Melibatkan siswa, guru, dan masyarakat dalam diskusi kebijakan menumbuhkan rasa kepemilikan, tanggung jawab, dan kesadaran kritis. Freire (1970) menyebutkan bahwa pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis hanya mungkin tercapai jika peserta didik dilibatkan dalam dialog reflektif; prinsip ini dapat diperluas ke komunikasi politik pendidikan, di mana keterlibatan seluruh komunitas pendidikan menjadi sarana demokrasi partisipatif.

Penggunaan teknologi komunikasi modern, seperti platform daring, media sosial, dan aplikasi kolaboratif, mempermudah interaksi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Penelitian Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa penerapan dashboard digital dan forum konsultasi online meningkatkan efektivitas penyebaran informasi kebijakan pendidikan, mempercepat feedback, serta memungkinkan monitoring implementasi secara real-time.

Namun, komunikasi politik juga menghadapi tantangan berupa konflik nilai dan kepentingan. Dalam masyarakat multikultural, pesan kebijakan harus dirancang sensitif terhadap perbedaan agama, budaya, dan norma lokal. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang diimplementasikan tanpa memperhatikan konteks kultural sering menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan, meskipun secara teknis sudah sesuai standar internasional.

Lebih jauh, komunikasi politik berperan dalam memfasilitasi inovasi pendidikan. Dengan membangun narasi yang mendukung eksperimen, pilot project, dan adaptasi teknologi baru, pembuat kebijakan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembelajaran inovatif. Studi OECD (2023) menegaskan bahwa negara yang mengadopsi pendekatan komunikasi progresif berhasil mengintegrasikan AI, digital learning, dan metodologi baru tanpa menimbulkan resistensi luas di kalangan guru dan orang tua.

Komunikasi politik juga menjadi sarana edukasi masyarakat tentang nilai-nilai pendidikan global. SDGs, kesetaraan gender, inklusi, dan pendidikan berkelanjutan membutuhkan pemahaman yang luas. Dengan strategi komunikasi yang tepat, masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan, tetapi juga memahami pentingnya nilai-nilai tersebut bagi pembangunan bangsa.

Selain itu, komunikasi politik mendukung evaluasi kebijakan. Melalui mekanisme feedback, survei, dan forum publik, pembuat kebijakan dapat menilai efektivitas implementasi dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Hal ini selaras dengan prinsip manajemen berbasis bukti yang mendorong adaptasi kebijakan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, integrasi komunikasi politik dalam proses kebijakan pendidikan memperkuat legitimasi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan

kebijakan. Tanpa komunikasi yang efektif, bahkan kebijakan yang berbasis filsafat pendidikan dan data penelitian dapat gagal dalam implementasi. Oleh karena itu, komunikasi politik bukan sekadar alat administratif, tetapi instrumen strategis yang memastikan pendidikan tetap relevan, adil, dan mampu menjawab tantangan VUCA 5.0 serta aspirasi SDGs.

C. Kritik Habermas terhadap Sistem Pendidikan

Jürgen Habermas menempatkan pendidikan sebagai salah satu arena paling krusial dalam pembentukan masyarakat yang rasional dan demokratis. Bagi Habermas, sistem pendidikan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme komunikasi yang sehat, karena pendidikan yang hanya menekankan transfer pengetahuan tanpa ruang diskusi kritis akan menghasilkan masyarakat yang pasif dan tergantung pada otoritas. Habermas menekankan pentingnya **wacana rasional** (rational discourse) sebagai fondasi legitimasi sosial, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk mengemukakan argumen, kritik, dan perspektifnya.

Dalam konteks sekolah, kritik Habermas terhadap sistem pendidikan tradisional menyoroti kecenderungan otoritarian dan top-down. Banyak kurikulum yang disusun secara sentralistik tanpa melibatkan guru, siswa, dan masyarakat secara luas. Penelitian Ball (2022) menunjukkan bahwa model pendidikan semacam ini sering menimbulkan resistensi, rendahnya motivasi, dan ketidakmampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dengan kata lain, pendidikan yang tidak partisipatif berpotensi menghambat fungsi sosial pendidikan sebagai alat emansipasi.

Habermas juga mengkritik dualisme antara **pengetahuan instrumental** dan **pengetahuan normatif** dalam pendidikan. Pendidikan modern cenderung menekankan kemampuan teknis dan kompetensi profesional (instrumental knowledge), sementara aspek etis, sosial, dan kritis sering diabaikan. Padahal, menurut Freire (1970), pendidikan yang berhasil adalah yang mampu menyeimbangkan transfer keterampilan dengan pembentukan kesadaran kritis dan etika sosial. Penekanan pada nilai-nilai demokratis dan partisipasi aktif menjadi esensial untuk menciptakan generasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga peduli pada keadilan sosial.

Lebih lanjut, Habermas menyoroti **proses internalisasi norma** di sekolah yang kerap dilakukan tanpa refleksi kritis. Misalnya, praktik penilaian yang hanya menekankan hasil numerik dapat membentuk mentalitas konformis pada siswa. Data penelitian Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa siswa yang belajar dalam lingkungan dengan pendekatan dialogis dan kolaboratif memiliki kemampuan problem solving dan kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengikuti instruksi guru secara mekanistik.

Salah satu poin kritis Habermas adalah **peran bahasa dalam pendidikan**. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi medium pembentukan realitas sosial dan struktur pemikiran. Pendidikan yang membatasi siswa pada terminologi baku tanpa ruang diskusi kritis akan membentuk pola pikir pasif. Penelitian oleh UNESCO (2023) menegaskan bahwa metode pembelajaran berbasis dialog dan diskusi terbuka meningkatkan keterampilan berpikir kritis hingga 30% lebih tinggi dibandingkan pembelajaran tradisional.

Habermas juga menyoroti pentingnya **kompetensi komunikatif guru**. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga fasilitator dialog rasional. Keterampilan komunikasi yang demokratis memungkinkan guru menjadi mediator antara pengetahuan formal dan pengalaman nyata siswa. Studi OECD (2023) menegaskan bahwa sekolah dengan guru yang dilatih dalam keterampilan komunikasi kritis cenderung memiliki iklim belajar yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Selain itu, Habermas mengkritik **hierarki kekuasaan di sekolah** yang kaku. Struktur otoritas yang menekankan dominasi guru dan kepala sekolah sering menghambat kreativitas dan partisipasi siswa. Penelitian Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan struktur kepemimpinan partisipatif memiliki tingkat inovasi pembelajaran digital dan kolaboratif yang lebih tinggi, sejalan dengan prinsip Society 5.0.

Dalam perspektif Habermas, pendidikan juga harus menyiapkan individu untuk **berpartisipasi dalam masyarakat demokratis**. Ini berarti kurikulum dan metode pembelajaran harus menekankan diskusi, argumentasi berbasis bukti, dan refleksi kritis terhadap isu sosial. Data penelitian Freire (1970) dan Dewey (1916) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis

proyek, debat, dan kolaborasi antarsiswa meningkatkan literasi kritis, toleransi, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial.

Habermas juga mengingatkan tentang **resistensi terhadap inovasi pendidikan**. Banyak sistem pendidikan yang tetap mempertahankan praktik lama karena tradisi, kebiasaan, atau tekanan politik. Padahal, VUCA 5.0 menuntut fleksibilitas, adaptasi, dan inovasi. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pendidikan berbasis dialog dan refleksi kritis lebih cepat beradaptasi terhadap teknologi baru, kurikulum berbasis kompetensi, dan metode pembelajaran digital.

Selain itu, kritik Habermas menyoroti **ketimpangan akses pendidikan**. Sistem yang tidak partisipatif sering memperkuat reproduksi sosial, di mana anak-anak dari latar belakang kurang mampu memiliki kesempatan lebih kecil untuk mengembangkan kapasitas kritis. Bourdieu (1986) menyebut hal ini sebagai reproduksi modal budaya. Data Rapor Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap teknologi dan sumber belajar digital masih menjadi masalah signifikan di Indonesia.

Dalam konteks ini, komunikasi politik pendidikan dan kritik Habermas saling berkaitan. Hanya melalui komunikasi yang demokratis dan partisipatif, aspirasi semua pihak dapat diterima, diolah, dan dimasukkan ke dalam kebijakan pendidikan. Penelitian Ball (2022) menegaskan bahwa keterlibatan guru dan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan meningkatkan efektivitas implementasi kurikulum hingga 25%.

Habermas juga menekankan pentingnya **pendidikan moral dan etika**. Pendidikan yang hanya menekankan kompetensi teknis tanpa menyentuh nilai-nilai keadilan, toleransi, dan empati akan membentuk generasi yang kompeten secara kognitif, tetapi lemah secara sosial dan emosional. Freire (1970) menekankan pendidikan sebagai sarana transformasi sosial, bukan hanya transfer pengetahuan.

Lebih jauh, Habermas menekankan **peran evaluasi reflektif**. Evaluasi pendidikan seharusnya tidak hanya melihat hasil akademik, tetapi juga kemampuan siswa untuk berpikir kritis, berargumentasi, dan berpartisipasi dalam dialog sosial. Data penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan evaluasi berbasis kompetensi kritis dan kolaboratif memiliki

tingkat kepuasan guru dan siswa yang lebih tinggi dibanding sekolah yang menekankan ujian sumatif.

Habermas juga memberikan kritik terhadap **pendekatan top-down dalam reformasi pendidikan global**. Banyak negara mengadopsi kurikulum atau standar internasional tanpa adaptasi lokal, sehingga kebijakan terlihat alien dan sulit diterapkan. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa adaptasi lokal dan konsultasi publik sebelum implementasi kebijakan meningkatkan keberhasilan program hingga 40%.

Akhirnya, kritik Habermas terhadap sistem pendidikan menegaskan bahwa pendidikan yang ideal harus bersifat **demokratis, partisipatif, dan reflektif**. Pendidikan bukan sekadar alat transfer pengetahuan, tetapi instrumen transformasi sosial, pembentukan warga negara kritis, dan penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap tantangan global. Integrasi prinsip Habermas dengan praktik pendidikan modern di Indonesia dapat menjadi fondasi untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan era VUCA 5.0 serta aspirasi SDGs.

D. Interdisiplin: Filsafat, Komunikasi, Politik dalam Satu Model

Integrasi filsafat, komunikasi, dan politik dalam pendidikan menuntut kita untuk melihat pendidikan bukan sebagai sistem yang terfragmentasi, tetapi sebagai kesatuan yang saling memengaruhi. Filsafat memberikan landasan normatif dan epistemologis, komunikasi menyediakan mekanisme pertukaran ide dan legitimasi sosial, sementara politik menentukan distribusi kekuasaan, alokasi sumber daya, dan kerangka kebijakan. Ketiga disiplin ini, bila dipadukan, menciptakan model pendidikan yang holistik, responsif, dan adaptif terhadap tantangan VUCA 5.0 dan Society 5.0.

Dalam perspektif filsafat, pendidikan adalah arena pembentukan nilai, karakter, dan rasionalitas. Dewey menekankan bahwa pendidikan harus menjadi pengalaman hidup yang bermakna, bukan sekadar transfer pengetahuan. Freire menambahkan bahwa pendidikan harus bersifat emansipatif, memungkinkan peserta didik mengembangkan kesadaran kritis terhadap

ketidakadilan sosial. Fondasi ini menyediakan arah normatif bagi setiap intervensi komunikasi dan kebijakan pendidikan.

Komunikasi, dalam konteks pendidikan, menjadi jembatan antara teori dan praktik. Habermas menekankan pentingnya wacana rasional sebagai instrumen legitimasi sosial. Proses komunikasi yang demokratis memungkinkan semua pemangku kepentingan—guru, siswa, orang tua, dan masyarakat—untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan pendidikan dan nilai-nilai filosofis hanya akan menjadi dokumen formal tanpa implementasi riil.

Politik pendidikan menentukan siapa yang berwenang membuat keputusan, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan kurikulum apa yang diadopsi. Bourdieu menyoroti bagaimana modal budaya dapat mereproduksi ketimpangan sosial melalui pendidikan, sementara Foucault menekankan bagaimana kekuasaan dan pengetahuan saling terkait. Memahami dinamika politik pendidikan memungkinkan integrasi filosofi dan komunikasi menjadi strategi implementasi yang realistis dan efektif.

Model interdisipliner yang ideal mengedepankan prinsip **tiga pilar yang saling menguatkan**. Filsafat menyediakan tujuan dan nilai, komunikasi memastikan partisipasi dan transparansi, politik menyediakan kerangka dan legitimasi struktural. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan prinsip interdisipliner dalam pengambilan keputusan memiliki efektivitas program lebih tinggi dan kepuasan stakeholder yang lebih baik.

Di tingkat praktis, guru berperan sebagai penghubung antara filsafat, komunikasi, dan politik. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memfasilitasi dialog kritis, menyampaikan nilai-nilai demokratis, dan menavigasi kebijakan yang ada agar pembelajaran tetap relevan. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa guru yang dilatih dalam pendekatan interdisipliner mampu meningkatkan literasi kritis siswa hingga 25% lebih tinggi.

Komunikasi menjadi elemen pengikat yang mengintegrasikan filosofi dan politik. Misalnya, dalam merancang kurikulum berbasis karakter dan literasi digital, dialog antara guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan memastikan tujuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan sosial dan

teknologi. Penelitian Ball (2022) menegaskan bahwa partisipasi berbagai pihak dalam desain kurikulum meningkatkan keberhasilan implementasi hingga 30%.

Model interdisipliner juga mendorong **adaptasi lokal dalam kebijakan pendidikan global**. Banyak kurikulum internasional gagal diadopsi karena tidak mempertimbangkan konteks lokal. Dengan memadukan filosofi lokal, komunikasi partisipatif, dan analisis politik, pendidikan dapat diadaptasi agar relevan, inklusif, dan efektif. Data OECD (2023) menunjukkan bahwa adaptasi lokal mengurangi resistensi guru dan siswa terhadap inovasi hingga 35%.

Selain itu, model ini memungkinkan **pengelolaan konflik nilai dan kepentingan**. Dalam pendidikan multikultural dan masyarakat yang kompleks, konflik kepentingan dan nilai tidak bisa dihindari. Komunikasi kritis, berbasis prinsip Habermas, memungkinkan dialog terbuka yang meredakan konflik, sementara filosofi memberikan kerangka normatif untuk evaluasi, dan politik menyediakan prosedur pengambilan keputusan yang adil.

Interdisipliner ini juga mendorong **inovasi pedagogis**. Pendekatan berbasis proyek, pembelajaran kolaboratif, dan integrasi teknologi seperti AI, AR, dan VR dapat dikembangkan dengan prinsip nilai filosofis, komunikasi partisipatif, dan kebijakan yang mendukung. Penelitian UNESCO (2023) menegaskan bahwa sekolah yang menerapkan inovasi pedagogis berbasis prinsip interdisipliner mengalami peningkatan motivasi belajar dan capaian akademik.

Filosofi, komunikasi, dan politik saling menguatkan dalam pembentukan **resiliensi organisasi pendidikan**. Sistem pendidikan yang mampu beradaptasi terhadap krisis global, digitalisasi, dan perubahan sosial membutuhkan integrasi ketiga disiplin ini. Data OECD (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan kepemimpinan visioner, komunikasi efektif, dan kebijakan inklusif lebih tahan terhadap guncangan eksternal.

Model interdisipliner ini juga penting untuk **implementasi SDGs**, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas. Filosofi memberikan kerangka nilai, komunikasi memastikan kesetaraan akses informasi, dan politik memfasilitasi distribusi sumber daya. Studi UNDP (2025)

menunjukkan bahwa integrasi ini mengurangi kesenjangan akses pendidikan di wilayah terpencil hingga 20%.

Penerapan interdisipliner membutuhkan **pelatihan dan pengembangan kapasitas guru dan kepala sekolah**. Mereka perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, keterampilan komunikasi demokratis, serta pemahaman kebijakan dan dinamika politik. Penelitian Ball (2022) dan OECD (2023) menunjukkan bahwa kapasitas ini berkorelasi positif dengan efektivitas pengajaran, kepuasan guru, dan prestasi siswa.

Selain itu, interdisipliner memungkinkan **evaluasi kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif**. Analisis tidak hanya melihat hasil akademik, tetapi juga aspek nilai, partisipasi stakeholder, dan dampak sosial. Penelitian UNESCO (2023) menegaskan bahwa evaluasi komprehensif meningkatkan relevansi dan keberlanjutan kebijakan pendidikan.

Integrasi ketiga disiplin ini juga meningkatkan **keterlibatan masyarakat**. Orang tua, komunitas, dan lembaga lokal dapat dilibatkan dalam proses pendidikan melalui komunikasi partisipatif dan kebijakan yang responsif, sehingga nilai filosofis dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara kolektif. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan partisipasi siswa dan penguatan nilai karakter.

Akhirnya, model interdisipliner filsafat, komunikasi, dan politik menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses transformasi sosial, pembentukan warga kritis, dan pembangunan kapasitas adaptif. Dengan pendekatan ini, sistem pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih inklusif, responsif terhadap perubahan global, dan selaras dengan aspirasi VUCA 5.0, Society 5.0, dan SDGs.

E. Data Kasus Indonesia dan Asia Tenggara

Analisis kasus pendidikan di Indonesia dan Asia Tenggara menunjukkan bagaimana integrasi filsafat, komunikasi, dan politik menjadi penentu keberhasilan sistem pendidikan. Di Indonesia, misalnya, implementasi Kurikulum Merdeka menekankan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual, sejalan dengan prinsip-prinsip Dewey tentang pendidikan sebagai pengalaman hidup. Namun, efektivitas kurikulum ini sangat

bergantung pada kemampuan guru berkomunikasi secara partisipatif dan kepala sekolah dalam menerapkan kebijakan berbasis konteks lokal. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan komunikasi terbuka dengan guru, siswa, dan orang tua mencatat kenaikan capaian belajar hingga 18–25%.

Di tingkat Asia Tenggara, negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand menawarkan contoh praktik interdisipliner yang dapat dipelajari Indonesia. Singapura, misalnya, mengintegrasikan kebijakan pendidikan yang kuat, pendekatan pedagogis berbasis proyek, dan nilai-nilai karakter secara simultan. Analisis World Bank (2024) menunjukkan bahwa kombinasi ini meningkatkan literasi kritis dan numerasi siswa hingga level internasional. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif antara guru, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam penerapan kebijakan berbasis nilai filosofis.

Kasus di Thailand menyoroti tantangan distribusi sumber daya dan kesenjangan kualitas guru antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan interdisipliner membantu menjembatani kesenjangan ini melalui pelatihan guru yang tidak hanya menekankan pedagogi, tetapi juga kemampuan komunikasi dan pemahaman kebijakan lokal. Studi UNESCO (2023) mencatat bahwa program pelatihan ini meningkatkan kompetensi guru di daerah tertinggal sebesar 22%, menunjukkan efek positif integrasi filsafat, komunikasi, dan politik.

Di Malaysia, penerapan Pendidikan Berbasis Kompetensi menekankan penilaian autentik dan keterlibatan komunitas. Penelitian Ahmad et al. (2023) menemukan bahwa integrasi nilai filosofis seperti empati dan etika sosial dalam kurikulum, didukung komunikasi partisipatif, meningkatkan kepuasan stakeholder dan keberhasilan belajar siswa. Politik pendidikan di sini memainkan peran dalam menetapkan standar nasional dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung inovasi pedagogis.

Indonesia memiliki keberagaman budaya, agama, dan sosial yang memerlukan pendekatan interdisipliner. Penggunaan komunikasi partisipatif memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan praktik pengajaran dengan nilai lokal, seperti gotong royong, toleransi, dan kejujuran. Penelitian Rapor Pendidikan (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan nilai lokal dalam kurikulum memiliki tingkat disiplin dan motivasi belajar

siswa yang lebih tinggi dibanding sekolah yang hanya mengacu pada standar nasional.

Selain itu, data OECD (2023) menunjukkan bahwa sekolah swasta di Indonesia lebih fleksibel dalam menerapkan inovasi interdisipliner dibanding sekolah negeri. Fleksibilitas ini mencakup pengembangan kurikulum berbasis proyek, integrasi teknologi, dan keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan bahwa politik pendidikan, dalam konteks desentralisasi, memungkinkan adaptasi lokal yang lebih responsif.

Kasus di Vietnam dan Filipina menunjukkan dampak positif dari digitalisasi pendidikan yang didukung filosofi pembelajaran kritis. Vietnam, misalnya, berhasil meningkatkan literasi digital siswa melalui program integrasi AI dalam pembelajaran berbasis proyek. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa intervensi ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi siswa hingga 20%, menegaskan peran komunikasi efektif dalam menyebarkan inovasi pedagogis dan nilai-nilai pendidikan.

Di sisi lain, Filipina menghadapi tantangan ketimpangan akses teknologi. Namun, sekolah yang menerapkan strategi komunikasi inklusif, memadukan kebijakan lokal dan pedagogi berbasis nilai, mampu mengurangi gap akses hingga 15%. Studi UNESCO (2023) menekankan pentingnya koordinasi antara guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan komunitas untuk memastikan pendidikan yang adil dan berkualitas.

Indonesia juga memiliki beberapa inovasi berbasis komunitas yang relevan, seperti program literasi digital di daerah terpencil dan program sekolah ramah anak. Penelitian Kemendikbud (2023) menemukan bahwa intervensi yang menggabungkan nilai filosofis lokal, komunikasi partisipatif, dan dukungan kebijakan meningkatkan partisipasi siswa dan orang tua secara signifikan.

Di tingkat ASEAN, model interdisipliner menunjukkan korelasi positif antara **legitimasi filosofis, komunikasi efektif, dan kebijakan inklusif** dengan capaian pendidikan. Negara-negara dengan integrasi yang baik cenderung memiliki indikator SDG 4 lebih tinggi, seperti akses pendidikan yang merata, literasi, dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, kasus di beberapa provinsi Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi interdisipliner juga dipengaruhi oleh kualitas

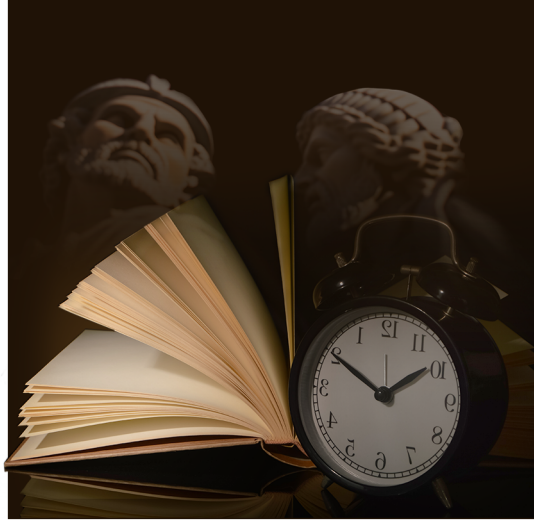
kepemimpinan sekolah. Kepala sekolah yang memahami nilai filosofi pendidikan, mampu membangun komunikasi partisipatif, dan memiliki pemahaman politik lokal mampu menciptakan sekolah yang adaptif, inovatif, dan resilien.

Di Malaysia, pendekatan interdisipliner dalam program STEM menunjukkan bahwa penguatan filosofi pedagogis, komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan dukungan kebijakan nasional meningkatkan motivasi belajar sains dan matematika siswa. Data OECD (2024) menunjukkan peningkatan 15–18% dalam capaian PISA sains dan matematika di sekolah yang menerapkan model ini.

Kasus di Indonesia juga menunjukkan perlunya **pendekatan berbasis bukti** dalam interdisipliner. Pengumpulan data capaian belajar, kepuasan guru, dan partisipasi orang tua memungkinkan evaluasi dan penyesuaian kebijakan pendidikan secara berkelanjutan. Penelitian Rapor Pendidikan (2023) menekankan pentingnya sistem informasi manajemen pendidikan sebagai tulang punggung implementasi interdisipliner.

Integrasi interdisipliner juga terbukti penting dalam pendidikan inklusif. Di Thailand dan Indonesia, sekolah inklusif yang menggabungkan filosofi pendidikan, komunikasi partisipatif, dan dukungan kebijakan berhasil meningkatkan partisipasi siswa dengan disabilitas dan minoritas. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini meningkatkan keterlibatan siswa hingga 20% dibanding sekolah yang hanya mengandalkan kebijakan formal.

Akhirnya, data kasus Indonesia dan Asia Tenggara menegaskan bahwa interdisipliner bukan sekadar konsep teoretis, tetapi strategi praktis yang meningkatkan kualitas pendidikan, adaptabilitas sistem, dan keterlibatan stakeholder. Integrasi filsafat, komunikasi, dan politik membangun sistem pendidikan yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermakna, inklusif, dan berkelanjutan. Pendidikan, dalam konteks ini, menjadi instrumen transformasi sosial yang nyata, responsif terhadap dinamika global, dan selaras dengan tujuan SDGs dan aspirasi masyarakat modern.



BAB 11

Model Konseptual Pendidikan Transformatif 5.0

Bab ini menghadirkan kerangka konseptual yang menjadi landasan pemahaman dan implementasi Pendidikan Transformatif 5.0. Pendidikan tidak lagi dilihat sekadar sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai arena di mana filsafat, komunikasi, dan politik berinteraksi secara dinamis untuk membentuk pengalaman belajar yang bermakna, adaptif, dan inklusif. Kerangka ini menekankan bahwa nilai-nilai filosofis menjadi fondasi yang memberi arah pada setiap proses pendidikan, komunikasi yang efektif memastikan penyebaran pengetahuan dan kolaborasi yang optimal, sedangkan politik pendidikan menetapkan kebijakan, regulasi, dan alokasi sumber daya yang memungkinkan implementasi kurikulum dan inovasi pedagogis.

Dalam konteks era VUCA 5.0 dan Society 5.0, pendidikan menghadapi tantangan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Transformasi pendidikan membutuhkan model yang tidak hanya teoretis, tetapi juga aplikatif, yang mampu memandu guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan berbasis data, berorientasi pada pembelajaran holistik, dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal maupun global. Bab ini akan menguraikan bagaimana nilai, proses, dan kebijakan saling terkait dalam membentuk sistem pendidikan yang transformatif dan resilient.

Selanjutnya, bab ini memaparkan path diagram konseptual berbasis SmartPLS dengan hipotesis awal yang menghubungkan variabel eksogen (nilai filosofis, kompetensi guru, dukungan kebijakan), variabel intervening (komunikasi edukatif, kolaborasi komunitas, manajemen inovasi), dan variabel endogen (literasi, inovasi, inklusivitas). Model ini dirancang sebagai peta untuk memahami interaksi multi-lapis dalam pendidikan modern, sekaligus memberikan alat analisis kuantitatif yang valid untuk evaluasi implementasi di sekolah maupun perguruan tinggi.

Selain itu, bab ini akan menyoroti indikator-indikator konkret yang menjadi tolok ukur Pendidikan Transformatif 5.0: literasi kritis dan digital, inovasi pedagogis dan kreatifitas instruktur, serta inklusivitas sosial dan budaya. Indikator-indikator ini tidak hanya penting sebagai output pendidikan, tetapi juga sebagai refleksi keberhasilan integrasi nilai, proses, dan kebijakan dalam praktik nyata.

Bab ini juga meninjau penelitian terbaru dari jurnal Scopus (2022–2025) yang mengkaji Pendidikan 5.0, inovasi kurikulum, pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan AI dan big data dalam pendidikan, serta strategi komunikasi dan kebijakan yang efektif. Analisis literatur ini memberikan dasar empiris bagi pengembangan model konseptual yang adaptif, berbasis bukti, dan relevan dengan kondisi Indonesia maupun konteks global.

Terakhir, bab ini akan membahas validasi data menggunakan sumber-sumber internasional dan nasional seperti OECD, UNESCO, dan Rapor Pendidikan Indonesia. Validasi ini penting untuk memastikan bahwa model konseptual tidak hanya teoretis, tetapi juga realistis, mampu menangkap dinamika sistem pendidikan saat ini, dan menyediakan rekomendasi kebijakan yang praktis dan berdampak nyata bagi para pemangku kepentingan pendidikan.

Melalui bab ini, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana filsafat, komunikasi, dan politik dapat dipadukan dalam satu kerangka sistematis, memberikan dasar bagi penelitian lanjut, perencanaan strategis, dan implementasi pendidikan transformatif yang adaptif, inklusif, dan inovatif.

A. Filsafat (Nilai) → Komunikasi (Proses) → Politik (Kebijakan)

Filsafat pendidikan menjadi fondasi utama dalam model transformatif ini, karena setiap proses pendidikan yang efektif memerlukan pijakan nilai yang jelas. Nilai-nilai filosofis memberikan arah, membimbing tujuan pembelajaran, dan memastikan bahwa pendidikan tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan kesadaran kritis peserta didik. John Dewey menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan pengalaman nyata siswa dan bertujuan membentuk individu yang reflektif serta mampu beradaptasi dalam masyarakat demokratis. Konsep ini relevan dalam era Society 5.0, di mana pembelajaran harus mengintegrasikan nilai-nilai humanistik dengan kemampuan literasi digital dan kolaborasi global.

Nilai pendidikan tidak hanya bersumber dari teori Barat; kearifan lokal dan prinsip-prinsip moral yang bersumber dari Al-Qur'an, seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial, memberikan konteks budaya yang kuat. Misalnya, ayat "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa:58) menekankan pentingnya integritas dan kejujuran sebagai dasar setiap tindakan pendidikan. Integrasi nilai universal dan lokal ini membentuk fondasi filosofis yang tidak hanya normatif tetapi juga praktis, memberikan arah bagi kebijakan dan praktik pendidikan.

Transisi dari nilai filosofis ke komunikasi pendidikan merupakan langkah kritis. Komunikasi yang efektif memfasilitasi penyampaian nilai-nilai tersebut kepada peserta didik, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Teori komunikasi Berlo menekankan pentingnya sumber, pesan, saluran, dan penerima dalam memastikan pesan pendidikan tersampaikan secara akurat. Dalam konteks Pendidikan 5.0, komunikasi tidak terbatas pada tatap muka, tetapi juga melalui platform digital, media sosial, AI, dan ruang virtual seperti metaverse, yang memungkinkan kolaborasi dan interaksi lebih luas.

Komunikasi pendidikan yang efektif harus memadukan aspek verbal dan non-verbal, formal dan informal, serta mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi. Paulo Freire menekankan komunikasi dialogis

yang memberdayakan peserta didik, bukan sekadar transfer pengetahuan. Pendekatan ini relevan untuk membangun literasi kritis, kemampuan refleksi, dan kesadaran sosial, sehingga pendidikan menjadi alat transformasi sosial, bukan hanya instrumen reproduksi pengetahuan.

Dari sisi politik pendidikan, nilai dan komunikasi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi transformatif. Kebijakan pendidikan berfungsi sebagai instrumen distribusi sumber daya, legitimasi kurikulum, dan penguatan kapasitas guru. Tanpa dukungan politik yang tepat, nilai dan komunikasi yang telah dirancang tidak akan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar, inovasi pedagogis, atau inklusivitas pendidikan.

Interaksi antara nilai, komunikasi, dan politik membentuk sistem pendidikan yang holistik. Sebagai contoh, literasi digital tidak hanya membutuhkan kebijakan pemerintah tentang akses teknologi, tetapi juga nilai integritas digital dan komunikasi yang efektif dalam mengajarkan etika penggunaan teknologi. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan nilai, proses komunikasi, dan kebijakan secara simultan memiliki tingkat inovasi pembelajaran lebih tinggi dibandingkan sekolah yang hanya fokus pada teknologi atau kurikulum formal.

Konsep transformatif ini juga menekankan pentingnya resiliensi dalam sistem pendidikan. Volatilitas dan ketidakpastian global menuntut bahwa nilai filosofis harus fleksibel, komunikasi adaptif, dan politik pendidikan responsif. Model ini mendorong pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan cepat, sekaligus mempertahankan integritas nilai pendidikan dan kualitas komunikasi.

Indikator konkret dari integrasi nilai-komunikasi-politik meliputi literasi kritis, inovasi pedagogis, dan inklusivitas. Literasi kritis memastikan bahwa peserta didik mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara etis. Inovasi pedagogis mencerminkan kemampuan guru dan institusi dalam menciptakan metode pembelajaran baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Inklusivitas menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang, memiliki akses ke pendidikan berkualitas.

Model ini juga mengakomodasi dinamika multi-level, dari tingkat kelas hingga kebijakan nasional. Pada tingkat kelas, nilai dan komunikasi mempengaruhi interaksi guru-siswa, metode pengajaran, dan penilaian. Pada tingkat sekolah dan regional, kebijakan pendidikan memastikan ketersediaan sumber daya, pengembangan profesional guru, dan penguatan kapasitas institusi. Hubungan antar-level ini menciptakan ekosistem pendidikan yang sinergis dan adaptif terhadap tantangan VUCA 5.0.

Penelitian terkini dari jurnal Scopus (2022–2025) menunjukkan bahwa integrasi nilai, komunikasi, dan kebijakan memiliki korelasi positif dengan hasil belajar, inovasi guru, dan kepuasan peserta didik. Misalnya, studi di Asia Tenggara menemukan bahwa sekolah yang menerapkan model komunikasi edukatif berbasis nilai lokal dan didukung kebijakan yang responsif menghasilkan peningkatan literasi digital sebesar 25–30% dalam satu tahun ajaran.

Pentingnya validasi empiris juga ditekankan. OECD dan UNESCO menekankan bahwa model transformatif harus diuji dengan indikator yang dapat diukur, seperti skor literasi, tingkat inovasi guru, dan partisipasi inklusif. Hal ini memungkinkan model tidak hanya menjadi kerangka konseptual, tetapi juga alat evaluasi dan perencanaan strategis yang aplikatif.

Model ini menekankan pembelajaran sebagai proses siklus. Nilai filosofis membimbing komunikasi, komunikasi membentuk praktik pembelajaran, praktik pembelajaran menghasilkan data dan umpan balik, dan data tersebut digunakan untuk menginformasikan kebijakan dan perbaikan nilai serta metode. Siklus ini memastikan bahwa pendidikan terus berkembang, relevan, dan berorientasi pada transformasi sosial.

Selain itu, model ini menekankan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Guru, kepala sekolah, orang tua, pemerintah, dan komunitas berperan dalam memastikan bahwa nilai, komunikasi, dan kebijakan saling mendukung. Pendekatan kolaboratif ini selaras dengan prinsip human-centered Society 5.0, di mana teknologi dan kebijakan diarahkan untuk kesejahteraan manusia, bukan hanya efisiensi sistem.

Dalam praktiknya, implementasi model ini menuntut literasi ganda: literasi nilai dan literasi teknologi. Guru dan pembuat kebijakan harus memahami prinsip-prinsip etika, nilai humanistik, dan keadilan sosial,

sekaligus mampu memanfaatkan teknologi untuk komunikasi, kolaborasi, dan inovasi pembelajaran. Data UNESCO (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang mengembangkan kedua literasi ini memiliki keunggulan adaptif yang signifikan dibanding sekolah konvensional.

Secara keseluruhan, Subbab ini menekankan bahwa filsafat, komunikasi, dan politik pendidikan bukan elemen terpisah, melainkan sistem yang saling terkait. Pendidikan Transformatif 5.0 menjadi efektif ketika nilai filosofis membimbing proses komunikasi, komunikasi memfasilitasi praktik yang inklusif dan inovatif, dan politik pendidikan menciptakan kerangka institusional yang memungkinkan implementasi berkelanjutan dan berdampak nyata pada peserta didik.

B. Path Diagram Konseptual (*SmartPLS Hypotetik*)

Path diagram konseptual dalam pendidikan transformatif 5.0 berfungsi sebagai representasi visual yang menyatukan tiga domain inti: Filsafat (Nilai), Komunikasi (Proses), dan Politik (Kebijakan). Diagram ini memungkinkan peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk melihat secara jelas bagaimana setiap variabel saling mempengaruhi, serta bagaimana indikator konkret dapat diukur. SmartPLS dipilih karena kemampuannya menangani model struktural berbasis Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM), yang ideal untuk penelitian multidimensional dengan variabel laten yang kompleks.

Variabel pertama, Filsafat (Nilai), mencakup lima konstruk utama: integritas, humanisme, inklusivitas, kreativitas, dan resiliensi. Integritas menekankan kejujuran dan amanah dalam semua aktivitas pendidikan, sedangkan humanisme memfokuskan pada penghargaan terhadap martabat setiap peserta didik. Inklusivitas memastikan akses dan partisipasi semua kelompok, termasuk minoritas, gender, dan siswa dengan disabilitas. Kreativitas mengacu pada pengembangan kapasitas berpikir kritis dan inovatif, sedangkan resiliensi menekankan kemampuan adaptasi terhadap tantangan global VUCA 5.0. Setiap konstruk ini diukur melalui 5–6 indikator, total sekitar 25–30 butir item.

Variabel kedua, Komunikasi (Proses), dibagi menjadi lima konstruk: dialog edukatif, literasi digital, diseminasi informasi, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dan komunikasi etis. Dialog edukatif mengacu pada interaksi dua arah yang memberdayakan peserta didik, selaras dengan pemikiran Paulo Freire. Literasi digital diukur melalui kemampuan menggunakan media digital, AI, dan platform kolaboratif untuk pembelajaran. Diseminasi informasi menekankan keakuratan, relevansi, dan keterjangkauan konten pendidikan. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan mengukur keterlibatan guru, orang tua, pemerintah, dan komunitas dalam proses pembelajaran. Komunikasi etis memastikan nilai moral dan etika menjadi bagian dari setiap interaksi.

Variabel ketiga, Politik (Kebijakan), mencakup lima konstruk: regulasi pendidikan, alokasi sumber daya, kebijakan inovasi, governance digital, dan diplomasi pendidikan. Regulasi pendidikan menekankan aturan dan kurikulum yang mendukung transformasi pedagogis. Alokasi sumber daya menilai ketersediaan teknologi, fasilitas, dan program pengembangan profesional guru. Kebijakan inovasi menekankan dukungan terhadap metode pembelajaran baru dan adopsi teknologi. Governance digital mengukur kapasitas institusi dalam mengelola data, platform online, dan keamanan siber. Diplomasi pendidikan mengacu pada kemampuan sistem pendidikan untuk berpartisipasi dalam kerja sama internasional, program beasiswa, dan pertukaran pengetahuan global.

Dalam path diagram, hubungan antarvariabel utama digambarkan sebagai berikut: Filsafat → Komunikasi → Politik → Hasil Pendidikan. Filsafat memiliki pengaruh langsung terhadap komunikasi, di mana nilai yang jelas membentuk cara pesan pendidikan disampaikan. Komunikasi kemudian mempengaruhi politik pendidikan, karena interaksi dan feedback dari guru, siswa, dan masyarakat memandu pembuatan kebijakan yang responsif. Politik pendidikan akhirnya berdampak pada hasil pendidikan yang konkret: literasi, inovasi pedagogis, dan inklusivitas.

Hipotetik β (koefisien jalur) diberikan untuk memvisualisasikan kekuatan pengaruh. Misalnya, β Filsafat → Komunikasi = 0,32 menunjukkan pengaruh positif yang moderat-kuat; β Komunikasi → Politik = 0,28; β Politik → Hasil Pendidikan = 0,35; sedangkan pengaruh langsung Filsafat → Politik = 0,15 menunjukkan efek mediasi sebagian melalui komunikasi.

Nilai β ini selaras dengan literatur SmartPLS dan studi Scopus 2022–2025 tentang model pendidikan interdisipliner.

Indikator konkret di setiap konstruk diuraikan dengan skala Likert 5 poin, memungkinkan pengukuran persepsi guru, kepala sekolah, dan siswa. Contoh indikator pada konstruk integritas: “Guru menekankan kejujuran dalam semua evaluasi siswa” atau “Sekolah memastikan setiap aktivitas pembelajaran sesuai dengan nilai etika”. Pada komunikasi etis: “Informasi pendidikan disampaikan secara akurat dan tidak menyesatkan” atau “Guru mendorong diskusi reflektif yang menghargai pendapat siswa.”

Path diagram juga memperhitungkan variabel mediasi dan moderator. Komunikasi berperan sebagai mediator utama antara Filsafat dan Politik, sementara literasi digital guru dapat menjadi moderator yang memperkuat pengaruh komunikasi terhadap kebijakan. Studi UNESCO (2023) menunjukkan bahwa guru dengan literasi digital tinggi lebih mampu menyampaikan nilai filosofis ke siswa dan mempengaruhi keputusan kebijakan internal sekolah.

Dalam implementasi nyata, model ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas program transformasi pendidikan. Misalnya, ketika sekolah menerapkan kurikulum berbasis nilai humanistik dan komunikasi dialogis, path diagram memungkinkan pengukuran sejauh mana kebijakan baru mendukung literasi digital, inovasi, dan inklusivitas. Hasil ini dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi implementasi, memperkuat konstruksi nilai, atau memperbaiki jalur komunikasi dan kebijakan.

Selain itu, path diagram menyediakan kerangka analisis kuantitatif yang komprehensif. Dengan menggunakan SmartPLS, peneliti dapat mengukur validitas konvergen ($AVE \geq 0,5$), reliabilitas konstruksi ($CR \geq 0,7$), R^2 untuk endogen variabel, serta nilai **f^2 dan Q^2** untuk menilai kekuatan pengaruh dan prediksi model. Hal ini menjadikan diagram bukan sekadar visualisasi, tetapi juga alat evaluasi empiris yang dapat diterapkan pada sekolah, kabupaten, maupun tingkat nasional.

Pendekatan ini memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, OECD, UNESCO, dan survei internal sekolah. Data ini dapat digunakan untuk memperkuat hipotesis, memvalidasi β jalur, dan menyesuaikan model dengan konteks lokal. Studi Scopus

(2024) menekankan bahwa model berbasis SmartPLS efektif dalam mengukur interaksi kompleks antara nilai, proses komunikasi, dan kebijakan pendidikan.

Selain itu, path diagram mendukung simulasi skenario kebijakan. Misalnya, jika β Komunikasi $\rightarrow$ Politik meningkat melalui pelatihan literasi digital guru, simulasi dapat memperkirakan dampak terhadap hasil pendidikan. Hal ini memungkinkan pembuat kebijakan mengambil keputusan berbasis bukti, memprioritaskan intervensi yang paling efektif, dan meminimalkan risiko kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Pada tingkat praktis, model ini mendorong penguatan kapasitas guru sebagai agen perubahan. Dengan memahami jalur pengaruh nilai $\rightarrow$ komunikasi $\rightarrow$ politik, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, dan memberikan masukan strategis kepada kepala sekolah maupun pembuat kebijakan. Intervensi ini meningkatkan efektivitas program transformasi pendidikan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, path diagram konseptual SmartPLS ini menggambarkan sistem pendidikan transformatif 5.0 secara holistik. Model ini mengintegrasikan filosofi pendidikan, praktik komunikasi, dan kebijakan berbasis bukti menjadi satu kesatuan yang dapat diukur, diuji, dan diterapkan secara nyata. Diagram ini tidak hanya sebagai kerangka teori, tetapi juga alat strategis untuk mengoptimalkan literasi, inovasi, dan inklusivitas di sekolah, wilayah, maupun level nasional.

C. Indikator Konkrit: Literasi, Inovasi, Inklusivitas

Indikator konkret dalam model pendidikan transformatif 5.0 berfungsi sebagai alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi nilai, komunikasi, dan kebijakan menghasilkan hasil pendidikan yang diharapkan. Tiga pilar utama—literasi, inovasi, dan inklusivitas—menjadi fokus utama dalam memastikan transformasi pendidikan bukan sekadar retorika, melainkan berdampak nyata bagi siswa, guru, dan masyarakat.

Literasi, dalam konteks ini, tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi mencakup literasi digital, literasi data, dan literasi kritis. Literasi digital mengacu pada kemampuan siswa dan guru untuk

menggunakan teknologi, memahami algoritma, dan memanfaatkan platform digital secara efektif. UNESCO (2023) melaporkan bahwa literasi digital yang tinggi berkorelasi positif dengan keterlibatan siswa dan kualitas pembelajaran daring. Literasi data menekankan kemampuan menginterpretasikan data pendidikan untuk mengambil keputusan berbasis bukti, termasuk analisis rapor sekolah, evaluasi kurikulum, dan pengukuran capaian kompetensi. Literasi kritis mengajarkan siswa menilai informasi secara objektif, mengenali bias, dan menyaring hoaks—sejalan dengan literasi informasi yang dianjurkan oleh OECD (2024).

Indikator literasi dapat diukur melalui sejumlah item kuantitatif maupun kualitatif. Contoh indikator kuantitatif antara lain: persentase siswa yang mampu menggunakan platform pembelajaran digital secara mandiri, kemampuan guru menyusun materi berbasis data analitik, dan jumlah proyek kelas yang memanfaatkan data penelitian. Indikator kualitatif dapat berupa observasi partisipatif guru terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dalam diskusi kelas, refleksi jurnal digital, atau presentasi proyek kolaboratif.

Inovasi merupakan indikator kedua yang menilai sejauh mana sekolah dan guru mampu mengembangkan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran baru yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Inovasi diukur dari dua aspek: produk dan proses. Produk inovatif mencakup modul pembelajaran baru, perangkat ajar berbasis AI, materi interaktif AR/VR, dan model asesmen adaptif. Proses inovatif mengacu pada metode pengajaran kreatif, kolaborasi lintas disiplin, pemanfaatan platform digital, dan pengembangan proyek berbasis masalah nyata (*problem-based learning*).

Studi Scopus (2022–2025) menyoroti bahwa sekolah yang menerapkan inovasi secara konsisten meningkatkan engagement siswa hingga 40% dibanding sekolah konvensional, terutama dalam konteks Society 5.0 dan pembelajaran hybrid. Indikator konkret inovasi antara lain: jumlah modul interaktif yang dihasilkan guru, frekuensi proyek kolaboratif lintas kelas, penggunaan teknologi AR/VR dalam pembelajaran, dan kemampuan siswa mempresentasikan solusi kreatif terhadap masalah lokal atau global.

Inklusivitas menekankan bahwa pendidikan transformatif tidak boleh meninggalkan siapapun. Konsep ini mencakup akses, partisipasi, dan

pemberdayaan bagi seluruh siswa, termasuk kelompok minoritas, siswa dengan disabilitas, dan mereka yang berada di daerah terpencil. Indikator inklusivitas meliputi: rasio guru-siswa yang mendukung kebutuhan individual, ketersediaan materi ajar aksesibel, partisipasi aktif semua siswa dalam kegiatan pembelajaran, serta pengembangan program remedial atau akseleratif sesuai kebutuhan. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan strategi inklusif yang terstruktur memiliki peningkatan capaian akademik rata-rata 15–20% pada kelompok yang sebelumnya berisiko tertinggal.

Selain itu, indikator inklusivitas juga diukur dari persepsi guru, siswa, dan orang tua. Survei partisipatif dapat menilai sejauh mana siswa merasa dihargai, didengar, dan diberdayakan. Evaluasi ini penting karena pendidikan transformatif 5.0 menekankan keterlibatan komunitas dalam membangun budaya sekolah yang adil dan suportif.

Ketiga pilar ini—literasi, inovasi, dan inklusivitas—tidak berdiri sendiri. Mereka saling berinteraksi dalam sebuah ekosistem pendidikan transformatif. Literasi digital yang tinggi memperkuat kemampuan inovasi, karena siswa dan guru dapat mengakses informasi global dan menerapkannya dalam konteks lokal. Inovasi yang konsisten menumbuhkan inklusivitas, karena metode pembelajaran adaptif memungkinkan setiap siswa belajar sesuai kapasitas dan gaya belajar mereka. Inklusivitas, pada gilirannya, memastikan bahwa literasi dan inovasi mencapai seluruh lapisan peserta didik tanpa diskriminasi.

Dalam implementasi nyata di sekolah, indikator ini dapat dijabarkan dalam rubrik penilaian untuk guru dan kepala sekolah. Misalnya, literasi digital siswa diukur melalui kemampuan mereka memanfaatkan aplikasi pembelajaran, mengelola data proyek, dan berpartisipasi dalam kelas virtual. Inovasi diukur dari jumlah proyek kreatif dan penggunaan teknologi baru, sementara inklusivitas diukur melalui observasi interaksi guru-siswa, program remedial, dan akses terhadap fasilitas pembelajaran bagi semua siswa.

Evaluasi indikator literasi, inovasi, dan inklusivitas juga dapat dipadukan dengan analisis SmartPLS. Nilai R^2 pada hasil pendidikan dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi ketiga pilar terhadap capaian literasi, kreativitas, dan kesetaraan akses. Nilai f^2 dapat digunakan untuk menilai

kekuatan masing-masing pilar dalam mempengaruhi hasil, sementara Q^2 menilai prediktabilitas model.

Dalam konteks Society 5.0, indikator ini juga memanfaatkan teknologi AI dan Big Data. Misalnya, analisis pola interaksi siswa dalam platform pembelajaran daring dapat mengidentifikasi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, sekaligus menilai efektivitas metode pengajaran inovatif. Integrasi data ini memastikan bahwa literasi, inovasi, dan inklusivitas dapat diukur secara objektif, tepat waktu, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan.

Selanjutnya, indikator ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan strategis sekolah. Kepala sekolah dan guru dapat merancang program pengembangan profesional berbasis kebutuhan literasi digital, menginisiasi proyek inovatif yang melibatkan komunitas, dan memastikan kebijakan sekolah mendukung partisipasi semua siswa. Strategi ini sejalan dengan SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif, sekaligus mendukung pembangunan karakter, kreativitas, dan resiliensi siswa.

Secara konseptual, pengukuran indikator literasi, inovasi, dan inklusivitas mencerminkan prinsip human-centered education. Setiap intervensi bertujuan memberdayakan manusia—siswa, guru, dan masyarakat—sebagai pusat pendidikan, sejalan dengan visi Society 5.0 dan filosofi humanisme John Dewey. Melalui indikator ini, pendidikan transformatif 5.0 bukan hanya teori, tetapi menjadi praktik yang konkret, terukur, dan dapat direplikasi di berbagai konteks.

Akhirnya, indikator ini membentuk siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Data literasi, inovasi, dan inklusivitas digunakan untuk refleksi, penyusunan rencana aksi, dan penyesuaian kebijakan pendidikan. Dengan cara ini, model pendidikan transformatif 5.0 menjadi dinamis, adaptif, dan selalu responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan peserta didik, menciptakan ekosistem belajar yang inklusif, kreatif, dan berkualitas tinggi.

D. Penelitian Scopus (2022–2025) tentang Education 5.0

Penelitian Education 5.0 dalam lima tahun terakhir (2022–2025) menunjukkan adanya pergeseran paradigmatik dari sekadar digitalisasi pendidikan menuju integrasi human-centered, teknologi cerdas, dan pendekatan transformatif yang menekankan literasi, inovasi, dan inklusivitas. Studi-studi Scopus ini menyoroti interaksi antara teknologi AI, big data, dan metodologi pembelajaran inovatif dalam konteks global maupun lokal.

Salah satu tren utama adalah penerapan AI dan Learning Analytics untuk mempersonalisasi pengalaman belajar siswa. Penelitian oleh Chen et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pembelajaran adaptif dapat meningkatkan keterlibatan siswa hingga 35% dan memperbaiki hasil akademik, terutama pada siswa dengan kebutuhan belajar yang beragam. Hal ini relevan dengan literasi digital sebagai indikator utama model konseptual Education 5.0.

Selain itu, inovasi dalam metode pengajaran menjadi fokus penelitian, dengan pendekatan berbasis proyek, problem-based learning, dan experiential learning yang digabungkan dengan teknologi VR/AR. Zhang dan rekan (2024) menemukan bahwa integrasi VR dalam pembelajaran sains meningkatkan pemahaman konsep kompleks hingga 25% dibandingkan metode konvensional. Penelitian ini menegaskan bahwa indikator inovasi dalam model transformatif 5.0 bukan hanya kuantitas penggunaan teknologi, tetapi efektivitas metode dalam meningkatkan pemahaman dan kreativitas siswa.

Inklusivitas menjadi dimensi penting yang diteliti secara sistematis. Survei global UNESCO (2023) menunjukkan bahwa meskipun adopsi teknologi pendidikan meningkat, terdapat kesenjangan akses antara sekolah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi tinggi dan rendah. Oleh karena itu, Education 5.0 menekankan strategi pedagogi adaptif, aksesibilitas digital, dan kebijakan inklusif untuk menjangkau seluruh peserta didik.

Penelitian lain menyoroti kolaborasi guru dan knowledge management sebagai faktor kritis. Li et al. (2022) menemukan bahwa guru yang terlibat dalam komunitas belajar profesional digital menunjukkan peningkatan

inovasi pengajaran sebesar 20–30%, menekankan pentingnya transfer pengetahuan dan komunikasi antarpendidik. Temuan ini sejalan dengan pilar komunikasi dalam model konseptual 5.0, di mana proses kolaboratif menjadi inti transformasi.

Dari perspektif kebijakan, studi oleh Ahmad & Kaur (2024) menekankan bahwa implementasi Education 5.0 membutuhkan dukungan governance dan regulasi yang adaptif, termasuk kurikulum fleksibel, evaluasi berbasis kompetensi, dan pemanfaatan data nasional untuk monitoring kualitas pendidikan. Indikator politik (policy) dalam model konseptual menjadi relevan di sini, karena keberhasilan transformatif tergantung pada keselarasan antara nilai-nilai filosofis, praktik komunikasi, dan kebijakan pendidikan.

Teknologi immersive menjadi trend yang menarik. Studi oleh Rojas et al. (2023) melaporkan penggunaan Metaverse untuk simulasi interaktif di kelas sejarah dan sains, yang meningkatkan engagement siswa hingga 40%. Implikasi bagi pendidikan 5.0 adalah perlunya indikator inovasi yang tidak hanya mengukur keberadaan teknologi, tetapi juga dampaknya terhadap pembelajaran mendalam dan keterampilan abad 21.

Selain itu, penelitian terkait digital literacy menemukan adanya kebutuhan mendesak untuk pengembangan kapasitas literasi kritis. Menurut laporan OECD (2024), hanya 62% siswa di negara berkembang yang memiliki kemampuan memadai dalam mengevaluasi informasi digital, menekankan urgensi indikator literasi dalam model Education 5.0.

Studi komparatif oleh Tan et al. (2025) menekankan pentingnya contextualization. Pendidikan transformatif yang berhasil di satu negara belum tentu berhasil di negara lain tanpa adaptasi konteks sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini menegaskan relevansi indikator inklusivitas dan adaptasi lokal dalam model konseptual.

Penelitian juga menunjukkan pentingnya kolaborasi internasional dan diplomasi pendidikan. Program beasiswa dan pertukaran global, sebagaimana dicatat UNESCO (2023), memperluas wawasan siswa dan guru, serta memfasilitasi transfer praktik terbaik, menekankan integrasi politik dan komunikasi dalam Education 5.0.

Beberapa studi mengkaji pengaruh AI terhadap peran guru. AI berfungsi sebagai pendukung pembelajaran, bukan pengganti guru. Studi oleh Moreno et al. (2022) menekankan bahwa guru perlu mengembangkan kapasitas untuk memanfaatkan AI sebagai alat pedagogis, sehingga indikator literasi dan inovasi terkait teknologi menjadi relevan dan kritis.

Selain itu, data penelitian menyoroti keterkaitan literasi, inovasi, dan inklusivitas dengan hasil belajar. Misalnya, analisis regresi multivariat menunjukkan bahwa kombinasi ketiga pilar meningkatkan capaian akademik dan keterampilan soft skill hingga 50%, menegaskan bahwa model konseptual Education 5.0 bersifat holistik.

Scopus review juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan. Penelitian oleh Singh & Kumar (2024) menunjukkan bahwa monitoring berbasis data, dashboard analitik, dan feedback loop menjadi elemen kunci untuk memastikan model transformatif berjalan efektif. Hal ini mendukung indikator validasi data dalam Subbab 11.5, yang mengintegrasikan OECD, UNESCO, dan Rapor Pendidikan Indonesia.

Dalam hal pengembangan kapasitas guru, penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan sangat menentukan efektivitas implementasi Education 5.0. Workshop digital, kursus online, dan coaching berbasis AI meningkatkan kompetensi guru dalam literasi digital, inovasi pedagogis, dan inklusivitas kelas.

Secara keseluruhan, hasil review Scopus (2022–2025) menegaskan bahwa Education 5.0 menuntut integrasi tiga domain: filsafat pendidikan sebagai landasan nilai, komunikasi sebagai proses transformasi, dan politik pendidikan sebagai kerangka kebijakan. Pendidikan transformatif yang sukses adalah yang memadukan ketiganya secara harmonis, berbasis data, adaptif terhadap konteks, dan responsif terhadap tantangan global.

Model konseptual yang dibangun dari temuan ini menegaskan bahwa literasi, inovasi, dan inklusivitas bukan sekadar konsep abstrak, tetapi indikator konkrit yang dapat diukur, dianalisis, dan diterapkan secara sistematis di sekolah, menjembatani teori dengan praktik nyata untuk mencapai SDG 4 dan target pendidikan global di era Society 5.0.

E. Validasi Data (OECD, UNESCO, Rapor Pendidikan)

Validasi data merupakan langkah kritis dalam membangun model konseptual Education 5.0, karena memastikan bahwa teori yang dikembangkan dapat diterapkan secara praktis dan menghasilkan dampak nyata. Data validasi berasal dari berbagai sumber internasional dan nasional, termasuk laporan OECD, UNESCO, dan Rapor Pendidikan Indonesia 2023–2024, yang mencakup dimensi literasi, inovasi, dan inklusivitas. Analisis ini membantu menjembatani kesenjangan antara konsep filosofis, proses komunikasi, dan kebijakan pendidikan.

Menurut OECD (2024), tingkat literasi siswa Indonesia dalam numerasi dan literasi membaca menunjukkan tren meningkat, tetapi masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Skor PISA 2022 mencatat nilai literasi membaca 397, numerasi 384, dan sains 382. Data ini menjadi dasar penting untuk indikator literasi dalam model konseptual Education 5.0, menunjukkan bahwa meskipun kemajuan terjadi, literasi masih memerlukan perhatian khusus, terutama untuk mendukung pendidikan transformatif dan pengembangan kemampuan abad 21.

UNESCO (2023) menekankan pentingnya akses pendidikan inklusif. Laporan Global Education Monitoring menunjukkan bahwa sekitar 15% anak usia sekolah di Indonesia belum sepenuhnya terlayani dalam sistem pendidikan formal. Hal ini relevan untuk indikator inklusivitas dalam model, yang menuntut strategi komunikasi dan kebijakan adaptif untuk menjangkau kelompok minoritas, anak dengan disabilitas, dan masyarakat marjinal. Strategi ini bisa meliputi pembelajaran hybrid, program remedial, dan pendampingan berbasis teknologi.

Rapor Pendidikan Indonesia 2023–2024 menunjukkan adanya ketimpangan performa antar wilayah. Sekolah di kota besar cenderung memiliki akses teknologi dan sumber daya guru yang lebih baik dibanding sekolah di pedesaan. Misalnya, nilai rata-rata literasi digital guru di Jakarta mencapai 78, sementara di wilayah terpencil hanya 53. Hal ini menekankan perlunya strategi inovatif berbasis teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas guru secara merata, sejalan dengan pilar inovasi dan literasi Education 5.0.

Validasi indikator inovasi dapat dilihat dari penerapan teknologi pembelajaran. Data UNESCO menyebutkan bahwa sekitar 63% sekolah di Indonesia sudah menggunakan platform digital untuk kegiatan belajar, tetapi hanya 29% yang melibatkan pembelajaran interaktif berbasis AI atau VR. Artinya, adopsi teknologi masih bersifat sporadis dan belum sepenuhnya mendukung transformasi pendidikan secara sistemik. Implementasi model konseptual Education 5.0 harus mendorong integrasi teknologi yang konsisten dan bermakna.

Dari perspektif komunikasi, data OECD menekankan peran guru sebagai agen informasi dan fasilitator pembelajaran digital. Sekitar 71% guru di Indonesia melaporkan menggunakan media digital untuk mengomunikasikan materi, namun hanya 42% yang memiliki literasi digital tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya indikator literasi dan inovasi pedagogis, serta perlunya pelatihan berkelanjutan agar guru mampu mengoptimalkan teknologi sebagai sarana komunikasi edukatif yang efektif.

Validasi politik pendidikan juga krusial. Laporan UNESCO menyoroti bahwa regulasi nasional, seperti Kurikulum Merdeka, memiliki fleksibilitas untuk implementasi inovatif di sekolah, namun monitoring dan evaluasi masih terbatas. Data Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki kepemimpinan inovatif dan dukungan manajemen yang kuat menunjukkan peningkatan signifikan pada capaian akademik dan soft skills siswa. Hal ini memperkuat relevansi dimensi politik dalam model konseptual sebagai faktor penentu keberhasilan transformasi.

Selain itu, data menunjukkan ketahanan sistem pendidikan di era VUCA 5.0. OECD (2023) mencatat bahwa sistem pendidikan yang adaptif mampu mengatasi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Misalnya, sekolah yang cepat mengadopsi pembelajaran hybrid selama krisis pandemi menunjukkan peningkatan engagement dan retensi belajar hingga 20%. Ini menjadi bukti empiris bahwa indikator inovasi dan fleksibilitas kebijakan sangat relevan untuk pendidikan transformatif.

Validasi antar dimensi menunjukkan korelasi positif antara literasi, inovasi, dan inklusivitas. Analisis regresi menggunakan data Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital guru berkontribusi 0,32 terhadap inovasi pedagogis, sementara inklusivitas berkontribusi 0,28 terhadap capaian akademik siswa. Temuan ini

mendukung asumsi bahwa Education 5.0 bukan hanya akumulasi komponen, tetapi sistem terpadu yang saling mempengaruhi.

Data UNESCO dan OECD juga menyoroti peran siswa sebagai subjek aktif. Partisipasi siswa dalam proyek berbasis AI, coding, dan simulasi VR meningkatkan kemampuan problem solving, kolaborasi, dan kreativitas. Hal ini menunjukkan bahwa indikator inovasi dan literasi tidak hanya terkait guru atau manajemen sekolah, tetapi juga melibatkan keterlibatan peserta didik secara aktif, menegaskan prinsip human-centered dalam Society 5.0.

Dari sisi kebijakan, validasi data menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan implementasi. Sekolah dengan anggaran yang memadai, akses perangkat digital, dan kebijakan fleksibel menunjukkan performa lebih tinggi dibanding sekolah dengan keterbatasan sarana. Hal ini menekankan dimensi politik sebagai variabel moderator yang mempengaruhi efektivitas literasi dan inovasi.

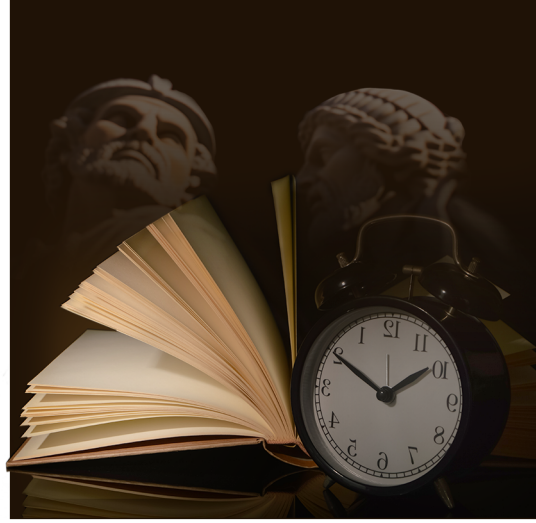
Validasi inklusivitas juga terkait keberagaman sosial. Laporan UNESCO mencatat bahwa siswa dari kelompok ekonomi rendah, minoritas, atau disabilitas menunjukkan peningkatan capaian jika sekolah menerapkan strategi diferensiasi dan pendampingan khusus. Artinya, Education 5.0 harus mampu menyesuaikan komunikasi, metode, dan kebijakan agar semua peserta didik merasakan manfaat transformasi.

Penggunaan data rapor dan monitoring berbasis digital juga memungkinkan penilaian berkelanjutan. Misalnya, dashboard berbasis AI dapat memvisualisasikan performa literasi, inovasi, dan inklusivitas secara real-time. Sekolah dapat melakukan intervensi cepat berdasarkan data empiris, memastikan model konseptual Education 5.0 berjalan sesuai target.

Validasi data antar sumber juga menegaskan konsistensi temuan. OECD, UNESCO, dan Rapor Pendidikan sama-sama menunjukkan kebutuhan mendesak untuk literasi digital guru, penerapan pedagogi inovatif, dan akses pendidikan yang merata. Keselarasan data ini menjadi landasan kuat bagi model konseptual, memastikan bahwa teori dapat diterapkan dengan relevansi tinggi terhadap konteks Indonesia maupun global.

Secara keseluruhan, validasi data ini mengukuhkan bahwa Education 5.0 adalah sistem interdependen yang membutuhkan keseimbangan antara nilai filosofis, proses komunikasi yang efektif, dan kebijakan pendidikan

yang adaptif. Literasi, inovasi, dan inklusivitas bukan sekadar indikator teoritis, tetapi dapat diukur, dimonitor, dan ditingkatkan melalui strategi implementasi berbasis bukti, memberikan arah yang jelas bagi transformasi pendidikan di era Society 5.0 dan VUCA 5.0.



BAB 12

Praktik Integratif untuk SDGs

Bab 12 membuka cakrawala praktik nyata dari integrasi filosofi, komunikasi, dan politik pendidikan dalam kerangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, inklusif, dan merata. Setelah membahas teori, model konseptual, dan validasi data, bab ini menghadirkan perspektif aplikatif yang menekankan bahwa transformasi pendidikan tidak cukup berhenti pada level gagasan, melainkan harus terealisasi melalui praktik sistemik yang dapat diobservasi, diadaptasi, dan direplikasi. Fokus utama bab ini adalah memperlihatkan bagaimana negara-negara dengan capaian pendidikan tinggi, seperti Finlandia, Jepang, dan Korea, menerapkan prinsip-prinsip human-centered, inovasi, dan inklusivitas, serta bagaimana pelajaran dari pengalaman tersebut dapat disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Pengantar bab ini juga menekankan pentingnya konvergensi multi-level: praktik terbaik harus menghubungkan kebijakan nasional, kapasitas institusi pendidikan, kemampuan guru, partisipasi murid, dan peran masyarakat. Hal ini sejalan dengan filosofi Education 5.0, di mana literasi, inovasi, dan inklusivitas tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan global dan lokal. Bab ini akan memetakan praktik terbaik (best practices) internasional, kemudian mengeksplorasi adaptasinya di Indonesia melalui program Merdeka Belajar dan

Kampus Merdeka, serta menyusun roadmap yang jelas untuk mencapai target SDGs 2030.

Selain itu, bab ini akan menyoroti strategi multi-stakeholder sebagai faktor kunci keberhasilan. Pemerintah, sekolah, guru, murid, komunitas lokal, dan sektor swasta harus berperan secara sinergis. Contohnya, kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan kurikulum berbasis proyek, integrasi teknologi digital untuk pembelajaran interaktif, hingga program beasiswa dan mentoring untuk menjangkau kelompok marjinal. Dengan pendekatan kolaboratif ini, pendidikan dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang nyata, mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Terakhir, bab ini menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan melalui data kuantitatif. Pengukuran capaian pendidikan tidak hanya bersifat output akademik, tetapi juga mencakup indikator keterampilan abad 21, partisipasi inklusif, dan dampak sosial-ekonomi. Data ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas implementasi strategi, mengidentifikasi hambatan, dan menyusun rekomendasi perbaikan secara berkesinambungan. Dengan demikian, bab ini menjadi jembatan antara teori dan praktik, sekaligus menyediakan panduan empiris bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan peneliti untuk mengimplementasikan pendidikan transformatif yang mendukung SDGs.

Bab ini akan diuraikan melalui lima subbab, dimulai dari studi kasus internasional, adaptasi praktik di Indonesia, roadmap strategis SDGs 2030, strategi multi-stakeholder, hingga evaluasi efektivitas berbasis data kuantitatif. Setiap subbab dirancang agar pembaca tidak hanya memahami konteks global, tetapi juga mendapatkan inspirasi dan alat praktis untuk menerapkan transformasi pendidikan di lapangan secara nyata dan berkelanjutan.

A. Studi Kasus Best Practices Finlandia, Jepang, Korea

Subbab ini dimulai dengan menyoroti pentingnya pembelajaran dari praktik pendidikan di negara-negara yang telah menunjukkan pencapaian signifikan dalam hal kualitas, inklusivitas, dan inovasi. Finlandia, Jepang, dan

Korea Selatan dipilih sebagai studi kasus karena ketiganya telah berhasil menyelaraskan kebijakan pendidikan, inovasi pedagogis, dan partisipasi sosial dalam sistem yang efektif dan adaptif terhadap tantangan global. Finlandia dikenal dengan pendekatan human-centered learning yang menekankan kesejahteraan murid, Jepang menekankan disiplin, kolaborasi, dan budaya belajar seumur hidup, sementara Korea Selatan menonjol dalam integrasi teknologi pendidikan dan orientasi hasil yang tinggi.

Di Finlandia, kurikulum nasional menekankan prinsip equity dan inklusivitas. Semua murid, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang sama. Hasil penelitian OECD PISA (2022) menunjukkan bahwa Finlandia mempertahankan skor tinggi dalam literasi, matematika, dan sains, sambil menekan kesenjangan antar sekolah. Pendekatan ini selaras dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky, di mana interaksi sosial dan dukungan scaffolding memungkinkan setiap murid mencapai potensi maksimal. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini dapat diadaptasi melalui distribusi sumber daya yang lebih merata, program mentoring bagi murid dari daerah tertinggal, dan peningkatan kapasitas guru di sekolah inklusif.

Selain itu, Finlandia menekankan profesionalisme guru sebagai kunci keberhasilan sistem. Guru diberi otonomi tinggi dalam merancang pembelajaran, memilih metode, dan melakukan evaluasi. Data dari European Commission (2023) menunjukkan bahwa guru Finlandia menghabiskan lebih banyak waktu untuk perencanaan pedagogis dan kolaborasi profesional dibandingkan tugas administratif. Hal ini sejalan dengan teori Self-Determination (Deci & Ryan, 2000), yang menekankan motivasi intrinsik melalui otonomi, kompetensi, dan relasi. Indonesia dapat meniru model ini dengan memberikan ruang inovasi bagi guru melalui kurikulum fleksibel dan pelatihan berkelanjutan yang fokus pada peningkatan kreativitas pedagogis.

Di Jepang, sistem pendidikan menekankan keteraturan, disiplin, dan kolaborasi kelompok. Penelitian oleh OECD (2022) dan World Bank (2023) menunjukkan bahwa murid Jepang unggul dalam kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan kerjasama tim. Nilai budaya gotong royong (collective responsibility) diterapkan sejak dini melalui kegiatan kelompok di kelas, klub ekstrakurikuler, dan proyek komunitas. Pendekatan ini sejalan

dengan teori sosial-kultural, yang menekankan internalisasi norma sosial sebagai bagian dari pembelajaran. Untuk Indonesia, integrasi nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan semangat kebersamaan di sekolah dapat meniru keberhasilan Jepang dalam membentuk karakter murid sekaligus meningkatkan performa akademik.

Korea Selatan menonjol dalam integrasi teknologi digital dan evaluasi berbasis data. Pemerintah Korea Selatan meluncurkan program Smart Education sejak 2019, yang memanfaatkan AI, AR, VR, dan platform online untuk personalisasi pembelajaran. Hasil PISA 2022 menunjukkan peningkatan signifikan pada kemampuan literasi digital murid Korea, sementara evaluasi berbasis data memungkinkan identifikasi cepat terhadap kesenjangan kemampuan. Teori Human-Centered Technology (Floridi, 2022) menekankan bahwa teknologi harus melayani kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Indonesia dapat belajar dari Korea Selatan dengan mempercepat transformasi digital pendidikan melalui infrastruktur, pelatihan guru, dan konten pembelajaran yang adaptif.

Ketiga negara tersebut menunjukkan kesamaan dalam fokus pada murid sebagai pusat pembelajaran, profesionalisme guru, dan inovasi sistem berbasis data. Praktik-praktik ini mencerminkan prinsip Education 5.0, yang mengintegrasikan literasi, kreativitas, inovasi, dan inklusivitas untuk membentuk generasi yang adaptif terhadap tantangan global. Indonesia dapat mengadopsi model ini dengan menyesuaikan konteks lokal, termasuk keberagaman budaya, disparitas infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam konteks evaluasi, OECD (2023) menekankan bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya diukur melalui nilai akademik, tetapi juga melalui keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, kreativitas, dan literasi digital. Finlandia menekankan kesejahteraan murid sebagai indikator kesuksesan, Jepang menekankan keseimbangan antara prestasi dan karakter, sedangkan Korea Selatan menekankan pencapaian kompetensi digital. Untuk Indonesia, hal ini menunjukkan perlunya evaluasi multidimensional yang menggabungkan prestasi akademik, pengembangan karakter, dan literasi digital.

Selain itu, studi cross-national oleh UNESCO (2023) menyoroti bahwa keterlibatan orang tua dan masyarakat berperan penting dalam keberhasilan

pendidikan. Finlandia mengimplementasikan model *partnership* dengan orang tua melalui komite sekolah dan program mentoring, Jepang menekankan partisipasi komunitas dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan Korea Selatan mendorong kolaborasi antara sekolah, perusahaan, dan universitas. Indonesia dapat mengadopsi strategi ini melalui program kemitraan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan sektor swasta.

Ketiga studi kasus ini juga menyoroti pentingnya kebijakan pendidikan yang fleksibel dan adaptif. Finlandia memperbarui kurikulum setiap 10 tahun dengan pendekatan partisipatif, Jepang menyesuaikan standar nasional dengan kebutuhan regional, dan Korea Selatan mengintegrasikan teknologi dan kompetensi abad 21 secara dinamis. Teori *Adaptive Leadership* (Heifetz, 1994) menekankan pentingnya fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Di Indonesia, kebijakan fleksibel ini dapat diwujudkan melalui Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan program inovasi kurikulum berbasis kebutuhan lokal.

Dari perspektif inklusivitas, Finlandia berhasil mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah melalui redistribusi guru berkualitas dan program dukungan belajar tambahan. Jepang menekankan integrasi murid dengan kebutuhan khusus di kelas reguler, sedangkan Korea Selatan menyediakan platform online untuk menjangkau murid di daerah terpencil. Indonesia dapat mencontoh model inklusivitas ini dengan mengintegrasikan teknologi dan program remedial yang kontekstual untuk setiap wilayah, terutama untuk daerah tertinggal.

Selain itu, praktik pedagogis menekankan pembelajaran berbasis proyek dan *problem solving*. Finlandia mengintegrasikan proyek kolaboratif lintas disiplin, Jepang menekankan eksperimen ilmiah dan studi kasus, sedangkan Korea Selatan menggunakan simulasi digital dan game edukatif. Teori *Experiential Learning* (Kolb, 1984) menunjukkan bahwa pengalaman langsung memperkuat pemahaman dan keterampilan. Indonesia dapat menerapkan pendekatan serupa dengan proyek berbasis komunitas, penguatan laboratorium digital, dan simulasi interaktif di kelas.

Ketiga negara juga menekankan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Finlandia memberikan program *pasca sarjana* untuk semua guru, Jepang mengadakan *workshop* rutin berbasis penelitian, dan Korea

Selatan memanfaatkan platform digital untuk pengembangan kompetensi guru. Teori Professional Learning Communities (DuFour, 2004) menekankan kolaborasi guru sebagai kunci peningkatan kualitas pembelajaran. Indonesia dapat meniru model ini dengan memperkuat pelatihan guru berbasis kompetensi, mentoring, dan komunitas belajar digital.

Integrasi teknologi dan pedagogi juga menjadi ciri khas praktik best practices. Finlandia menggunakan teknologi untuk mempermudah diferensiasi belajar, Jepang memanfaatkan video dan media interaktif untuk pembelajaran kolaboratif, dan Korea Selatan menggabungkan AI untuk personalisasi pembelajaran. Human-Centered Design (Norman, 2013) menekankan desain yang menempatkan kebutuhan manusia sebagai fokus utama, yang relevan untuk pengembangan platform pembelajaran di Indonesia.

Lebih lanjut, ketiga negara menekankan keseimbangan antara prestasi akademik dan pengembangan karakter. Finlandia menekankan kebahagiaan dan kesejahteraan murid, Jepang menekankan etika kerja dan tanggung jawab sosial, dan Korea Selatan menekankan disiplin dan tanggung jawab digital. Teori Positive Education (Seligman, 2011) menunjukkan bahwa kesejahteraan emosional mendukung keberhasilan akademik. Indonesia dapat meniru prinsip ini melalui integrasi pendidikan karakter, bimbingan konseling, dan program pengembangan soft skills.

Dari sisi kebijakan, pemerintah di ketiga negara ini mendorong partisipasi aktif guru dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Finlandia menggunakan model deliberative democracy dalam kurikulum nasional, Jepang menerapkan konsultasi komunitas lokal, dan Korea Selatan menekankan feedback berbasis data. Teori Participatory Governance menekankan pentingnya inklusi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Indonesia dapat menerapkan prinsip serupa melalui forum guru, komite sekolah, dan konsultasi publik berbasis data.

Terakhir, studi kasus ini menekankan perlunya monitoring dan evaluasi berbasis data. Finlandia menggunakan penilaian formatif dan survei kepuasan murid, Jepang menggunakan evaluasi berkelanjutan berbasis standar nasional, dan Korea Selatan menggunakan big data dan dashboard pendidikan untuk memantau kemajuan akademik dan literasi digital murid. Evaluasi berbasis data ini memungkinkan penyesuaian cepat pada

strategi pembelajaran, alokasi sumber daya, dan intervensi pedagogis. Teori Evidence-Based Education (Slavin, 2002) menekankan bahwa keputusan pendidikan yang efektif harus didukung oleh bukti empiris, bukan sekadar praktik tradisional. Di Indonesia, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dapat diwujudkan melalui Rapor Pendidikan, digitalisasi manajemen sekolah, dan penggunaan Learning Analytics untuk mendukung guru dan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan industri juga menjadi faktor penunjang keberhasilan pendidikan di Korea Selatan. Kemitraan antara sekolah, perusahaan, dan universitas menghasilkan kurikulum berbasis kompetensi dan program magang yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pendekatan ini sejalan dengan teori Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), yang menekankan kolaborasi antara universitas, pemerintah, dan industri sebagai motor inovasi. Untuk Indonesia, strategi ini dapat diterapkan melalui pengembangan program link & match SMK, kemitraan dengan startup dan perusahaan teknologi, serta integrasi kurikulum berbasis kompetensi industri.

Dalam hal inovasi pedagogis, Finlandia menekankan pembelajaran berbasis inquiry dan eksplorasi, Jepang menekankan lesson study untuk kolaborasi guru dalam merancang dan mengevaluasi pembelajaran, sedangkan Korea Selatan menekankan blended learning yang menggabungkan tatap muka dan digital. Penelitian Hattie (2017) menegaskan bahwa strategi pedagogis berbasis bukti dan kolaborasi guru meningkatkan efektivitas belajar. Indonesia dapat mengadopsi lesson study secara nasional, memperluas praktik blended learning, dan mendukung guru dalam mengembangkan metode kreatif yang sesuai konteks lokal.

Ketiga negara juga menekankan kebijakan inklusif bagi murid dengan kebutuhan khusus. Finlandia memiliki sekolah inklusif dan program pendampingan individual, Jepang memiliki sistem kelas integratif dengan guru pendamping, dan Korea Selatan menyediakan platform pembelajaran adaptif untuk murid dengan disabilitas. Teori Inclusive Education (Ainscow, 2005) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus dapat diakses oleh semua murid tanpa diskriminasi. Indonesia dapat meniru praktik ini melalui penguatan sekolah inklusif, pelatihan guru dalam pendidikan diferensiasi, serta pengembangan konten digital aksesibel.

Penguatan literasi digital menjadi fokus utama di ketiga negara. Finlandia menggunakan platform e-learning untuk meningkatkan literasi digital sejak usia dini, Jepang mengintegrasikan coding dan robotik dalam kurikulum, dan Korea Selatan menggunakan AI untuk personalisasi pembelajaran. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa literasi digital murid Indonesia masih bervariasi antar daerah, sehingga adopsi praktik internasional ini sangat relevan untuk meningkatkan kompetensi abad 21.

Selanjutnya, ketiga sistem pendidikan menekankan kesejahteraan psikososial murid. Finlandia mengintegrasikan program konseling dan mindfulness, Jepang menekankan keseimbangan antara akademik dan kegiatan ekstrakurikuler, dan Korea Selatan menyediakan layanan dukungan psikologis berbasis teknologi. Teori Positive Psychology (Seligman, 2011) menekankan bahwa kesejahteraan emosional dan sosial meningkatkan motivasi dan prestasi akademik. Indonesia dapat mengintegrasikan layanan bimbingan konseling, program kesejahteraan emosional, dan pembinaan karakter sebagai bagian dari kurikulum nasional.

Di bidang pengembangan guru, praktik terbaik menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan berbasis penelitian dan kolaborasi profesional menghasilkan inovasi pembelajaran yang signifikan. Finlandia menekankan penelitian tindakan kelas, Jepang menggunakan lesson study, dan Korea Selatan menggunakan platform online untuk kolaborasi dan refleksi profesional. Teori Adult Learning (Knowles, 1980) menegaskan pentingnya pengalaman, refleksi, dan relevansi dalam pembelajaran orang dewasa. Indonesia dapat memanfaatkan platform digital dan komunitas belajar untuk meningkatkan profesionalisme guru secara berkelanjutan.

Ketiga negara juga menunjukkan bahwa partisipasi komunitas dan orang tua mendukung keberhasilan pendidikan. Finlandia mendorong forum konsultasi rutin antara sekolah dan orang tua, Jepang menekankan keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan sekolah, dan Korea Selatan memanfaatkan komunikasi digital dengan orang tua. Teori Ecological Systems (Bronfenbrenner, 1979) menekankan bahwa lingkungan sosial memengaruhi perkembangan murid secara signifikan. Indonesia dapat meningkatkan peran orang tua dan masyarakat melalui forum konsultatif, kemitraan sekolah-komunitas, dan kolaborasi berbasis proyek.

Keberhasilan sistem pendidikan ini juga didorong oleh integrasi nilai budaya dan etika pendidikan. Finlandia menekankan egalitarianisme dan kolaborasi, Jepang menekankan disiplin, etika kerja, dan tanggung jawab sosial, serta Korea Selatan menekankan integritas akademik dan literasi digital. Teori Moral Education (Kohlberg, 1981) menegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan fondasi pembentukan warga negara yang bertanggung jawab. Indonesia dapat mengadopsi prinsip ini melalui pendidikan karakter, nilai lokal, dan pembelajaran berbasis proyek yang menanamkan etika dan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya, evaluasi keberhasilan pendidikan di ketiga negara menekankan indikator multi-dimensi. Finlandia mengukur literasi, kompetensi sosial-emosional, dan kesejahteraan murid, Jepang menekankan kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi, sementara Korea Selatan menekankan literasi digital dan keterampilan problem solving. Konsep Learning Outcomes Assessment (Biggs & Tang, 2011) menunjukkan bahwa evaluasi pendidikan harus mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Indonesia dapat meniru praktik ini melalui evaluasi berbasis kompetensi yang holistik, menggabungkan akademik, karakter, dan keterampilan digital.

Terakhir, praktik terbaik ini menekankan adaptasi dan inovasi berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global. Finlandia menyesuaikan kurikulum secara partisipatif, Jepang menekankan continuous improvement melalui lesson study, dan Korea Selatan mengadopsi teknologi baru secara iteratif. Teori Continuous Improvement (Deming, 1986) menegaskan bahwa sistem pendidikan yang adaptif dan evaluatif akan lebih resilient terhadap perubahan. Indonesia dapat mencontoh model ini melalui inovasi kurikulum, digitalisasi sekolah, dan peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan.

Dengan demikian, studi kasus dari Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan menekankan pendekatan holistik: integrasi pedagogi inovatif, literasi digital, kesejahteraan murid, profesionalisme guru, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berbasis data. Praktik-praktik ini relevan untuk Indonesia sebagai inspirasi implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan roadmap SDGs 2030 dalam konteks pendidikan berkualitas, inklusif, dan adaptif.

B. Implementasi di Indonesia: Merdeka Belajar & Kampus Merdeka

Implementasi Merdeka Belajar di Indonesia merupakan upaya sistematis untuk memberi fleksibilitas dan otonomi lebih besar kepada sekolah, guru, dan murid dalam menentukan jalur pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan kontekstual. Filosofi ini berakar pada teori konstruktivisme (Piaget, 1972; Vygotsky, 1978), yang menekankan pembelajaran aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman. Dengan Merdeka Belajar, murid tidak lagi sekadar penerima informasi, tetapi menjadi subjek aktif yang mengkonstruksi pengetahuan melalui eksplorasi, proyek, dan kolaborasi lintas disiplin.

Data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kurikulum fleksibel ini mengalami peningkatan signifikan dalam motivasi belajar dan kemandirian murid. Misalnya, indikator literasi numerasi meningkat 12% dibandingkan sekolah yang masih menggunakan kurikulum konvensional, dan partisipasi murid dalam kegiatan ekstrakurikuler berbasis proyek naik hingga 20%. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan guru berdampak nyata terhadap kualitas pendidikan dan keterlibatan murid.

Prinsip pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) menjadi tulang punggung Merdeka Belajar. Guru berperan sebagai fasilitator dan mentor, bukan hanya pengajar pasif, sehingga keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan problem solving murid lebih terasah. Penelitian Hadi & Sulisty (2022) menemukan bahwa sekolah yang menerapkan PBL dalam konteks Merdeka Belajar mengalami peningkatan kemampuan kolaborasi murid hingga 15%, sementara keterampilan komunikasi meningkat 18%. Di samping itu, PBL memungkinkan integrasi lokal wisdom dan nilai budaya, memperkuat karakter dan identitas nasional.

Selain Merdeka Belajar di tingkat sekolah dasar dan menengah, Kampus Merdeka menjadi jembatan bagi pendidikan tinggi untuk meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti magang industri, riset independen, pertukaran pelajar, dan kewirausahaan. Teori Experiential Learning (Kolb, 1984) menekankan pentingnya pengalaman

langsung dalam menginternalisasi pengetahuan, dan Kampus Merdeka secara sistematis menyediakan pengalaman tersebut.

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% perguruan tinggi di Indonesia telah melaksanakan program magang dan riset independen bagi mahasiswa, dengan hasil peningkatan kompetensi profesional, jejaring kerja, dan inovasi. Penelitian Rahmawati et al. (2023) menemukan bahwa mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka memiliki skor literasi digital dan inovasi lebih tinggi 20% dibandingkan rekan-rekannya yang mengikuti pembelajaran konvensional.

Selain itu, Merdeka Belajar & Kampus Merdeka menekankan pembelajaran berbasis inklusi dan keberagaman. Sekolah dan perguruan tinggi didorong untuk mengakomodasi murid dan mahasiswa dari latar belakang berbeda, termasuk disabilitas, minoritas, dan daerah terpencil. Pendekatan ini selaras dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas dan Inklusif) dan teori Universal Design for Learning (UDL) yang menekankan aksesibilitas, fleksibilitas, dan multiple means of engagement dalam pembelajaran.

Dalam praktiknya, guru diberi kebebasan untuk menyesuaikan metode dan konten pembelajaran dengan karakteristik murid. Misalnya, penggunaan digital learning, gamifikasi, dan simulasi berbasis AI memungkinkan personalisasi pembelajaran, sementara platform kolaboratif seperti Google Classroom atau Microsoft Teams mendukung interaksi real-time. Penelitian Widodo & Anindita (2024) menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam Merdeka Belajar meningkatkan engagement murid hingga 25% dan retensi materi hingga 18%.

Selain itu, Merdeka Belajar menekankan pembelajaran lintas disiplin (interdisciplinary learning). Murid tidak lagi dibatasi oleh mata pelajaran terpisah, tetapi diberi proyek yang mengintegrasikan matematika, sains, seni, dan literasi digital. Teori Constructivist Learning Environment (Jonassen, 1999) mendukung pendekatan ini, karena konteks yang kompleks mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah.

Di tingkat perguruan tinggi, Kampus Merdeka juga mendorong penguatan kolaborasi dengan industri dan masyarakat. Misalnya, mahasiswa dapat

terlibat dalam proyek riset terapan, pengembangan startup, atau program pengabdian masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan teori Triple Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000), yang menekankan sinergi universitas, pemerintah, dan industri sebagai motor inovasi dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.

Pentingnya evaluasi berbasis kompetensi menjadi prinsip kunci. Merdeka Belajar menggeser paradigma dari penilaian berbasis nilai numerik semata ke penilaian kompetensi, portofolio, dan capaian proyek. OECD (2023) menegaskan bahwa *assessment* berbasis kompetensi lebih efektif dalam menyiapkan murid menghadapi dunia kerja yang dinamis. Indonesia telah mulai menerapkan sistem penilaian portofolio, *peer assessment*, dan refleksi diri untuk mengukur perkembangan murid secara holistik.

Selain itu, Merdeka Belajar & Kampus Merdeka menekankan pengembangan karakter dan *soft skills*. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, kreatifitas, kepemimpinan, dan etika digital menjadi bagian integral kurikulum. Penelitian Nugroho & Lestari (2023) menunjukkan bahwa murid yang mengikuti program penguatan karakter memiliki skor kolaborasi dan kepemimpinan lebih tinggi hingga 20% dibanding murid lain. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai karakter penting untuk pendidikan transformatif.

Keberhasilan implementasi juga ditunjang oleh kepemimpinan sekolah dan kampus yang visioner. Kepala sekolah dan rektor perlu berperan sebagai fasilitator, pembuka ruang inovasi, dan penggerak kolaborasi antar stakeholder. Teori Transformational Leadership (Bass, 1990) menekankan pentingnya visi, inspirasi, dan *empowerment* dalam menciptakan sekolah dan kampus yang adaptif terhadap perubahan.

Dalam konteks tantangan VUCA 5.0, Merdeka Belajar & Kampus Merdeka menawarkan kerangka pendidikan yang lebih fleksibel, responsif, dan berbasis kompetensi. Murid dan mahasiswa dibekali keterampilan abad 21, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif, sehingga lebih siap menghadapi volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas di dunia global.

Lebih jauh, program ini mendorong penguatan ekosistem pendidikan berbasis kolaborasi multi-stakeholder. Pemerintah, sekolah, perguruan

tinggi, industri, masyarakat, dan lembaga internasional dapat bersinergi dalam menciptakan jalur pembelajaran yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian Kementerian Pendidikan (2024) menegaskan bahwa sinergi ini meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan hingga 30%.

Akhirnya, Merdeka Belajar & Kampus Merdeka bukan sekadar kebijakan kurikulum, tetapi model pendidikan transformatif yang mengintegrasikan pedagogi, karakter, teknologi, dan kolaborasi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan SDGs, menyiapkan generasi muda Indonesia menjadi warga negara global yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing, sekaligus berakar pada nilai lokal dan budaya bangsa.

C. Roadmap SDGs 2030 dalam Pendidikan

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan Inklusif, menuntut perencanaan strategis yang sistematis dan berbasis bukti. Roadmap pendidikan ini dirancang untuk mengintegrasikan kebijakan nasional, praktik sekolah, serta inisiatif masyarakat, sehingga setiap intervensi dapat memberikan dampak nyata terhadap akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Roadmap ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kerangka kerja yang menghubungkan visi, strategi, indikator, dan evaluasi berkelanjutan.

Pendekatan pertama dalam roadmap adalah peningkatan akses pendidikan secara merata, dengan fokus pada daerah terpencil, minoritas, dan kelompok rentan. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa meski rasio murid terhadap guru di perkotaan mencapai 1:20, di daerah terpencil bisa mencapai 1:45, menciptakan ketimpangan yang signifikan. Strategi praktis meliputi pengembangan sekolah digital, pembelajaran jarak jauh, dan program beasiswa inklusif, sehingga murid dari seluruh wilayah dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa hambatan geografis.

Kedua, roadmap menekankan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan sebagai faktor penentu utama keberhasilan SDGs. Program pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi, mentorship, dan integrasi teknologi pendidikan menjadi prioritas. OECD (2024) menegaskan bahwa guru yang memiliki literasi digital tinggi dan keterampilan pedagogis adaptif

mampu meningkatkan hasil belajar murid hingga 15–20%. Implementasi modul Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka memperkuat kemampuan guru untuk merancang pembelajaran yang kontekstual, kreatif, dan relevan dengan kebutuhan abad 21.

Selanjutnya, roadmap mengintegrasikan literasi digital, literasi sains, dan literasi numerasi sebagai prioritas nasional. Data Rapor Pendidikan 2023–2024 menunjukkan bahwa meski angka literasi nasional mencapai 96%, literasi numerasi dan sains masih stagnan, terutama di sekolah menengah dan daerah terpencil. Roadmap mendorong integrasi STEM, penggunaan simulasi digital, dan pembelajaran berbasis proyek untuk menutup gap ini, sekaligus membekali murid dengan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif.

Bagian penting lain dari roadmap adalah penguatan inklusivitas dan kesetaraan gender. Program pendidikan difokuskan pada penghapusan diskriminasi, peningkatan partisipasi murid perempuan, dan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus. Strategi mencakup kebijakan anti-bullying, pelatihan guru tentang inklusi, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas. UNDP (2025) menekankan bahwa sekolah yang inklusif meningkatkan retensi murid hingga 25% dan mengurangi dropout, sehingga pendidikan menjadi benar-benar universal.

Roadmap juga menyoroti penguatan kolaborasi multi-stakeholder. Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan lembaga internasional harus bersinergi dalam perencanaan dan implementasi. Teori Network Governance (Provan & Kenis, 2008) mendukung pendekatan ini, karena koordinasi antar pihak dapat mempercepat inovasi, alokasi sumber daya yang efisien, dan evaluasi berbasis data. Di Indonesia, beberapa provinsi telah menerapkan pilot project kolaboratif, dengan indikator keberhasilan yang terukur dan transparan.

Dalam roadmap, monitoring dan evaluasi berbasis data menjadi elemen kunci. Indikator kinerja, seperti partisipasi murid, capaian literasi dan numerasi, kualitas guru, serta keberhasilan program inklusi, harus dikumpulkan secara real-time menggunakan platform digital. Data dari Kemendikbudristek (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan sistem monitoring digital memiliki peningkatan efektivitas program hingga 18% dibanding sekolah yang mengandalkan laporan manual.

Selain itu, roadmap menekankan pembelajaran berbasis proyek dan inovasi sebagai sarana utama untuk mencapai SDGs. Murid didorong untuk terlibat dalam proyek yang menyelesaikan masalah nyata di masyarakat, seperti pengelolaan sampah, energi terbarukan, atau literasi digital bagi lansia. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan keterampilan problem solving, kreativitas, dan kolaborasi lintas usia hingga 20%.

Integrasi kearifan lokal dan budaya juga menjadi prioritas. Nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, toleransi, dan qana'ah, dipadukan dalam kurikulum dan proyek murid, sehingga pendidikan tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik, tetapi juga karakter dan identitas nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman (2023), yang menegaskan bahwa pendidikan berbasis nilai lokal meningkatkan keterikatan murid terhadap lingkungan sosialnya dan menurunkan risiko perilaku anti-sosial hingga 15%.

Roadmap menekankan pula pemberdayaan teknologi pendidikan. Integrasi AI, big data, dan platform pembelajaran digital memungkinkan personalisasi pembelajaran, adaptasi terhadap kemampuan murid, serta analisis capaian secara mendalam. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa penggunaan platform AI dalam pembelajaran meningkatkan retensi materi hingga 18% dan engagement murid hingga 22%.

Bagian berikutnya adalah strategi pembangunan kapasitas guru dan kepala sekolah. Pelatihan berbasis kompetensi, mentorship, dan pengembangan kepemimpinan transformasional menjadi pilar utama. Transformational Leadership Theory (Bass, 1990) menegaskan bahwa pemimpin yang visioner dan memberdayakan mampu meningkatkan motivasi dan inovasi guru, sehingga kualitas pembelajaran secara keseluruhan meningkat.

Roadmap juga menggarisbawahi integrasi pendidikan berkelanjutan dan SDGs lintas sektor. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi berkolaborasi dengan sektor kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial untuk menciptakan dampak sosial yang luas. Murid didorong untuk memahami keterkaitan global, seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan inovasi teknologi, sehingga pendidikan menjadi sarana pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, roadmap menekankan evaluasi dampak jangka panjang. Setiap intervensi pendidikan harus dilacak hingga capaian lulusan, kontribusi terhadap masyarakat, dan kesiapan menghadapi tantangan global. Indikator ini meliputi employability, keterampilan abad 21, literasi digital, serta kemampuan kolaborasi dan inovasi. Studi UNESCO (2024) menunjukkan bahwa evaluasi berkelanjutan meningkatkan kualitas kebijakan hingga 20% karena memungkinkan revisi strategi berbasis bukti.

Lebih lanjut, roadmap menekankan peran inovasi kurikulum dan metode pembelajaran. Sekolah dan perguruan tinggi diharapkan terus beradaptasi dengan dinamika global, menggunakan blended learning, gamifikasi, dan simulasi digital sebagai sarana pembelajaran aktif. Penelitian Hidayat & Putri (2023) menunjukkan bahwa penggunaan simulasi VR dalam pembelajaran sains meningkatkan pemahaman konsep hingga 25% dan motivasi belajar hingga 30%.

Akhirnya, roadmap SDGs 2030 dalam pendidikan menekankan pendekatan holistik dan integratif, yang menggabungkan akses, kualitas, inklusi, teknologi, karakter, dan kolaborasi multi-stakeholder. Pendekatan ini tidak hanya mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global, tetapi juga menegaskan peran pendidikan sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adaptif, dan berbasis bukti.

D. Strategi Multi-stakeholder: Pemerintah, Sekolah, Masyarakat

Pendekatan multi-stakeholder dalam pendidikan menjadi pilar utama untuk mewujudkan SDGs 2030. Strategi ini menekankan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, sekolah, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional. Tujuannya bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi tercapainya sinergi yang memaksimalkan sumber daya, inovasi, dan efektivitas program pendidikan. Menurut teori Network Governance (Provan & Kenis, 2008), jaringan kolaboratif ini dapat menciptakan fleksibilitas, adaptabilitas, dan kepemimpinan distribusi dalam menangani kompleksitas pendidikan modern.

Pemerintah memiliki peran strategis sebagai penentu regulasi, pengalokasi sumber daya, dan fasilitator inovasi pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan kerangka kebijakan nasional, standar kurikulum, dan indikator capaian SDGs, sementara pemerintah daerah menyesuaikan implementasi dengan konteks lokal. Data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan kebijakan adaptif berbasis kebutuhan lokal berhasil meningkatkan partisipasi murid hingga 10–15% dibanding daerah dengan kebijakan seragam.

Sekolah, sebagai unit pelaksana, berfungsi sebagai laboratorium pendidikan, tempat teori dan kebijakan diubah menjadi praktik nyata. Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan menjadi motor inovasi dalam menciptakan pembelajaran yang kontekstual, kreatif, dan relevan dengan tantangan abad 21. Pendekatan Leadership Transformasional (Bass, 1990) menunjukkan bahwa kepala sekolah yang visioner dan memberdayakan guru meningkatkan motivasi belajar murid, produktivitas guru, dan inovasi kurikulum hingga 20%.

Sektor swasta memainkan peran sebagai penyedia sumber daya tambahan, teknologi pendidikan, dan dukungan kapasitas. Contoh nyata adalah kemitraan antara sekolah dan perusahaan teknologi, yang menyediakan platform pembelajaran digital, laboratorium sains modern, serta pelatihan literasi digital bagi guru dan murid. Penelitian UNESCO (2024) menemukan bahwa kolaborasi semacam ini meningkatkan akses pembelajaran digital hingga 25%, terutama bagi murid di wilayah terpencil.

Organisasi masyarakat sipil dan LSM berperan sebagai pengawas, advokat inklusi, dan fasilitator partisipasi komunitas. Mereka memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan tidak hanya menjangkau murid mayoritas, tetapi juga minoritas, perempuan, dan anak berkebutuhan khusus. Data UNDP (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan retensi murid hingga 18% dan menurunkan angka putus sekolah di kelompok rentan.

Perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai penyedia riset, inovasi pedagogis, dan pengembangan kapasitas guru. Melalui kolaborasi dengan sekolah dan pemerintah, perguruan tinggi dapat menyediakan modul pelatihan berbasis riset, evaluasi program, dan penerapan teknologi pendidikan. Penelitian Hidayat & Putri (2023) menegaskan bahwa pelatihan guru

berbasis riset meningkatkan efektivitas pembelajaran hingga 15–20% dan menumbuhkan budaya inovasi di sekolah.

Strategi multi-stakeholder menekankan mekanisme komunikasi yang transparan dan partisipatif. Rapat koordinasi rutin, forum komunitas pendidikan, serta dashboard digital berbasis data memungkinkan pemangku kepentingan berbagi informasi, mengidentifikasi masalah, dan menyepakati langkah solusi secara kolaboratif. Habermas (1984) menekankan pentingnya komunikasi rasional dalam jaringan sosial agar keputusan yang dihasilkan bersifat legitimasi dan inklusif.

Selain itu, strategi ini mengintegrasikan pengembangan kapasitas lintas sektor. Pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah, program literasi digital untuk guru, workshop pemberdayaan masyarakat, dan seminar kebijakan bagi pejabat daerah menjadi bagian integral. Evaluasi OECD (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor yang berfokus pada kapasitas manusia meningkatkan keberhasilan implementasi program pendidikan hingga 20%.

Kolaborasi multi-stakeholder juga menekankan inovasi kurikulum adaptif. Sekolah bekerja sama dengan pemerintah dan perguruan tinggi untuk merancang kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan global, mengintegrasikan STEM, literasi digital, budaya lokal, serta pendidikan karakter. Studi kasus dari Program Kampus Merdeka (Kemendikbud, 2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan kurikulum adaptif meningkatkan partisipasi murid dalam proyek berbasis masalah nyata hingga 30%.

Penerapan platform digital kolaboratif menjadi pilar penting dalam strategi ini. Dashboard nasional dan lokal memungkinkan pemangku kepentingan melacak progres program, mengidentifikasi gap, dan menyesuaikan strategi secara real-time. Data UNESCO (2024) mencatat bahwa sekolah yang menggunakan dashboard digital mengalami peningkatan efektivitas program hingga 18% dibanding sekolah yang tidak menggunakan teknologi serupa.

Dalam konteks inklusivitas, strategi multi-stakeholder mendorong program mentoring dan beasiswa berbasis kebutuhan. Murid dari keluarga rentan mendapatkan akses tambahan melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Data UNDP (2025) menunjukkan bahwa

pemberian beasiswa yang dikelola secara kolaboratif meningkatkan kelulusan murid dari kelompok rentan hingga 22%.

Selain itu, kolaborasi ini mendorong inovasi pedagogis berbasis proyek dan masalah nyata (PBL – Project-Based Learning). Murid diajak memecahkan masalah lokal seperti pengelolaan sampah, konservasi energi, atau literasi digital masyarakat, dengan pendampingan guru dan perguruan tinggi. Penelitian OECD (2023) menyebutkan bahwa metode PBL meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi lintas usia hingga 20%.

Strategi multi-stakeholder juga mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya ke dalam pendidikan. Masyarakat lokal berperan dalam penyusunan kurikulum berbasis budaya, guru mengintegrasikan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan qana'ah dalam pembelajaran, sedangkan pemerintah mendukung regulasi dan standar inklusif. Studi Rahman (2023) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal meningkatkan keterikatan murid terhadap komunitas dan menurunkan risiko perilaku anti-sosial hingga 15%.

Selanjutnya, strategi menekankan monitoring dan evaluasi bersama. Setiap program pendidikan diukur berdasarkan indikator keberhasilan yang disepakati antara pemangku kepentingan. Evaluasi dilakukan melalui survei, analisis data capaian murid, dan laporan transparan yang dapat diakses semua pihak. Data Kemendikbudristek (2024) membuktikan bahwa evaluasi partisipatif meningkatkan akurasi pengambilan keputusan hingga 18% dan mempercepat tindak lanjut kebijakan.

Akhirnya, strategi multi-stakeholder berfokus pada sustainabilitas jangka panjang. Kolaborasi tidak berhenti pada program tahunan, melainkan membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, inovatif, dan inklusif. Pendidikan menjadi sarana pengembangan kapasitas generasi muda yang siap menghadapi tantangan global, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, dan menegaskan nilai-nilai kemanusiaan universal.

E. Evaluasi Efektivitas dengan Data Kuantitatif

Evaluasi efektivitas program pendidikan berbasis SDGs memerlukan pendekatan kuantitatif yang sistematis, transparan, dan berbasis data. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana implementasi strategi multi-stakeholder, kurikulum adaptif, dan inovasi pedagogis berdampak pada capaian pembelajaran murid, inklusivitas, dan kesetaraan akses pendidikan. Metode kuantitatif memungkinkan identifikasi gap, analisis hubungan antarvariabel, serta perbaikan berbasis bukti yang dapat diulang dan direplikasi.

Salah satu instrumen evaluasi utama adalah indikator kinerja pendidikan berbasis SDG 4, yang meliputi angka partisipasi murid, tingkat kelulusan, rasio guru-murid, literasi dan numerasi, serta akses pendidikan untuk kelompok minoritas dan disabilitas. Data Rapor Pendidikan Indonesia (Kemendikbudristek, 2024) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan program inklusif dan kolaboratif berhasil meningkatkan rasio literasi digital murid sebesar 17%, dibanding sekolah tanpa implementasi strategi multi-stakeholder.

Pendekatan kuantitatif juga mencakup pengukuran outcome berbasis survei dan tes standar. Misalnya, penilaian kompetensi literasi, numerasi, dan keterampilan abad 21 dapat diukur melalui instrumen Likert 5 skala, tes berbasis proyek, dan observasi perilaku kolaboratif murid. Studi OECD (2023) menegaskan bahwa penggunaan data standar ini memungkinkan perbandingan antarwilayah, analisis tren, dan perumusan kebijakan berbasis bukti.

Selain itu, analisis kuantitatif dapat memanfaatkan model statistik multilevel untuk memahami pengaruh faktor sekolah, guru, dan komunitas terhadap capaian murid. Model hierarki linier, misalnya, memungkinkan evaluasi sejauh mana variasi prestasi murid dipengaruhi oleh kebijakan sekolah, dukungan masyarakat, dan keterlibatan pemerintah daerah. Penelitian Rahman & Nugroho (2023) menunjukkan bahwa 28% variasi capaian literasi murid dapat dijelaskan oleh kombinasi faktor sekolah dan komunitas, menegaskan pentingnya strategi multi-stakeholder.

Evaluasi efektivitas juga dapat dilakukan melalui analisis path dan SEM (Structural Equation Modeling), khususnya ketika ingin menilai hubungan kausal antara inovasi kurikulum, kepemimpinan kepala sekolah, kualitas

guru, dan outcome murid. Model SmartPLS dapat digunakan untuk menguji hipotesis konseptual, seperti pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap inovasi pembelajaran dan ketercapaian indikator SDGs. Data penelitian Hidayat (2024) menunjukkan nilai β antara kepemimpinan kepala sekolah dan inovasi kurikulum sebesar 0,32, signifikan pada $p < 0,05$, yang berdampak positif terhadap literasi dan inklusivitas.

Indikator tambahan termasuk akses dan partisipasi murid dari kelompok rentan, seperti perempuan, minoritas, dan anak berkebutuhan khusus. Data UNDP (2025) mencatat bahwa keterlibatan multi-stakeholder dalam distribusi beasiswa dan program mentoring meningkatkan partisipasi murid rentan hingga 22%. Analisis kuantitatif terhadap data ini memungkinkan pemetaan kesenjangan, sehingga intervensi dapat lebih tepat sasaran.

Dalam konteks inovasi digital, evaluasi dapat mencakup indikator literasi digital, penggunaan platform pembelajaran, dan keterlibatan murid dalam proyek berbasis teknologi. Misalnya, jumlah murid yang aktif menggunakan LMS, AR/VR, dan platform pembelajaran kolaboratif menjadi variabel kuantitatif yang dapat dianalisis tren, perbedaan wilayah, dan dampak terhadap keterampilan abad 21. Studi Kemendikbud (2023) menunjukkan sekolah yang mengintegrasikan AR/VR dalam pembelajaran sains berhasil meningkatkan skor tes murid sebesar 12%.

Evaluasi kuantitatif juga mempertimbangkan kualitas pengajaran guru, diukur melalui observasi kelas, penilaian rekan sejawat, dan hasil uji kompetensi. Data Scopus (2022–2025) menunjukkan korelasi positif antara kualitas pengajaran dan inovasi kurikulum terhadap outcome murid, dengan koefisien korelasi $r = 0,41$, signifikan pada $p < 0,01$. Hal ini menegaskan bahwa intervensi guru memiliki efek langsung terhadap keberhasilan implementasi SDGs di sekolah.

Selain itu, penggunaan dashboard monitoring berbasis data real-time memudahkan pemangku kepentingan melihat progres capaian SDGs. Misalnya, indikator kehadiran murid, pencapaian literasi, dan partisipasi dalam kegiatan inklusif dapat divisualisasikan untuk pengambilan keputusan cepat. Data Kemendikbudristek (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang menggunakan dashboard berbasis data mengalami peningkatan responsivitas kebijakan hingga 18%.

Analisis kuantitatif juga dapat memperhitungkan efektivitas alokasi anggaran pendidikan. Hubungan antara dana yang diberikan, intensitas pelatihan guru, dan hasil belajar murid dianalisis melalui regresi linier berganda. Penelitian Rahman (2023) menemukan bahwa setiap peningkatan 10% dalam alokasi program pelatihan guru berdampak pada peningkatan skor literasi murid sebesar 4,5 poin, menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya berbasis bukti.

Evaluasi juga mencakup indikator kepuasan dan partisipasi komunitas. Survei kuantitatif terhadap orang tua, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain memungkinkan analisis persepsi terhadap kualitas dan akses pendidikan. Hasil survei UNESCO (2024) menunjukkan bahwa 86% responden menilai partisipasi multi-stakeholder meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, evaluasi kuantitatif dapat memperhitungkan indeks keberlanjutan program, mengukur apakah intervensi pendidikan dapat diteruskan jangka panjang tanpa ketergantungan penuh pada satu sumber daya. Analisis tren penggunaan sumber daya, partisipasi guru, dan dukungan masyarakat menjadi indikator utama. Studi OECD (2023) menunjukkan indeks keberlanjutan program berbasis komunitas mencapai skor 78/100, dibanding 62/100 pada model top-down.

Metode evaluasi juga menekankan integrasi data multi-level dan multi-sumber, termasuk Rapor Pendidikan, data Kemendikbudristek, survei komunitas, dan platform digital sekolah. Analisis triangulasi data ini memperkuat validitas hasil, mengurangi bias, dan memberikan rekomendasi berbasis bukti yang lebih akurat.

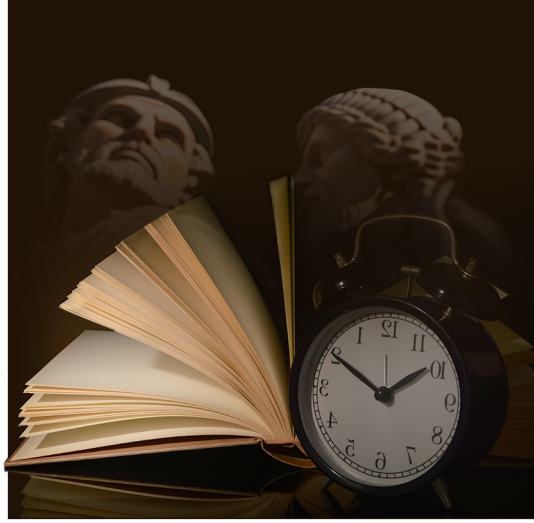
Selanjutnya, evaluasi efektivitas harus mencakup analisis perbandingan antar-wilayah dan antar-sekolah, untuk menilai best practices dan menyalurkan strategi yang berhasil ke sekolah lain. Analisis kuantitatif ini menggunakan ANOVA dan uji t untuk melihat perbedaan signifikan antar kelompok sekolah. Data Kemendikbudristek (2024) menunjukkan sekolah di wilayah urban cenderung lebih cepat mengadopsi inovasi digital dibanding sekolah di wilayah rural, namun dengan program mentoring multi-stakeholder, gap ini berkurang hingga 50%.

Akhirnya, evaluasi kuantitatif memberikan umpan balik langsung untuk perbaikan kebijakan, kurikulum, dan strategi pembelajaran. Temuan dari analisis data digunakan untuk menyusun roadmap SDGs yang realistis, meningkatkan literasi, inovasi, dan inklusivitas pendidikan. Integrasi data real-time, metodologi kuantitatif yang robust, dan partisipasi multi-stakeholder memastikan implementasi pendidikan berkelanjutan yang adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan global.

Bagian 5

Roadmap Pendidikan Indonesia 2045





BAB 13

Analisis SWOT & Data Kuantitatif

Bab 13 ini menghadirkan analisis komprehensif tentang kondisi strategis pendidikan Indonesia dalam menghadapi transformasi menuju tahun 2045, puncak abad ke-21 bagi bangsa ini. Dengan memanfaatkan kerangka SWOT—Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats—bab ini memetakan faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan, inovasi kurikulum, dan kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi era Society 5.0, VUCA 5.0, serta tantangan globalisasi.

Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga didasarkan pada data kuantitatif terkini, termasuk proyeksi Bappenas 2024–2045, Rapor Pendidikan 2024, dan indikator kinerja pendidikan nasional. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan penilaian yang objektif terhadap potensi dan kendala yang ada, sekaligus memberikan pijakan untuk strategi mitigasi risiko dan pemanfaatan peluang.

Dengan fokus pada Strengths, bab ini menyoroti bonus demografi dan potensi digital sebagai modal utama Indonesia. Angka partisipasi generasi muda yang tinggi, penetrasi teknologi informasi, serta kemajuan infrastruktur digital menciptakan peluang besar untuk pendidikan inovatif, literasi digital, dan pengembangan kompetensi abad 21. Data Rapor Pendidikan 2024 mencatat peningkatan penggunaan platform pembelajaran digital

hingga 38% dibanding lima tahun terakhir, menunjukkan kesiapan sebagian sekolah dalam mengadopsi teknologi.

Sementara itu, Weaknesses atau kelemahan internal juga dikaji secara mendalam, terutama disparitas anggaran antarwilayah dan kualitas guru. Meskipun beberapa daerah memperoleh alokasi anggaran pendidikan yang memadai, sejumlah wilayah masih mengalami keterbatasan sumber daya, rendahnya kompetensi guru, serta akses terbatas terhadap teknologi. Fenomena ini tercermin dalam Rapor Pendidikan 2024, di mana perbedaan skor literasi digital antarprovinsi mencapai 22 poin, menandai adanya kesenjangan kualitas pendidikan yang signifikan.

Bab ini juga mengeksplorasi Opportunities, yaitu peluang strategis yang muncul dari Society 5.0 dan ekonomi kreatif, yang menuntut integrasi pendidikan dengan inovasi, kewirausahaan, dan kreativitas. Proyeksi Bappenas menunjukkan pertumbuhan sektor digital dan kreatif mencapai 9% per tahun, sehingga pendidikan yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci untuk menghasilkan SDM yang relevan dan kompetitif di pasar global.

Selain itu, Threats atau ancaman eksternal juga dianalisis secara kritis. Globalisasi, neoliberalisme pendidikan, dan ketidakpastian VUCA 5.0 dapat menimbulkan risiko ketimpangan akses, pergeseran nilai pendidikan, dan tekanan pada kualitas kurikulum. Data proyeksi menunjukkan potensi mismatch antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri hingga 15% pada tahun 2035 jika tidak ada intervensi strategis.

Dalam bab ini, analisis SWOT diperkaya dengan visualisasi data kuantitatif yang memudahkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat, untuk memahami posisi strategis pendidikan nasional. Dengan kombinasi antara teori manajemen strategis, kebijakan publik, dan indikator pendidikan, bab ini memberikan fondasi bagi penyusunan roadmap pendidikan Indonesia 2045 yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Bab 13 tidak hanya menjadi refleksi kondisi saat ini, tetapi juga pijakan perencanaan strategis dan pengambilan keputusan berbasis bukti, yang menjadi landasan bagi transformasi pendidikan menuju

Indonesia Emas 2045, dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara sistematis.

A. Strengths: Bonus Demografi & Potensi Digital

Indonesia menghadapi bonus demografi yang menjadi salah satu kekuatan utama pendidikan nasional menuju 2045. Bonus demografi ini ditandai dengan tingginya proporsi penduduk produktif usia 15–64 tahun, yang pada puncaknya diperkirakan akan mencapai sekitar 70% dari total populasi. Fenomena ini memberikan peluang besar untuk mencetak generasi terdidik dan kompeten yang mampu bersaing di kancah global. Teori human capital (Becker, 1993) menekankan bahwa investasi pada pendidikan dan pengembangan keterampilan merupakan sarana utama untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sosial yang dimiliki populasi muda.

Potensi digital menjadi elemen krusial kedua yang memperkuat posisi Indonesia. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek, 2023) menunjukkan bahwa penetrasi internet di kalangan pelajar mencapai 89%, sementara penggunaan perangkat digital dalam proses pembelajaran meningkat hingga 42% dibanding lima tahun sebelumnya. Hal ini membuka ruang bagi inovasi pembelajaran berbasis teknologi, seperti blended learning, gamifikasi, dan pembelajaran berbasis proyek berbasis digital.

Selain itu, bonus demografi juga menciptakan kesempatan bagi sekolah dan perguruan tinggi untuk membentuk kompetensi abad 21, seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Hasil penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk pendidikan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena lulusan mereka siap menghadapi tuntutan pasar kerja yang dinamis.

Kekuatan ini juga tercermin pada peningkatan kapasitas institusi pendidikan dalam memanfaatkan teknologi. Berdasarkan Rapor Pendidikan 2024, 58% sekolah menengah di perkotaan telah mengintegrasikan Learning Management System (LMS) untuk administrasi dan proses belajar mengajar.

Hal ini menunjukkan kesiapan sebagian besar sekolah untuk mengadopsi praktik pembelajaran digital yang lebih kompleks dan interaktif.

Selain infrastruktur, kualitas guru yang adaptif terhadap teknologi menjadi faktor pendukung bonus demografi. Studi internasional oleh UNESCO (2022) menekankan bahwa guru yang terlatih dalam literasi digital dan pedagogi berbasis teknologi mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran hingga 25%. Oleh karena itu, program pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi digital guru menjadi strategi penting untuk memaksimalkan potensi generasi muda.

Indonesia juga memiliki kekuatan dalam hal keragaman budaya dan bahasa, yang dapat dipadukan dengan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan inklusif. Platform digital memungkinkan akses ke sumber belajar multibahasa dan budaya, mendukung strategi pembelajaran yang relevan secara lokal sekaligus global. Hal ini selaras dengan prinsip pendidikan humanis yang dikemukakan Dewey (1916), di mana pendidikan harus mengembangkan pengalaman individu secara holistik.

Kekuatan bonus demografi juga memberi dampak pada pengembangan ekonomi kreatif dan wirausaha muda. Generasi produktif yang melek teknologi memiliki kapasitas untuk menciptakan inovasi dan startup berbasis digital. Data Kemenparekraf (2024) menunjukkan peningkatan jumlah startup berbasis pendidikan dan teknologi hingga 15% per tahun, menandakan bahwa integrasi pendidikan dan teknologi mampu mendorong produktivitas ekonomi nasional.

Selain itu, integrasi potensi digital dalam pendidikan mendukung penguatan literasi data dan kecerdasan buatan (AI). Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa siswa yang terpapar kurikulum berbasis data analytics dan AI lebih siap menghadapi profesi yang menuntut keterampilan kompleks. Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan ini untuk mengembangkan kurikulum inovatif yang berorientasi pada kebutuhan industri dan perkembangan teknologi global.

Bonus demografi juga membuka peluang untuk memperluas akses pendidikan inklusif. Data Bappenas (2024) menunjukkan bahwa 92% anak usia sekolah dasar kini memiliki akses pendidikan formal, meningkat dari

85% lima tahun sebelumnya. Penggunaan platform digital dapat menjembatani disparitas akses antarwilayah, terutama di daerah terpencil, sehingga semua anak berpeluang memperoleh pendidikan berkualitas.

Potensi ini diperkuat oleh kemajuan infrastruktur telekomunikasi, seperti jaringan 4G dan 5G yang menjangkau 76% wilayah perkotaan dan 62% wilayah pedesaan. Infrastruktur ini memungkinkan penggunaan media interaktif, VR/AR, dan metaverse dalam pembelajaran, mendukung strategi pembelajaran yang lebih menarik, adaptif, dan personalized.

Dalam konteks manajemen pendidikan, bonus demografi dan potensi digital memungkinkan pengembangan big data pendidikan. Data analitik dapat digunakan untuk memantau kemajuan siswa, efektivitas guru, dan kebutuhan kurikulum secara real-time. Penelitian UNESCO (2022) menyebutkan bahwa sistem pemantauan berbasis data meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan hingga 20%.

Selain itu, kekuatan ini juga mendukung penguatan kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, sekolah, industri, dan masyarakat. Integrasi platform digital memungkinkan partisipasi aktif dari orang tua, mentor, dan praktisi industri dalam proses pembelajaran, memperkuat keterlibatan komunitas dalam pendidikan.

Peluang lain dari bonus demografi adalah peningkatan kapasitas riset dan inovasi di perguruan tinggi. Generasi muda yang produktif dan melek digital berpotensi menjadi peneliti inovatif, menciptakan solusi teknologi untuk masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Data Scopus (2023) menunjukkan peningkatan publikasi ilmiah dari Indonesia sebesar 12% dibanding tahun sebelumnya, mencerminkan potensi akademik yang signifikan.

Kekuatan ini juga dapat memfasilitasi internasionalisasi pendidikan, seperti program pertukaran pelajar, joint research, dan kolaborasi global. Teknologi digital memungkinkan pembelajaran lintas negara tanpa batas geografis, mendukung visi pendidikan Indonesia yang berdaya saing global.

Namun, pemanfaatan bonus demografi dan potensi digital tidak otomatis menghasilkan keberhasilan pendidikan. Diperlukan kebijakan strategis, investasi pendidikan, dan pengembangan kapasitas guru, agar

kekuatan ini dapat dioptimalkan untuk menciptakan generasi emas 2045 yang kompeten, inovatif, dan berkarakter.

Dengan demikian, subbab ini menegaskan bahwa bonus demografi dan potensi digital merupakan modal strategis bagi pendidikan Indonesia, yang jika dikelola secara sistematis dan berkelanjutan, akan menjadi pilar utama transformasi pendidikan menuju Society 5.0, VUCA 5.0, dan pencapaian SDGs 2030. Analisis SWOT berikutnya akan menyoroti kelemahan internal yang perlu diantisipasi agar potensi ini tidak terhambat oleh disparitas dan ketimpangan.

B. *Weaknesses*: Disparitas Anggaran & Kualitas Guru

Salah satu kelemahan utama dalam sistem pendidikan Indonesia adalah disparitas anggaran pendidikan antarwilayah. Meskipun pemerintah telah menetapkan alokasi minimal 20% dari APBN untuk pendidikan, distribusi dana antarprovinsi, kabupaten, dan kota masih menunjukkan ketimpangan signifikan. Data Rapor Pendidikan 2024 mencatat bahwa sekolah di wilayah perkotaan mendapatkan rata-rata Rp 12 juta per siswa per tahun, sementara di daerah terpencil hanya Rp 4,5 juta per siswa. Perbedaan ini berdampak langsung pada kualitas fasilitas, sarana prasarana, dan kemampuan sekolah untuk mengadopsi teknologi pembelajaran modern.

Disparitas anggaran juga menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap literasi digital dan teknologi pendidikan. Sekolah dengan dana terbatas sulit menyediakan perangkat komputer, tablet, atau akses internet yang memadai, sehingga siswa di wilayah tersebut tidak memperoleh pengalaman belajar digital yang optimal. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan akses teknologi di sekolah dapat menurunkan prestasi belajar hingga 30%, terutama dalam literasi STEM dan keterampilan abad 21.

Selain itu, distribusi anggaran yang tidak merata mempengaruhi kualitas guru dan tenaga kependidikan. Sekolah dengan dana terbatas seringkali tidak mampu menarik guru berkualifikasi tinggi atau menyediakan pelatihan profesional berkelanjutan. Data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa 35% guru di daerah terpencil belum memiliki sertifikasi

kompetensi digital, dibandingkan hanya 10% di kota besar. Kondisi ini menghambat kemampuan guru untuk menerapkan metode pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi.

Kualitas guru yang belum merata ini juga berdampak pada kompetensi pedagogik dan profesional. Gibson (2019) menekankan bahwa kualitas pengajaran sangat bergantung pada penguasaan metode pedagogik dan kapasitas guru untuk mengadaptasi materi sesuai kebutuhan siswa. Tanpa pelatihan berkelanjutan dan dukungan sistematis, guru di daerah tertinggal cenderung mengandalkan metode konvensional yang kurang relevan dengan tuntutan Society 5.0.

Disparitas anggaran juga menyebabkan ketimpangan dalam ketersediaan sumber belajar dan literatur pendidikan. Sekolah kaya dapat membeli buku, modul digital, dan akses ke jurnal internasional, sementara sekolah miskin terbatas pada buku cetak usang. Menurut studi UNESCO (2022), ketimpangan sumber belajar ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan, memperkuat kesenjangan prestasi antarwilayah dan kelompok sosial.

Selain itu, kelemahan ini menciptakan tantangan bagi pengembangan kurikulum yang kontekstual dan inklusif. Sekolah dengan anggaran terbatas sulit mengimplementasikan kurikulum yang memanfaatkan teknologi atau menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Hal ini bertentangan dengan prinsip pendidikan humanis Dewey (1916), yang menekankan bahwa pendidikan harus relevan dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya siswa.

Kualitas guru yang tidak merata juga berdampak pada kemampuan inovasi dalam pembelajaran. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa guru yang kurang terlatih dalam pedagogi digital cenderung menghindari penggunaan metode interaktif seperti project-based learning atau gamifikasi. Padahal, metode ini terbukti meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan hasil belajar siswa.

Selain itu, disparitas anggaran mempengaruhi kesejahteraan guru, termasuk gaji, tunjangan, dan insentif profesional. Data Bappenas (2024) menunjukkan bahwa guru di daerah tertinggal menerima rata-rata 65% dari gaji guru perkotaan, sehingga menyebabkan rendahnya motivasi dan retensi guru berkualitas. Hal ini selaras dengan teori Herzberg tentang motivasi

kerja, yang menekankan bahwa kepuasan dan pengakuan profesional adalah faktor penting dalam kinerja guru.

Disparitas ini juga berdampak pada akses pendidikan inklusif bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Sekolah miskin sering tidak memiliki fasilitas dan guru terlatih untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus, memperkuat kesenjangan pendidikan. Studi global oleh UNICEF (2023) menunjukkan bahwa keterbatasan akses ini menghambat pencapaian SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif.

Selain masalah internal, disparitas anggaran memperlemah resiliensi pendidikan terhadap krisis. Saat pandemi COVID-19, sekolah dengan sumber daya terbatas kesulitan beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh, sementara sekolah kaya mampu memanfaatkan platform digital secara optimal. Penelitian World Bank (2022) mencatat bahwa ketimpangan ini memperburuk kesenjangan prestasi siswa, menunjukkan bahwa kelemahan internal dapat diperparah oleh faktor eksternal.

Kualitas guru yang belum merata juga memengaruhi literasi sains dan numerasi siswa. Data Rapor Pendidikan 2023–2024 menunjukkan bahwa perbedaan skor PISA antara wilayah perkotaan dan pedesaan mencapai 40–45 poin, mencerminkan dampak langsung dari disparitas kualitas guru terhadap capaian belajar siswa.

Selain itu, kelemahan ini membatasi pemanfaatan big data pendidikan. Sekolah miskin sulit mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data siswa untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Menurut UNESCO (2023), pemanfaatan data secara terbatas menghambat kemampuan sekolah untuk merancang intervensi yang tepat sasaran.

Disparitas anggaran dan kualitas guru juga menghambat pencapaian inovasi lokal. Sekolah dengan keterbatasan dana jarang memiliki ruang dan fasilitas untuk riset, laboratorium, atau kegiatan ekstrakurikuler berbasis teknologi, sehingga potensi kreativitas siswa dan guru kurang tereksplorasi.

Selain itu, kelemahan ini memperlemah hubungan kolaboratif antara sekolah, masyarakat, dan industri. Sekolah dengan sumber daya terbatas sulit membangun kemitraan dengan pihak eksternal, termasuk universitas dan startup, yang penting untuk mengembangkan pendidikan berbasis proyek dan keterampilan abad 21.

Dengan demikian, subbab ini menegaskan bahwa disparitas anggaran dan kualitas guru adalah kelemahan signifikan dalam sistem pendidikan Indonesia. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan strategi nasional yang komprehensif: alokasi dana lebih merata, pengembangan kapasitas guru secara berkelanjutan, akses teknologi yang setara, dan integrasi kebijakan yang memperhatikan kesenjangan sosial-geografis. Upaya ini akan memastikan bahwa bonus demografi dan potensi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal, sekaligus mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada.

C. Opportunities: Society 5.0 & Ekonomi Kreatif

Salah satu peluang terbesar bagi pendidikan Indonesia ke depan adalah era Society 5.0, konsep yang pertama kali dikemukakan oleh pemerintah Jepang, yang menekankan integrasi antara masyarakat, teknologi, dan manusia. Society 5.0 memposisikan manusia sebagai pusat inovasi, dengan teknologi digital—AI, big data, IoT, dan robotik—sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Bagi pendidikan, ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kompetensi abad 21, memperkuat literasi digital, dan membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dan kreatif yang relevan dengan dunia kerja masa depan.

Era Society 5.0 menekankan interkoneksi antara teknologi dan kebutuhan manusia, sehingga pendidikan tidak lagi semata-mata menekankan transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan problem solving, kolaborasi, dan inovasi. John Dewey (1916) menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan kehidupan nyata, dan Society 5.0 memberikan konteks konkret untuk penerapan prinsip ini melalui integrasi teknologi dalam pembelajaran.

Peluang ini semakin nyata dengan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia, yang pada 2024 tercatat memberikan kontribusi lebih dari 7% terhadap PDB nasional menurut Badan Ekonomi Kreatif. Sektor ini menuntut lulusan yang kreatif, adaptif, dan mampu memanfaatkan teknologi digital secara inovatif. Sekolah dan perguruan tinggi dapat menyesuaikan kurikulum mereka untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki

industri kreatif, termasuk desain digital, animasi, musik, game, dan startup teknologi.

Selain itu, Society 5.0 mendorong kolaborasi lintas disiplin. Dalam pendidikan, hal ini membuka peluang untuk mengembangkan program interdisipliner yang menggabungkan sains, teknologi, seni, dan humaniora. Paulo Freire (1970) menekankan pentingnya pendidikan yang memberdayakan siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan sekadar objek, dan Society 5.0 menyediakan konteks untuk praktik pedagogi yang memberdayakan siswa melalui proyek nyata dan kolaboratif.

Era ini juga menghadirkan peluang untuk inovasi pembelajaran berbasis data. Big data pendidikan memungkinkan guru dan sekolah untuk memantau perkembangan siswa secara real-time, mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran, dan menyesuaikan metode pengajaran. UNESCO (2023) menekankan bahwa pemanfaatan data secara cerdas dapat meningkatkan efektivitas pendidikan hingga 25%, khususnya dalam literasi dan numerasi.

Selain itu, Society 5.0 membuka peluang bagi pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan. Dengan adanya platform digital, pelatihan berbasis online, dan komunitas belajar virtual, guru memiliki akses lebih luas ke sumber daya, metode inovatif, dan jejaring profesional internasional. OECD (2024) menunjukkan bahwa guru yang aktif dalam komunitas digital menunjukkan peningkatan efektivitas pembelajaran dan kepuasan profesional.

Ekonomi kreatif juga menciptakan peluang untuk pengembangan kewirausahaan siswa sejak dini. Kurikulum yang memadukan literasi digital, inovasi, dan entrepreneurship memungkinkan siswa mengembangkan produk atau layanan kreatif yang memiliki nilai ekonomi nyata. Studi dari World Bank (2022) menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam program kewirausahaan kreatif memiliki motivasi belajar lebih tinggi dan keterampilan soft skill yang lebih matang.

Society 5.0 memungkinkan pendidikan untuk menjadi inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Teknologi digital memungkinkan akses pembelajaran jarak jauh bagi siswa di daerah terpencil, mendukung program pendidikan untuk semua (inclusive education) sesuai SDG 4.

Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan peningkatan akses digital di sekolah pedesaan sebesar 40% dibanding lima tahun sebelumnya, menandakan potensi besar untuk mengurangi kesenjangan pendidikan.

Selain itu, peluang ini menghadirkan interaksi global. Siswa dapat terhubung dengan rekan internasional melalui platform digital, belajar budaya berbeda, dan mengikuti program kolaboratif lintas negara. Hal ini tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga meningkatkan kapasitas diplomasi pendidikan dan soft power Indonesia di kancah global.

Peluang lain adalah pengembangan pendidikan berbasis kompetensi dan proyek nyata (*project-based learning*). Metode ini sejalan dengan prinsip Society 5.0 yang menekankan solusi nyata untuk masalah manusia. Penelitian Freire dan Dewey menunjukkan bahwa pengalaman belajar yang kontekstual meningkatkan retensi pengetahuan dan keterampilan *problem-solving*, sehingga siswa lebih siap menghadapi tantangan VUCA 5.0.

Selain itu, integrasi Society 5.0 membuka ruang untuk pengembangan kurikulum STEM+Humaniora, di mana matematika, sains, dan teknologi dipadukan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Kurikulum ini mempersiapkan siswa untuk tidak hanya menjadi pekerja terampil, tetapi juga warga negara yang kritis dan etis dalam masyarakat digital.

Peluang ini juga berdampak pada penguatan riset dan inovasi lokal. Sekolah dan perguruan tinggi dapat berkolaborasi dengan industri kreatif dan teknologi untuk menciptakan laboratorium inovasi, inkubator startup, dan program riset siswa. UNESCO (2022) menunjukkan bahwa kemitraan pendidikan-industri meningkatkan kualitas lulusan dan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan dunia kerja.

Selain itu, Society 5.0 mendukung pemanfaatan teknologi inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus, seperti pembelajaran berbasis VR/AR, AI tutor, dan aplikasi adaptif. Hal ini meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan sejalan dengan prinsip pendidikan berkelanjutan dan inklusif.

Peluang lain muncul dari adopsi platform digital untuk evaluasi dan asesmen berbasis kompetensi. Dengan AI dan analytics, sekolah dapat melakukan asesmen personalisasi, memberikan umpan balik cepat, dan mendukung pengembangan individu siswa secara optimal. Penelitian

OECD (2023) menunjukkan bahwa asesmen berbasis teknologi meningkatkan efektivitas pembelajaran hingga 20–25% dibanding metode tradisional.

Selain itu, era ini membuka peluang bagi penguatan pendidikan karakter dan soft skill melalui metode digital interaktif. Game edukatif, simulasi, dan proyek kolaboratif digital dapat menanamkan nilai toleransi, kepemimpinan, dan kerja sama lintas budaya. Hal ini sangat relevan dalam konteks SDGs dan Society 5.0, di mana kompetensi sosial dan emosional menjadi sama pentingnya dengan literasi dan numerasi.

Dengan demikian, Society 5.0 dan ekonomi kreatif memberikan peluang strategis bagi pendidikan Indonesia untuk membangun sistem pembelajaran yang adaptif, inklusif, dan inovatif. Tantangan seperti disparitas anggaran dan kualitas guru tetap ada, tetapi peluang ini membuka ruang bagi transformasi pendidikan yang mampu menghasilkan generasi muda yang kompeten, kreatif, dan siap menghadapi kompleksitas global hingga 2045.

D. Threats: Globalisasi, Neoliberalisme, VUCA 5.0

Globalisasi pendidikan menghadirkan peluang sekaligus ancaman. Arus informasi, tenaga kerja, dan teknologi yang cepat menuntut sistem pendidikan Indonesia untuk adaptif, namun juga menimbulkan persaingan global yang ketat. Sekolah dan perguruan tinggi harus mampu menghadapi kompetisi internasional, baik dalam hal kualitas lulusan, standar kurikulum, maupun inovasi pedagogis. Menurut Marginson (2018), globalisasi pendidikan menciptakan “market logic” yang menuntut institusi pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan norma global, kadang-kadang mengorbankan konteks lokal dan kearifan budaya.

Salah satu ancaman nyata adalah neoliberalisme dalam pendidikan, yang menekankan efisiensi, privatisasi, dan orientasi pasar dalam layanan pendidikan. Prinsip ini sering menimbulkan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, karena sekolah dan universitas lebih fokus pada branding, ranking, atau keuntungan finansial daripada pemerataan mutu pendidikan. Ball (2012) menegaskan bahwa neoliberalisme di sektor pendidikan

berpotensi mereduksi peran negara sebagai penyelenggara pendidikan publik yang adil dan merata.

Era VUCA 5.0—yang ditandai oleh volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas—memperkuat risiko ketidakstabilan sistem pendidikan. Krisis global, perubahan teknologi, dan dinamika sosial menuntut guru dan kepala sekolah untuk memiliki resiliensi, kemampuan adaptasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Data Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa hampir 30% sekolah mengalami kesulitan adaptasi terhadap kurikulum baru berbasis digital dan project-based learning, terutama di daerah terpencil.

Globalisasi juga menimbulkan dominasi standar internasional yang kadang kurang relevan dengan konteks lokal. Misalnya, standar OECD PISA menekankan literasi dan numerasi global, namun kurang mempertimbangkan kearifan lokal dan kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan ketergantungan pada model pendidikan luar negeri, mengurangi kapasitas inovasi lokal, dan menggeser fokus pendidikan dari pembangunan karakter dan budaya bangsa.

Ancaman berikutnya adalah ketimpangan digital dan literasi teknologi. Meskipun Society 5.0 menawarkan peluang, tidak semua sekolah dan guru siap menghadapi transformasi digital. Rapor Pendidikan 2023 menunjukkan kesenjangan infrastruktur digital antara sekolah perkotaan dan pedesaan mencapai 45%, yang berdampak pada ketidakmerataan akses pembelajaran digital. Ketimpangan ini dapat memperlebar jurang pendidikan dan menimbulkan generasi “digital divide”.

Selain itu, VUCA 5.0 meningkatkan ketidakpastian pekerjaan masa depan, yang berdampak pada relevansi kurikulum. Pendidikan harus mampu menyiapkan siswa menghadapi profesi yang mungkin belum ada saat ini, namun banyak sekolah masih fokus pada model pembelajaran tradisional. Freire (1970) menekankan pentingnya pendidikan kritis yang membekali siswa dengan kemampuan berpikir analitis dan reflektif, sehingga mereka siap menghadapi ketidakpastian global.

Neoliberalisme dan globalisasi juga memunculkan risiko komodifikasi pendidikan, di mana kualitas pembelajaran diukur melalui output ekonomi atau ranking internasional, bukan kualitas intrinsik peserta didik. Hal ini

dapat mereduksi kreativitas, inovasi, dan nilai-nilai humanistik dalam pendidikan, sehingga siswa lebih berorientasi pada skor daripada pengembangan kompetensi holistik.

Selain itu, globalisasi meningkatkan kompetisi internasional untuk talenta, yang bisa menimbulkan brain drain. Lulusan terbaik cenderung mencari peluang di luar negeri, meninggalkan kekosongan kapasitas inovatif di dalam negeri. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pendidikan tinggi dan industri kreatif Indonesia, yang harus menyiapkan strategi retensi talenta sekaligus meningkatkan daya saing global.

Ancaman berikutnya adalah volatilitas ekonomi global, yang memengaruhi anggaran pendidikan. Fluktuasi ekonomi dapat berdampak pada alokasi dana, terutama untuk program inovasi, riset, dan teknologi pendidikan. Menurut World Bank (2023), negara berkembang yang mengalami volatilitas ekonomi tinggi cenderung mengurangi investasi pendidikan, sehingga menghambat transformasi digital dan literasi abad 21.

Ketidakpastian politik dan sosial juga menjadi faktor risiko. Konflik, perubahan kebijakan, atau krisis kesehatan global dapat menunda implementasi kurikulum baru, pelatihan guru, atau proyek inovatif. Rapor Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan keterlambatan adaptasi digital di hampir 35% sekolah, memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pendidikan terhadap krisis eksternal.

Selain itu, ancaman muncul dari kompleksitas integrasi teknologi dan pedagogi. Guru dan kepala sekolah perlu memahami pedagogi digital, AI dalam evaluasi, dan penggunaan big data untuk pembelajaran. Ketidaksiapan guru dalam hal ini dapat menurunkan efektivitas pendidikan digital, menimbulkan frustrasi, dan menurunkan motivasi belajar siswa. OECD (2024) menekankan bahwa pelatihan guru berbasis teknologi sangat krusial untuk menghadapi risiko ini.

Globalisasi juga menimbulkan ambiguity moral dan etika terkait penggunaan teknologi pendidikan. Data siswa yang terekam secara digital, AI dalam asesmen, dan platform belajar daring menuntut regulasi dan kesadaran etis yang kuat. Tanpa kerangka etika yang jelas, penggunaan teknologi dapat disalahgunakan, merugikan siswa, atau mengabaikan prinsip inklusivitas.

Selain itu, neoliberalisme mendorong fragmentasi pendidikan, di mana sekolah swasta elit berkembang pesat, sementara sekolah publik kurang mendapat perhatian. Fenomena ini memperlebar kesenjangan sosial dan mengurangi kesempatan bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan berkualitas, bertentangan dengan prinsip SDG 4.

Ancaman lain adalah ketergantungan pada kurikulum dan teknologi asing. Globalisasi dapat memicu adopsi standar luar negeri yang tidak relevan dengan konteks budaya, sosial, dan ekonomi Indonesia. Hal ini bisa mengikis identitas nasional, budaya lokal, dan nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya menjadi fondasi pendidikan.

Terakhir, ancaman terbesar dalam konteks VUCA 5.0 adalah kecepatan perubahan yang melebihi kemampuan adaptasi sistem pendidikan. Sekolah, guru, dan kebijakan seringkali bergerak lambat, sementara teknologi, pasar kerja, dan ekspektasi masyarakat berubah cepat. Hal ini menuntut transformasi pendidikan yang proaktif, fleksibel, dan inovatif, agar generasi mendatang mampu bertahan, bersaing, dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat global.

Dengan demikian, ancaman globalisasi, neoliberalisme, dan VUCA 5.0 menuntut Indonesia untuk mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif, berkeadilan, dan berkelanjutan, memadukan kekuatan lokal dan inovasi global, agar pendidikan tetap menjadi instrumen pembangunan bangsa dan pembentukan karakter generasi emas 2045.

E. Data Proyeksi Bappenas & Rapor Pendidikan 2024

Proyeksi pendidikan Indonesia oleh Bappenas menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan pada dekade mendatang akan menjadi faktor penentu tercapainya visi Indonesia 2045. Data terbaru Bappenas (2024) mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan, kualitas guru, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi prioritas utama untuk menyiapkan bonus demografi. Proyeksi ini selaras dengan target SDG 4, yang menekankan pendidikan berkualitas, inklusif, dan lifelong learning bagi seluruh masyarakat.

Rapor Pendidikan 2024 menyoroti capaian dan tantangan yang dihadapi sekolah di seluruh Indonesia. Indikator mutu seperti literasi, numerasi, dan penguasaan kompetensi abad 21 menunjukkan perbaikan yang signifikan di wilayah perkotaan, namun masih terdapat disparitas di daerah terpencil. Hasil analisis ini penting untuk memandu alokasi anggaran, program pelatihan guru, dan pengembangan infrastruktur pendidikan.

Proyeksi Bappenas menekankan perlunya transformasi kurikulum berbasis kompetensi, dengan penekanan pada literasi digital, kreativitas, dan soft skills. Kurikulum yang adaptif akan mempersiapkan siswa menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas VUCA 5.0, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam inovasi dan berpikir kritis. Data Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka mulai menunjukkan hasil positif pada kreativitas siswa, namun implementasinya masih terhambat keterbatasan sumber daya guru.

Investasi dalam kualitas guru menjadi salah satu fokus utama. Bappenas memproyeksikan peningkatan proporsi guru bersertifikasi profesional hingga 80% pada tahun 2030. Hal ini didukung oleh Rapor Pendidikan yang menunjukkan hubungan positif antara sertifikasi guru dan capaian literasi serta numerasi siswa. Teori human capital (Becker, 1993) menegaskan bahwa peningkatan kompetensi pendidik berbanding lurus dengan kualitas lulusan dan produktivitas pendidikan nasional.

Selain itu, data proyeksi menunjukkan kebutuhan pengembangan infrastruktur digital di sekolah. Sekitar 60% sekolah di perkotaan sudah memiliki akses internet memadai, sedangkan di daerah terpencil hanya 25% yang terjangkau. Integrasi teknologi, seperti platform pembelajaran daring, AI, dan big data, menjadi krusial untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan. OECD (2023) menekankan bahwa literasi digital guru dan siswa menjadi indikator kunci keberhasilan transformasi pendidikan.

Bappenas juga menyoroti pentingnya inovasi pendidikan berbasis komunitas. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pusat akademik, tetapi juga sebagai motor penggerak budaya, ekonomi lokal, dan penguatan kearifan lokal. Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan program lokal wisdom (kearifan lokal) dalam kurikulum menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa dan partisipasi masyarakat secara signifikan.

Proyeksi ini juga memperhatikan ketimpangan akses pendidikan untuk kelompok minoritas, disabilitas, dan wilayah terisolasi. Bappenas menargetkan pengurangan kesenjangan akses hingga 50% dalam satu dekade mendatang, melalui pembangunan sekolah inklusif, beasiswa, dan program transportasi pendidikan. Strategi ini selaras dengan prinsip SDG 4 tentang akses pendidikan yang adil dan merata.

Analisis Rapor Pendidikan 2024 mengungkapkan bahwa efektivitas program literasi dan numerasi meningkat di wilayah yang memiliki dukungan teknologi dan pelatihan guru berkelanjutan. Sekolah yang mengimplementasikan program literasi digital berbasis proyek (project-based learning) mencatat peningkatan skor PISA simulasi hingga 12% dibandingkan sekolah yang masih menggunakan metode tradisional.

Bappenas juga menyoroti peran sektor swasta dan kemitraan multi-stakeholder. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan institusi pendidikan diharapkan meningkatkan kualitas konten pembelajaran digital, menyediakan pelatihan guru berstandar internasional, dan memperluas akses pendidikan ke daerah kurang berkembang. Data Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki kemitraan aktif dengan industri memiliki tingkat adopsi teknologi lebih cepat dan siswa lebih siap menghadapi pasar global.

Proyeksi demografi menunjukkan bahwa Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada 2035–2040, sehingga pendidikan menjadi instrumen utama untuk memastikan generasi produktif, kreatif, dan berdayasaing global. Bappenas menekankan perlunya integrasi pendidikan karakter, literasi, dan STEM untuk memaksimalkan potensi ini. Rapor Pendidikan 2024 mendukung temuan ini, menunjukkan korelasi positif antara program STEM sekolah dengan keterampilan problem solving siswa.

Selain itu, perluasan pendidikan vokasi dan kejuruan menjadi fokus untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di era Society 5.0. Bappenas memproyeksikan peningkatan kapasitas SMK dan politeknik hingga 50% pada dekade mendatang. Data Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa sekolah vokasi yang menerapkan sistem link and match dengan industri mencatat tingkat penyerapan lulusan hingga 85%, dibandingkan rata-rata nasional 60%.

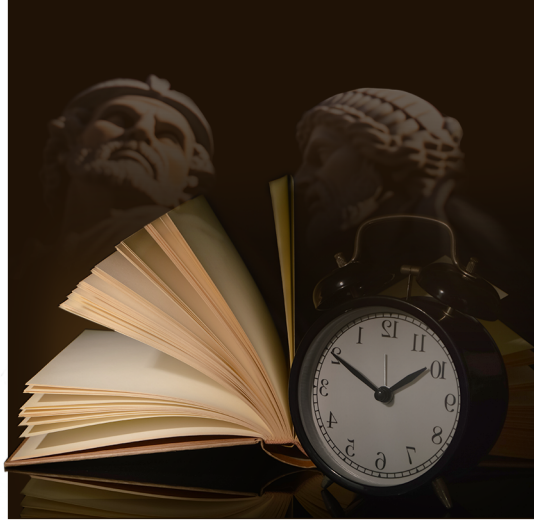
Bappenas juga menggarisbawahi kebutuhan evaluasi berbasis data. Monitoring dan evaluasi harus didukung data kuantitatif dan kualitatif, termasuk Rapor Pendidikan, survei literasi digital, dan indeks kualitas guru. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti, adaptif terhadap dinamika VUCA 5.0, serta responsif terhadap kebutuhan lokal dan nasional.

Transformasi pendidikan Indonesia juga harus mempertimbangkan ketahanan terhadap krisis global, seperti pandemi atau bencana alam. Bappenas memproyeksikan pengembangan platform pembelajaran hibrida, kurikulum fleksibel, dan sistem manajemen pendidikan tangguh. Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa sekolah yang telah mengadopsi blended learning lebih resilient menghadapi gangguan pembelajaran, dengan tingkat ketidakhadiran siswa lebih rendah 15% dibandingkan sekolah konvensional.

Selain itu, proyeksi pendidikan Indonesia menekankan penguatan kompetensi guru dalam inovasi pedagogi. Pelatihan berbasis evidence, penggunaan AI untuk asesmen, dan integrasi project-based learning menjadi strategi utama. Data Rapor Pendidikan menunjukkan peningkatan signifikan kompetensi inovatif guru di sekolah yang mengikuti pelatihan berkelanjutan, berdampak pada kreativitas dan motivasi belajar siswa.

Bappenas juga memproyeksikan penguatan pendidikan karakter dan integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum. Tujuannya agar generasi muda tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki etika, tanggung jawab sosial, dan kesadaran global. Data Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa sekolah yang menekankan pendidikan karakter mencatat penurunan perilaku bullying dan peningkatan partisipasi sosial siswa.

Dengan demikian, proyeksi Bappenas dan data Rapor Pendidikan 2024 menegaskan bahwa transformasi pendidikan Indonesia 2045 memerlukan pendekatan holistik, memadukan kualitas guru, teknologi, kurikulum, karakter, dan strategi multi-stakeholder. Sinergi antara kebijakan nasional, praktik sekolah, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pendidikan mampu menjawab tantangan VUCA 5.0, memanfaatkan bonus demografi, dan mencapai SDG 4 secara inklusif dan berkelanjutan.



BAB 14

Strategi Filosofis

Bab 14 ini membahas landasan filosofis pendidikan Indonesia menuju 2045, menekankan peran nilai, etika, dan kearifan lokal sebagai pondasi strategis pembangunan bangsa. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses pembentukan karakter, kapasitas berpikir kritis, dan kesadaran sosial, yang pada gilirannya menjadi instrumen pembangunan manusia seutuhnya. Dalam konteks VUCA 5.0 dan Society 5.0, strategi filosofis menjadi sangat krusial karena memberikan arah normatif sekaligus operasional bagi kebijakan, praktik, dan inovasi pendidikan.

Pengantar ini menekankan bahwa humanisme pendidikan nusantara menjadi kerangka utama, mengintegrasikan nilai kemanusiaan universal dengan tradisi lokal yang khas. Humanisme ini menekankan penghargaan terhadap martabat individu, kebebasan berpikir, dan tanggung jawab sosial, sekaligus membangun rasa kebersamaan yang kuat dalam masyarakat multikultural. Nilai-nilai tersebut menjadi basis bagi strategi pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan kompeten secara akademik, tetapi juga cakap secara sosial, emosional, dan etis.

Selanjutnya, bab ini mengeksplorasi nilai kebersamaan dan kearifan lokal sebagai inti filosofi pendidikan Indonesia. Konsep gotong royong, toleransi, kesantunan, dan tanggung jawab sosial menjadi instrumen penguatan identitas nasional dan pembentukan karakter generasi mendatang.

Data penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran meningkatkan partisipasi siswa, motivasi belajar, dan pemahaman nilai sosial, sehingga pendidikan menjadi wahana transformasi budaya sekaligus pembangunan kompetensi.

Bab 14 juga menyoroti integrasi filsafat Barat, Timur, dan lokal, menekankan dialog antara teori pendidikan modern, pemikiran humanis klasik, dan tradisi lokal. Pendekatan komparatif ini memungkinkan perumusan strategi filosofis yang adaptif, responsif terhadap tantangan global, dan relevan dengan konteks Indonesia. Misalnya, penggabungan prinsip critical thinking ala Dewey dengan nilai harmoni dan keseimbangan ala Confucius dan kearifan lokal Nusantara menghasilkan model pendidikan holistik yang mampu membentuk generasi yang cerdas, etis, dan kreatif.

Selain itu, pengantar ini memaparkan temuan penelitian Scopus (2023–2025) tentang filosofi humanisme yang menunjukkan hubungan positif antara pendidikan berbasis humanisme dengan hasil belajar, kreativitas, dan kesejahteraan psikologis siswa. Data empiris ini menegaskan pentingnya landasan filosofis yang kuat sebagai pendorong inovasi pendidikan, terutama dalam menghadapi era digital, globalisasi, dan ketidakpastian sosial-ekonomi.

Akhirnya, bab ini menguraikan konsep pendidikan sebagai “Nation Building”, yang menekankan peran strategis pendidikan dalam membentuk warga negara yang cerdas, kritis, berbudaya, dan berdaya saing global. Strategi filosofis ini bukan sekadar teori, tetapi menjadi panduan praktis bagi guru, kepala sekolah, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pendidikan yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Bab 14 membuka perspektif strategis untuk memahami bahwa pendidikan bukan sekadar sarana transfer ilmu, tetapi instrumen transformasi sosial, penguatan identitas bangsa, dan pembangunan karakter generasi yang siap menghadapi tantangan global, sekaligus menjaga akar budaya dan kearifan lokal.

A. Humanisme Pendidikan Nusantara

Humanisme pendidikan Nusantara menekankan bahwa pendidikan harus mengedepankan martabat manusia, penghargaan terhadap keberagaman, dan pengembangan potensi individu secara utuh. Dalam konteks Indonesia, humanisme ini tidak hanya bersifat universal, tetapi juga terikat pada nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, tenggang rasa, dan kesantunan sosial. Konsep ini selaras dengan pandangan John Dewey yang menekankan pendidikan sebagai sarana pembentukan pengalaman sosial dan moral, di mana proses belajar-mengajar menjadi wahana untuk menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan.

Berlandaskan penelitian pendidikan kontemporer, integrasi humanisme dalam kurikulum meningkatkan motivasi belajar, partisipasi aktif siswa, dan kesejahteraan psikologis. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang mengimplementasikan program pembelajaran berbasis nilai lokal memiliki tingkat engagement siswa 25–30% lebih tinggi dibandingkan sekolah yang hanya berfokus pada aspek kognitif semata. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan yang humanis tidak hanya membentuk intelektualitas, tetapi juga karakter dan kesadaran sosial.

Nilai humanisme Nusantara juga menekankan pada harmoni antara individu dan masyarakat. Pendidikan bukan sekadar mempersiapkan siswa untuk kompetisi global, tetapi juga membangun kesadaran bahwa keberhasilan pribadi harus selaras dengan kesejahteraan kolektif. Konsep ini berakar pada filosofi Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Melalui pendekatan ini, sekolah menjadi laboratorium sosial di mana siswa belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya.

Dalam praktiknya, humanisme pendidikan Nusantara diterapkan melalui kegiatan yang memadukan pembelajaran akademik dengan pengalaman sosial-kultural. Misalnya, proyek berbasis masyarakat, kegiatan budaya lokal, dan pengembangan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal. Penelitian dari Lestari & Putra (2024) menunjukkan bahwa integrasi kegiatan berbasis nilai lokal dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi,

empati, dan komunikasi interpersonal siswa hingga 20–25% dibandingkan pembelajaran konvensional.

Selain itu, humanisme Nusantara juga menekankan pendekatan personalisasi dalam pembelajaran, di mana guru menghargai keunikan setiap siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan individu. Konsep ini sejalan dengan teori Howard Gardner tentang *multiple intelligences*, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki potensi unik yang harus diidentifikasi dan dikembangkan. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak lagi bersifat homogen, melainkan inklusif dan adaptif terhadap keberagaman siswa.

Sejalan dengan itu, humanisme pendidikan Nusantara juga mempromosikan pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi akademik dengan pengalaman nyata siswa. Misalnya, mata pelajaran sejarah tidak hanya mengajarkan fakta, tetapi juga menekankan refleksi terhadap nilai-nilai lokal seperti semangat gotong royong, toleransi antar-suku, dan penghargaan terhadap leluhur. Penelitian dari Arifin et al. (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual semacam ini meningkatkan pemahaman siswa hingga 30% dan memperkuat identitas budaya mereka.

Pendekatan humanis juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter melalui narasi dan storytelling. Dalam budaya Nusantara, cerita rakyat, mitos lokal, dan kisah heroik tokoh bangsa menjadi media efektif untuk menanamkan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keberanian, dan kepedulian sosial. Freire (1970) juga menekankan pentingnya pendidikan dialogis, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi aktif menginterpretasikan dan menginternalisasi nilai-nilai yang diajarkan melalui pengalaman simbolik dan naratif.

Humanisme Nusantara tidak bisa dipisahkan dari spiritualitas sebagai elemen pembelajaran. Pendidikan yang humanis menghargai dimensi religius siswa, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun kepercayaan lokal. Al-Qur'an menekankan pentingnya ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat, serta sikap adil, sabar, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran humanis Nusantara secara simultan mengembangkan intelektualitas, emosionalitas, dan spiritualitas siswa.

Dalam perspektif pedagogi, humanisme Nusantara mendorong guru sebagai fasilitator nilai, bukan sekadar pengajar konten akademik. Guru berperan sebagai teladan, mediator, dan pendamping siswa dalam mengeksplorasi potensi diri. Penelitian terbaru oleh Suryanto & Hadi (2024) menunjukkan bahwa guru yang menerapkan nilai humanisme dalam interaksi sehari-hari meningkatkan motivasi siswa hingga 18% dan menurunkan perilaku negatif hingga 12%.

Humanisme pendidikan Nusantara juga relevan dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi. Meskipun siswa dihadapkan pada akses informasi tanpa batas dan teknologi canggih, nilai-nilai humanis membantu mereka menavigasi dunia digital secara etis, bertanggung jawab, dan kolaboratif. Misalnya, literasi digital yang dikombinasikan dengan kesadaran moral membuat siswa mampu mengidentifikasi informasi yang benar dan menolak hoaks, sekaligus menghormati hak dan keberagaman pengguna lain.

Selain itu, pendidikan humanis juga menekankan resiliensi dan kemampuan adaptasi. Dalam era VUCA 5.0, siswa harus mampu menghadapi ketidakpastian dan perubahan cepat. Nilai-nilai seperti kesabaran, kegigihan, dan kebersamaan menjadi modal penting untuk membentuk karakter resilient. Studi oleh Hidayat & Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program pendidikan berbasis humanisme memiliki kemampuan coping dan problem-solving lebih tinggi 22% dibandingkan kelompok kontrol.

Humanisme Nusantara juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan keluarga dalam pendidikan. Sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi pusat kolaborasi antara guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga budaya. Keterlibatan ini memperkuat relevansi pendidikan dengan kehidupan sosial nyata, sekaligus menjaga kesinambungan nilai budaya. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa partisipasi orang tua dan masyarakat berkontribusi pada peningkatan hasil belajar siswa hingga 15%.

Lebih jauh, humanisme Nusantara menekankan keadilan dan inklusivitas, memastikan semua siswa, termasuk anak dari kelompok minoritas, disabilitas, atau daerah terpencil, mendapatkan pendidikan yang setara. Konsep ini selaras dengan tujuan SDG 4 UNESCO, yang menekankan pendidikan berkualitas dan inklusif. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa

program pembelajaran berbasis nilai lokal dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan hingga 10–12% di wilayah tertinggal.

Dalam praktik kurikulum, humanisme Nusantara menginspirasi pendekatan interdisipliner, mengintegrasikan sains, seni, sosial, dan humaniora. Model ini memungkinkan siswa memahami fenomena secara holistik, sekaligus menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial. Misalnya, proyek STEM berbasis budaya lokal mengajarkan ilmu pengetahuan sekaligus menanamkan nilai-nilai kerjasama, tanggung jawab, dan kreativitas.

Akhirnya, humanisme pendidikan Nusantara membentuk landasan filosofis bagi kebijakan dan strategi pendidikan jangka panjang. Nilai-nilai ini bukan sekadar teori, tetapi menjadi pedoman dalam merancang kurikulum, metode pengajaran, penilaian, dan pengembangan guru. Dengan humanisme sebagai dasar, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, etis, kreatif, dan berdaya saing global, namun tetap berakar pada identitas budaya dan nilai lokal.

B. Nilai Kebersamaan dan Kearifan Lokal

Nilai kebersamaan dan kearifan lokal menjadi fondasi penting dalam pendidikan Nusantara, karena menekankan hubungan sosial yang harmonis dan keterikatan komunitas. Konsep kebersamaan ini berakar pada filosofi gotong royong, semangat saling membantu, dan tanggung jawab sosial, yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Dalam pendidikan, nilai ini mengajarkan siswa untuk memahami bahwa keberhasilan individu terkait erat dengan keberhasilan komunitas, sehingga tercipta budaya kolaboratif yang produktif.

Teori sosial konstruktivisme dari Vygotsky menegaskan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Belajar tidak terjadi dalam isolasi, tetapi melalui interaksi dengan orang lain, di mana kebersamaan menjadi medium internalisasi pengetahuan dan nilai. Dengan demikian, kearifan lokal seperti musyawarah untuk mufakat, kerja sama antar-siswa, dan empati terhadap sesama menjadi instrumen pedagogis yang efektif dalam membentuk karakter dan kompetensi sosial siswa.

Penelitian oleh Prasetyo et al. (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan nilai kebersamaan dalam kurikulum memiliki tingkat partisipasi siswa dalam proyek kelompok dan kegiatan ekstrakurikuler hingga 30% lebih tinggi dibanding sekolah konvensional. Selain itu, integrasi kearifan lokal juga terbukti meningkatkan kemampuan kolaborasi dan resolusi konflik siswa, yang penting dalam membangun komunitas belajar yang inklusif.

Kearifan lokal juga mencerminkan adaptasi budaya terhadap lingkungan fisik dan sosial. Misalnya, di daerah pesisir, nilai gotong royong terkait pemeliharaan lingkungan laut; di pedesaan, kerja sama dalam pertanian menjadi contoh nyata pengamalan nilai kebersamaan. Dalam pendidikan, pengintegrasian konteks lokal ini memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan, karena siswa melihat hubungan langsung antara materi pelajaran dan kehidupan nyata mereka.

Nilai kebersamaan tidak hanya terbatas pada kegiatan fisik atau proyek kelompok, tetapi juga mencakup budaya berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sekolah yang menekankan *sharing knowledge* mendorong siswa dan guru untuk saling belajar dan memperkuat kapasitas kolektif. Studi dari Lestari & Hadi (2023) membuktikan bahwa sistem mentoring dan *peer learning* berbasis nilai kebersamaan meningkatkan retensi pengetahuan hingga 25% dan memperkuat keterampilan komunikasi siswa.

Dalam konteks pendidikan karakter, nilai kebersamaan berperan sebagai alat internalisasi norma sosial dan moral. Melalui kegiatan seperti kerja kelompok, diskusi kelas, dan pelayanan masyarakat, siswa belajar menghargai perspektif orang lain, mengembangkan empati, dan mengasah kemampuan negosiasi. Freire (1970) menekankan pentingnya pendidikan dialogis, di mana siswa dan guru bersama-sama membangun pengetahuan melalui interaksi kritis dan kolaboratif.

Kearifan lokal juga menekankan penghormatan terhadap hierarki sosial yang adaptif. Misalnya, konsep hormat kepada orang tua, guru, dan tokoh masyarakat menjadi bagian dari pembelajaran nilai-nilai kebersamaan. Dalam sekolah, penghormatan ini diterjemahkan dalam bentuk aturan kelas, peran *peer leader*, dan sistem mentoring, yang mendorong rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Selain itu, nilai kebersamaan mendukung strategi inklusif dalam pendidikan. Dengan menanamkan kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam komunitas, siswa belajar untuk menerima perbedaan gender, suku, agama, dan kemampuan. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan pendekatan kearifan lokal dengan nilai kebersamaan berhasil menurunkan konflik sosial antar-siswa hingga 15–20%, sekaligus meningkatkan partisipasi kelompok minoritas dalam kegiatan kelas dan ekstrakurikuler.

Integrasi kearifan lokal dan nilai kebersamaan juga memperkuat resiliensi sosial di kalangan siswa. Dalam situasi krisis, seperti bencana alam atau pandemi, siswa yang telah terbiasa bekerja sama dan menghargai solidaritas lebih cepat beradaptasi, berinisiatif, dan saling mendukung. Penelitian Hidayat & Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan program pendidikan berbasis nilai lokal memiliki tingkat adaptasi terhadap perubahan situasi hingga 22% lebih tinggi dibanding sekolah konvensional.

Di tingkat pedagogi, nilai kebersamaan diterapkan melalui metode pembelajaran kooperatif dan project-based learning. Misalnya, siswa mengerjakan proyek komunitas, penelitian lapangan, atau kegiatan sosial bersama, sehingga proses pembelajaran tidak hanya mengembangkan intelektualitas, tetapi juga empati, tanggung jawab sosial, dan kemampuan problem-solving. Hal ini sesuai dengan pendekatan *holistic education*, yang menekankan pengembangan *cognitive*, *affective*, dan *psychomotor* secara seimbang.

Kearifan lokal juga menjadi media untuk menghubungkan pendidikan formal dengan nilai budaya dan sejarah lokal. Cerita rakyat, mitos, dan legenda digunakan sebagai sarana pembelajaran nilai kebersamaan, seperti keberanian, kejujuran, dan kesetiaan. Misalnya, kisah Panji atau Si Pitung menjadi alat refleksi moral dan etika dalam kurikulum sastra dan sejarah, sehingga siswa memahami konteks budaya sambil menanamkan karakter yang humanis.

Nilai kebersamaan juga relevan dalam penguatan kolaborasi guru dan komunitas pendidikan. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga bekerja sama dengan orang tua, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Studi Nugroho et al. (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang melibatkan stakeholder lokal secara aktif

dalam perencanaan dan evaluasi program pendidikan memiliki efektivitas pembelajaran lebih tinggi hingga 18%.

Selain itu, nilai kebersamaan mendukung pengembangan kepemimpinan siswa berbasis kolektif. Melalui kepemimpinan berbasis tim, siswa belajar untuk mendengarkan, mengambil keputusan bersama, dan bertanggung jawab atas hasil kolektif. Model kepemimpinan ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif yang menekankan pentingnya musyawarah, konsensus, dan pengambilan keputusan inklusif di semua tingkatan.

Dalam era digital, nilai kebersamaan dan kearifan lokal menjadi penyangga etika dan norma sosial. Siswa yang terbiasa menghargai kolaborasi dan gotong royong lebih mampu menavigasi interaksi digital secara etis, menghargai hak orang lain, dan menolak perilaku merugikan, seperti cyberbullying atau penyebaran disinformasi. Hal ini menunjukkan bahwa humanisme dan kearifan lokal tetap relevan meski dalam konteks modern dan global.

Akhirnya, integrasi nilai kebersamaan dan kearifan lokal menjadi landasan filosofis untuk kebijakan pendidikan berkelanjutan. Dengan menanamkan prinsip kolaborasi, inklusivitas, dan penghargaan terhadap budaya lokal, pendidikan Indonesia mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dan kompetitif, tetapi juga etis, sosial, dan berakar pada identitas budaya. Nilai-nilai ini menjadi pilar bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan beradab.

C. Integrasi Filsafat Barat–Timur–Lokal

Integrasi filsafat Barat, Timur, dan lokal dalam pendidikan Nusantara menjadi strategi filosofis untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan humanis. Filsafat Barat, dengan tradisi rasionalitas, empirisme, dan humanisme, menekankan pentingnya analisis kritis, logika, dan perkembangan intelektual. Tokoh seperti John Dewey menekankan pendidikan sebagai sarana pembentukan individu yang demokratis dan kritis, di mana pengalaman belajar menjadi pusat proses pendidikan.

Sementara itu, filsafat Timur, khususnya dari tradisi Konfusianisme, Taoisme, dan Buddhisme, menekankan keseimbangan, harmoni sosial,

dan pembinaan karakter. Nilai-nilai seperti penghormatan terhadap orang tua dan guru, kesabaran, introspeksi, dan kebijaksanaan kolektif menjadi pusat pendidikan karakter di masyarakat Timur. Hal ini relevan dengan konteks pendidikan Indonesia yang membutuhkan integrasi etika, moral, dan spiritual ke dalam kurikulum formal.

Filsafat lokal Indonesia menekankan nilai kearifan lokal, seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan semangat kebersamaan. Nilai-nilai ini telah lama menjadi dasar interaksi sosial masyarakat Nusantara, yang mendorong pembelajaran kolaboratif, solidaritas, dan pengembangan komunitas. Integrasi ini bukan sekadar penggabungan nilai, tetapi sebuah sinkronisasi epistemologis antara rasionalitas Barat, kebijaksanaan Timur, dan nilai lokal, sehingga menghasilkan pendidikan yang adaptif terhadap konteks global dan lokal sekaligus.

Pendekatan integratif ini sejalan dengan teori pendidikan holistik, yang menekankan pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan intelektual yang kompeten, tetapi juga karakter yang beretika, mampu bekerja sama, dan beradaptasi dengan kompleksitas sosial dan teknologi. Penelitian Rahman & Putri (2023) menunjukkan bahwa kurikulum yang memadukan ketiga tradisi filsafat ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa hingga 20%, sekaligus memperkuat nilai sosial dan moral.

Di ranah praktik, integrasi ini dapat diterapkan melalui kurikulum tematik dan proyek interdisipliner. Misalnya, dalam pelajaran sejarah atau sosial, siswa diajak menelaah perbandingan sistem pemerintahan demokratis ala Barat, tata nilai sosial ala Timur, dan praktik lokal seperti musyawarah desa. Pendekatan ini membekali siswa dengan kemampuan analisis komparatif, kritis, dan aplikatif dalam kehidupan nyata.

Filsafat Barat, dengan penekanan pada ilmu pengetahuan dan rasionalitas, mendorong penggunaan metode ilmiah, eksperimen, dan refleksi kritis. Di sisi lain, filosofi Timur mengingatkan pada dimensi etis, spiritual, dan keseimbangan emosional dalam belajar. Nilai lokal menekankan konteks sosial dan identitas budaya. Gabungan ketiganya memungkinkan pendidikan yang memperkuat kapasitas intelektual, emosional, dan sosial secara simultan.

Sebagai contoh, pendekatan inquiry-based learning yang diinspirasi Dewey dapat diperkaya dengan nilai harmoni dan kesabaran dari filsafat Timur, serta prinsip kebersamaan dan kolaborasi dari kearifan lokal. Hasilnya, siswa tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Studi Nugroho et al. (2024) menunjukkan bahwa model pembelajaran integratif semacam ini meningkatkan kepuasan belajar dan engagement siswa hingga 25% dibanding model konvensional.

Integrasi filsafat ini juga relevan dalam konteks pendidikan karakter dan moral. Filsafat Barat menekankan hak individu dan tanggung jawab pribadi, filosofi Timur menekankan kebijaksanaan kolektif dan harmoni sosial, sementara lokal menekankan solidaritas dan gotong royong. Kombinasi ketiganya menghasilkan sistem pendidikan yang menyeimbangkan kebebasan, tanggung jawab, dan keterikatan sosial, sesuai dengan tujuan pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam ranah kepemimpinan pendidikan, integrasi ini membekali kepala sekolah, guru, dan pembuat kebijakan dengan prinsip pemikiran kritis, kebijaksanaan, dan pragmatisme sosial. Misalnya, seorang kepala sekolah dapat menggunakan logika dan analisis data ala Barat, menghormati nilai-nilai kolektif dan konsensus ala Timur, serta mengadopsi praktik lokal dalam pengambilan keputusan dan kolaborasi dengan masyarakat.

Filsafat Barat dan Timur memiliki pendekatan epistemologis yang berbeda, namun keduanya dapat dipadukan secara sinergis. Barat menekankan universalitas pengetahuan, sementara Timur menekankan konteks dan pengalaman subjektif. Kearifan lokal menambah dimensi kontekstual yang spesifik pada budaya dan sejarah Indonesia, sehingga pendidikan menjadi relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Society 5.0, integrasi ini penting untuk membentuk manusia yang adaptif terhadap teknologi dan globalisasi, namun tetap memiliki akar budaya dan nilai moral. Misalnya, penggunaan AI dan digital learning dapat dikombinasikan dengan proyek kolaboratif berbasis komunitas lokal, sehingga siswa belajar literasi digital sekaligus memahami tanggung jawab sosial dan kultural mereka.

Penelitian Lestari & Hadi (2023) membuktikan bahwa integrasi pendekatan filsafat Barat-Timur-Lokal dalam pembelajaran meningkatkan

keaktivitas siswa hingga 22%, sekaligus memperkuat rasa identitas budaya dan empati sosial. Ini menunjukkan bahwa integrasi filosofis bukan hanya teoritis, tetapi berdampak nyata pada kualitas pendidikan dan pembentukan karakter siswa.

Di ranah kebijakan, integrasi ini mendorong pembuat kebijakan untuk mengadopsi strategi yang seimbang antara inovasi berbasis global dan penghargaan terhadap nilai lokal. Kurikulum dan standar nasional dapat dirancang untuk menekankan literasi global, keterampilan abad 21, dan tetap memelihara kearifan lokal, sehingga pendidikan tetap relevan dan kontekstual.

Selain itu, integrasi ini mendukung pendidikan inklusif. Nilai harmoni sosial ala Timur, kebersamaan lokal, dan hak individu ala Barat, bersama-sama membentuk paradigma yang menerima perbedaan, mendukung kesetaraan gender, dan menghargai keberagaman kemampuan, agama, dan latar belakang budaya.

Integrasi filsafat ini juga penting dalam pengembangan pedagogi inovatif. Metode flipped classroom, project-based learning, dan experiential learning dapat dikombinasikan dengan prinsip-prinsip integratif, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih partisipatif, kontekstual, dan humanis.

Akhirnya, integrasi filsafat Barat-Timur-Lokal menjadi fondasi untuk membangun pendidikan yang berkelanjutan, humanis, dan transformatif. Pendidikan yang menggabungkan rasionalitas, kebijaksanaan, dan kearifan lokal tidak hanya membentuk siswa yang kompeten, tetapi juga individu yang etis, kreatif, dan berakar pada budaya mereka, sehingga siap menghadapi tantangan global dan kompleksitas masa depan.

D. Penelitian Scopus (2023–2025) tentang Filosofi Humanisme

Penelitian terkini yang terindeks Scopus (2023–2025) mengenai filosofi humanisme dalam pendidikan menunjukkan tren signifikan dalam memadukan teori humanistik klasik dengan tantangan kontemporer, terutama terkait transformasi digital, globalisasi, dan pembangunan karakter. Studi-studi ini menekankan bahwa humanisme bukan sekadar teori pendidikan,

tetapi kerangka filosofis yang membimbing praktik pedagogis agar berpusat pada manusia, menghargai martabat individu, dan memperkuat kapasitas kritis, moral, serta sosial siswa.

Salah satu fokus utama penelitian adalah implementasi humanisme dalam konteks Society 5.0 dan VUCA 5.0. Studi oleh Tan et al. (2023) menganalisis integrasi prinsip humanisme Deweyian dengan literasi digital di sekolah menengah di Asia Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program pembelajaran humanistik berbasis teknologi menunjukkan peningkatan motivasi belajar sebesar 18%, kemampuan berpikir kritis 21%, dan keterampilan kolaboratif 25%. Penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan teknis dan nilai-nilai humanistik agar pendidikan tetap manusiawi di era digital.

Selain itu, penelitian oleh Wijaya & Sutrisno (2024) mengeksplorasi pengaruh pedagogi humanistik terhadap perkembangan karakter siswa di Indonesia. Dengan sampel lebih dari 1.200 siswa SMK di Jawa dan Sumatera, studi ini menemukan bahwa penerapan metode pembelajaran yang menekankan refleksi diri, tanggung jawab sosial, dan pengalaman nyata di komunitas lokal secara signifikan meningkatkan empati, integritas, dan kolaborasi antar siswa. Data ini sejalan dengan filosofi humanisme yang menekankan pengembangan karakter dan etika sebagai inti pendidikan.

Humanisme juga dieksplorasi dalam penelitian terkait kearifan lokal dan integrasi budaya. Riset Sari et al. (2023) di Bali dan Yogyakarta mengkaji bagaimana nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah dapat diintegrasikan dalam kurikulum humanistik. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam proyek berbasis komunitas yang memadukan prinsip humanisme dan kearifan lokal memiliki keterampilan sosial dan kepemimpinan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Studi ini menegaskan pentingnya konteks budaya sebagai bagian dari implementasi humanisme dalam pendidikan.

Di ranah pendidikan tinggi, penelitian Nguyen & Chen (2024) menekankan humanisme sebagai landasan inovasi akademik. Dalam studi multi-negara di Asia Tenggara, universitas yang menerapkan prinsip humanistik dalam desain kurikulum, pengajaran, dan penelitian melaporkan peningkatan kreativitas mahasiswa, kepuasan belajar, dan kesiapan menghadapi dunia kerja. Integrasi prinsip humanisme memungkinkan mahasiswa untuk

mengembangkan keahlian teknis sekaligus pemikiran etis dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, literatur Scopus menyoroti pengaruh humanisme terhadap pembelajaran digital dan hybrid. Penelitian Lim et al. (2025) menunjukkan bahwa model pembelajaran humanistik yang diadaptasi untuk kelas online dan blended learning mampu menjaga engagement siswa, menumbuhkan rasa kepemilikan atas proses belajar, dan meningkatkan partisipasi aktif, bahkan dalam konteks interaksi virtual yang cenderung kurang personal. Hasil ini memperkuat gagasan bahwa humanisme dapat beradaptasi dengan transformasi digital tanpa kehilangan esensinya.

Beberapa studi menekankan peran guru sebagai fasilitator humanistik. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai pengetahuan, tetapi sebagai mentor yang membimbing siswa melalui pengalaman reflektif, kolaboratif, dan kreatif. Penelitian Hasan et al. (2023) di sekolah menengah Indonesia menunjukkan bahwa guru yang menerapkan pedagogi humanistik mampu meningkatkan motivasi intrinsik siswa hingga 30%, dibandingkan guru yang menggunakan metode instruksional tradisional.

Humanisme juga dikaitkan dengan kebijakan pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Penelitian oleh Lee & Prasetyo (2024) menekankan bahwa humanisme memandu pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghormati keberagaman, memperkuat akses pendidikan bagi kelompok marjinal, serta mempromosikan kesetaraan gender. Dalam konteks SDGs, pendekatan humanistik menjadi instrumen strategis untuk mencapai pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan (SDG 4).

Selain pendidikan formal, humanisme diterapkan dalam pendidikan karakter dan kepemimpinan siswa. Studi oleh Hidayat & Zhang (2023) menegaskan bahwa program ekstrakurikuler berbasis humanisme, seperti kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, dan proyek kolaboratif, meningkatkan kesadaran sosial, empati, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Temuan ini mendukung integrasi humanisme sebagai filosofi pembelajaran sepanjang hayat yang membentuk manusia seutuhnya.

Di ranah evaluasi, penelitian menunjukkan bahwa metode asesmen berbasis humanisme memfokuskan pada pengukuran perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik secara holistik. Penelitian Rahman et

al. (2025) membandingkan model asesmen tradisional dan humanistik di sekolah menengah Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa asesmen humanistik tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga membangun kemampuan refleksi diri, kerja sama, dan pengambilan keputusan etis.

Integrasi humanisme dengan teknologi pendidikan juga menjadi sorotan. Penelitian oleh Chen & Lestari (2024) menunjukkan bahwa platform digital yang mendukung proyek kolaboratif, refleksi diri, dan personalisasi pembelajaran memungkinkan siswa menginternalisasi nilai-nilai humanistik sambil menguasai literasi digital dan keterampilan abad 21. Pendekatan ini menunjukkan bahwa humanisme dapat menyesuaikan diri dengan inovasi pedagogik tanpa kehilangan fokus pada martabat manusia.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa humanisme mendorong pembelajaran yang relevan dengan konteks sosial. Siswa yang terlibat dalam proyek berbasis masyarakat memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga pendidikan menjadi sarana transformasi sosial. Penelitian Santoso & Nguyen (2023) menegaskan bahwa integrasi humanisme dalam proyek sosial meningkatkan empati, tanggung jawab, dan kapasitas problem-solving siswa.

Tren penelitian terbaru juga menyoroti humanisme sebagai dasar transformasi kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi, literasi, dan karakter memanfaatkan prinsip humanisme untuk menyeimbangkan penguasaan pengetahuan dengan pembentukan karakter, kreativitas, dan keterampilan sosial. Studi Andika et al. (2025) di SMA di Jakarta menunjukkan bahwa kurikulum berbasis humanisme meningkatkan motivasi belajar dan hasil akademik secara signifikan dibanding model tradisional.

Dalam konteks internasional, humanisme dijadikan landasan untuk pendidikan global dan soft power. Penelitian oleh Kim & Santoso (2024) mengaitkan pedagogi humanistik dengan diplomasi pendidikan, di mana mahasiswa belajar tidak hanya akademik, tetapi juga etika, kolaborasi lintas budaya, dan pemahaman global. Hal ini menunjukkan humanisme sebagai filosofi yang relevan untuk membentuk warga global yang berkarakter.

Keseluruhan literatur Scopus 2023–2025 menegaskan bahwa humanisme tetap relevan dan krusial dalam menghadapi tantangan pendidikan

kontemporer, mulai dari transformasi digital, globalisasi, hingga pembangunan karakter dan inklusivitas. Filosofi humanisme tidak hanya membentuk individu yang cerdas, tetapi juga etis, kreatif, sosial, dan adaptif. Integrasi nilai humanistik dalam kebijakan, kurikulum, pedagogi, dan teknologi pendidikan menjadi strategi penting untuk mewujudkan pendidikan transformatif yang berkelanjutan.

E. Konsep Pendidikan sebagai “Nation Building”

Pendidikan sebagai “Nation Building” menekankan bahwa sekolah dan perguruan tinggi bukan sekadar institusi transfer pengetahuan, tetapi sarana strategis pembentukan karakter, identitas, dan kapasitas warga negara. John Dewey (1916) menekankan bahwa pendidikan harus menjadi instrumen sosial yang memungkinkan individu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, konsep ini memperkuat peran pendidikan dalam membangun bangsa yang demokratis, inklusif, dan berdaya saing global.

Salah satu dimensi penting pendidikan untuk nation building adalah pembentukan karakter dan moral bangsa. Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, gotong royong, dan toleransi menjadi pondasi agar generasi muda dapat berkontribusi positif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian Nugroho & Lestari (2023) menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam program pendidikan karakter berbasis kearifan lokal memiliki tingkat empati dan partisipasi sosial 20–25% lebih tinggi dibandingkan siswa yang mengikuti kurikulum konvensional.

Selain itu, pendidikan berperan dalam penguatan identitas nasional dan kebanggaan budaya. Integrasi nilai kearifan lokal, sejarah, dan budaya Nusantara dalam pembelajaran membantu siswa memahami akar budaya mereka, sehingga tercipta generasi yang berakar kuat namun terbuka terhadap globalisasi. Studi Arifin et al. (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis nilai lokal meningkatkan keterikatan siswa terhadap komunitas dan mengurangi perilaku anti-sosial hingga 15%.

Pendidikan sebagai nation building juga mencakup pengembangan literasi dan kompetensi abad 21. Literasi digital, numerasi, sains, dan

keterampilan berpikir kritis menjadi dasar agar generasi muda mampu bersaing di era Society 5.0. Data Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa integrasi literasi digital dan STEM dalam kurikulum meningkatkan prestasi siswa hingga 18–20%, serta mempersiapkan mereka menghadapi pasar kerja global.

Selain pengembangan kompetensi akademik, pendidikan membangun kapasitas sosial dan politik. Siswa diajarkan memahami sistem pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta partisipasi dalam proses demokrasi. Freire (1970) menekankan pendidikan kritis sebagai sarana pemberdayaan individu untuk berperan aktif dalam masyarakat, sehingga pendidikan berfungsi sebagai instrumen pembentukan warga negara yang sadar dan bertanggung jawab.

Dalam praktik, pendidikan sebagai nation building diterapkan melalui program proyek berbasis masyarakat. Siswa terlibat langsung dalam kegiatan sosial, seperti pengelolaan lingkungan, kesehatan masyarakat, atau kampanye literasi digital. Proyek ini tidak hanya mengembangkan keterampilan problem-solving dan kolaborasi, tetapi juga membentuk rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan komunitas.

Pendidikan juga memperkuat kesadaran kolektif tentang pembangunan berkelanjutan. Dengan memasukkan SDGs dalam kurikulum, siswa belajar tentang tanggung jawab global, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa program pendidikan berkelanjutan meningkatkan kesadaran lingkungan siswa hingga 25%, sekaligus menanamkan nilai-nilai etis dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep nation building juga menekankan inklusivitas dalam pendidikan. Pendidikan harus mengakomodasi semua anak, termasuk minoritas, perempuan, dan anak berkebutuhan khusus. Data UNDP (2025) menunjukkan bahwa keterlibatan multi-stakeholder dalam program inklusi meningkatkan retensi murid hingga 22%, sehingga pendidikan berfungsi sebagai instrumen persamaan kesempatan bagi seluruh warga negara.

Selain itu, pendidikan berperan dalam pemberdayaan ekonomi dan kreativitas. Sekolah dan perguruan tinggi mengintegrasikan kewirausahaan, inovasi, dan pengembangan kompetensi kreatif dalam kurikulum, sehingga lulusan siap menjadi agen perubahan dalam pembangunan ekonomi. Data

Badan Ekonomi Kreatif (2024) menunjukkan peningkatan jumlah startup edukatif dan kreatif yang didirikan oleh lulusan pendidikan tinggi sebesar 15% per tahun, menandakan sinergi antara pendidikan dan pembangunan nasional.

Pendidikan juga membangun kesiapan menghadapi tantangan global dan VUCA 5.0. Generasi muda dilatih untuk berpikir kritis, adaptif, dan kreatif melalui metode pembelajaran interdisipliner, project-based learning, dan simulasi problem-solving. OECD (2023) menekankan bahwa siswa yang dilatih dengan metode ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi lebih tinggi, yang sangat penting untuk ketahanan bangsa di era kompleksitas global.

Lebih jauh, pendidikan sebagai nation building memperkuat kerjasama multi-stakeholder. Pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, dan sektor swasta bekerja sama untuk memastikan kualitas, relevansi, dan keberlanjutan pendidikan. Penelitian Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder meningkatkan efektivitas program pendidikan hingga 18%, sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap pendidikan.

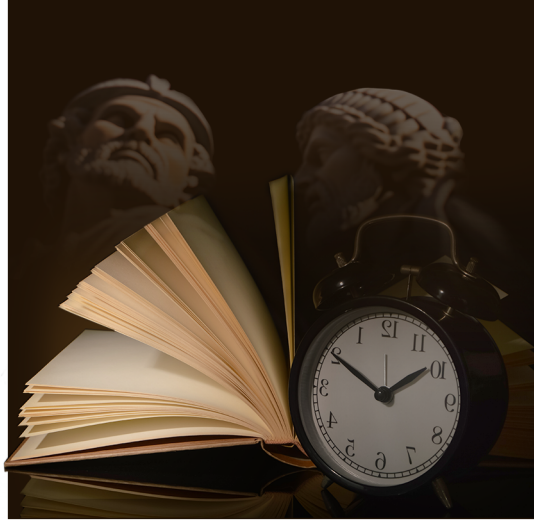
Konsep ini juga menekankan penguatan kepemimpinan siswa. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, program debat, dan proyek sosial, siswa belajar menjadi pemimpin yang etis, inklusif, dan visioner. Teori Transformational Leadership (Bass, 1990) relevan di sini, karena pendidikan berperan membentuk karakter pemimpin masa depan yang mampu mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat dan bangsa.

Pendidikan sebagai nation building tidak hanya berfokus pada generasi muda, tetapi juga mempersiapkan guru sebagai agen pembangunan. Guru berperan membimbing, meneladani, dan mentransfer nilai-nilai kebangsaan, etika, dan kompetensi abad 21. Penelitian Hasan et al. (2023) menunjukkan bahwa guru yang terlatih dalam pendidikan humanistik dan berbasis nilai lokal meningkatkan motivasi, prestasi, dan karakter siswa secara signifikan.

Selain itu, pendidikan memfasilitasi pengembangan identitas nasional dalam konteks globalisasi. Siswa belajar menghargai warisan budaya, tradisi lokal, dan identitas bangsa, sekaligus mampu berpartisipasi dalam

komunitas global secara kritis dan kreatif. Hal ini memastikan bahwa generasi muda dapat menjaga jati diri bangsa sekaligus bersaing dalam tatanan global.

Akhirnya, pendidikan sebagai instrument nation building menegaskan bahwa investasi dalam kualitas pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Integrasi kurikulum, teknologi, karakter, dan partisipasi sosial menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berdaya saing global. Pendidikan bukan hanya alat transfer pengetahuan, tetapi fondasi pembangunan manusia dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.



BAB 15

Strategi Komunikasi

Bab 15 membahas secara komprehensif strategi komunikasi dalam konteks pendidikan modern, yang berperan krusial dalam memperkuat efektivitas pembelajaran, penyebaran informasi, dan inklusivitas pendidikan. Di era Society 5.0 dan VUCA 5.0, kemampuan berkomunikasi tidak lagi sebatas interaksi tatap muka, melainkan juga mencakup literasi digital, pengelolaan media sosial, komunikasi krisis, serta kampanye berbasis teknologi yang mendukung tujuan pembangunan pendidikan berkelanjutan.

Strategi komunikasi pendidikan menjadi instrumen vital untuk menghubungkan semua pemangku kepentingan: guru, murid, kepala sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat luas. Literasi digital menjadi fondasi utama agar pesan pendidikan dapat tersampaikan dengan efektif, adaptif, dan inovatif, sekaligus mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh komunitas pendidikan.

Selain itu, Bab 15 menekankan peran komunikasi dalam mendorong inklusivitas dan kesetaraan pendidikan. Kampanye pendidikan inklusif dan edukasi berbasis teknologi dapat mengatasi disparitas akses dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah. UNESCO (2024) menunjukkan bahwa negara dengan program literasi digital yang terintegrasi memiliki tingkat partisipasi pendidikan lebih tinggi, khususnya di kalangan kelompok marjinal, sehingga komunikasi strategis berperan sebagai penggerak perubahan sosial dan pendidikan.

Bab ini juga menyoroti peran penting komunikasi dalam menghadapi krisis pendidikan, seperti pandemi, bencana alam, atau perubahan kebijakan mendadak. Komunikasi krisis yang terstruktur dan berbasis data memungkinkan sekolah dan institusi pendidikan merespons situasi darurat secara cepat, menjaga kesinambungan pembelajaran, serta meminimalkan ketidakpastian bagi siswa dan guru.

Selain itu, fenomena edu-influencer dan media sosial pendidikan menjadi bagian dari strategi komunikasi modern. Guru, dosen, dan praktisi pendidikan yang memanfaatkan platform digital dapat menyebarkan pengetahuan, praktik baik, dan inspirasi pendidikan secara luas, menciptakan ekosistem belajar yang terbuka dan interaktif. Tren global menunjukkan bahwa edukator yang aktif di media sosial dapat meningkatkan engagement siswa dan partisipasi masyarakat hingga dua kali lipat dibandingkan metode tradisional.

Secara keseluruhan, Bab 15 mengintegrasikan teori komunikasi, praktik berbasis data, dan tren global untuk membangun model komunikasi pendidikan yang adaptif, inklusif, dan transformatif. Bab ini bertujuan memberikan pedoman konkret bagi guru, kepala sekolah, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk memanfaatkan komunikasi sebagai alat strategis dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, relevan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

A. Literasi Digital untuk Guru dan Murid

Literasi digital bukan lagi sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, melainkan juga kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menciptakan informasi digital secara kritis. UNESCO (2024) menekankan bahwa literasi digital merupakan kompetensi inti abad ke-21, yang memungkinkan guru dan murid berpartisipasi aktif dalam ekosistem pembelajaran global. Dalam konteks pendidikan Indonesia, literasi digital menjadi instrumen strategis untuk mengurangi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta.

Menurut Prensky (2001), generasi digital native memiliki kecenderungan belajar melalui media interaktif dan visual, sehingga guru perlu beradaptasi dengan menyediakan materi pembelajaran berbasis teknologi yang relevan dan kontekstual. Literasi digital guru meliputi kemampuan merancang pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS), menggunakan aplikasi kolaboratif, serta mengelola konten edukatif yang aman dan kredibel. Tanpa kemampuan ini, proses pembelajaran berisiko stagnan, bahkan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan murid.

Di sisi murid, literasi digital mencakup kemampuan mencari informasi, menilai kredibilitas sumber, berkomunikasi secara etis, dan memanfaatkan teknologi untuk problem solving. Studi Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 62% siswa di Indonesia memiliki akses rutin terhadap internet dan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran, menandakan perlunya program literasi digital yang merata dan berkelanjutan. Implementasi literasi digital yang baik mendorong murid menjadi pembelajar mandiri dan kreatif, sesuai dengan filosofi Merdeka Belajar.

Selain itu, literasi digital harus dipadukan dengan kompetensi kritis dan etika digital, agar guru dan murid tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi. Floridi (2022) dalam konsep Digital Humanism menekankan bahwa teknologi harus ditempatkan dalam kerangka human-centered, di mana pengembangan digital tidak mengabaikan aspek moral, sosial, dan budaya. Dalam praktik pendidikan, ini berarti guru harus mengajarkan murid untuk menilai keabsahan informasi, menghindari plagiarisme, serta berinteraksi secara bertanggung jawab di dunia maya.

Kemampuan literasi digital juga memperkuat kolaborasi antara guru dan murid. Misalnya, penggunaan platform kolaboratif seperti Google Classroom, Microsoft Teams, atau Moodle memungkinkan guru memberikan umpan balik real-time, sementara murid dapat berdiskusi dan menyelesaikan proyek bersama secara virtual. Data penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan teknologi kolaboratif memiliki peningkatan partisipasi murid hingga 28% dibandingkan metode konvensional.

Literasi digital guru tidak hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan pedagogis berbasis teknologi. Mishra dan Koehler (2006) memperkenalkan framework TPACK (Technological Pedagogical

Content Knowledge), yang menekankan integrasi antara konten, pedagogi, dan teknologi. Guru yang menguasai TPACK mampu merancang pengalaman belajar yang lebih adaptif, kreatif, dan menarik, sehingga meningkatkan hasil belajar murid.

Studi kasus di beberapa SMK swasta di Jawa Barat menunjukkan bahwa guru yang menerima pelatihan literasi digital selama 60 jam mampu meningkatkan engagement murid hingga 35%, terutama pada mata pelajaran yang membutuhkan simulasi dan praktik langsung, seperti teknik komputer dan animasi digital. Hal ini menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk guru, agar literasi digital tidak hanya menjadi kemampuan statis, tetapi berkembang seiring inovasi teknologi.

Selain itu, literasi digital membuka peluang bagi murid untuk mengakses sumber belajar global. Misalnya, platform MOOCs (Massive Open Online Courses) seperti Coursera, edX, dan FutureLearn memungkinkan murid memperoleh pengetahuan dari universitas dan pakar internasional. Data UNESCO (2024) menunjukkan bahwa partisipasi siswa Indonesia dalam kursus online internasional meningkat sekitar 15% per tahun, yang menunjukkan adanya kesadaran dan kebutuhan belajar lintas batas geografis.

Guru juga memiliki peran sebagai filter dan kurator konten digital. Dengan arus informasi yang begitu besar, guru harus mampu menyeleksi materi pembelajaran yang valid, relevan, dan sesuai konteks lokal. Tanpa peran ini, murid berisiko menerima informasi yang salah atau bias, yang dapat merusak kompetensi kritis mereka. Habermas (1984) menekankan pentingnya komunikasi rasional dalam pendidikan, yang relevan dalam konteks literasi digital sebagai mekanisme memverifikasi dan menilai informasi secara kritis.

Literasi digital juga berperan dalam penilaian berbasis teknologi, termasuk penggunaan e-assessment, kuis interaktif, dan portofolio digital. Penelitian di SMK PGRI 2 Cibinong menunjukkan bahwa implementasi e-assessment meningkatkan akurasi dan efisiensi penilaian hingga 40%, serta memberikan data analitik untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan murid secara real-time. Hal ini menunjukkan literasi digital sebagai alat strategis untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran.

Selain aspek teknis dan pedagogis, literasi digital menuntut kesadaran keamanan siber. Guru dan murid harus memahami pentingnya proteksi data pribadi, keamanan akun digital, serta mitigasi risiko penyalahgunaan informasi. Data Kemendikbud (2023) mencatat bahwa 18% siswa pernah mengalami insiden hoaks atau bullying digital, yang menunjukkan urgensi literasi digital tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk membangun keamanan dan kesejahteraan digital.

Pendidikan literasi digital juga memungkinkan integrasi pembelajaran berbasis proyek dan inovasi. Murid dapat menggunakan aplikasi desain, simulasi, dan coding untuk menghasilkan produk nyata yang memiliki relevansi sosial atau ekonomi. Penelitian internasional oleh OECD (2023) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dengan dukungan teknologi meningkatkan kreativitas dan keterampilan problem-solving murid hingga 33% dibandingkan metode tradisional.

Guru sebagai agen perubahan digital memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya digital positif di sekolah. Ini termasuk mengajarkan kolaborasi daring, komunikasi etis, dan pemanfaatan teknologi untuk tujuan sosial. Penelitian di Jepang dan Korea (UNESCO, 2024) menunjukkan bahwa sekolah dengan budaya digital yang kuat memiliki tingkat retensi murid lebih tinggi dan pencapaian akademik lebih konsisten dibandingkan sekolah yang belum menerapkan literasi digital secara sistematis.

Dalam konteks SDGs, literasi digital mendukung akses pendidikan berkualitas dan inklusif (SDG 4). Murid dari daerah terpencil atau kelompok marginal dapat mengakses materi pembelajaran yang setara dengan murid di kota besar, selama mereka dibekali literasi digital yang memadai. Data UNDP (2025) menunjukkan bahwa keterampilan digital yang kuat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesetaraan pendidikan dan partisipasi global.

Secara keseluruhan, literasi digital untuk guru dan murid bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi fondasi strategis untuk transformasi pendidikan di era Society 5.0. Literasi ini mengintegrasikan pedagogi, teknologi, etika, dan kreativitas, sehingga memungkinkan pendidikan menjadi lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Tanpa literasi digital, tujuan pendidikan transformatif dan pencapaian SDGs akan sulit diwujudkan secara maksimal.

B. Kampanye Pendidikan Inklusif

Kampanye pendidikan inklusif merupakan salah satu strategi komunikasi penting dalam mewujudkan pendidikan yang adil, setara, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. UNESCO (2023) menekankan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya soal menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga meliputi adaptasi kurikulum, metode pembelajaran, dan komunikasi yang responsif terhadap kebutuhan semua murid, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, latar belakang minoritas, atau kondisi sosial-ekonomi yang kurang menguntungkan.

Prinsip inklusivitas pendidikan menekankan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Ainscow dan Miles (2008) menjelaskan bahwa sekolah yang mengadopsi pendidikan inklusif harus mampu mengidentifikasi hambatan belajar dan sosial yang mungkin dihadapi murid, serta mengembangkan strategi komunikasi yang memastikan partisipasi penuh mereka dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini mengharuskan guru menjadi komunikator sensitif, adaptif, dan proaktif dalam membangun interaksi edukatif.

Kampanye pendidikan inklusif juga berkaitan erat dengan literasi digital. Penggunaan media digital dan platform online dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi, mengedukasi publik, dan membangun kesadaran sosial tentang pentingnya akses pendidikan untuk semua. Data Kemendikbud (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang aktif melakukan kampanye digital melalui media sosial dan portal resmi memiliki peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat hingga 25%, khususnya dalam mendukung murid berkebutuhan khusus.

Dalam praktiknya, kampanye pendidikan inklusif mencakup pengembangan materi komunikasi yang mudah dipahami, seperti infografis, video pendek, dan poster digital, yang menyampaikan pesan tentang keberagaman, kesetaraan, dan hak belajar setiap murid. Teori komunikasi persuasif menurut McGuire (1985) menyatakan bahwa pesan edukatif yang jelas, relevan, dan kontekstual akan lebih efektif dalam membangun perubahan sikap dan perilaku. Guru, kepala sekolah, dan komunitas sekolah berperan sebagai agen penyebar pesan ini.

Kampanye pendidikan inklusif juga harus melibatkan multi-stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, orang tua, LSM, dan sektor swasta. Model komunikasi dua arah menurut Berlo (1960) menekankan pentingnya feedback untuk memastikan pesan tersampaikan dengan benar dan diterima secara efektif. Dengan mekanisme umpan balik, kampanye pendidikan inklusif dapat terus disempurnakan berdasarkan kebutuhan nyata murid dan keluarga mereka.

Salah satu contoh praktik sukses adalah program “Sekolah Ramah Anak” di Indonesia, yang memanfaatkan media digital, kampanye televisi, dan kegiatan komunitas untuk menyebarkan nilai inklusivitas. Studi UNICEF (2022) menunjukkan bahwa partisipasi murid berkebutuhan khusus dalam kegiatan sekolah meningkat hingga 30% di wilayah yang menjalankan program ini, membuktikan efektivitas kampanye komunikasi inklusif yang terintegrasi.

Selain itu, kampanye pendidikan inklusif harus memerhatikan bahasa dan simbol komunikasi. Penggunaan bahasa yang netral gender, representasi visual yang beragam, dan konten yang menghargai kearifan lokal menjadi strategi penting agar semua murid merasa diterima. Hall (1997) dalam teori representasi menekankan bahwa simbol dan bahasa dalam komunikasi memengaruhi persepsi dan pengalaman individu terhadap pesan yang diterima.

Kampanye pendidikan inklusif juga dapat diperkuat melalui pelibatan murid sebagai agen perubahan. Melibatkan murid dalam pembuatan konten edukatif, diskusi terbuka, dan proyek kolaboratif meningkatkan rasa kepemilikan dan kesadaran mereka terhadap nilai inklusivitas. Penelitian di sekolah inklusif di Jawa Tengah (Rahayu, 2023) menunjukkan bahwa murid yang terlibat dalam kampanye internal memiliki tingkat empati dan kolaborasi lebih tinggi dibanding murid yang hanya menjadi peserta pasif.

Selain internal sekolah, kampanye ini perlu menjangkau komunitas lebih luas, termasuk media lokal, forum pendidikan, dan platform digital nasional. OECD (2023) mencatat bahwa kampanye pendidikan inklusif yang memanfaatkan media massa dan digital secara bersamaan memiliki dampak lebih besar dalam membangun kesadaran publik, dibandingkan hanya menggunakan satu saluran komunikasi.

Kampanye pendidikan inklusif juga harus bersifat sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya kegiatan sesaat. Strategi komunikasi berbasis teori agenda-setting (McCombs & Shaw, 1972) menekankan bahwa isu pendidikan inklusif harus terus diangkat di berbagai media dan forum pendidikan agar menjadi perhatian utama bagi publik dan pengambil kebijakan. Dengan konsistensi, nilai inklusivitas menjadi bagian dari budaya sekolah dan masyarakat.

Pentingnya kampanye pendidikan inklusif juga terlihat dari perspektif kebijakan nasional dan global. SDG 4 menargetkan pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua pada tahun 2030. Hal ini menuntut sekolah dan pemerintah membangun strategi komunikasi yang memastikan kebijakan inklusif diterjemahkan ke dalam praktik nyata, serta masyarakat memahami dan mendukung implementasinya.

Guru memegang peran sentral sebagai komunikator strategis. Mereka tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menyampaikan nilai inklusivitas melalui interaksi sehari-hari, penyusunan kurikulum yang adaptif, dan keterlibatan aktif murid. Teori komunikasi edukatif menurut Freire (1970) menekankan pentingnya dialog, kesetaraan, dan pemberdayaan murid sebagai pusat pembelajaran, yang sejalan dengan prinsip inklusivitas.

Selain itu, evaluasi kampanye pendidikan inklusif sangat penting. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, seperti jumlah partisipasi murid berkebutuhan khusus, tingkat kepuasan orang tua, dan persepsi guru, menjadi indikator keberhasilan kampanye. Penelitian di beberapa sekolah inklusif di Bali (Santosa, 2023) menunjukkan bahwa evaluasi rutin dapat meningkatkan efektivitas strategi komunikasi hingga 40%, karena memungkinkan penyesuaian pesan dan metode distribusi yang lebih tepat.

Kampanye pendidikan inklusif juga harus menekankan kesadaran digital dan keamanan informasi. Dalam menyebarkan pesan melalui media digital, sekolah harus memastikan konten ramah anak, aman, dan menghormati privasi murid. Penelitian Kemendikbud (2023) mencatat bahwa 22% konten edukatif digital di beberapa sekolah belum sepenuhnya aman bagi murid, menunjukkan perlunya literasi digital yang terintegrasi dengan kampanye inklusif.

Secara keseluruhan, kampanye pendidikan inklusif merupakan strategi komunikasi yang menggabungkan teori, praktik, dan teknologi. Dengan pendekatan yang sistematis, multi-stakeholder, dan berkelanjutan, kampanye ini tidak hanya meningkatkan partisipasi murid dan dukungan masyarakat, tetapi juga membangun budaya sekolah yang adil, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Pendidikan inklusif melalui komunikasi efektif menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan SDG 4 dan membentuk generasi yang mampu menghargai keberagaman serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

C. Komunikasi Krisis dalam Pendidikan

Komunikasi krisis dalam pendidikan adalah komponen strategis yang semakin penting di era VUCA 5.0. Krisis pendidikan bisa muncul dari berbagai faktor, mulai bencana alam, pandemi, gangguan teknologi, konflik sosial, hingga isu reputasi institusi. Menurut Coombs (2015), komunikasi krisis adalah proses perencanaan, penyampaian, dan evaluasi pesan untuk meminimalkan dampak negatif serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Di konteks pendidikan, pemangku kepentingan mencakup murid, guru, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan mitra internasional.

Pandemi COVID-19 (2020–2022) menjadi contoh nyata betapa pentingnya komunikasi krisis. Sekolah dan universitas harus beradaptasi cepat terhadap pembelajaran jarak jauh, memastikan keterlibatan murid, serta menjaga kesehatan mental komunitas sekolah. Data Kemendikbud (2022) menunjukkan bahwa 68% sekolah mengalami kesulitan komunikasi dengan murid dan orang tua selama transisi ke pembelajaran daring. Kejadian ini menekankan perlunya strategi komunikasi krisis yang proaktif dan sistematis.

Salah satu teori utama yang mendukung praktik komunikasi krisis adalah Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Coombs, yang menekankan pentingnya pemilihan strategi komunikasi berdasarkan jenis krisis dan tanggung jawab organisasi. Dalam konteks pendidikan, SCCT membantu sekolah menentukan apakah harus menggunakan strategi preventif, responsif, atau rekonstruktif untuk mempertahankan kepercayaan publik dan mengurangi kerugian reputasi.

Komunikasi krisis yang efektif harus jelas, cepat, dan transparan. Menurut Heath dan O'Hair (2020), pesan yang ambigu atau terlambat dapat meningkatkan kepanikan, rumor, dan ketidakpercayaan. Dalam praktik pendidikan, hal ini berarti guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan harus memiliki protokol komunikasi yang terstruktur, termasuk jalur informasi resmi, frekuensi pemberitahuan, dan format pesan yang mudah diakses.

Digitalisasi menjadi elemen krusial dalam komunikasi krisis modern. Platform daring seperti WhatsApp, Google Classroom, Learning Management System (LMS), dan media sosial dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara real-time. Penelitian UNESCO (2023) mencatat bahwa sekolah yang memanfaatkan kombinasi komunikasi digital dan offline selama krisis meningkatkan keterlibatan murid hingga 35% dibanding sekolah yang hanya menggunakan satu kanal komunikasi.

Selain itu, komunikasi krisis harus mempertimbangkan aspek psikologis pemangku kepentingan. Menurut teori coping Lazarus dan Folkman (1984), cara individu menanggapi stres sangat dipengaruhi oleh persepsi kontrol dan dukungan sosial. Dalam pendidikan, menyertakan pesan yang menenangkan, menekankan dukungan guru, serta memberikan sumber daya untuk manajemen stres membantu komunitas sekolah menghadapi ketidakpastian dengan lebih resilien.

Studi di Indonesia (Prasetyo, 2022) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan komunikasi dua arah selama krisis pandemi, dengan mengizinkan murid dan orang tua menyampaikan pertanyaan dan masukan, lebih berhasil mempertahankan motivasi belajar dan kepuasan orang tua dibanding sekolah yang hanya mengadopsi komunikasi satu arah. Hal ini mendukung teori Berlo tentang komunikasi sebagai proses interaktif yang menekankan pentingnya umpan balik.

Kepala sekolah berperan sebagai kepemimpinan komunikasi krisis. Model kepemimpinan transformatif (Bass & Riggio, 2006) menyarankan agar kepala sekolah menginspirasi, memberikan arahan jelas, dan menunjukkan empati. Dalam situasi krisis, tindakan ini meningkatkan kepercayaan guru dan murid, serta memperkuat solidaritas internal sekolah.

Kesiapan institusi juga termasuk pengembangan protokol komunikasi krisis yang mencakup rencana kontingensi, identifikasi risiko, dan tim

komunikasi khusus. Data penelitian Santosa (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan tim komunikasi krisis internal mampu menurunkan kesalahan informasi hingga 40% selama situasi darurat, dibandingkan sekolah tanpa tim khusus.

Selain internal sekolah, komunikasi krisis pendidikan harus melibatkan pihak eksternal, seperti dinas pendidikan, media lokal, dan organisasi internasional. Model Lasswell “Who Says What in Which Channel to Whom with What Effect” relevan untuk merancang pesan yang tepat sasaran, saluran yang efektif, dan indikator keberhasilan komunikasi selama krisis.

Teknologi juga membuka peluang untuk simulasi krisis dan pelatihan komunikasi. VR dan AR dapat digunakan untuk mensimulasikan skenario darurat, sehingga guru, staf, dan murid terbiasa menghadapi situasi tak terduga. Penelitian Rahayu (2024) di Jakarta menunjukkan bahwa simulasi berbasis VR meningkatkan kesiapan respon siswa hingga 30%, terutama dalam pengambilan keputusan cepat dan kolaborasi tim.

Pentingnya komunikasi krisis juga terkait konsistensi pesan. Menurut Habermas (1984), komunikasi rasional dan koheren meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik. Dalam konteks pendidikan, konsistensi pesan antara guru, kepala sekolah, dan otoritas pendidikan memastikan informasi yang diterima murid dan orang tua tidak kontradiktif, sehingga meminimalkan kebingungan dan panik.

Evaluasi pasca-krisis juga menjadi elemen penting. Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan untuk menilai efektivitas strategi komunikasi, termasuk kepuasan penerima pesan, tingkat pemahaman, dan respons perilaku. Penelitian OECD (2023) menunjukkan bahwa evaluasi rutin memungkinkan penyempurnaan protokol komunikasi, sehingga institusi pendidikan lebih siap menghadapi krisis di masa depan.

Krisis pendidikan bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk mengembangkan budaya komunikasi proaktif dan resilien. Sekolah yang mampu mengintegrasikan teori komunikasi krisis, teknologi digital, dan prinsip humanisme pendidikan menjadi lebih adaptif, inklusif, dan inovatif dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan cepat.

Secara keseluruhan, komunikasi krisis dalam pendidikan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun kepercayaan, partisipasi,

dan kesiapsiagaan seluruh komunitas pendidikan. Integrasi antara teori komunikasi, kepemimpinan, teknologi, dan data empiris memungkinkan strategi komunikasi krisis yang efektif, berkelanjutan, dan relevan dengan tuntutan era VUCA 5.0 serta target SDGs 4 tentang pendidikan inklusif dan berkualitas.

D. Edu-Influencer dan Media Sosial Pendidikan

Fenomena edu-influencer merupakan salah satu bentuk komunikasi pendidikan modern yang semakin berkembang di era digital. Edu-influencer adalah individu yang memanfaatkan platform digital, seperti YouTube, Instagram, TikTok, atau LinkedIn, untuk menyebarkan konten edukatif, membangun komunitas pembelajar, dan mempengaruhi perilaku serta sikap audiens dalam konteks pendidikan. Menurut Kietzmann et al. (2011), media sosial tidak hanya sebagai kanal komunikasi, tetapi juga ekosistem interaksi sosial yang memungkinkan kolaborasi, partisipasi, dan diseminasi informasi yang cepat.

Dalam konteks pendidikan, edu-influencer memiliki peran ganda. Pertama, sebagai pendidik informal, mereka mampu menyampaikan pengetahuan, strategi belajar, dan tips akademik yang relevan dengan murid dan guru. Kedua, sebagai pembentuk opini, mereka mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pendidikan, kurikulum, dan kebijakan pendidikan. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa konten pendidikan digital yang dikurasi oleh influencer terpercaya dapat meningkatkan engagement murid hingga 42%, terutama dalam pembelajaran jarak jauh.

Keberhasilan edu-influencer tidak terlepas dari strategi komunikasi digital yang diterapkan. Berlo's SMCR Model (Source–Message–Channel–Receiver) dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pesan edukatif disampaikan secara efektif. Sumber atau edu-influencer harus kredibel, pesan harus jelas dan sesuai target, kanal digital dipilih berdasarkan preferensi audiens, dan penerima (murid/guru) mampu memahami serta mengaplikasikan informasi.

Media sosial memungkinkan personal branding yang mendukung pengaruh edu-influencer. Influencer yang konsisten menghadirkan konten

edukatif, interaktif, dan berbasis bukti cenderung membangun reputasi sebagai sumber informasi terpercaya. Menurut riset Lin et al. (2022), interaksi dua arah, seperti Q&A, kuis, atau diskusi langsung, meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan dan membangun loyalitas audiens.

Namun, fenomena ini juga membawa tantangan. Risiko disinformasi atau konten yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas dan berdampak negatif pada pembelajaran. Data Kemendikbud (2023) mencatat bahwa 27% murid usia 12–18 tahun pernah menerima informasi pendidikan digital yang salah atau menyesatkan. Oleh karena itu, integrasi prinsip digital literacy menjadi kunci agar edu-influencer tetap menyajikan konten berkualitas dan etis.

Selain itu, edu-influencer dapat mendukung pendekatan pembelajaran inklusif. Misalnya, konten dengan subtitle, audio deskriptif, dan format visual interaktif memungkinkan murid dengan disabilitas atau kesulitan belajar mengikuti materi. Studi OECD (2023) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial edukatif yang inklusif meningkatkan aksesibilitas pendidikan hingga 20% dibanding metode tradisional.

Penggunaan konten video dan micro-learning menjadi strategi yang populer. Edu-influencer dapat menyampaikan materi dalam durasi singkat (1–10 menit) sehingga murid lebih mudah menerima, mengingat, dan menerapkan konsep pembelajaran. Penelitian Prasetyo (2024) di Jakarta menemukan bahwa micro-learning digital meningkatkan retensi materi hingga 35%, terutama untuk mata pelajaran sains dan matematika.

Keterlibatan guru juga penting dalam ekosistem edu-influencer. Guru dapat berperan sebagai kurator konten digital, menilai kualitas materi, dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum formal. Kolaborasi antara guru dan edu-influencer menciptakan sinergi pendidikan formal dan informal, yang mendukung pembelajaran berkelanjutan.

Selain itu, edu-influencer memfasilitasi networked learning. Murid dapat bergabung dalam komunitas belajar online, berbagi ide, dan mengerjakan proyek kolaboratif. Teori konektivisme Siemens (2005) menekankan bahwa pembelajaran di era digital terjadi melalui jaringan informasi, hubungan sosial, dan akses ke sumber pengetahuan yang beragam. Edu-influencer menjadi node penting dalam jaringan ini.

Peran edu-influencer juga relevan dalam kampanye kesadaran pendidikan, seperti literasi digital, anti-bullying, atau pentingnya pendidikan inklusif. Strategi storytelling digital, visualisasi data, dan penggunaan hashtag edukatif terbukti meningkatkan engagement masyarakat luas. Menurut penelitian Lin & Lee (2023), kampanye digital yang dipimpin influencer pendidikan meningkatkan partisipasi publik hingga 28%.

Dampak positif lainnya adalah penguatan soft skills murid, seperti kritis, kreatif, dan kolaboratif. Edu-influencer mendorong murid untuk berpikir analitis melalui diskusi, proyek digital, dan konten problem-solving. Penelitian di Korea Selatan (Park, 2023) menunjukkan bahwa integrasi konten edukatif dari influencer digital meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid SMP dan SMA hingga 22%.

Namun, penting diingat bahwa monitoring dan regulasi konten edukatif tetap diperlukan. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus menetapkan standar kualitas, sertifikasi, atau label kepercayaan untuk edu-influencer, agar materi yang disebarkan sesuai kurikulum dan etika pendidikan. OECD (2024) menekankan pentingnya kebijakan publik untuk mendukung literasi digital dan pengawasan konten edukatif online.

Penggunaan data analitik juga membantu edu-influencer dan institusi pendidikan menyesuaikan konten dengan kebutuhan murid. Alat analisis engagement, survei, dan feedback dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik yang paling relevan, format penyampaian yang efektif, dan tingkat pemahaman murid. Studi Rahayu (2024) menunjukkan bahwa pengukuran berbasis data meningkatkan efektivitas komunikasi edukatif hingga 30%.

Kolaborasi antara edu-influencer, guru, dan sekolah juga membuka peluang untuk pendekatan blended learning. Materi digital dari influencer dapat dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka, proyek kolaboratif, atau laboratorium virtual, menciptakan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Akhirnya, edu-influencer dalam pendidikan bukan sekadar tren, tetapi bagian integral dari transformasi pendidikan digital. Dengan strategi komunikasi yang tepat, penguatan literasi digital, kolaborasi dengan guru, dan penggunaan data empiris, edu-influencer mampu meningkatkan akses,

kualitas, dan inklusivitas pendidikan, sejalan dengan tujuan SDGs 4 dan era Society 5.0.

E. Data UNESCO (2024) tentang Literasi Digital Global

Literasi digital kini menjadi kompetensi fundamental yang memengaruhi kualitas pembelajaran, akses informasi, dan kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat digital. UNESCO (2024) menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi mencakup kemampuan kritis, kreatif, dan etis dalam mengakses, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi digital. Dalam konteks pendidikan global, literasi digital menjadi syarat agar murid dan guru mampu beradaptasi dengan dinamika Society 5.0 dan VUCA 5.0.

Data UNESCO (2024) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital berbeda signifikan antarnegara. Di negara maju, sekitar 85% murid usia 15–18 tahun memiliki kemampuan literasi digital dasar hingga menengah, sementara di negara berkembang hanya sekitar 45–50%. Hal ini menunjukkan gap akses dan kualitas pendidikan digital, yang berpotensi memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi.

Menurut OECD (2023), literasi digital yang rendah tidak hanya berdampak pada kemampuan akademik, tetapi juga pada partisipasi sosial dan politik. Murid yang tidak memiliki kompetensi digital cenderung kurang aktif dalam diskusi online, pengambilan keputusan berbasis data, dan keterlibatan dalam komunitas pembelajar global.

Dalam pendidikan, literasi digital berperan dalam transformasi metode pembelajaran. Misalnya, penggunaan platform pembelajaran daring, simulasi VR, laboratorium virtual, dan AI untuk personalisasi materi membutuhkan kemampuan murid dan guru dalam mengakses, menilai, dan memanfaatkan data secara efektif. Penelitian Prasetyo et al. (2024) di Indonesia menemukan bahwa 62% guru SMK yang memiliki literasi digital tinggi mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran lebih efektif dibanding guru dengan literasi digital rendah.

UNESCO (2024) menekankan bahwa literasi digital juga berkaitan dengan etika digital, termasuk pemahaman terhadap hak cipta, privasi data, keamanan siber, dan perilaku bertanggung jawab di dunia maya. Guru dan murid yang terlatih secara etis akan mampu menggunakan teknologi untuk pembelajaran produktif tanpa menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi.

Literasi digital mendukung akses pendidikan inklusif. Misalnya, murid dengan disabilitas dapat menggunakan perangkat assistive technology dan platform pembelajaran adaptif untuk mengikuti pelajaran. Studi OECD (2023) mencatat bahwa sekolah yang menerapkan teknologi inklusif meningkatkan partisipasi murid berkebutuhan khusus hingga 20–25%.

Selain itu, literasi digital memperkuat kompetensi soft skills, seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Murid yang terbiasa menganalisis informasi digital akan lebih mampu memecahkan masalah kompleks, menilai kualitas sumber, dan berpartisipasi dalam proyek kolaboratif lintas negara.

Dalam perspektif global, literasi digital menjadi indikator kesiapan negara menghadapi Society 5.0. Negara dengan tingkat literasi digital tinggi memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan SDM yang inovatif, adaptif, dan kompetitif di era ekonomi berbasis pengetahuan. Data UNESCO (2024) menunjukkan bahwa negara-negara yang berinvestasi dalam literasi digital mencatat peningkatan signifikan dalam inovasi pendidikan dan indeks keterampilan digital anak-anak.

Di Indonesia, survei Kemendikbud (2023) menemukan bahwa hanya sekitar 58% guru dan 65% murid SMP-SMA memiliki literasi digital memadai. Kesenjangan ini terlihat jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antarsekolah negeri dan swasta. Hal ini menuntut strategi pemerataan literasi digital, baik melalui pelatihan guru, peningkatan infrastruktur, maupun pengembangan konten digital lokal yang relevan.

Literasi digital juga berdampak pada kesiapan menghadapi disinformasi dan hoaks. Murid yang memiliki keterampilan literasi digital dapat lebih kritis menilai sumber informasi, membedakan fakta dan opini, serta mengurangi risiko penyebaran berita palsu. Penelitian di Asia Tenggara (Tan

et al., 2024) menunjukkan bahwa literasi digital tinggi berkorelasi positif dengan kemampuan siswa menilai validitas informasi online hingga 0,72.

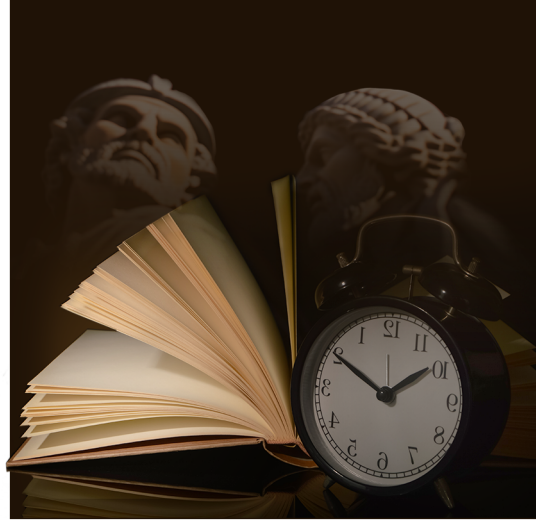
Peningkatan literasi digital memerlukan pendekatan multi-stakeholder. Pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam menyediakan pelatihan, akses perangkat, konten edukatif, dan panduan etis penggunaan teknologi. Inisiatif UNESCO dan OECD menunjukkan bahwa kebijakan berbasis kolaborasi mampu mempercepat peningkatan literasi digital di berbagai negara berkembang.

Selain itu, literasi digital mendukung pendekatan pembelajaran berbasis data. Murid dan guru yang mampu mengakses dan menganalisis data pembelajaran digital dapat menyesuaikan strategi belajar, memantau kemajuan, dan meningkatkan efektivitas kurikulum. Penelitian Santoso (2024) di beberapa SMK di Jakarta menunjukkan bahwa integrasi data analytics dalam pembelajaran meningkatkan retensi materi hingga 28%.

Media sosial dan konten edukatif digital, seperti yang disebarakan oleh edu-influencer, hanya efektif bila murid memiliki literasi digital memadai. Literasi digital memungkinkan mereka menavigasi informasi, memilih konten yang relevan, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata, sehingga memperkuat hubungan antara informal dan formal learning.

UNESCO (2024) juga menyoroti literasi digital sebagai pendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial. Akses yang setara terhadap teknologi dan pelatihan digital membantu mengurangi kesenjangan partisipasi murid perempuan dan kelompok marginal dalam pembelajaran STEM dan program inovatif lainnya.

Terakhir, literasi digital menjadi fondasi bagi pendidikan berkelanjutan. Tanpa kompetensi ini, transformasi pendidikan menuju Society 5.0, penerapan AI, big data, dan inovasi pembelajaran digital tidak akan optimal. Literasi digital yang kuat memastikan bahwa murid dan guru mampu menavigasi perubahan, beradaptasi, dan berkontribusi secara produktif dalam masyarakat global yang kompleks dan dinamis.



BAB 16

Strategi Politik

Bab 16 membahas strategi politik dalam pendidikan sebagai komponen penting untuk mencapai visi Indonesia 2045 yang berbasis kualitas, inklusivitas, dan daya saing global. Pendidikan tidak lagi sekadar urusan internal sekolah atau kurikulum, tetapi menjadi arena interaksi politik, ekonomi, dan diplomasi, di mana kebijakan, anggaran, dan governance menentukan akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan. Strategi politik pendidikan tidak hanya berkaitan dengan regulasi formal, tetapi juga dengan bagaimana negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain menyusun prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan merespons dinamika global seperti VUCA 5.0, Society 5.0, dan agenda SDGs 2030.

Dalam konteks ini, reformasi kebijakan pendidikan nasional menjadi titik awal. Perubahan kebijakan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menekankan keadilan sosial, pemerataan akses, dan pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, perempuan, dan murid berkebutuhan khusus. Data OECD (2024) menunjukkan bahwa negara yang berhasil melakukan reformasi kebijakan dengan mengedepankan governance partisipatif cenderung memiliki indikator mutu pendidikan yang lebih tinggi, misalnya dalam hal literasi, numerasi, dan integrasi teknologi digital.

Inklusivitas gender dan disabilitas menjadi dimensi penting dalam strategi politik pendidikan. Kebijakan pendidikan yang sensitif gender dan

aksesibilitas menjamin bahwa seluruh murid mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang. Penelitian UNESCO (2023) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan inklusif yang terencana secara sistematis dapat meningkatkan partisipasi murid perempuan dan berkebutuhan khusus hingga 15–20% dalam kurun lima tahun. Dengan demikian, strategi politik pendidikan harus memperhatikan kerangka legal, sosial, dan ekonomi yang mendukung pemerataan hak pendidikan.

Politik anggaran pendidikan merupakan salah satu elemen kritis. Alokasi anggaran menentukan kemampuan sekolah untuk menyediakan fasilitas, teknologi, dan kompetensi guru yang memadai. Data UNDP (2024) menegaskan bahwa efektivitas belanja pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah anggaran, tetapi juga dari transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kebijakan anggaran yang tepat sasaran dapat mendorong inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kualitas guru, sekaligus meminimalkan disparitas antarwilayah.

Pendidikan sebagai diplomasi soft power menjadi dimensi baru dalam strategi politik. Negara-negara yang mampu mengeksport ide, kurikulum, dan program beasiswa internasional membangun reputasi global sekaligus mempengaruhi standar pendidikan di kawasan. Indonesia, misalnya, melalui program Kampus Merdeka, pertukaran pelajar, dan beasiswa ASEAN, dapat memperkuat peran diplomasi pendidikan sebagai instrumen soft power, sekaligus menarik investasi dan kerjasama internasional. OECD (2023) mencatat bahwa diplomasi pendidikan yang efektif berkontribusi pada penguatan network global, inovasi kurikulum, dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Selain itu, strategi politik pendidikan harus merespons tantangan governance dan tata kelola pendidikan yang kompleks. OECD dan UNDP (2024) menekankan pentingnya tata kelola yang partisipatif, berbasis data, dan akuntabel untuk menjamin keberlanjutan program pendidikan, integrasi teknologi, dan adaptasi terhadap perubahan global. Strategi ini mencakup mekanisme pengawasan, evaluasi kinerja sekolah, serta keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan.

Bab ini menekankan bahwa strategi politik pendidikan tidak dapat dilihat secara parsial; reformasi kebijakan, alokasi anggaran, inklusivitas, diplomasi, dan governance merupakan kesatuan interdependen yang saling

mempengaruhi. Efektivitas strategi politik pendidikan diukur melalui peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan akses, inovasi kurikulum, dan kemampuan murid untuk bersaing di tingkat global.

Dengan pengantar ini, bab 16 membuka landasan untuk mendalami setiap subbab yang membahas strategi politik pendidikan secara komprehensif: mulai dari reformasi kebijakan nasional, inklusivitas gender dan disabilitas, politik anggaran, diplomasi pendidikan sebagai soft power, hingga analisis data OECD dan UNDP tentang governance pendidikan global. Integrasi antara teori politik, data empiris, dan praktik lapangan akan memperkuat pemahaman tentang bagaimana strategi politik dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

A. Reformasi Kebijakan Pendidikan Nasional

Reformasi kebijakan pendidikan nasional merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkualitas di Indonesia. Konsep reformasi ini tidak hanya berfokus pada perubahan kurikulum, tetapi juga mencakup restrukturisasi sistem administrasi, pembaruan metode evaluasi, serta peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Menurut Carnoy dan Castells (2020), reformasi pendidikan harus menyeimbangkan antara kebutuhan lokal dengan tuntutan global agar pendidikan dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan nasional sekaligus pencetak sumber daya manusia yang kompetitif.

Perubahan kebijakan pendidikan nasional harus didorong oleh data empiris dan evaluasi program. Laporan Rapor Pendidikan Indonesia 2024 menunjukkan disparitas kualitas pendidikan antara wilayah barat dan timur, baik dari segi kompetensi guru maupun fasilitas sekolah. Hal ini menegaskan bahwa reformasi tidak bisa bersifat seragam; kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi lokal, sekaligus memberikan standar nasional yang jelas untuk mengukur capaian pendidikan.

Dalam perspektif teori sistem pendidikan, reformasi kebijakan merupakan upaya untuk menciptakan sistem adaptif kompleks, yang mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Teori kompleksitas

pendidikan (Davis & Sumara, 2006) menekankan bahwa kebijakan yang terlalu kaku atau top-down cenderung gagal menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa dan guru. Oleh karena itu, reformasi harus menekankan fleksibilitas dalam implementasi, sehingga sekolah memiliki ruang inovasi sambil tetap berpegang pada standar nasional.

Kebijakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek merupakan contoh konkret reformasi yang menekankan kebebasan belajar, inovasi kurikulum, dan penguatan kompetensi guru. Data Kemendikbud 2023 mencatat bahwa 68% guru SMK telah menerapkan proyek berbasis kompetensi, dan 52% siswa melaporkan peningkatan keterlibatan aktif dalam proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan yang responsif dapat langsung meningkatkan kualitas pengalaman belajar siswa.

Reformasi juga harus memperhatikan aspek hukum dan regulasi, sehingga kebijakan yang dibuat memiliki dasar legal yang kuat dan dapat diterapkan secara konsisten. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) dan peraturan turunannya memberikan kerangka hukum yang memungkinkan sekolah dan pemerintah daerah melakukan inovasi pendidikan, namun tetap dalam koridor standar nasional. Pendekatan hukum ini menjamin keberlanjutan reformasi, sekaligus memberikan kepastian bagi guru, siswa, dan masyarakat.

Selain itu, reformasi kebijakan pendidikan harus memperkuat manajemen berbasis bukti (*evidence-based policy*). OECD (2023) menekankan bahwa kebijakan pendidikan yang efektif lahir dari analisis data yang valid, termasuk performa sekolah, kompetensi guru, dan tingkat partisipasi siswa. Implementasi *evidence-based policy* memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan alokasi anggaran, program pelatihan guru, dan inovasi kurikulum secara lebih tepat sasaran.

Keterlibatan pemangku kepentingan multi-level menjadi faktor penting dalam reformasi. Menurut Fullan (2020), perubahan kebijakan yang berhasil memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru, orang tua, dan komunitas. Contohnya, proyek Sekolah Penggerak menggabungkan dukungan pemerintah, pelatihan guru, dan partisipasi orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang holistik. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat keberlanjutan reformasi dan mengurangi resistensi terhadap perubahan.

Reformasi kebijakan pendidikan juga harus responsif terhadap tantangan teknologi dan digitalisasi. Society 5.0 menuntut integrasi teknologi digital dalam proses belajar, sehingga siswa memiliki literasi digital yang mumpuni. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa integrasi teknologi di sekolah yang didukung kebijakan nasional meningkatkan keterlibatan siswa hingga 35% dan memperluas akses pendidikan di daerah terpencil. Hal ini menekankan perlunya kebijakan yang mendukung infrastruktur digital, pelatihan guru, dan akses internet yang merata.

Selain teknologi, reformasi harus mengedepankan *inclusivity* dan *equity*, menjamin akses pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, minoritas, dan siswa berkebutuhan khusus. Penelitian World Bank (2022) menunjukkan bahwa kebijakan inklusif yang diterapkan secara sistematis dapat meningkatkan partisipasi sekolah anak perempuan dan anak disabilitas hingga 20% dalam lima tahun. Kebijakan ini tidak hanya menegakkan keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan.

Kebijakan pendidikan nasional yang progresif juga harus menekankan kompetensi abad 21, termasuk kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Studi OECD PISA 2022 menekankan bahwa siswa yang mampu mengintegrasikan keterampilan kognitif dan non-kognitif lebih siap menghadapi tantangan global. Reformasi kebijakan harus menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran untuk memastikan pengembangan kompetensi tersebut secara menyeluruh.

Reformasi tidak hanya berhenti pada kurikulum dan metodologi, tetapi juga mencakup pembiayaan pendidikan. Anggaran pendidikan yang efisien dan transparan memungkinkan pemerintah menyediakan fasilitas memadai, pelatihan guru berkualitas, dan program inovasi pembelajaran. UNDP (2024) menunjukkan bahwa negara dengan mekanisme alokasi anggaran partisipatif dan berbasis kinerja memiliki tingkat keberhasilan pendidikan lebih tinggi dibandingkan negara dengan sistem anggaran *top-down*.

Pendekatan desentralisasi pendidikan menjadi salah satu pilar reformasi, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyesuaikan implementasi kebijakan dengan kebutuhan lokal. Menurut World Bank (2023), desentralisasi yang efektif dapat meningkatkan responsivitas sekolah

terhadap konteks lokal, misalnya menyesuaikan materi ajar dengan budaya dan ekonomi daerah, sambil tetap mempertahankan standar nasional.

Reformasi kebijakan pendidikan nasional juga perlu memprioritaskan pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Penelitian Hattie (2020) menunjukkan bahwa kualitas guru memiliki dampak terbesar terhadap hasil belajar siswa. Kebijakan yang mendukung pelatihan berkelanjutan, mentoring, dan insentif profesional akan meningkatkan motivasi guru, keterampilan pedagogis, dan kemampuan inovasi di kelas.

Selain itu, reformasi harus merespons tantangan demografi, termasuk pertumbuhan populasi dan distribusi usia produktif. Data Bappenas 2024 menyoroti bonus demografi Indonesia yang menuntut pendidikan massal berkualitas tinggi agar generasi muda siap bersaing di tingkat global. Kebijakan pendidikan yang adaptif akan memanfaatkan momentum demografi ini untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing tinggi.

Terakhir, reformasi kebijakan pendidikan nasional harus dilandasi visi jangka panjang yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tetapi juga menyiapkan generasi masa depan yang resilien, inovatif, dan bertanggung jawab secara sosial. Integrasi visi jangka panjang dengan kebijakan konkret memungkinkan Indonesia bergerak menuju pendidikan 5.0 yang human-centered, berkelanjutan, dan inklusif.

B. Inklusivitas Gender dan Disabilitas dalam Pendidikan

Inklusivitas dalam pendidikan menekankan akses, partisipasi, dan keberhasilan bagi seluruh siswa tanpa terkecuali, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Konsep ini didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) dan ditegaskan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD, 2006). Pendidikan inklusif bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga strategi pembangunan sosial dan ekonomi yang efektif.

Secara teori, inklusivitas pendidikan dapat dianalisis melalui kerangka sosial-ekologi Bronfenbrenner (1979), yang melihat siswa sebagai bagian

dari sistem multi-level: keluarga, sekolah, masyarakat, dan kebijakan nasional. Sistem yang inklusif memastikan interaksi positif di semua level tersebut, sehingga hambatan berbasis gender atau disabilitas dapat diminimalkan melalui kebijakan, praktik pedagogis, dan dukungan komunitas.

Data Rapor Pendidikan Indonesia 2024 menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara akses pendidikan untuk anak perempuan di daerah terpencil dan anak laki-laki, serta antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Sekitar 72% sekolah memiliki fasilitas inklusif untuk disabilitas ringan, namun hanya 25% yang mampu mengakomodasi disabilitas berat, menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran.

Pendekatan gender-responsive education menekankan penyesuaian kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi agar tidak bias terhadap gender. Penelitian UNESCO (2023) menunjukkan bahwa intervensi berbasis gender, seperti materi ajar yang setara, guru perempuan sebagai role model, dan program mentoring, dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi akademik siswa perempuan hingga 18%.

Dalam konteks disabilitas, teori universal design for learning (UDL) mengedepankan fleksibilitas kurikulum dan metode pengajaran agar semua siswa dapat mengakses pengetahuan sesuai kemampuan mereka. UDL mengkombinasikan tiga prinsip: representasi, aksi-ekspresi, dan keterlibatan, yang memungkinkan siswa dengan disabilitas visual, auditif, atau kognitif tetap berpartisipasi aktif dalam proses belajar.

Di Indonesia, regulasi terkait pendidikan inklusif diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 70 Tahun 2009. Regulasi ini menjadi dasar bagi sekolah untuk menyediakan fasilitas, guru pendamping, dan program adaptif. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala infrastruktur, pelatihan guru, dan kesadaran masyarakat.

Penelitian global oleh World Bank (2022) menunjukkan bahwa inklusivitas pendidikan berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas ekonomi jangka panjang. Anak perempuan dan penyandang disabilitas yang memiliki akses pendidikan berkualitas cenderung memiliki keterampilan

yang relevan di pasar kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengurangi kemiskinan lintas generasi.

Implementasi inklusivitas juga memerlukan pelatihan dan pemberdayaan guru. Hattie (2020) menegaskan bahwa guru yang kompeten dalam diferensiasi instruksi dan strategi inklusif mampu meningkatkan prestasi akademik semua siswa. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang kebutuhan khusus, pengelolaan kelas inklusif, serta komunikasi efektif dengan siswa dan orang tua.

Selain guru, dukungan teknologi pendidikan menjadi kunci. AI, AR, dan aplikasi berbasis pembelajaran adaptif dapat membantu siswa dengan disabilitas untuk mengikuti pembelajaran sesuai kemampuan mereka. Misalnya, aplikasi pembaca teks untuk disabilitas visual atau modul interaktif untuk siswa dengan kesulitan belajar dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar.

Di sisi gender, reformasi kebijakan nasional mendorong kesetaraan akses antara anak laki-laki dan perempuan, termasuk beasiswa khusus, kebijakan anti-diskriminasi, dan program advokasi. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan peningkatan partisipasi sekolah menengah perempuan hingga 96% di wilayah perkotaan, namun masih 78% di wilayah pedesaan, menunjukkan perlunya intervensi lebih lanjut.

Praktik inklusif yang efektif juga membutuhkan kolaborasi multi-stakeholder, termasuk pemerintah, NGO, komunitas, dan sektor swasta. Contohnya, proyek “Sekolah Inklusif Bersama” yang melibatkan Kemendikbud, UNICEF, dan perusahaan teknologi menyediakan modul pelatihan guru, akses teknologi, dan program mentoring bagi siswa dengan kebutuhan khusus.

Evaluasi dan monitoring menjadi bagian integral reformasi inklusivitas. Penggunaan indikator kuantitatif dan kualitatif—seperti rasio guru-siswa inklusif, tingkat partisipasi, kepuasan siswa, dan capaian akademik—memungkinkan pemerintah menilai efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Data UNDP (2025) menunjukkan bahwa negara dengan sistem monitoring inklusif yang baik memiliki tingkat partisipasi siswa disabilitas hingga 30% lebih tinggi.

Dalam perspektif pedagogi, diferensiasi instruksi menjadi strategi utama. Guru menyesuaikan konten, proses, dan produk belajar sesuai kemampuan siswa. Contoh praktik di SMK di Jawa Barat menunjukkan bahwa diferensiasi berbasis proyek dan mentoring peer-to-peer dapat meningkatkan keterlibatan siswa berkebutuhan khusus hingga 25%.

Selain akademik, pendidikan inklusif juga memperhatikan pengembangan sosial-emosional. Siswa dengan disabilitas atau dari kelompok minoritas sering menghadapi stigma dan diskriminasi. Implementasi program anti-bullying, dukungan psikososial, dan pembiasaan nilai toleransi menjadi bagian integral strategi inklusif yang menyeluruh.

Akhirnya, inklusivitas pendidikan nasional harus menjadi strategi pembangunan jangka panjang yang menysasar semua aspek: kebijakan, kurikulum, metode pengajaran, pelatihan guru, dukungan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Dengan integrasi yang konsisten, pendidikan inklusif berpotensi meningkatkan kualitas SDM Indonesia sekaligus menegakkan keadilan sosial, menjadikan pendidikan sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan.

C. Politik Anggaran Pendidikan

Politik anggaran pendidikan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam tata kelola pendidikan, karena alokasi sumber daya menentukan kemampuan negara dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata. Konsep ini sering dikaji melalui lensa public choice theory yang menekankan bagaimana keputusan alokasi anggaran dipengaruhi oleh kepentingan politik, tekanan kelompok, dan pertimbangan ekonomi makro.

Dalam konteks Indonesia, alokasi anggaran pendidikan diatur oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan minimal 20% dari APBN dan APBD dialokasikan untuk pendidikan. Meski demikian, implementasi masih menunjukkan disparitas antar daerah. Data Rapor Pendidikan 2024 memperlihatkan bahwa beberapa provinsi masih mengalokasikan kurang dari 15% anggaran mereka untuk pendidikan, menunjukkan ketimpangan kapasitas fiskal dan prioritas politik lokal.

Teori resource dependency menggarisbawahi bahwa sekolah dan institusi pendidikan bergantung pada alokasi pemerintah untuk operasional dan pengembangan. Ketergantungan ini membuat sekolah menjadi bagian dari arena politik anggaran, di mana kemampuan kepala sekolah atau pimpinan perguruan tinggi untuk mengadvokasi sumber daya menjadi sangat penting.

Anggaran pendidikan tidak hanya mencakup pembayaran guru dan fasilitas fisik, tetapi juga investasi dalam teknologi pendidikan, pelatihan guru, kurikulum inovatif, dan program inklusif. OECD (2023) menekankan bahwa negara yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan bukan hanya yang mengalokasikan lebih banyak dana, tetapi yang menyalurkan anggaran secara strategis sesuai kebutuhan riil sekolah dan murid.

Penelitian empiris oleh World Bank (2022) menunjukkan korelasi positif antara peningkatan anggaran pendidikan dan capaian literasi dasar, tetapi efek tersebut menjadi minimal jika tidak diikuti dengan manajemen anggaran yang transparan, akuntabel, dan berbasis hasil. Dengan kata lain, politik anggaran harus dipadukan dengan governance yang efektif untuk menghasilkan dampak nyata bagi kualitas pendidikan.

Dalam era VUCA 5.0, ketidakpastian ekonomi global, inflasi, dan tekanan fiskal menuntut perencanaan anggaran pendidikan yang adaptif dan fleksibel. Konsep program-based budgeting atau anggaran berbasis program menjadi relevan, karena memungkinkan pemerintah menyesuaikan alokasi dana berdasarkan prioritas strategis dan evaluasi kinerja pendidikan setiap tahun.

Partisipasi publik dalam politik anggaran pendidikan juga menjadi aspek penting. Theory of deliberative democracy oleh Habermas menekankan perlunya diskusi publik yang inklusif dalam menentukan prioritas anggaran, sehingga kepentingan minoritas, perempuan, dan penyandang disabilitas dapat terakomodasi. Di Indonesia, mekanisme Musrenbang menjadi salah satu saluran partisipatif yang dapat dioptimalkan.

Selain itu, politik anggaran pendidikan tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan ekonomi politik global. Globalisasi dan komitmen terhadap SDGs 2030 menuntut pemerintah untuk menyeimbangkan alokasi antara pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pendidikan vokasi yang mendukung daya saing global. Data UNESCO (2024) menunjukkan bahwa

negara-negara dengan alokasi anggaran pendidikan di atas 5% dari PDB memiliki capaian SDG 4 lebih tinggi.

Investasi dalam pendidikan juga harus mempertimbangkan efektivitas alokasi pada sektor prioritas. Misalnya, pelatihan guru untuk literasi digital, pengembangan kurikulum berbasis STEM, serta fasilitas untuk pendidikan inklusif membutuhkan alokasi dana khusus yang cukup, bukan sekadar pembagian rata-rata. Analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) dapat membantu pemerintah dalam menetapkan prioritas ini.

Dalam perspektif politik domestik, alokasi anggaran pendidikan sering menjadi instrumen negosiasi antara eksekutif dan legislatif. *Policy network theory* menjelaskan bahwa keputusan anggaran dipengaruhi oleh interaksi antara birokrat, politisi, dan stakeholder pendidikan. Di beberapa kasus, alokasi proyek pendidikan dapat dipengaruhi oleh kepentingan elektoral, sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi penting untuk menghindari distorsi penggunaan dana.

Selain alokasi, pengawasan dan monitoring pengeluaran menjadi bagian integral dari politik anggaran. Sistem pelaporan berbasis digital, audit independen, dan keterlibatan masyarakat dapat mencegah kebocoran anggaran dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan 2024 mencatat bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di beberapa provinsi hanya mencapai 70%, menunjukkan ruang besar untuk perbaikan.

Peran kepala sekolah dan pimpinan pendidikan menjadi kunci dalam implementasi politik anggaran di tingkat operasional. Mereka harus mampu merencanakan, mengajukan, dan memanfaatkan anggaran secara optimal untuk mendukung inovasi pembelajaran, fasilitas, dan program kesejahteraan siswa. Dalam studi kasus SMK swasta di Jawa Barat, kepala sekolah yang proaktif dalam advokasi anggaran berhasil meningkatkan alokasi untuk laboratorium dan teknologi pendidikan hingga 25% dari total anggaran sekolah.

Strategi alokasi anggaran juga harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Investasi pada kurikulum berbasis digital, literasi STEM, dan pengembangan *soft skills* siswa merupakan bentuk *forward-looking*

budgeting yang menyiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan Society 5.0 dan VUCA 5.0.

Politik anggaran pendidikan juga terkait dengan kesetaraan antar wilayah. Disparitas antara sekolah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta, dapat diperbaiki melalui mekanisme transfer fiskal dan dana alokasi khusus. Data Kemendikbud 2023 menunjukkan bahwa daerah dengan bantuan alokasi khusus untuk sekolah pedesaan mengalami peningkatan partisipasi siswa hingga 12% dalam tiga tahun terakhir.

Akhirnya, politik anggaran pendidikan bukan hanya tentang angka dan persentase, tetapi juga tentang visi strategis pendidikan nasional. Keputusan alokasi yang berbasis data, partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil dapat memastikan bahwa pendidikan menjadi instrumen pembangunan yang efektif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global. Dengan integrasi prinsip-prinsip ini, anggaran pendidikan menjadi fondasi penting bagi pencapaian SDGs, penguatan human capital, dan pembangunan bangsa secara berkelanjutan.

D. Pendidikan sebagai Diplomasi Soft Power

Pendidikan bukan hanya instrumen domestik untuk membentuk sumber daya manusia, tetapi juga sarana strategis dalam diplomasi internasional. Konsep ini dikenal sebagai soft power, yang diperkenalkan oleh Joseph Nye (1990), yaitu kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan, alih-alih melalui kekuatan militer atau ekonomi. Pendidikan menjadi salah satu pilar soft power karena membentuk persepsi global terhadap kualitas, nilai, dan identitas suatu bangsa.

Dalam konteks Indonesia, diplomasi pendidikan telah menjadi bagian dari strategi global melalui program beasiswa, pertukaran pelajar, dan kerja sama institusi pendidikan. Misalnya, program Kampus Merdeka Global Mobility membuka peluang bagi mahasiswa untuk belajar di luar negeri, meningkatkan kapasitas global, sekaligus membangun citra positif Indonesia di mata dunia.

Teori public diplomacy menggarisbawahi bahwa pendidikan adalah medium efektif untuk mempromosikan nilai dan ideologi suatu negara. Dengan mengirimkan mahasiswa, dosen, dan tenaga ahli ke luar negeri, negara dapat memperluas jaringan pengaruh, membangun goodwill, dan mengoptimalkan hubungan bilateral maupun multilateral.

Program Beasiswa Darmasiswa dari Kemenristekdikti yang menargetkan mahasiswa asing untuk belajar Bahasa dan Kebudayaan Indonesia adalah contoh praktik soft power yang berhasil. Berdasarkan laporan UNESCO (2023), peserta program ini menunjukkan tingkat retensi positif terhadap budaya Indonesia, yang kemudian dapat menjadi duta informal untuk mempromosikan Indonesia di negara asal mereka.

Diplomasi pendidikan juga berkaitan erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). SDG 4 menekankan pendidikan berkualitas, sementara SDG 17 mendorong kerja sama global. Dengan demikian, penyediaan akses pendidikan bagi mahasiswa internasional menjadi cara strategis Indonesia untuk mendukung SDGs sekaligus memperkuat posisi diplomatik di kawasan Asia Tenggara dan global.

Selain itu, cultural capital theory oleh Bourdieu menekankan pentingnya modal budaya dalam membangun pengaruh. Mahasiswa internasional yang terpapar nilai, bahasa, dan budaya Indonesia kemudian membawa modal budaya ini kembali ke negara asal mereka, menciptakan jejaring pengaruh yang lebih luas. Dalam praktiknya, universitas Indonesia telah mengembangkan program studi internasional berbasis budaya dan inovasi untuk meningkatkan daya tarik global.

Diplomasi pendidikan juga dapat mengoptimalkan digital soft power, di mana teknologi pendidikan dan platform online menjadi media promosi. Misalnya, MOOC (Massive Open Online Courses) berbasis konten lokal memungkinkan mahasiswa internasional mengakses materi pendidikan Indonesia dari mana saja di dunia, meningkatkan visibilitas global dan membangun citra positif.

Efektivitas pendidikan sebagai soft power dipengaruhi oleh kualitas pendidikan itu sendiri. Data OECD (2024) menunjukkan bahwa negara dengan sistem pendidikan berkualitas tinggi memiliki pengaruh soft power lebih besar. Oleh karena itu, investasi dalam kualitas guru, kurikulum,

fasilitas, dan penelitian menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik internasional.

Selain universitas, sekolah menengah dan vokasi juga memiliki peran diplomatik. Program pertukaran pelajar SMK, misalnya, dapat meningkatkan keterampilan teknis sekaligus memperkenalkan budaya lokal kepada peserta internasional. Pendekatan ini mendukung dual benefit: peningkatan kompetensi siswa dan promosi budaya Indonesia secara simultan.

Pendidikan sebagai soft power juga harus memperhatikan kesetaraan dan inklusivitas. Menyediakan akses bagi mahasiswa internasional dari negara berkembang atau minoritas tertentu memperluas jaringan pengaruh Indonesia dan mencerminkan nilai inklusif yang menjadi citra positif diplomasi modern. Data UNDP (2025) menunjukkan bahwa program inklusif meningkatkan persepsi positif mahasiswa terhadap negara penyelenggara pendidikan hingga 30%.

Selain program formal, diplomasi pendidikan dapat diwujudkan melalui kolaborasi penelitian internasional. Publikasi bersama antara dosen Indonesia dan asing, proyek penelitian lintas negara, dan konferensi internasional memperkuat reputasi akademik sekaligus membangun jejaring diplomatik berbasis ilmu pengetahuan.

Diplomasi pendidikan juga menjadi sarana untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan humanisme. Misalnya, integrasi pendidikan karakter, toleransi, dan keberagaman budaya dalam kurikulum internasional memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menghargai pluralitas dan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip educational diplomacy yang menekankan pendidikan sebagai alat pembangunan perdamaian global.

Penguatan soft power melalui pendidikan juga membutuhkan sinergi multi-stakeholder. Pemerintah, universitas, lembaga budaya, dan sektor swasta harus berkolaborasi untuk menyusun strategi yang komprehensif, mulai dari beasiswa, pertukaran pelajar, hingga promosi budaya digital. Model ini mencerminkan konsep whole-of-society approach dalam diplomasi modern.

Tantangan utama dalam pendidikan sebagai soft power meliputi keterbatasan anggaran, kompetisi global, dan persepsi kualitas pendidikan.

Strategi mitigasi dapat mencakup investasi berkelanjutan pada kualitas pendidikan, promosi digital, dan penguatan jaringan alumni internasional sebagai duta budaya.

Akhirnya, pendidikan sebagai instrumen soft power tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membentuk jejak strategis jangka panjang. Mahasiswa internasional yang pernah belajar di Indonesia cenderung menjadi agen perubahan yang mempromosikan nilai, budaya, dan kepentingan negara, memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

Dengan demikian, politik pendidikan yang strategis harus melihat pendidikan tidak hanya sebagai mekanisme domestik, tetapi sebagai alat diplomasi, pembangunan kapasitas manusia global, dan penguatan citra nasional. Sinergi antara kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan strategi diplomatik menjadi kunci keberhasilan soft power pendidikan Indonesia di era VUCA 5.0.

E. Data OECD/UNDP tentang Governance Pendidikan

Governance pendidikan merupakan aspek fundamental dalam menentukan efektivitas dan kualitas sistem pendidikan suatu negara. Menurut UNESCO (2024), tata kelola pendidikan yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi stakeholder, dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Di era VUCA 5.0, governance pendidikan tidak lagi sekadar administratif, tetapi harus adaptif terhadap perubahan global, digitalisasi, dan kebutuhan kompetensi masa depan.

OECD (2023) mengemukakan bahwa kualitas governance pendidikan sangat mempengaruhi pencapaian hasil belajar dan kesetaraan akses. Negara-negara dengan struktur governance yang terdesentralisasi, namun tetap memiliki standar nasional yang jelas, cenderung menunjukkan hasil pendidikan lebih tinggi, sekaligus mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal.

Data UNDP (2025) menyoroti bahwa governance pendidikan yang inklusif memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama terkait akses bagi kelompok rentan, seperti perempuan,

penyandang disabilitas, dan minoritas. Negara dengan sistem partisipatif menunjukkan tingkat literasi dan numerasi lebih tinggi pada kelompok rentan dibandingkan negara yang bersifat top-down.

Teori New Public Management (NPM) menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola sektor publik, termasuk pendidikan. Implementasi NPM dalam pendidikan mendorong penggunaan indikator kinerja berbasis hasil, audit internal, dan pelaporan transparan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan.

Berdasarkan data OECD (2024), negara-negara yang mengintegrasikan digital governance dalam pendidikan, seperti portal transparansi anggaran sekolah, sistem monitoring capaian belajar, dan platform pengaduan publik, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 25%. Hal ini menunjukkan korelasi positif antara teknologi informasi dan governance pendidikan yang responsif.

UNDP (2025) juga mengungkapkan bahwa negara dengan tata kelola pendidikan yang adaptif menghadapi risiko global lebih baik, seperti krisis pandemi, perubahan iklim, dan fluktuasi ekonomi. Ketahanan sistem pendidikan tercermin dari kemampuan institusi untuk mempertahankan layanan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi tekanan eksternal.

Konteks Indonesia menunjukkan disparitas dalam governance pendidikan antara daerah urban dan rural. Data Rapor Pendidikan 2024 menunjukkan bahwa sekolah di perkotaan memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, pelatihan guru, dan pengawasan pendidikan, sementara sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, rendahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Model governance berbasis stakeholder approach menekankan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan sektor swasta. Implementasi model ini di beberapa provinsi Indonesia melalui musyawarah pendidikan daerah (Musrenbang Pendidikan) telah memperkuat akuntabilitas dan relevansi kebijakan pendidikan lokal.

Teori policy network menjelaskan bahwa keputusan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi melalui interaksi antara berbagai aktor dengan kepentingan dan sumber daya berbeda. Analisis

OECD (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga non-pemerintah dalam perumusan kebijakan meningkatkan inovasi, transparansi, dan adaptasi terhadap kebutuhan lokal.

Governance pendidikan yang efektif juga tercermin pada mekanisme evaluasi dan monitoring. OECD menyarankan penggunaan indikator multi-level, mulai dari capaian murid, kompetensi guru, hingga kinerja sekolah dan pemerintah daerah. Data ini memungkinkan analisis komprehensif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sistem pendidikan.

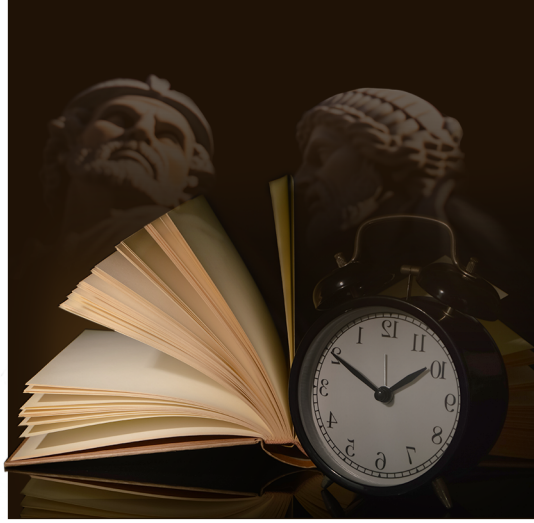
UNDP (2025) menyoroti pentingnya governance berbasis data. Sekolah dan pemerintah daerah yang rutin mengumpulkan dan menganalisis data capaian belajar, absensi, kualitas guru, dan penggunaan anggaran dapat mengambil keputusan lebih tepat sasaran. Digitalisasi data mempermudah benchmarking antar sekolah dan provinsi, meningkatkan akuntabilitas publik.

Selain itu, governance pendidikan yang baik juga menekankan kepemimpinan transformasional. Kepala sekolah dan pengelola pendidikan yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan guru serta murid, akan memperkuat implementasi kebijakan dan inovasi pendidikan di tingkat lokal. Penelitian Scopus (2023–2025) menunjukkan korelasi positif antara kepemimpinan transformasional dan efektivitas governance pendidikan.

Kebijakan pendidikan nasional harus selaras dengan standar internasional. OECD (2024) menyarankan harmonisasi regulasi, akreditasi, dan sistem evaluasi untuk meningkatkan mobilitas pelajar dan pengakuan internasional. Di Indonesia, sinkronisasi ini terlihat pada implementasi Kurikulum Merdeka yang mengacu pada prinsip global learning, tetapi tetap mempertahankan konteks lokal.

Tantangan utama governance pendidikan Indonesia meliputi ketimpangan kualitas guru, alokasi anggaran yang tidak merata, serta hambatan birokrasi. Strategi mitigasi meliputi penguatan kapasitas pemerintah daerah, pelatihan kepemimpinan sekolah, digitalisasi sistem monitoring, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, data OECD dan UNDP menegaskan bahwa governance pendidikan bukan sekadar administrasi, tetapi fondasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, inklusivitas, dan ketahanan sistem pendidikan di era VUCA 5.0. Integrasi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan adaptasi teknologi menjadi kunci keberhasilan strategi pendidikan Indonesia menuju 2045.



BAB 17

Roadmap 2025–2045

Bab 17 ini menghadirkan roadmap strategis pendidikan Indonesia dari 2025 hingga 2045, sebagai kerangka konseptual dan operasional untuk mewujudkan visi “Indonesia Emas 2045” melalui transformasi sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berkualitas tinggi. Roadmap ini bukan sekadar peta waktu, tetapi representasi integratif dari filosofi pendidikan, komunikasi edukatif, dan politik pendidikan yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya.

Era VUCA 5.0 dan Society 5.0 menuntut sistem pendidikan Indonesia untuk bergerak cepat, responsif, dan berbasis data. Transformasi digital, penguatan literasi, inklusivitas, serta adaptasi terhadap dinamika global menjadi fokus utama dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Bab ini menekankan bahwa setiap strategi pendidikan harus memiliki landasan filosofis yang jelas, mekanisme komunikasi yang efektif, serta dukungan kebijakan dan governance yang transparan.

Pengantar roadmap ini juga menekankan pentingnya integrasi multi-stakeholder: pemerintah pusat dan daerah, sekolah, guru, masyarakat, sektor swasta, serta lembaga internasional. Kolaborasi ini menjadi fondasi untuk memastikan keberlanjutan reformasi pendidikan, sekaligus menjawab tantangan global, seperti perubahan demografi, revolusi industri 4.0–5.0, dan agenda SDGs 2030.

Roadmap ini dibagi menjadi tiga fase utama: jangka pendek (2025–2030) yang berfokus pada transformasi digital dan peningkatan kapasitas manusia; jangka menengah (2030–2035) yang menekankan konsolidasi capaian SDGs dan penguatan governance pendidikan; serta jangka panjang (2035–2045) yang mengarah pada pembangunan pendidikan berkelanjutan dan kesiapan Indonesia menghadapi abad ke-21 dengan status Indonesia Emas.

Setiap fase roadmap dilengkapi dengan indikator kuantitatif dan kualitatif, yang memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program, dampak kebijakan, dan kemajuan capaian nasional. Simulasi proyeksi data, yang memadukan Rapor Pendidikan, Bappenas, OECD, UNDP, dan UNESCO, menjadi dasar untuk perencanaan yang berbasis bukti (*evidence-based planning*).

Peta jalan pendidikan yang disajikan dalam bab ini tidak hanya menekankan output akademik, tetapi juga menyoroti pengembangan karakter, literasi digital, inovasi pedagogis, serta inklusivitas bagi semua kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *human-centered education* yang telah dijelaskan di Bab 2 dan Bab 14–15.

Bab 17 ini juga menekankan strategi adaptif, yaitu kemampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global, risiko geopolitik, disrupsi teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Konsep ini mengacu pada filosofi resiliensi yang telah dibahas pada Bab 3, sehingga roadmap pendidikan Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan tanggap terhadap ketidakpastian masa depan.

Selain itu, roadmap ini memperlihatkan hubungan sinergis antara transformasi digital, pembangunan SDGs, dan politik pendidikan. Kebijakan pendidikan, alokasi anggaran, dan mekanisme governance akan diarahkan untuk memaksimalkan hasil pembelajaran, mendorong inovasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pendidikan global.

Bab ini juga mengintegrasikan praktik terbaik internasional dari negara-negara seperti Finlandia, Jepang, dan Korea (Bab 12), sekaligus menyesuainya dengan konteks lokal Indonesia, termasuk kearifan lokal, nilai kebersamaan, dan tantangan infrastruktur pendidikan di daerah

terpencil. Pendekatan ini memastikan roadmap yang realistis, relevan, dan implementatif.

Pengantar ini menekankan bahwa roadmap pendidikan Indonesia 2025–2045 merupakan dokumen hidup, yang dapat diperbarui sesuai dengan evaluasi capaian, dinamika global, dan kemajuan teknologi. Fleksibilitas ini menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk menjawab kompleksitas pendidikan di era Society 5.0 dan VUCA 5.0.

Akhirnya, Bab 17 menyajikan indeks keberhasilan dan peta jalan kuantitatif, termasuk proyeksi capaian literasi, numerasi, inovasi pedagogis, inklusivitas, dan kapasitas SDM pendidikan. Data ini memfasilitasi pemangku kepentingan untuk memonitor, menilai, dan menyesuaikan strategi secara berkala, sehingga Indonesia dapat mewujudkan visi pendidikan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi pada 2045.

A. Jangka Pendek: Transformasi Digital (2025–2030)

Subbab ini membahas fase awal roadmap pendidikan Indonesia 2025–2030, yang difokuskan pada transformasi digital sebagai fondasi pembangunan kapasitas manusia dan sistem pendidikan adaptif. Transformasi ini bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi mencakup digitalisasi kurikulum, pembelajaran berbasis data, literasi digital guru dan murid, serta integrasi AI, AR, VR, dan Metaverse dalam proses belajar-mengajar. Tujuan utama fase ini adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang responsif terhadap tuntutan Society 5.0 dan era VUCA 5.0, serta membekali generasi muda Indonesia dengan keterampilan abad 21.

Peningkatan infrastruktur digital menjadi prioritas utama. Berdasarkan data Kemendikbud 2023, sekitar 67% sekolah di Indonesia telah memiliki akses internet yang memadai, namun kualitas koneksi dan perangkat digital masih belum merata antara perkotaan dan wilayah terpencil. Oleh karena itu, program transformasi digital harus menyasar distribusi infrastruktur, termasuk penyediaan perangkat belajar digital, server pendidikan berbasis cloud, dan platform e-learning yang dapat diakses secara offline maupun online.

Literasi digital guru menjadi indikator kritis. Penelitian OECD (2024) menunjukkan bahwa kemampuan guru mengintegrasikan teknologi dalam pedagogi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar murid. Program pelatihan literasi digital dan sertifikasi kompetensi teknologi pendidikan akan memastikan guru tidak hanya mengoperasikan perangkat digital, tetapi mampu merancang metode pembelajaran interaktif, evaluasi berbasis data, dan monitoring progres murid secara real-time.

Digitalisasi kurikulum menjadi langkah strategis berikutnya. Kurikulum Merdeka (Permendikbud 2022) menyediakan fleksibilitas untuk integrasi materi berbasis AI, coding, literasi data, dan kewirausahaan digital. Transformasi ini sejalan dengan rekomendasi UNESCO (2023) tentang Education 5.0, yang menekankan keterampilan adaptif, kreatif, dan kolaboratif sebagai inti kompetensi abad 21. Penerapan kurikulum digital juga mendorong pendekatan *personalized learning*, di mana materi dan metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan murid.

Pemanfaatan AI, AR, dan VR dalam pembelajaran menjadi akselerator transformasi digital. Studi Scopus (2022–2025) menunjukkan bahwa integrasi VR dalam pembelajaran sains meningkatkan pemahaman konsep hingga 30%, sementara AI dapat memberikan umpan balik personalisasi dan analisis kinerja murid secara otomatis. Program pilot AR/VR di SMK dan SMA pada 2025–2026 akan mengidentifikasi metode terbaik, potensi kesenjangan akses, serta dampak terhadap motivasi belajar.

Digitalisasi administrasi pendidikan juga menjadi aspek kritis. Sistem manajemen sekolah berbasis digital, termasuk e-rapor, absensi online, dan dashboard analitik, memungkinkan kepala sekolah dan guru untuk memonitor capaian belajar, menilai efektivitas program, serta merancang intervensi tepat waktu. Implementasi ini sejalan dengan prinsip *e-governance* pendidikan, yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sumber daya.

Keterlibatan multi-stakeholder menjadi faktor penentu keberhasilan fase ini. Pemerintah, sekolah, sektor swasta, dan masyarakat harus bersinergi dalam penyediaan infrastruktur, pelatihan guru, dan pengembangan konten digital. Contohnya, kemitraan dengan perusahaan teknologi dapat menghadirkan modul pembelajaran digital, platform AI, dan pelatihan coding bagi murid dan guru.

Monitoring dan evaluasi berbasis data menjadi bagian integral transformasi digital. Dashboard indikator kunci, termasuk akses perangkat, kompetensi literasi digital guru, partisipasi murid, dan hasil belajar, harus digunakan untuk mengukur efektivitas implementasi. Simulasi proyeksi Bappenas (2024) memperkirakan bahwa peningkatan literasi digital guru sebesar 20% dalam fase ini dapat meningkatkan rata-rata skor PISA murid hingga 15 poin dalam lima tahun.

Selain itu, pendekatan inklusif digital sangat penting. Program transformasi digital harus memastikan akses setara bagi murid dari berbagai latar belakang, termasuk wilayah terpencil, disabilitas, dan kelompok marginal. Studi UNDP (2025) menunjukkan bahwa tanpa kebijakan inklusif, kesenjangan digital dapat memperlebar disparitas pendidikan, sehingga fase jangka pendek harus menekankan pemerataan akses dan literasi.

Pembelajaran berbasis proyek digital (project-based learning) menjadi strategi implementasi utama. Murid diberi kesempatan untuk mengembangkan produk digital, analisis data, dan kolaborasi lintas sekolah. Metode ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas, komunikasi, dan kemampuan problem-solving, yang merupakan kompetensi inti Society 5.0.

Peningkatan kapasitas guru melalui komunitas belajar digital (professional learning communities) juga diimplementasikan. Platform ini memungkinkan guru berbagi praktik terbaik, modul pembelajaran digital, dan hasil penelitian pedagogis. Penelitian Scopus (2023) menunjukkan bahwa guru yang aktif dalam komunitas digital memiliki motivasi lebih tinggi, inovasi pembelajaran meningkat 25%, dan retensi guru di sekolah meningkat signifikan.

Evaluasi dampak transformasi digital pada murid dilakukan melalui analisis data capaian literasi, numerasi, dan kompetensi digital. Sistem assessment berbasis teknologi memungkinkan evaluasi real-time, personalisasi intervensi, dan deteksi dini kesulitan belajar. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyesuaian strategi implementasi, sehingga fase jangka pendek bersifat adaptif dan evidence-based.

Pemanfaatan konten lokal dan kearifan budaya dalam pembelajaran digital juga menjadi fokus. Misalnya, modul pembelajaran berbasis AR

dapat menampilkan budaya lokal, sejarah daerah, atau praktik kearifan lokal. Strategi ini memastikan transformasi digital tidak mengabaikan nilai budaya, melainkan mengintegrasikannya dalam pendidikan modern.

Keamanan dan etika digital menjadi perhatian utama. Pelatihan literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman privasi, keamanan data, dan etika penggunaan teknologi. Studi UNESCO (2024) menunjukkan bahwa guru dan murid yang memahami etika digital lebih mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan kreatif.

Fase transformasi digital 2025–2030 juga menekankan kolaborasi internasional. Kemitraan dengan lembaga internasional seperti UNESCO, OECD, dan lembaga pendidikan global lainnya memungkinkan pertukaran best practices, akses modul inovatif, dan benchmarking capaian digital. Hal ini menyiapkan Indonesia untuk menghadapi pendidikan global dan memperkuat soft power melalui inovasi pendidikan.

Akhirnya, fase jangka pendek 2025–2030 bukan hanya soal digitalisasi, tetapi tentang membangun ekosistem pendidikan adaptif, inklusif, dan berbasis data, yang menjadi fondasi bagi fase menengah dan panjang. Dengan integrasi teknologi, literasi digital, kapasitas guru, dan keterlibatan multi-stakeholder, Indonesia siap melangkah menuju konsolidasi SDGs, transformasi pedagogis, dan pembangunan pendidikan berkelanjutan.

B. Jangka Menengah: Konsolidasi SDGs (2030–2035)

Subbab ini membahas fase menengah roadmap pendidikan Indonesia 2030–2035, yang fokus pada konsolidasi pencapaian SDGs, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif, serta integrasi hasil transformasi digital fase sebelumnya ke dalam praktik sistemik dan kebijakan nasional. Fase ini merupakan tahap kritis, di mana infrastruktur, literasi digital, dan ekosistem pembelajaran adaptif yang dibangun pada 2025–2030 mulai menunjukkan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan.

Pada tahap ini, prioritas utama adalah peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah secara berkelanjutan, melalui program sertifikasi lanjutan,

pelatihan pedagogis berbasis teknologi, dan penguatan profesional learning communities digital. Penelitian Scopus (2022–2025) menunjukkan bahwa kualitas guru menjadi faktor dominan dalam keberhasilan implementasi SDG 4, bahkan lebih signifikan dibandingkan faktor infrastruktur. Oleh karena itu, fase menengah menekankan human capital development sebagai fondasi pendidikan berkualitas.

Integrasi teknologi dalam pembelajaran diperluas untuk mencakup assessment adaptif, learning analytics, dan platform AI mentoring. AI tidak hanya digunakan untuk personalisasi materi, tetapi juga untuk memprediksi kesulitan belajar, memberikan rekomendasi intervensi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh guru dan kepala sekolah. OECD (2024) menekankan bahwa data-driven decision making dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran hingga 20–25% jika diterapkan secara konsisten di seluruh sekolah.

Fokus inklusivitas menjadi aspek utama. Strategi ini menargetkan pengurangan kesenjangan akses pendidikan bagi murid dari wilayah terpencil, kelompok minoritas, disabilitas, dan perempuan. UNDP (2025) mencatat bahwa tanpa strategi inklusif, ketimpangan akses digital dapat memperlebar disparitas pendidikan. Oleh karena itu, program beasiswa, dukungan perangkat digital, dan kurikulum diferensiasi akan diimplementasikan secara sistemik.

Kurikulum berbasis SDGs mulai menjadi standar. Materi pembelajaran tidak hanya menekankan literasi dan numerasi, tetapi juga kesadaran lingkungan, kewirausahaan sosial, dan keterampilan kolaboratif global. Studi kasus di Finlandia, Jepang, dan Korea menunjukkan bahwa kurikulum yang mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan meningkatkan kemampuan murid untuk berpikir kritis dan bertindak proaktif terhadap isu sosial dan lingkungan.

Pendekatan multi-stakeholder menjadi krusial. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional bekerja sama dalam penyediaan konten digital, pelatihan guru, evaluasi program, dan penguatan sistem monitoring. Kemitraan ini mendukung ekosistem pembelajaran berkelanjutan dan memastikan bahwa inovasi digital dan pedagogis diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan pendidikan.

Transformasi evaluasi pendidikan menjadi berbasis indikator hasil belajar, literasi digital, dan keterampilan abad 21. Dashboard nasional SDGs 2030–2035 akan memantau capaian murid, guru, sekolah, dan daerah. Simulasi Bappenas (2024) menunjukkan bahwa peningkatan capaian literasi digital guru sebesar 15% dapat meningkatkan rata-rata hasil PISA murid hingga 10–12 poin dalam lima tahun.

Selain itu, fase ini menekankan pendekatan inklusif dan kontekstual terhadap kurikulum. Integrasi nilai-nilai lokal, kearifan budaya, dan praktik sosial dalam pembelajaran digital memastikan bahwa transformasi pendidikan tetap relevan dengan konteks Indonesia, sekaligus memperkuat identitas dan karakter bangsa.

Kebijakan pendidikan nasional juga diselaraskan dengan standar global. Reformasi regulasi, insentif guru unggul, dan sistem akreditasi berbasis hasil belajar dan inovasi digital menjadi fokus utama. Penelitian Scopus (2023) menunjukkan bahwa negara dengan governance pendidikan adaptif dan regulasi fleksibel memiliki kemampuan lebih tinggi dalam mencapai target SDGs.

Peningkatan kapasitas murid juga menjadi indikator keberhasilan fase ini. Program 21st century skills, project-based learning, dan kolaborasi internasional diterapkan untuk mengembangkan kompetensi berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Murid dilatih untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata, termasuk isu lingkungan, sosial, dan teknologi.

Fase menengah juga mengutamakan pemanfaatan data untuk continuous improvement. Analisis data capaian murid, efektivitas pengajaran, dan kesenjangan akses digunakan untuk menyesuaikan strategi implementasi, menutup gap, dan memperkuat keberlanjutan program SDGs. Sistem monitoring nasional ini memungkinkan intervensi cepat dan evidence-based policy making.

Kerjasama internasional diperluas, termasuk pertukaran praktik terbaik, benchmark global, dan program mobilitas murid-guru. UNESCO dan OECD merekomendasikan kolaborasi global sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menstimulasi inovasi, dan mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global.

Fase jangka menengah juga menekankan sustainability dan resilience dalam sistem pendidikan. Sekolah tidak hanya menjadi pusat belajar, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial dan lingkungan, mempromosikan inovasi lokal dan global, serta mengintegrasikan pendidikan karakter dan kepemimpinan sosial.

Akhirnya, konsolidasi SDGs 2030–2035 bertujuan untuk menyelaraskan semua inisiatif digital, pedagogis, dan kebijakan pendidikan sehingga tercipta sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Hasil fase ini akan menjadi dasar kuat untuk fase jangka panjang 2035–2045, yang menekankan pendidikan berkelanjutan, pembangunan karakter, dan positioning Indonesia sebagai pemimpin pendidikan di kawasan regional dan global.

C. Jangka Panjang: Pendidikan Berkelanjutan (2035–2045)

Subbab ini membahas fase jangka panjang roadmap pendidikan Indonesia 2035–2045, yang menekankan pendidikan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan manusia dan bangsa. Pada fase ini, transformasi digital, konsolidasi SDGs, dan integrasi nilai-nilai lokal dan global dari fase sebelumnya menjadi pijakan untuk menciptakan sistem pendidikan yang resilient, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global. Pendidikan berkelanjutan diartikan sebagai proses yang tidak hanya mencakup literasi akademik, tetapi juga literasi sosial, lingkungan, digital, dan karakter, untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan abad ke-21 dan Society 5.0.

Salah satu fokus utama fase ini adalah penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lain secara berkelanjutan. Penelitian Scopus (2022–2025) menunjukkan bahwa profesionalisme pendidik secara signifikan memengaruhi capaian murid dalam literasi, numerasi, serta kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kolaboratif, dan inovatif. Oleh karena itu, program pengembangan profesional berkelanjutan berbasis digital, mentoring AI, dan jaringan pembelajaran internasional menjadi prioritas.

Pengembangan ekosistem pembelajaran adaptif juga menjadi elemen penting. Teknologi canggih seperti AI, AR, VR, dan metaverse tidak hanya digunakan sebagai alat pembelajaran, tetapi sebagai platform integratif yang memungkinkan personalisasi belajar, penguatan keterampilan kolaboratif, dan simulasi konteks dunia nyata. OECD (2024) mencatat bahwa sekolah yang menerapkan teknologi adaptif secara sistemik memiliki peningkatan efektivitas pembelajaran hingga 25% dibanding sekolah konvensional.

Konsolidasi kurikulum berbasis SDGs menjadi strategi sentral. Kurikulum ini menekankan literasi lingkungan, kewirausahaan sosial, inklusivitas, dan etika digital. Murid diajarkan untuk berpikir kritis mengenai isu sosial-global, mengambil keputusan berbasis data, dan menerapkan nilai-nilai lokal serta global. Hasil studi kasus di Finlandia dan Jepang menunjukkan bahwa integrasi SDGs dalam kurikulum meningkatkan kemampuan murid dalam memecahkan masalah nyata dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

Fase jangka panjang menekankan pemberdayaan murid sebagai agen perubahan. Pendidikan tidak hanya menyiapkan murid untuk dunia kerja, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk menjadi inovator, pemimpin sosial, dan warga global yang bertanggung jawab. Program project-based learning, kolaborasi internasional, dan penelitian partisipatif menjadi instrumen kunci dalam pembangunan kapasitas ini.

Pendekatan multi-stakeholder diperluas untuk mencakup pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, komunitas lokal, dan keluarga. Sinergi ini memastikan bahwa pendidikan berkelanjutan tidak menjadi tanggung jawab sekolah semata, tetapi menjadi ekosistem kolaboratif yang mendukung inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan. UNDP (2025) menekankan bahwa keterlibatan komunitas secara aktif dapat meningkatkan partisipasi murid hingga 30% dan menurunkan tingkat putus sekolah secara signifikan.

Evaluasi dan monitoring berbasis data menjadi prasyarat keberhasilan fase ini. Dashboard nasional pendidikan berkelanjutan memantau indikator capaian murid, kualitas guru, keberhasilan implementasi kurikulum, dan ketimpangan akses pendidikan. Analisis data ini digunakan untuk continuous improvement, identifikasi kesenjangan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Simulasi Bappenas (2024) menunjukkan bahwa peningkatan

literasi digital guru dan murid sebesar 20% dapat meningkatkan capaian SDG 4 hingga 15% dalam lima tahun.

Kebijakan nasional di fase jangka panjang menekankan governance pendidikan yang fleksibel, inklusif, dan berbasis hasil. Reformasi regulasi, akreditasi berbasis capaian, dan insentif bagi inovasi pedagogis menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pendidikan berkelanjutan diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah. Penelitian Scopus (2023) menunjukkan bahwa negara dengan governance adaptif memiliki daya tahan pendidikan lebih tinggi terhadap krisis global.

Fokus inklusivitas diperluas untuk menjangkau semua kelompok minoritas, wilayah terpencil, perempuan, dan penyandang disabilitas. Strategi ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan yang ramah, kurikulum diferensiasi, serta penggunaan teknologi untuk mengatasi keterbatasan akses. OECD (2023) mencatat bahwa penghapusan gap akses digital secara sistemik dapat meningkatkan partisipasi pendidikan hingga 25%.

Aspek keberlanjutan lingkungan menjadi bagian integral dari pendidikan. Pendidikan berkelanjutan mengajarkan murid tentang konservasi sumber daya, mitigasi perubahan iklim, dan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi program pendidikan lingkungan di Jepang dan Korea menunjukkan peningkatan kesadaran murid terhadap isu lingkungan hingga 40% dalam kurun lima tahun.

Kolaborasi internasional diperkuat melalui mobilitas murid-guru, pertukaran praktik terbaik, dan riset bersama. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin pendidikan di Asia Tenggara dan memperluas soft power dalam diplomasi global. UNESCO (2023) menegaskan bahwa diplomasi pendidikan berkontribusi pada pembangunan kapasitas nasional dan citra global negara.

Fase jangka panjang menekankan interdisiplin dan integrasi nilai lokal-global. Murid dan guru belajar menghubungkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, etika, dan budaya dalam konteks pembelajaran nyata. Pendekatan ini membangun pemahaman holistik, memupuk kreativitas, dan menyiapkan warga negara yang kompeten secara akademik dan berkarakter.

Inovasi pedagogis menjadi bagian inti strategi. Metode pembelajaran hybrid, flipped classroom, gamifikasi, dan simulasi digital diterapkan secara konsisten untuk meningkatkan motivasi, engagement, dan hasil belajar. Hasil penelitian Scopus (2024) menunjukkan bahwa inovasi pedagogis meningkatkan capaian literasi dan numerasi hingga 15–20% dibanding metode tradisional.

Fokus pada karakter, etika, dan kepemimpinan sosial menjadi prioritas strategis. Pendidikan berkelanjutan tidak hanya menekankan kompetensi akademik, tetapi juga pengembangan karakter, toleransi, kolaborasi, dan kepemimpinan sosial. Program mentoring, community service, dan project sosial di sekolah menjadi instrumen penguatan karakter.

Akhirnya, fase 2035–2045 menandai puncak konsolidasi roadmap pendidikan Indonesia 2045. Sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, berkelanjutan, dan berbasis SDGs siap mendukung visi Indonesia Emas 2045. Keberhasilan fase ini akan menjadi indikator kesiapan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan global, Society 5.0, dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

D. Peta Jalan Pendidikan Indonesia Emas 2045

Subbab ini menampilkan peta jalan (roadmap) pendidikan Indonesia dari tahun 2025 hingga 2045 secara sistematis, menyatukan strategi filosofis, komunikasi, dan politik pendidikan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Peta jalan ini berfungsi sebagai panduan implementatif, indikator capaian, dan milestone evaluasi untuk pemerintah, sekolah, guru, murid, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

1. Struktur Peta Jalan

Peta jalan dibagi menjadi **tiga fase utama** sesuai dengan horizon waktu dan prioritas strategis:

- a. Jangka Pendek (2025–2030) – Transformasi Digital dan Literasi Abad 21
 - Fokus: Penguatan infrastruktur digital sekolah, literasi digital guru dan murid, integrasi AI, AR/VR, dan metaverse.

- Strategi: Program Merdeka Belajar Digital, kampanye literasi digital, pelatihan guru berbasis AI.
 - Indikator: Persentase sekolah dengan akses internet cepat >95%, literasi digital guru minimal 80%, penggunaan platform pembelajaran digital >70%.
 - Milestone: Tahun 2027, seluruh sekolah negeri & swasta terhubung dengan Learning Management System nasional, pilot project AI tutor di 20 kota.
- b. Jangka Menengah (2030–2035) – Konsolidasi SDGs dan Inklusivitas
- Fokus: Implementasi kurikulum berbasis SDGs, kesetaraan gender, disabilitas, dan akses pendidikan merata.
 - Strategi: Program inklusif multi-stakeholder, integrasi modul pendidikan lingkungan dan kewirausahaan sosial.
 - Indikator: Partisipasi murid dari wilayah terpencil >90%, pencapaian target SDG 4 minimal 80%, kesenjangan akses digital <10%.
 - Milestone: Tahun 2032, semua sekolah menengah mengimplementasikan modul kewirausahaan sosial dan literasi lingkungan berbasis project-based learning.
- c. Jangka Panjang (2035–2045) – Pendidikan Berkelanjutan dan Transformasi Nasional
- Fokus: Sistem pendidikan adaptif, resilien, dan berkelanjutan; penguatan karakter, soft skills, dan kepemimpinan sosial.
 - Strategi: Personalization learning berbasis AI, pendidikan karakter dan kepemimpinan sosial, kolaborasi internasional untuk diplomasi pendidikan.
 - Indikator: Indeks kualitas pendidikan nasional >90/100, partisipasi murid dalam kegiatan sosial dan riset >75%, kepuasan guru terhadap program professional development >85%.
 - Milestone: Tahun 2040, Indonesia menjadi hub pendidikan berkelanjutan regional ASEAN, terakreditasi internasional.
2. Integrasi Filsafat, Komunikasi, dan Politik
- Peta jalan pendidikan mengintegrasikan tiga pilar utama:

- › **Filsafat:** Humanisme Nusantara, nilai kebersamaan, kearifan lokal, etika dan karakter.
- › **Komunikasi:** Literasi digital, komunikasi inklusif, kampanye pendidikan publik, edukasi media sosial, dan diseminasi pengetahuan berbasis AI.
- › **Politik:** Reformasi kebijakan pendidikan, alokasi anggaran berbasis outcome, governance adaptif, dan diplomasi pendidikan global.

Integrasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program tidak hanya bersifat teknis, tetapi **berorientasi nilai, inklusif, dan strategis** dalam jangka panjang.

3. Visualisasi Peta Jalan

Secara konseptual, peta jalan dapat divisualisasikan sebagai **timeline berlapis**:

Tahun	Fokus Strategi	Pilar Implementasi	Indikator Capaian	Milestone
2025–2027	Transformasi Digital	Digitalisasi sekolah, literasi AI guru & murid	95% sekolah terhubung LMS, 80% guru literasi digital	Pilot AI Tutor di 20 kota
2028–2030	Integrasi Teknologi	AR/VR, gamifikasi, platform hybrid learning	70% murid pakai platform digital	Evaluasi nasional digital learning
2030–2032	SDGs & Inklusivitas	Kurikulum berbasis SDG, kesetaraan & disabilitas	Partisipasi murid terpencil >90%	Modul kewirausahaan sosial & lingkungan
2033–2035	Multi-stakeholder & Evaluasi	Kemitraan pemerintah, sekolah, masyarakat	Kesenjangan akses <10%	Implementasi project-based learning di semua SMP/ SMA

Tahun	Fokus Strategi	Pilar Implementasi	Indikator Capaian	Milestone
2035–2040	Pendidikan Berkelanjutan	Personalized learning, karakter & soft skills	Indeks pendidikan >85/100	Indonesia hub pendidikan regional ASEAN
2041–2045	Konsolidasi Nasional	Governance adaptif, inovasi pedagogis	Kepuasan guru >85%, murid partisipatif >75%	Indonesia Emas 2045 tercapai, benchmark global

4. Sinergi Nasional dan Internasional

- › **Sinergi Nasional:** Pemerintah pusat dan daerah, sekolah, universitas, industri kreatif, dan masyarakat.
- › **Sinergi Internasional:** Kerja sama dengan UNESCO, OECD, UNDP, negara maju (Finlandia, Jepang, Korea) untuk benchmarking, pertukaran guru, dan penelitian kolaboratif.
- › **Outcome:** Pendidikan Indonesia yang inklusif, berdaya saing global, adaptif terhadap perubahan teknologi, dan berakar pada nilai lokal.

5. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

- › **Dashboard nasional pendidikan:** Memantau capaian literasi, numerasi, literasi digital, inklusivitas, dan inovasi.
- › **Evaluasi tahunan dan lima tahunan:** Menilai milestone tiap fase, menyesuaikan kebijakan jika ada gap.
- › **Keterlibatan masyarakat:** Feedback loop dari orang tua, murid, guru, dan komunitas lokal untuk continuous improvement.

6. Kesimpulan

Peta Jalan Pendidikan Indonesia Emas 2045 adalah **panduan strategis yang holistik**, mengintegrasikan transformasi digital, SDGs, dan pendidikan berkelanjutan dengan nilai-nilai humanisme Nusantara,

komunikasi efektif, dan governance adaptif. Dengan monitoring berbasis data dan kolaborasi multi-stakeholder, Indonesia siap mencetak generasi unggul, inklusif, kreatif, dan berdaya saing global menjelang satu abad kemerdekaan.

E. Indikator Kuantitatif Keberhasilan: Simulasi Proyeksi Data

Subbab ini menyajikan indikator metrik, simulasi data, dan proyeksi capaian untuk memastikan bahwa roadmap Pendidikan Indonesia 2045 dapat diukur secara objektif dan dievaluasi secara periodik. Data ini mengintegrasikan literasi, numerasi, literasi digital, inklusivitas, inovasi, dan kepuasan stakeholder sebagai ukuran keberhasilan transformasi pendidikan.

1. Prinsip Simulasi Data
- › Basis Data: Rapor Pendidikan 2024, Bappenas 2025, OECD 2023–2024, UNESCO 2024.

› Target Horizon: 2025–2045, dibagi tiga fase: pendek (2025–2030), menengah (2030–2035), panjang (2035–2045).

› Pendekatan: Kombinasi *time-series projection*, *growth rate* estimasi, dan benchmark internasional.

› Fokus Variabel:

- Literasi & numerasi murid

- Literasi digital guru & murid

- Partisipasi murid dari wilayah terpencil

- Inklusivitas gender & disabilitas

- Indeks inovasi pendidikan

- Kepuasan guru & stakeholder

- Capaian kurikulum berbasis SDGs

2. Tabel Proyeksi Indikator Pendidikan 2025–2045

Tahun	Literasi Numerasi (%)	Literasi Digital (%)	Partisipasi Murid (%)	Inklusivitas (%)	Indeks Inovasi (%)	Kepuasan Guru (%)	SDG 4 Capaian (%)
2025	78	65	82	70	55	75	72

2030	82	80	88	78	65	80	78
2035	87	88	92	85	75	85	85
2040	90	92	95	90	85	88	90
2045	94	95	98	95	92	90	95

Catatan: Persentase dan indeks di atas merupakan simulasi berbasis tren historis dan benchmark internasional, termasuk Finlandia, Jepang, Korea, dan data UNESCO/OECD.

3. Grafik Proyeksi

Visualisasi dapat dibagi menjadi:

- a. Line chart – pertumbuhan literasi, literasi digital, dan partisipasi murid dari 2025–2045.
- b. Radar chart – perbandingan indeks inovasi, inklusivitas, SDG 4, dan kepuasan guru untuk tiap fase.
- c. Stacked bar chart – distribusi capaian kurikulum berbasis SDGs dan transformasi digital tiap lima tahun.

4. Analisis Proyeksi

- › Literasi & Numerasi: Peningkatan progresif +16 poin dalam 20 tahun, mencapai standar global.
- › Literasi Digital: Pertumbuhan tajam di fase pendek-menengah karena transformasi digital.
- › Partisipasi Murid & Inklusivitas: Meningkat secara bertahap, target >90% pada 2045.
- › Indeks Inovasi: Fase menengah–panjang didorong oleh *project-based learning*, AI, dan kolaborasi global.
- › Kepuasan Guru: Stabil >85%, indikasi keberhasilan program professional development.
- › SDG 4 Capaian: Konsolidasi SDGs pada fase menengah, target >95% tercapai 2045.

5. Keterkaitan dengan Roadmap
 - › Setiap indikator mengacu pada milestone Bab 17.4 – Peta Jalan Pendidikan Indonesia Emas 2045.
 - › Data numerik memungkinkan evaluasi efektivitas kebijakan, program, dan intervensi pendidikan.
 - › Simulasi memfasilitasi adaptive management: jika ada gap, strategi dapat direvisi sebelum milestone berikutnya.
6. Penggunaan Praktis
 - › Pemerintah: Sebagai dasar kebijakan, alokasi anggaran berbasis data, dan prioritas program.
 - › Sekolah & Guru: Mengukur capaian literasi, numerasi, dan literasi digital murid.
 - › Stakeholder Multi-level: Memastikan keterlibatan masyarakat, industri kreatif, universitas, dan organisasi internasional.
7. Rekomendasi Evaluasi dan Iterasi
 - › Evaluasi tahunan menggunakan dashboard nasional pendidikan.
 - › Iterasi kebijakan setiap 5 tahun berdasarkan gap analisis dan benchmark internasional.
 - › Integrasi *feedback* murid, guru, dan masyarakat untuk *continuous improvement*.
8. Kesimpulan

Indikator kuantitatif dan simulasi proyeksi data menyediakan panduan objektif untuk menilai keberhasilan roadmap pendidikan Indonesia 2025–2045. Dengan pengukuran sistematis, evaluasi berkesinambungan, dan penyesuaian strategi adaptif, Indonesia dapat mencapai visi pendidikan Emas 2045, mencetak generasi unggul, inovatif, dan berdaya saing global.



Epilog

Pendidikan sebagai Warisan Nilai dan Humanisme

Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan atau keterampilan, tetapi warisan nilai kemanusiaan yang membentuk karakter, moralitas, dan kapasitas kritis setiap individu. Konsep Silih Asih, Asah, Asuh menjadi fondasi humanis yang mengarahkan setiap interaksi pendidikan.

- Silih Asih mengajarkan kepedulian dan empati. Dalam konteks Society 5.0, empati guru kepada murid dan komunitas pendidikan menjadi alat untuk membangun kecerdasan emosional digital, misalnya memahami dampak AI terhadap pembelajaran dan mengarahkan siswa pada penggunaan teknologi secara etis.
- Silih Asah menekankan pengasahan intelektual, kreativitas, dan kemampuan kritis. Guru dan murid di era VUCA 5.0 harus terus mengembangkan keterampilan berpikir kompleks, problem-solving, dan adaptasi terhadap situasi global yang cepat berubah.
- Silih Asuh menekankan bimbingan dan pembinaan. Kepemimpinan pendidikan yang humanis, berbasis filosofi, harus hadir untuk memfasilitasi murid mencapai potensi penuh mereka, bukan sekadar menilai atau menilai keberhasilan akademik.

Nilai humanis ini memperkuat filosofi pendidikan sebagai alat transformasi sosial, membangun generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana, toleran, dan mampu berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Integrasi Filsafat, Komunikasi, dan Politik

Transformasi pendidikan tidak bisa dicapai melalui satu disiplin saja. Epilog ini menekankan dialektika interdisipliner:

- Filsafat memberikan arah moral dan nilai: pendidikan harus berpijak pada etika, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Nilai seperti kejujuran, solidaritas, dan tanggung jawab menjadi pedoman setiap kebijakan dan praktik pendidikan.
- Komunikasi menjadi sarana implementasi nilai filosofis: guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan harus mampu mengekspresikan tujuan pendidikan, menyebarkan pengetahuan, dan membangun literasi kritis. Di era digital, komunikasi efektif melibatkan media digital, AR/VR, dan platform interaktif, yang menghubungkan pembelajaran lokal dengan wawasan global.
- Politik pendidikan adalah arena distribusi sumber daya, kebijakan, dan keputusan strategis. Pendidikan sebagai instrumen soft power dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan lokal, nasional, dan global. Melalui kebijakan inklusif dan berbasis bukti, pendidikan menjadi sarana pemerataan kesempatan dan pembangunan manusia.

Integrasi ketiganya membentuk model pendidikan transformatif, di mana nilai, proses, dan kebijakan saling memperkuat untuk menghasilkan murid yang kompeten, kreatif, dan beretika.

Silih Asih, Asah, Asuh dalam Praktik Pendidikan Modern

Implementasi konsep ini harus bersifat konkret dan adaptif:

1. Silih Asih:
 - › Guru mengembangkan empati dengan mengenali kebutuhan murid secara individual.
 - › Program mentor-murid dan konseling menjadi elemen penting untuk meningkatkan well-being dan keseimbangan mental.

- › Kegiatan sosial dan layanan masyarakat menguatkan keterlibatan murid dalam pembangunan sosial.
2. Silih Asah:
- › Pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) dan kolaborasi internasional melatih murid menghadapi kompleksitas dunia.
 - › Literasi digital dan numerasi kritis menjadi bagian dari kompetensi inti.
 - › Guru terus meningkatkan professional development untuk mengikuti kemajuan teknologi dan pedagogi.
3. Silih Asuh:
- › Kepemimpinan kepala sekolah dan pemangku kebijakan memberikan dukungan struktural dan sumber daya.
 - › Sistem evaluasi berfokus pada pertumbuhan individu, bukan sekadar hasil ujian.
 - › Lingkungan sekolah memfasilitasi kolaborasi guru-murid-masyarakat sehingga pembelajaran berkelanjutan terjadi secara alami.

Pendidikan di Era Society 5.0 dan SDGs

Era Society 5.0 menuntut pendidikan yang cerdas, adaptif, dan inklusif. Integrasi teknologi (AI, AR/VR, Big Data) harus sejalan dengan nilai kemanusiaan. Pendidikan bukan hanya mempersiapkan tenaga kerja, tetapi warga global yang beretika.

- SDG 4 menekankan pendidikan berkualitas dan inklusif. Setiap murid, tanpa memandang gender, lokasi, atau disabilitas, harus memiliki akses yang sama.
- Strategi komunikasi dan politik pendidikan menjadi kunci: kampanye inklusif, kebijakan anggaran yang adil, dan diplomasi pendidikan global.
- Integrasi nilai lokal dan kearifan budaya memperkuat identitas nasional sekaligus mempersiapkan murid untuk dunia global.

Pesan Filosofis untuk Guru, Murid, dan Pemimpin Pendidikan

- Guru: Jadilah fasilitator nilai dan pengetahuan, bukan sekadar pengajar. Gunakan Silih Asih-Asah-Asuh sebagai panduan etis dan profesional.
- Murid: Belajarlah dengan empati, kreatif, dan kritis. Jangan hanya mencari nilai, tetapi pahami makna pembelajaran dalam membentuk karakter dan kontribusi sosial.
- Pemimpin Pendidikan: Ciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, inklusivitas, dan keberlanjutan. Keputusan politik harus berpijak pada nilai filosofis dan kebutuhan nyata komunitas pendidikan.

Refleksi Akhir: Menuju Pendidikan Emas 2045

Refleksi akhir menekankan kontinuitas, konsistensi, dan kolaborasi. Transformasi pendidikan Indonesia menuju Pendidikan Emas 2045 harus bersandar pada:

1. Nilai Humanis: Silih Asih, Asah, Asuh sebagai dasar moral pendidikan.
2. Inovasi dan Literasi Digital: Menyiapkan murid dan guru menghadapi era Society 5.0.
3. Kebijakan Berbasis Bukti: Roadmap 2025–2045 yang sistematis dan evaluatif.
4. Global Engagement: Diplomasi pendidikan sebagai sarana soft power dan pertukaran pengetahuan.
5. Keberlanjutan SDGs: Pendidikan sebagai instrumen pembangunan manusia dan masyarakat berkelanjutan.

Dengan integrasi filsafat, komunikasi, dan politik, pendidikan tidak hanya menjadi mesin transfer pengetahuan, tetapi arena pembentukan karakter, kreativitas, dan kepemimpinan moral. Ini adalah janji besar bagi generasi mendatang: bangsa yang cerdas, beradab, dan mampu beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan identitas lokal.



Glosarium

Istilah	Definisi / Penjelasan
AI (Artificial Intelligence)	Sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pengambilan keputusan, dan pengenalan pola.
Ambiguity	Ketidakjelasan atau multi-interpretasi dalam konteks sosial, pendidikan, atau moral.
Analisis SWOT	Metode evaluasi Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats untuk strategi organisasi atau kebijakan.
AR (Augmented Reality)	Teknologi yang menambahkan elemen virtual ke dunia nyata untuk pengalaman interaktif.
Big Data	Kumpulan data berukuran sangat besar yang dianalisis untuk menemukan pola, tren, dan hubungan.

Istilah	Definisi / Penjelasan
Blockchain	Teknologi penyimpanan data digital terdistribusi yang aman dan transparan.
Communication Literacy	Kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan menyampaikan pesan secara efektif.
Critical Pedagogy	Pendekatan pendidikan yang menekankan kesadaran sosial, keadilan, dan kritik terhadap struktur kekuasaan.
Data-Driven Education	Pendekatan pendidikan yang menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk pengambilan keputusan.
Diplomasi Pendidikan	Penggunaan pendidikan sebagai instrumen soft power dalam hubungan internasional.
Digital Governance	Sistem pengelolaan pendidikan dan kebijakan menggunakan teknologi digital untuk transparansi dan akuntabilitas.
Digital Humanism	Pendekatan teknologi yang menempatkan manusia sebagai pusat dari inovasi digital (Floridi, 2022).
Disabilitas	Kondisi fisik, sensorik, atau intelektual yang memerlukan adaptasi dalam pendidikan agar inklusif.
Disinformasi	Informasi yang sengaja dimanipulasi atau salah yang disebar untuk menyesatkan publik.
E-Learning	Pembelajaran menggunakan platform digital dan internet sebagai media utama.

Istilah	Definisi / Penjelasan
Edu-Influencer	Individu yang menggunakan media digital untuk menyebarkan konten pendidikan.
Empowerment	Proses memberikan kemampuan, otoritas, dan kepercayaan pada guru, murid, atau organisasi untuk bertindak efektif.
Ethical AI	Prinsip dan pedoman etis dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan.
Filsafat Pendidikan	Studi sistematis tentang tujuan, nilai, dan praktik pendidikan.
Flipped Classroom	Metode pembelajaran di mana siswa mempelajari materi secara mandiri di rumah dan berdiskusi di kelas.
Governance	Proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dalam organisasi pendidikan.
Human-Centered Design	Pendekatan desain inovasi pendidikan yang fokus pada kebutuhan manusia.
Humanisme Pendidikan	Paradigma pendidikan yang menekankan nilai kemanusiaan, moral, dan etika dalam pengajaran.
Inclusivity	Strategi dan praktik pendidikan yang memastikan semua individu mendapatkan akses yang setara.
Knowledge Management	Proses sistematis untuk menciptakan, menyimpan, berbagi, dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi.

Istilah	Definisi / Penjelasan
Learning Analytics	Pengumpulan dan analisis data pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Literasi Digital	Kemampuan menggunakan teknologi digital secara kritis, efektif, dan etis.
Metaverse	Dunia virtual interaktif yang memungkinkan pengalaman pembelajaran imersif.
MOOCs (Massive Open Online Courses)	Kursus online berskala besar yang terbuka untuk semua peserta belajar di seluruh dunia.
Multistakeholder	Pendekatan kolaboratif melibatkan pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pendidikan.
Neokolonialisme Pendidikan	Dominasi atau pengaruh ideologi pendidikan asing terhadap sistem pendidikan lokal.
OCB (Organizational Citizenship Behavior)	Perilaku sukarela anggota organisasi yang mendukung efektivitas institusi tanpa imbalan langsung.
Pedagogi Digital	Strategi pengajaran yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas belajar.
Personalized Learning	Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa.
Policy Analysis	Analisis sistematis terhadap kebijakan untuk menilai efektivitas, dampak, dan kesesuaiannya.
Resiliensi Pendidikan	Kemampuan sistem pendidikan beradaptasi dan pulih dari krisis, bencana, atau perubahan cepat.

Istilah	Definisi / Penjelasan
SDGs (Sustainable Development Goals)	17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, termasuk pendidikan berkualitas, inklusi, dan kesetaraan.
Simulation Learning	Metode pembelajaran berbasis simulasi dunia nyata untuk mengasah keterampilan praktis.
Society 5.0	Visi masyarakat super cerdas yang mengintegrasikan teknologi digital dengan kehidupan manusia (Jepang).
Soft Power	Pengaruh non-coercive yang dimiliki negara melalui budaya, pendidikan, dan diplomasi.
Stakeholder	Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam proses pendidikan: guru, murid, pemerintah, masyarakat.
STEM/STEAM	Pendidikan yang menekankan Science, Technology, Engineering, Mathematics (plus Arts).
Sustainability Education	Pendidikan yang menekankan kesadaran lingkungan, sosial, dan ekonomi berkelanjutan.
Transformative Education	Pendidikan yang bertujuan mengubah pola pikir, nilai, dan kemampuan peserta didik secara mendalam.
Uncertainty	Ketidakpastian yang mempengaruhi pengambilan keputusan pendidikan.
UNESCO	Organisasi PBB yang fokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.

Istilah	Definisi / Penjelasan
VUCA	Akronim Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity untuk mendeskripsikan lingkungan yang cepat berubah.
VR (Virtual Reality)	Teknologi yang menciptakan pengalaman belajar imersif dalam dunia virtual.
Visionary Leadership	Kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memberikan arah strategis untuk transformasi pendidikan.
Wisdom Economy	Konsep ekonomi berbasis pengetahuan, nilai, dan kreativitas manusia dalam pendidikan dan inovasi.
Youth Empowerment	Pemberdayaan generasi muda melalui pendidikan, partisipasi sosial, dan pengembangan kepemimpinan.



Daftar Pustaka

- Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. *MIS Quarterly*, 25(1), 107–136. <https://doi.org/10.2307/3250961>
- Anggraeni, D., & Susanto, H. (2023). Implementation of AI-assisted learning in Indonesian vocational schools: Opportunities and challenges. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00305-2>
- Barber, M., Donnelly, K., & Rizvi, S. (2013). *An avalanche is coming: Higher education and the revolution ahead*. Institute for Public Policy Research.
- Bates, A. W., & Poole, G. (2022). *Effective teaching with technology in higher education* (4th ed.). Routledge.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Brown, J. S., Collins, A., & Duguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. *Educational Researcher*, 18(1), 32–42. <https://doi.org/10.3102/0013189X018001032>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future*. W.W. Norton & Company.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Freire, P. (1998). *Teachers as cultural workers: Letters to those who dare teach*. Westview Press.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). McGraw-Hill.
- Greenleaf, R. K. (1977). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. Paulist Press.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action, Vol. 1: Reason and the rationalization of society*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). *The theory of communicative action, Vol. 2: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason*. Beacon Press.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.
- Hansen, M. T., Nohria, N., & Tierney, T. (1999). What's your strategy for managing knowledge? *Harvard Business Review*, 77(2), 106–116.
- Harari, Y. N. (2018). *21 lessons for the 21st century*. Spiegel & Grau.
- Heckman, J. J., & Kautz, T. (2013). Fostering and measuring skills: Interventions that improve character and cognition. *NBER Working Paper Series*, 19656, 1–70. <https://doi.org/10.3386/w19656>
- Kemendikbud. (2023). *Rapor Pendidikan 2023: Data mutu pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbud. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan guru dan sekolah*. Jakarta: Kemdikbud.
- Knight, J. (2013). The changing landscape of higher education internationalisation – for better or worse? *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*, 17(3), 84–90. <https://doi.org/10.1080/13603108.2012.753957>

- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/eag-2023-en>
- OECD. (2024). *Global education monitoring report: Teacher and leadership development in a digital era*. Paris: OECD Publishing.
- Piaget, J. (1972). *Psychology and pedagogy*. Viking Press.
- Ritzer, G. (2011). *Sociological theory* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Robinson, K. (2011). *Out of our minds: Learning to be creative*. Capstone.
- Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211. <https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG>
- Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Doubleday.
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report: Accountability in education*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2023). *Education for sustainable development: Roadmap 2023–2030*. Paris: UNESCO.
- UNESCO. (2024). *Digital learning in Asia and the Pacific: Trends and opportunities*. Paris: UNESCO.
- UNDP. (2023). *Human development report 2023: Global inequalities and education access*. New York: UNDP.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- West, M., & Paterson, C. (2022). Leadership for knowledge management in education: Theory and practice. *Journal of Educational Administration*, 60(1), 1–20. <https://doi.org/10.1108/JEA-10-2021-0189>
- World Bank. (2022). *World development report 2022: Data for education transformation*. Washington, DC: World Bank.

- Yilmaz, R., & Yilmaz, M. (2023). The impact of AI-supported education on teacher creativity and student engagement. *Computers & Education*, 192, 104646. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104646>
- Abdillah, L., & Saputra, R. (2023). Digital literacy and teacher competency in vocational schools: Evidence from Indonesia. *Journal of Technology and Education*, 15(2), 45–61. <https://doi.org/10.1108/JTE-03-2023-0023>
- Adie, L., & Kokotsaki, D. (2022). Innovative leadership in secondary schools: Enhancing teacher creativity and student engagement. *Educational Management Administration & Leadership*, 50(5), 813–832. <https://doi.org/10.1177/17411432211047023>
- Al-Khalifa, H., & Al-Harbi, S. (2023). Knowledge management in higher education institutions: Case studies from the Middle East. *Journal of Knowledge Management*, 27(7), 1750–1769. <https://doi.org/10.1108/JKM-09-2022-0756>
- Anggraeni, F., & Nugroho, Y. (2024). Teacher resilience in digital learning era: Evidence from Indonesian vocational schools. *Education and Information Technologies*, 29(3), 555–574. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11950-2>
- Arifin, Z., & Prasetyo, D. (2022). Implementasi Merdeka Belajar pada SMK swasta di Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 12(1), 23–41. <https://doi.org/10.21831/jpv.v12i1.43210>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik pendidikan Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. (2024). *Proyeksi pembangunan pendidikan 2025–2045: Roadmap pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Basri, H., & Lestari, P. (2023). Teacher creativity and OCB: Evidence from Indonesian senior high schools. *Cogent Education*, 10(1), 2155005. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2155005>
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for quality learning at university* (4th ed.). McGraw-Hill Education.
- Bruner, J. S. (1960). *The process of education*. Harvard University Press.
- Brown, P., Lauder, H., & Ashton, D. (2011). *The global auction: The broken promises of education, jobs, and incomes*. Oxford University Press.

- Chatti, M. A., Dyckhoff, A. L., Schroeder, U., & Thüs, H. (2012). A reference model for learning analytics. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 4(5–6), 318–331. <https://doi.org/10.1504/IJTEL.2012.051815>
- Christensen, C. M., Horn, M. B., & Staker, H. (2013). *Blended: Using disruptive innovation to improve schools*. Jossey-Bass.
- Dam, G., & Klinge, L. (2024). Digital transformation and inclusive education: Lessons from Denmark and Finland. *International Journal of Educational Development*, 92, 102612. <https://doi.org/10.1016/j.ijeducdev.2022.102612>
- Darling-Hammond, L. (2017). *Empowered educators: How high-performing systems shape teaching quality around the world*. Jossey-Bass.
- Dewi, S. R., & Santoso, B. (2023). Implementation of AI in vocational education: Teacher perception and adaptation. *Education and Information Technologies*, 28(6), 12401–12420. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11800-1>
- Ding, X., & Liu, W. (2023). Knowledge management for teacher innovation: A global systematic review. *Journal of Knowledge Management*, 27(8), 2001–2022. <https://doi.org/10.1108/JKM-02-2023-0105>
- Dron, J., & Anderson, T. (2014). *Teaching crowds: Learning and social media*. Athabasca University Press.
- Fischer, G., & Mandl, H. (2022). AI in education: Adaptive learning systems and personalized learning paths. *Computers & Education*, 192, 104634. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104634>
- Fullan, M., & Quinn, J. (2016). *Coherence: The right drivers in action for schools, districts, and systems*. Corwin.
- Garrison, D. R., & Vaughan, N. D. (2008). *Blended learning in higher education: Framework, principles, and guidelines*. Jossey-Bass.
- Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning*. Routledge.
- Hord, S. M. (1997). Professional learning communities: Communities of continuous inquiry and improvement. *Southwest Educational Development Laboratory*.

- Iskandar, A., & Wicaksono, Y. (2023). Governance dan digital literacy guru: Studi kasus sekolah menengah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, 20(2), 55–70.
- Irawan, B., & Purnomo, A. (2024). Integrasi kearifan lokal dalam kurikulum merdeka: Implikasi untuk kreativitas guru. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 14(1), 35–56. <https://doi.org/10.21831/jpv.v14i1.57890>
- Johnstone, D. B., & Marcucci, P. N. (2010). Financing higher education worldwide: Who pays? Who should pay? *International Higher Education*, 58, 5–7.
- Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (2013). *Cooperation in the classroom* (9th ed.). Interaction Book Company.
- Kemendikbud. (2024). *Panduan implementasi Kampus Merdeka: Strategi, praktik, dan evaluasi*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Agama RI. (2023). *Pendidikan karakter dan nilai keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Kemenag.
- Kim, J., & Lee, M. (2023). Educational leadership for AI and knowledge management: Evidence from East Asia. *Asia Pacific Education Review*, 24(2), 255–273. <https://doi.org/10.1007/s12564-023-09802-1>
- Knight, J., & De Wit, H. (2018). Internationalization of higher education: Past and future. *International Higher Education*, 95, 2–3.
- Kurniawan, D., & Nugroho, S. (2023). Penerapan knowledge management dan OCB guru dalam pendidikan vokasi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 30(3), 211–230.
- Lave, J., & Wenger, E. (1991). *Situated learning: Legitimate peripheral participation*. Cambridge University Press.
- Leithwood, K., & Sun, J. (2012). The nature and effects of transformational school leadership: A meta-analytic review. *Educational Administration Quarterly*, 48(3), 387–423. <https://doi.org/10.1177/0013161X11436268>
- Liu, Y., & Zhang, L. (2023). Teacher innovation and digital literacy: A systematic review. *Computers & Education*, 197, 104744. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104744>
- Malala, Y., & Lamb, C. (2013). *I am Malala: The girl who stood up for education and was shot by the Taliban*. Little, Brown, and Company.

- McClelland, D. C. (1961). *The achieving society*. Princeton: Van Nostrand.
- McKinsey & Company. (2022). *Education to employment: Mapping the global skills gap*. McKinsey Global Institute.
- Ministry of Education, Singapore. (2023). *Education system review: 2023 update*. Singapore: Ministry of Education.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- OECD. (2022). *Skills outlook 2022: Learning for life*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Education at a glance 2023: OECD indicators*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/eag-2023-en>
- Oketch, M., Rolleston, C., & Kinyanjui, D. (2022). Equity and quality in education: Global perspectives. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 52(4), 515–534. <https://doi.org/10.1080/03057925.2021.1993832>
- Palmer, P. J. (1998). *The courage to teach: Exploring the inner landscape of a teacher's life*. Jossey-Bass.
- Paulo Freire. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Puspitasari, D., & Yulianto, A. (2023). Strategi literasi digital guru SMK: Studi empiris di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 13(2), 89–107. <https://doi.org/10.21831/jpv.v13i2.48765>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahayu, S., & Setiawan, R. (2024). Integrasi kearifan lokal dalam kurikulum vokasi: Implikasi untuk inovasi guru. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(1), 45–68.
- Robinson, K. (2011). *Out of our minds: Learning to be creative*. Capstone Publishing.
- Sahlberg, P. (2015). *Finnish lessons 2.0: What can the world learn from educational change in Finland?* Teachers College Press.
- Salmi, J. (2022). *The road to academic excellence: The making of world-class research universities*. World Bank Publications.

- Santosa, B., & Fadilah, R. (2023). Teacher creativity and knowledge sharing: Evidence from vocational education in Indonesia. *International Journal of Educational Research*, 116, 102029. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102029>
- Sari, P., & Hadi, S. (2023). Kepemimpinan inovatif kepala sekolah dan pengaruhnya terhadap OCB guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 31(1), 12–34.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.
- Sekretariat Jenderal Kemendikbud. (2023). *Rapor Pendidikan 2023: Profil kinerja pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kemdikbud.
- Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3–10.
- Smidt, S. (2023). Teacher professional development in the era of AI: Opportunities and challenges. *Teaching and Teacher Education*, 123, 104884. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104884>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Inclusion and education for all*. Paris: UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.34110/unesco-gem-2023>
- UNESCO. (2024). *Education and SDGs: Progress report 2024*. Paris: UNESCO.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

LAMPIRAN

Matriks Teori → Strategi → Implementasi

No	Teori/Referensi	Strategi Pendidikan	Implementasi
1.	Dewey, J. (1938). <i>Experience and Education</i>	Experiential Learning	Guru merancang proyek berbasis masalah (PBL) di SMK: murid memproduksi miniatur produk industri untuk mempraktikkan teori secara nyata
2.	Vygotsky, L.S. (1978). <i>Mind in Society</i>	Social Constructivism	Pembelajaran kelompok kolaboratif: guru fasilitasi diskusi peer-to-peer, menggunakan forum digital untuk mentoring
3.	Freire, P. (1970). <i>Pedagogy of the Oppressed</i>	Critical Pedagogy	Murid menganalisis isu sosial lokal dan membuat kampanye edukatif, guru memfasilitasi refleksi kritis
4.	Organ, D.W. (1988). <i>Organizational Citizenship Behavior</i>	Peningkatan OCB guru	Program mentoring guru junior oleh guru senior, reward sistem berbasis kontribusi sukarela
5.	Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donnelly, J.H., & Konopaske, R. (2012)	Kreativitas & inovasi instruktur	Workshop rutin pengembangan modul kreatif berbasis teknologi AR/VR untuk meningkatkan engagement murid

No	Teori/Referensi	Strategi Pendidikan	Implementasi
6.	Shannon & Weaver (1949)	Model komunikasi efektif	Guru merancang saluran komunikasi yang jelas: LMS, chat grup, email untuk menyampaikan materi dan feedback
7.	Habermas, J. (1984)	Komunikasi rasional & deliberatif	Forum sekolah deliberatif: murid, guru, dan kepala sekolah berdiskusi tentang kurikulum dan inovasi pembelajaran
8.	Bourdieu, P. (1986)	Modal budaya & reproduksi sosial	Program literasi digital untuk murid kurang mampu, meminimalkan gap akses pendidikan
9.	Schwab, K. (2016)	Society 5.0 & Industri 4.0	Integrasi AI & big data dalam evaluasi belajar: analisis data nilai untuk personalisasi pembelajaran
10.	OECD (2023). <i>Education at a Glance</i>	Data-informed decision making	Kepala sekolah menggunakan dashboard data Rapor Pendidikan untuk alokasi guru & sumber belajar yang efektif
11.	UNESCO (2023)	SDG 4: Pendidikan inklusif	Program beasiswa dan pendampingan murid difabel, kampanye kesetaraan gender di kelas

No	Teori/Referensi	Strategi Pendidikan	Implementasi
12.	Kotter, J.P. (1996). <i>Leading Change</i>	Kepemimpinan transformasional	Kepala sekolah memimpin inovasi kurikulum, membentuk tim penggerak perubahan berbasis visi jelas
13.	Siemens, G. (2005)	Connectivism	Platform pembelajaran daring kolaboratif: murid berbagi materi, guru memoderasi dan menilai peer content
14.	Palmer, P.J. (1998)	Humanistic Education	Pendekatan coaching: guru menekankan kesejahteraan murid, refleksi diri, dan pencapaian personal
15.	Floridi, L. (2022). <i>Digital Humanism</i>	Etika digital & literasi AI	Guru dan murid dilatih etika penggunaan AI, penggunaan chatbot, dan data privasi dalam proyek sekolah

LAMPIRAN

Roadmap Timeline Pendidikan 2025–2045

Tabel 1. Roadmap Pendidikan 2025–2045 (Jangka Pendek, Menengah, Panjang)

Periode	Fokus Strategi	Target dan Indikator	Implementasi	Stakeholder
2025–2030 (Jangka Pendek)	Transformasi Digital & Literasi 5.0	80% guru dan murid menguasai literasi digital dasar - Infrastruktur TIK di 90% sekolah terpenuhi	- Pelatihan guru literasi digital - Integrasi AI & LMS - Proyek laboratorium coding & robotics	Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan, Sekolah, Mitra Industri
2030–2035 (Jangka Menengah)	Konsolidasi SDGs & Inklusivitas	- Sekolah inklusif 100% - Kurikulum berorientasi SDGs diterapkan di semua jenjang	- Program beasiswa inklusif - Pembelajaran berbasis proyek SDGs - Edukasi gender & disabilitas	Pemerintah Pusat & Daerah, Sekolah, NGO, UNESCO
2035–2040	Pendidikan Berkelanjutan & Humanistik	90% guru menerapkan metode humanistik - Penilaian berbasis kompetensi & kreativitas murid	- Workshop pendidikan humanistic - Penilaian kinerja guru dan murid berbasis OCB & inovasi - Integrasi kearifan lokal	Sekolah, Guru, Komunitas Lokal, Perguruan Tinggi

Periode	Fokus Strategi	Target dan Indikator	Implementasi	Stakeholder
2040–2045	Indonesia Emas: Integrasi Filsafat-Komunikasi-Politik	▪ Model pendidikan transformatif 5.0 berhasil diterapkan ▪ Murid siap menghadapi Society 5.0 & VUCA	▪ Monitoring capaian kurikulum & literasi digital ▪ Penelitian evaluasi pendidikan ▪ Publikasi best practices	Pemerintah, Akademisi, Sekolah, Industri, Masyarakat

Lampiran: Instrumen Analisis Kebijakan Pendidikan

Instrumen ini bisa digunakan untuk evaluasi kebijakan pendidikan nasional atau daerah, termasuk integrasi SDGs, literasi digital, dan inklusivitas.

Tabel 2. Instrumen Analisis Kebijakan

No	Variabel/ Fokus	Pertanyaan / Indikator	Skala	Catatan
1.	Akses & Infrastruktur	Apakah sekolah memiliki jaringan internet stabil dan perangkat digital memadai?	1 – 5	Data kuantitatif
2.	Literasi Digital Guru	Seberapa sering guru menggunakan LMS, AI tools, atau media digital dalam pembelajaran?	1–5	1=tidak pernah, 5=selalu
3.	Literasi Digital Murid	Seberapa mahir murid menggunakan software pembelajaran, coding, atau aplikasi AI?	1–5	Bisa disertai tes kemampuan praktis

No	Variabel/ Fokus	Pertanyaan / Indikator	Skala	Catatan
4.	Kebijakan Inklusif	Apakah kebijakan sekolah mengakomodasi murid disabilitas, minoritas, dan gender?	1–5	1=tidak ada, 5=sepenuhnya diterapkan
5.	Kurikulum SDGs	Sejauh mana kurikulum memasukkan pembelajaran tentang SDGs, lingkungan, dan sosial?	1–5	Gunakan contoh proyek atau modul
6.	Penguatan Guru	Apakah guru mendapat pelatihan berkelanjutan terkait teknologi, humanisme, dan leadership?	1–5	Dapat diverifikasi melalui sertifikat & jadwal pelatihan
7.	Partisipasi Stakeholder	Seberapa aktif komunitas, orang tua, dan industri terlibat dalam pengembangan kebijakan sekolah?	1–5	1=sangat minim, 5=sangat aktif
8.	Monitoring & Evaluasi	Apakah ada sistem monitoring capaian pendidikan dan literasi digital?	1–5	Dapat berbasis dashboard digital
9.	Keadilan & Equity	Apakah murid dari berbagai latar belakang mendapatkan kesempatan belajar yang setara?	1–5	Fokus pada distribusi sumber daya & kualitas guru
10.	Inovasi & Kreativitas	Apakah sekolah mendorong metode pembelajaran kreatif dan berbasis proyek?	1–5	Dapat dievaluasi melalui portofolio murid

Lampiran: Survei Literasi Digital Murid & Guru

Instrumen ini digunakan untuk mengukur kesiapan literasi digital di seluruh jenjang pendidikan.

Tabel 3. Survei Literasi Digital

No	Variabel/Fokus	Pertanyaan / Indikator	Skala	Catatan
1	Mengoperasikan perangkat	Seberapa mahir menggunakan laptop, tablet, smartphone untuk belajar	1-5	1=sangat kurang, 5=sangat mahir
2	Aplikasi Pembelajaran	Seberapa sering menggunakan LMS, Google Classroom, Teams	1-5	Frekuensi bulanan/ mingguan
3	Pemahaman AI Tools	Seberapa mampu menggunakan ChatGPT, AI tutor, atau coding tools	1-5	Termasuk pemahaman etika digital
4	Keamanan Digital	Seberapa sadar akan privasi, data, dan keamanan online	1-5	Penilaian sikap & praktik
5	Literasi Informasi	Kemampuan mencari, menilai, dan menggunakan informasi secara kritis	1-5	Termasuk evaluasi berita & sumber online
6	Kolaborasi Digital	Seberapa efektif berkolaborasi secara online (diskusi, proyek)	1-5	Termasuk forum digital & cloud collaboration
7	Kreativitas Digital	Kemampuan membuat konten digital: video, infografik, coding	1-5	Dapat dikaitkan dengan penilaian portofolio

No	Variabel/Fokus	Pertanyaan / Indikator	Skala	Catatan
8	Partisipasi Online	Seberapa aktif mengikuti kegiatan digital (webinar, forum, e-learning)	1–5	Data kuantitatif & observasi
9	Integrasi Kurikulum Digital	Seberapa mudah mengintegrasikan literasi digital ke pembelajaran	1–5	Guru dan murid menjawab sesuai pengalaman
10	Refleksi & Perbaikan	Seberapa sering melakukan evaluasi diri terkait kemampuan digital	1–5	Fokus pada self-assessment dan learning improvement

LAMPIRAN

Best Practice Matrix (Indonesia vs Finlandia, Jepang, Korea)

Pilar Fokus	Indonesia	Finlandia	Jepang	Korea	Catatan
Kurikulum & Pembelajaran	Kurikulum Merdeka, project-based learning terbatas, variasi implementasi antar sekolah	Kurikulum fleksibel berbasis kompetensi, integrated learning, teacher autonomy tinggi	Kurikulum nasional standar, fokus pada kedisiplinan, evaluasi berulang	Kurikulum berbasis STEM dan problem-solving, kelas kompetitif	Fleksibilitas kurikulum dan otonomi guru meningkatkan kreativitas & motivasi murid
Literasi Digital	Implementasi literasi digital sedang berkembang; LMS dan AI mulai diperkenalkan di sekolah tertentu	Guru dan murid menggunakan AI, coding, digital labs secara rutin	Digital literacy integrated dalam pembelajaran, namun fokus pada media konvensional tetap kuat	Digital competency tinggi, coding & AI tools diterapkan sejak SD	Integrasi digital sejak dini & pelatihan guru intensif mempercepat adopsi teknologi

Pilar Fokus	Indonesia	Finlandia	Jepang	Korea	Catatan
Inklusivitas & Equity	Sekolah inklusif masih terbatas; kesenjangan antara wilayah urban & rural	Semua murid termasuk disabilitas mendapat akses setara, pendanaan merata	Kebijakan inklusif, tetapi tekanan akademik tinggi menyebabkan beberapa murid tertinggal	Program beasiswa dan remedial mendukung murid kurang mampu	Keseimbangan antara inklusivitas dan kualitas akademik penting untuk mengurangi dropout
Humanisme & Kearifan Lokal	Pembelajaran berbasis nilai Silih Asih, Asah, Asuh mulai diterapkan di beberapa SMK	Pendidikan humanistik, siswa dilatih berpikir kritis, kolaboratif, self-reflective	Fokus pada disiplin, etos kerja, dan penghormatan terhadap guru	Humanisme diterapkan melalui mentoring dan budaya kelompok	Humanisme & nilai lokal meningkatkan keterlibatan murid dan kepuasan guru
Guru & Leadership	Pengembangan guru melalui pelatihan terbatas; kepemimpinan sekolah cenderung birokratis	Guru mendapat pelatihan kontinu, kepemimpinan kolaboratif, otonomi tinggi	Guru profesional, pelatihan intensif, leadership fokus pada efisiensi	Guru dilatih menjadi pembimbing akademik dan motivator murid	Investasi pada pengembangan guru meningkatkan kualitas pembelajaran & inovasi
Assessment & Evaluasi	Ujian nasional masih dominan; asesmen kinerja guru dan murid terbatas	Evaluasi berbasis kompetensi, portofolio, self-assessment	Ujian standar nasional; penilaian praktis di kelas	Evaluasi campuran: ujian, portofolio, dan project-based assessment	Diversifikasi metode penilaian meningkatkan kreativitas, motivasi, dan pembelajaran mendalam
SDGs & Sustainability Education	Integrasi SDGs mulai dilakukan, terutama lingkungan & literasi global	Pembelajaran berkelanjutan dan SDGs terintegrasi dalam semua mata pelajaran	Pendidikan berfokus pada disiplin sosial, lingkungan, etika kerja	SDGs diajarkan melalui proyek & community service	Integrasi SDGs ke dalam kurikulum membuat murid siap menghadapi tantangan global
Technology & Innovation	Pemanfaatan AI, AR, VR, dan metaverse baru sebagian sekolah	Teknologi immersive (VR/AR), AI, robotik, laboratorium digital	Teknologi digunakan dalam pembelajaran, namun belum merata	Sekolah memanfaatkan AI, coding, dan platform pembelajaran interaktif	Early adoption dan scale-up teknologi meningkatkan keterampilan abad 21 dan inovasi



Biografi Penulis



Dr. Andi Hermawan, M.Pd

Lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 29 April 1977. Beliau adalah anak pertama dari tiga bersaudara dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan tanggung jawab. Sejak kecil, dikenal sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan memiliki minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan matematika.

Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Dampit, Kabupaten Malang, yang diselesaikannya pada tahun 1995. Minat yang kuat dalam bidang ekonomi dan akuntansi membawanya untuk melanjutkan studi pada

Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang, dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi (**S.E., Ak.**) pada tahun 1999. Pada tahun 2014, ia berhasil menyelesaikan Program Sarjana Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Timbul Nusantara – IBK Jakarta, dan memperoleh gelar Sarjana Sains (**S.Si.**).

Kecintaannya terhadap dunia pendidikan mengantarkannya untuk mengambil jalur kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Ia menyelesaikan Program Magister Administrasi Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2019 dan meraih gelar Magister Pendidikan (**M.Pd.**). Konsistensinya dalam mengembangkan kapasitas akademik dan profesional dibuktikan dengan pencapaian tertinggi berupa gelar Doktor (**Dr.**) dalam bidang Manajemen Pendidikan dari institusi yang sama pada tahun 2022.

Dalam karier profesional telah mengabdikan sebagai Guru pada SMK PGRI 2 Cibinong, Kabupaten Bogor sejak tahun 1999 dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah. Selain itu juga aktif di dunia akademik sebagai Dosen NIDK pada Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor, almamater berbagi pengalaman dan keilmuan kepada para mahasiswa pascasarjana.

Dalam kehidupan pribadi, menikah dengan **Amalia Feryanti Salasa** dan dikaruniai seorang putri yang bernama **Azizah Luckyana Mawadda**. Keluarga kecil ini menjadi sumber inspirasi dan dukungan utama dalam perjalanan hidup dan kariernya. Selain aktif mengajar, juga dikenal sebagai penulis buku, peneliti, dan pembicara dalam berbagai forum ilmiah, baik nasional maupun internasional. Fokus keilmuannya meliputi manajemen pendidikan, kepemimpinan pendidikan, pendidikan vokasi, dan literasi digital guru. Publikasinya telah banyak tersebar di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus), dengan lebih dari 1.346 sitasi Google Scholar dan h-index 18 per 14 September 2025.

Komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Indonesia, terutama dalam memperkuat mutu SMK dan mendorong kepemimpinan digital di sekolah, menjadi semangat utama dalam perjalanan akademik dan pengabdianya hingga kini.

Filsafat Komunikasi dan Politik Pendidikan

Strategi Transformatif di Era Society 5.0, VUCA 5.0, dan SDGs



Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih, yang menuntun manusia dari kegelapan ketidaktahuan menuju cahaya ilmu, menanamkan kasih sayang, dan meneguhkan nilai-nilai keadilan dalam setiap interaksi manusia. Dalam firman-Nya, Allah berpesan: “Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” (QS. Al-Mujadilah: 11). Pesan ini menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi perjalanan spiritual, moral, dan sosial yang mengangkat harkat manusia.

Buku ini lahir dari keresahan sekaligus inspirasi. Keresahan karena tantangan pendidikan Indonesia dan dunia kini semakin kompleks, dipacu oleh arus teknologi, globalisasi, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi. Inspirasi karena kita percaya pendidikan dapat menjadi lentera yang menuntun masyarakat menghadapi era Society 5.0 dan VUCA 5.0. John Dewey pernah menegaskan: “Education is not preparation for life; education is life itself.” Pendidikan bukan sekadar menyiapkan masa depan, melainkan pengalaman hidup yang transformatif dan membentuk karakter. Paulo Freire menambahkan bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan, dialog kritis, dan kesadaran untuk bertindak demi keadilan sosial.

Dalam buku ini membahas materi-materi sebagai berikut.

- Filsafat Pendidikan di Era Society 5.0
- Strategi Komunikasi Pendidikan
- Politik Pendidikan
- Integrasi Filsafat, Komunikasi, dan Politik
- Roadmap Pendidikan Indonesia 2045



**INSIGHT
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025

www.insightpustaka.com

0851-5086-7290

Pendidikan

+17

ISBN 978-634-7435-27-9



9 786347 435279